RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2026

AYO BANGUN NTT

Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA)
Provinsi Nusa Tenggara Timur

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 29 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat Bapperida adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah provinsi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2026 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2026, yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

Pasal 2...

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan RKPD Tahun 2026.

(2) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari 8 (delapan) BAB dengan rincian sebagai berikut:

a. BAB I pendahuluan;
b. BAB II gambaran umum kondisi Daerah;
c. BAB III kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
d. BAB IV sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
e. BAB V arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota;
f. BAB VI rencana kerja dan pendanaan Daerah;
g. BAB VII kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
h. BAB VIII penutup.

(3) Rincian lebih lanjut dari RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, menjadi pedoman bagi pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2026 dan rancangan APBD tahun anggaran 2026.

Pasal 4

(1) Pimpinan PD harus menyesuaikan rencana kerja Perangkat Daerah masing-masing dengan RKPD Tahun 2026.

(2) Pimpinan Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi untuk menjaga konsistensi RKPD Tahun 2026 dengan rencana kerja Perangkat Daerah.

(3) Hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah untuk dijadikan bahan masukan bagi perencanaan selanjutnya.

Pasal 5...

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 22 Juli 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

E. MELKIADES LAKA LENA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 22 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

ttd.

KOSMAS D. LANA

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 029

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN...

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Tabel ii	
Daftar Gambar	iv
BAB I. Pendahuluan	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum	I-2
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-5
1.4. Maksud dan Tujuan	I-6
1.5. Sistematika Penulisan	I-7
BAB II. Gambaran Umum dan Kondisi Daerah	II-1
2.1. Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-18
2.3. Aspek Daya Saing Daerah	II-31
2.4. Aspek Pelayanan Umum	II-47
2.5. Evaluasi RKPD Triwulan I Tahun 2025	II-54
2.6. Permasalahan Pembangunan Daerah	II-57
BAB III. Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah	III-1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-11
BAB IV. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah	IV-1
4.1. Arahan RPJPN 2025-2045, RPJPD Provinsi NTT Tahun 2025-2045, RPJMN Tahun 2025-2029, RPJMD Tahun 2025-2029 dan RKP Tahun 2026	IV-1
4.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan	IV-74
4.3. Prioritas Pembangunan Daerah	IV-90
4.4. Inovasi Daerah	IV-125
BAB V. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota	V-1
5.1. Target Indikator Makro Kabupaten/Kota se-NTT	V-1
5.2. Pengembangan Rantai Nilai Ekonomi	V-17
BAB VI. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah	VI-1
BAB VII. Kinerja Penyelenggaraa Pemerintah Daerah	VII-1
BAB VIII. Penutup	VIII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Ketinggian Kabupaten/ Kota di Provinsi NTT (Mdpl) Tahun 2022	II-1
Tabel 2.2	Komponen Tutupan Lahan Provinsi NTT	II-7
Tabel 2.3	Hasil Pemodelan Kebutuhan Energi Final Per Sektor Provinsi NTT Tahun 2015-2050	II-10
Tabel 2.4	Hasil Pemodelan Kebutuhan Energi Final Per Jenis untuk seluruh sector Provinsi NTT Tahun 2015-2050 (MTOE) ...	II-5
Tabel 2.5	Gambaran Indikator Kelistrikan di NTT 2011-2021	II-10
Tabel 2.6	Jumlah Bendungan di Provinsi NTT 1981-2023	II-12
Tabel 2.7	Neraca Air pada Wilayah Sungai di Provinsi NTT Tahun 2016	II-12
Tabel 2.8	Jumlah Wilayah Adat pada BRWA dengan status Teregistrasi, Terverivikasi dan Tersertivikasi Berdasarkan Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi NTT Kondisi sampai dengan Tahun 2023.....	II-18
Tabel 2.9	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Harga Berlaku Provinsi NTT menurut Lapangan Usaha, 2020-2024	II-32
Tabel 2.10	Indikator Kinerja Utama Yang Mendukung Tiga Pilar Ekonomi Hijau Provinsi NTT Tahun 2024-2026	II-34
Tabel 2.11	Jumlah Proyek dan Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Luar Negeri Di Provinsi NTT Tahun 2010-2023	II-43
Tabel 2.12	Populasi Ternak Unggulan Provinsi NTT Tahun 2000 sampai dengann 2022	II-46
Tabel 2.13	Luas Tanaman Perkebunan Unggulan Provinsi NTT Tahun 2013-2023 (Ribu Ha)	II-46
Tabel 2.14	Jumlah Produksi Komoditas Utama Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT Tahun 2017-2022	II-47
Tabel 2.15	Interval dan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja.....	II-54
Tabel 2.16	Pagu, Realisasi dan Tingkat Capaian Anggaran Triwulan I Tahun 2025	II-55
Tabel 3.1	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pengeluaran (y-on-y) Tahun Dasar 2024	III-4
Tabel 3.2	Laju Pertumbuhan PDRB menurut Lapangan Usaha (yoy) Tahun 2023 seri 2010	III-3
Tabel 3.4	Jumlah dan presentase Penduduk Miskin menurut Daerah, Maret 2023 dan September 2024	III-4
Tabel 3.5	Karakteristik Pengangguran di Provinsi NTT, Agustus 2021-Agustus 2023	III-7
Tabel 3.6	Realisasi Pendapatan Provinsi NTT Tahun 2025	III-12
Tabel 3.7	Proyeksi Pendapatan Provinsi NTT Tahun 2025-2027	III-13

Tabel 3.8	Realisasi Belanja Daerah tahun 2025-2027	III-14
Tabel 3.9	Proyeksi Belanja Provinsi NTT tahun 2024-2026	III-15
Tabel 3.10	Proyeksi Pembiayaan Daerah.....	III-16
Tabel 4.1	17 Arah (Tujuan) Pembangunan didasarkan pada Kelompok Transformasi Indonesia dan Landasan Transformasi	IV-3
Tabel 4.2	Kerangka Upaya Transformasi Super Prioritas (Game Changers).....	IV-6
Tabel 4.3	Sasaran Visi dan Indikator RPJPD Provinsi NTT Tahun 2025-2029	IV-8
Tabel 4.4	Arah Kebijakan Tranformasi Daerah Periode I Tahun 2025-2029	IV-9
Tabel 4.5	Program Prioritas NNasional dan Program Hasil Terbaik Cepat	IV-32
Tabel 4.6	Penahapan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026-2030	IV-23
Tabel 4.7	Sasaran Visi dan Indikator Visi RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029	IV-35
Tabel 4.8	Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi NTT Tahun 2025-2029	IV-36
Tabel 4.9	Lokus Pembangunan Wilayah di Provinsi NTT Tahun 2025-2029	IV-65
Tabel 4.10	Lokasi Prioritas Pembangunan Provinsi NTT Tahun 2026 ..	IV-72
Tabel 4.11	Tujuan dan Sasaran Pembanngunan Daerah Tahun 2026 ..	IV-51
Tabel 4.12	Sasaran Indikator Makro Provinsi NTT dalam RKPD 2026 ..	IV-95
Tabel 4.13	17 Program Prioritas dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat ...	IV-96
Tabel 4.14	Kegiatan Prioritas Utama	IV-98
Tabel 4.15	Program Strategis Nasional (ProSN)	IV-101
Tabel 4.16	Pemetaan Misi, Pilar Pemangunan dan Dasa Cita	IV-105
Tabel 4.17	Program Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi NTT Tahun 2026	IV-106
Tabel 4.18	Profil Pencapaian Inovasi Daerah Provinsi NTT Tahun 2020-2024	IV-129
Tabel 4.19	Top 10 Inovasi KOIN-YANLIK Provinsi NTT Tahun 2024 ...	IV-134
Tabel 5.1	Target Indikator Pembangunan Makro Kota Kupang Tahun 2026	VI-1
Tabel 5.2	Target Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Kupang Tahun 2026	V-2
Tabel 5.3	Target Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2026	V-3
Tabel 5.4	Target Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2026	V-3

Tabel 5.5	Target Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Belu Tahun 2026	V-4
Tabel 5.6	Target Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Malaka Tahun 2026	V-4
Tabel 5.7	Target Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2026	V-5
Tabel 5.8	Target Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Manggarai Tahun 2026	V-6
Tabel 5.9	Target Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2026	V-6
Tabel 5.10	Target Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Ngada Tahun 2026	V-6
Tabel 5.11	Target Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Nagakeo Tahun 2026	V-8
Tabel 5.12	Target Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Ende Tahun 2026	V-8
Tabel 5.13	Target Indikator Pembangunan Makro Kabbupaten Sikka Tahun 2026	V-9
Tabel 5.14	Target Indikator Pembangunan Makro Kabbupaten Flores Timur Tahun 2026	V-10
Tabel 5.15	Target Indikator Pembangunan Makro Lembata Tahun 2026	V-11
Tabel 5.16	Target Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Alor Tahun 2026	V-11
Tabel 5.17	Target Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Rote Tahun 2026	V-11
Tabel 5.18	Target Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2026	V-13
Tabel 5.19	Target Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Sumba Timur Tahun 2026	V-13
Tabel 5.20	Target Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2026	V-15
Tabel 5.21	Target Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Sumba Barat Tahun 2026	V-16
Tabel 5.22	Target Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2026	V-16
Tabel 6.1	Pagu Anggaran per Prioritas Per Perangkat Daerah Tahun 2026	VI-4
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025	VII-1
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025	VII-3

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Alur Perencanaan RKPD Tahun 2026	I-2
Gambar 1.2	Bagan Alir Keterkaitan RKPD dengan dokumen Perencanaan Lainnya	I-5
Gambar 2.1	Peta Kedalaman Laut di wilayah Provinsi NTT.....	II-2
Gambar 2.2	Laju Perubahan Curah Hujan Tahunan Periode 1981-2022	II-3
Gambar 2.3	Laju Perubahan Hari Hujan Periode 1981-2022	II-4
Gambar 2.4	Proyeksi Perubahan Curah Hujan Musiman Periode 2020-2049 Terhadap 1976-2005 September, Oktober, November Skenario RCP4.5	II-4
Gambar 2.5	Proyeksi Perubahan Hari Kering Periode 2020-2049 Terhadap 1976-2005 September, Oktober, November Skenario RCP4.5	II-5
Gambar 2.6	Proyeksi Perubahan Awal Musim Hujan Periode 2020-2049 Terhadap 1976-2005 September, Oktober, November Skenario RCP4.5	II-5
Gambar 2.7	Proyeksi Perubahan Panjang Musim Hujan Periode 2020-2049 Terhadap 1976-2005 September, Oktober, November Skenario RCP4.5.....	II-6
Gambar 2.8	Laju Perubahan Suhu Rata-Rata Tahunan Periode 1981-2022	II-7
Gambar 2.9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi NTT 2010-2022	II-8
Gambar 2.10	Indeks Resiko Bencana Provinsi NTT 2015-2022	II-9
Gambar 2.11	Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Provinsi NTT 2019-2023 ..	II-10
Gambar 2.12	Emisi dari Sektor Energi, IPPU, Pertanian, Kehutanan dan Limbah Provinsi NTT Tahun 2000-2021	II-12
Gambar 2.13	Gambaran Umum Tantangan Terkait air diseluruh Wilayah Indonesia Tahun 2022	II-13
Gambar 2.14	Kelangkaan air pada musim kemarau di Indonesia dalam kaitannya dengan wilayah sungai menyumbang 60 Persen dari PDB Tahun 2045	II-13
Gambar 2.15	Status Pencemaran Air Permukaan di Seluruh Indonesia Tahun 2021	II-14
Gambar 2.16	Persentase Penduduk Yang Terlayani BUMD Air Minum Provinsi NTT Tahun 2012-2021	II-16
Gambar 2.17	Kinerja BUMD Air Minum Provinsi NTT Tahun 2012-2021	II-17
Gambar 2.18	Proyeksi Laju pertumbuhan penduduk Nusa Tenggara Timur Tahun 2011-2022 (%)	II-17
Gambar 2.19	Komposisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Provinsi NTT Tahun 2024	II-18
Gambar 2.20	Kepadatan Penduduk Provinsi NTT Tahun 2002-2024	II-18

Gambar 2.21	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTT Tahun 2010-2023	II-20
Gambar 2.22	Gini Ratio Provinsi NTT Tahun 2009-2023	II-20
Gambar 2.23	Indeks Williamson Provinsi NTT Tahun 2009-2022	II-21
Gambar 2.24	Nilai Tukar Petani Provinsi NTT Tahun 2008-2022	II-22
Gambar 2.25	Persentase Penduduk Miskin Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2023	II-22
Gambar 2.26	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi NTT Tahun 2005-2023	II-23
Gambar 2.27	Perkembangan IPM Provinsi NTT Tahun 2010-2023	II-23
Gambar 2.28	Mata Pencaharian Penduduk Provinsi NTT Tahun 2023	II-24
Gambar 2.29	Mata Pencaharian Penduduk Provinsi NTT Tahun 2023	II-25
Gambar 2.30	Indeks Kualitas Keluarga Provinsi NTT Tahun 2019-2022	II-25
Gambar 2.31	Komponen Indeks Kualitas Keluarga Provinsi NTT Tahun 2021 dan 2022	II-26
Gambar 2.32	Indeks Perlindungan Anak (IPA), Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Provinsi NTT Tahun 2019-2022	II-27
Gambar 2.33	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2023	II-27
Gambar 2.34	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2023	II-28
Gambar 2.35	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2022	II-29
Gambar 2.36	Perkembangan Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi NTT Tahun 2015-2022	II-30
Gambar 2.37	Komponen Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi NTT Tahun 2022	II-30
Gambar 2.38	Perkembangan Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi NTT Tahun 2018-2022	II-31
Gambar 2.39	Komponen Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi NTT Tahun 2022	II-31
Gambar 2.40	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Menurut Lapangan Usaha di level Provinsi (Ribu Rupiah), 2023	II-33
Gambar 2.41	Perkembangan PDRB Per Kapita Provinsi NTT Tahun 2010-2023	II-34
Gambar 2.42	Indeks Modal Manusia (Human Capital Index) Provinsi NTT Tahun 2015-2018	II-35
Gambar 2.43	Indeks Pendidikan Provinsi NTT Tahun 2010-2018	II-36
Gambar 2.44	Angka Literasi dan Numerasi Provinsi NTT Tahun 2022-2023.....	II-36
Gambar 2.45	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Berdasarkan Kabupaten/ Kota lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur	II-37

	Tahun 2023	
Gambar 2.46	Indeks Literasi Digital Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Indonesia, Tahun 2020-2022	II-38
Gambar 2.47	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Indonesia, 2012-2022	II-38
Gambar 2.48	Rasio Ketergantungan Hasil Proyeksi Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Indonesia, 2010-2035	II-39
Gambar 2.49	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi NTT Tahun 2009-2022	II-40
Gambar 2.50	Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) Provinsi NTT Tahun 2021-2023	II-40
Gambar 2.51	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Provinsi NTT Tahun 2019-2023	II-41
Gambar 2.52	Komponen IDSD Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2023	II-42
Gambar 2.53	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IPTIK) Provinsi NTT Tahun 2012-2022	II-42
Gambar 2.54	Komponen Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi Provinsi NTT Tahun 2012-2022	II-43
Gambar 2.55	Jumlah Tamu Hotel Wisatawan Mancanegara dan Domestik Provinsi NTT Tahun 2010-2023	II-45
Gambar 2.56	Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel di Provinsi NTT Tahun 2010-2023 (%)	II-45
Gambar 2.57	Rata-Rata Lama Menginap Tamu Pada Hotel Bintang Di Provinsi NTT Tahun 2004-2022 (hari)	II-46
Gambar 2.58	Indeks Inovasi Daerah Provinsi NTT Tahun 2021-2022	II-48
Gambar 2.59	Indeks SPBE Provinsi NTT Tahun 2020-2023	II-49
Gambar 2.60	Indeks SAKIP Provinsi NTT Tahun 2018-2023.....	II-49
Gambar 2.61	Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi NTT Tahun 2019-2023	II-50
Gambar 2.62	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Berdasarkan Kabupaten/ Kota di Provinsi NTT Tahun 2023 (%)	II-50
Gambar 2.63	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Berdasarkan Kabupaten/ Kota di Provinsi NTT Tahun 2023 (%)	II-51
Gambar 2.64	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan Berdasarkan Kabupaten/ Kota di Provinsi NTT Tahun 2023 (%)	II-52
Gambar 2.65	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Berdasarkan Kabupaten/ Kota di Provinsi NTT Tahun 2023 (%)	II-52
Gambar 2.66	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Berdasarkan Kabupaten/ Kota di Provinsi NTT Tahun 2023 (%)	II-53
Gambar 2.67	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan	II-54

	Masyarakat Berdasarkan Kabupaten/ Kota di Provinsi NTT Tahun 2023 (%)	
Gambar 2.68	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial Berdasarkan Kabupaten/ Kota di Provinsi NTT Tahun 2023 (%)	II-55
Gambar 3.1	Pertumbuhan Ekonomi NTT dan Nasional secara Triwulan Tahun 2024.....	III-2
Gambar 3.2	Tingkat Inflasi Year On-year (y-on-y) Provinsi Nusa Tenggara Timur April 2024-2025.....	III-4
Gambar 3.3	Andil Inflasi Year-on-Year (y-on-y) Provinsi Nusa Tenggara Timur menurut kelompok pengeluaran.....	III-4
Gambar 3.4	Inflasi Terendah di Provinsi NTT.....	III-7
Gambar 3.5	Gini Rasio Provinsi NTT, Maret 2017 – Maret 2024	III-11
Gambar 4.1	Sasaran Makro Pembangunan Tahun 2025-2029	IV-21
Gambar 4.2	Skenario Pertumbuhan Ekonomi pada Tahun 2025-2029 ..	IV-20
Gambar 4.3	Tema Pembangunan Wilayah Bali-Nusra	IV-19
Gambar 4.4	Arah Pembangunan Provinsi NTT 2025-2029	IV-20
Gambar 4.5	Persandingan Visi, Misi, dan Program Prioritas.....	IV-33
Gambar 4.6	Pemetaan Misi, Pilar Pembangunan dan Dasa Cita	IV-50
Gambar 5.1	Perkembangan Kemiskinan di NTT Maret 2011- September 2020	V-7

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang diawali dengan penyusunan Rancangan Awal RKPD. Penyusunan Rancangan Awal RKPD berpedoman pada Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029, rancangan awal RKP (Rencana Kerja Pemerintah), program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD Tahun 2026.

RKPD Tahun 2026 ini merupakan tahun Pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029, dengan arah kebijakan **Ekonomi yang kokoh, Infrastruktur yang handal dan SDM yang berkualitas.**

Penyusunan RKPD Tahun 2026 dilakukan masih menggunakan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up*, dan *top down* serta berorientasi Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Pendekatan (1) politik digunakan dalam menyusun RKPD dengan memperhatikan berbagai masukan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai hasil penjaringan aspirasi masyarakat, yang berasal dari hasil kunjungan kerja, dan reses; (2) teknokratik menggunakan metode dan logika berpikir ilmiah; (3) partisipatif, pendekatan yang melibatkan seluruh unsur yaitu pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat; (4) *bottom up* dilakukan dengan mengacu pada proses Musrenbang yang telah berlangsung mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten/kota, dan provinsi; (5) *top down* dilakukan dengan mengacu pada RKP Tahun 2026 dan RPJMN 2025-2029. Pendekatan yang berorientasi pada THIS diimplementasikan melalui pengendalian perencanaan, penguatan perencanaan berbasis kewilayahan dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing wilayah serta penguatan integrasi seluruh pihak dan sumber pendanaan pembangunan. Implementasi *money follow priority* program dan program *follow result* menjadi landasan kerangka pendanaan pembangunan.

RKPD Provinsi NTT Tahun 2026 selain berpedoman pada RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029 juga berpedoman pada RKP 2026 sekaligus menjadi pedoman bagi penyusunan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2026, khususnya dalam memberikan arahan pembangunan bagi kabupaten/kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal ini dimaksudkan agar sinkronisasi perencanaan antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota dapat diwujudkan. Alur Perencanaan RKPD Tahun 2026 sebagaimana terlihat pada Gambar 1.1 berikut.

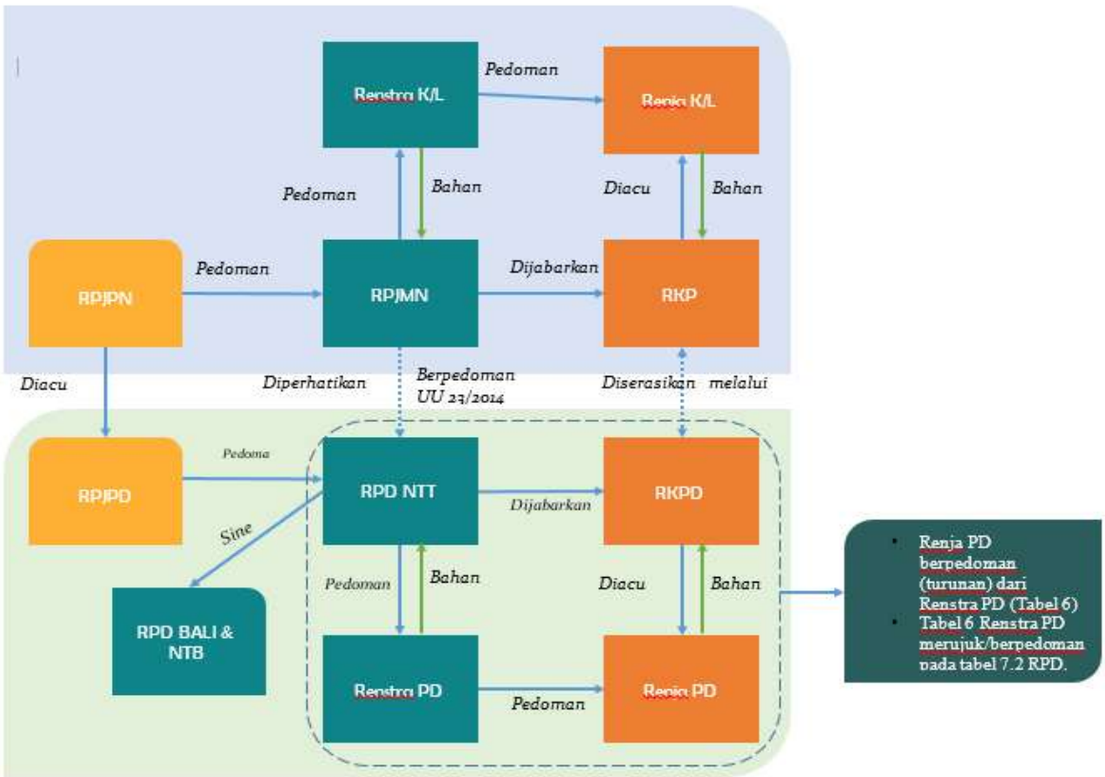

Gambar 1.1
Alur Perencanaan RKPD Tahun 2026

Sebagai penjabaran Tahun Pertama dari RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029, RKPD Tahun 2026 memuat strategi dan Arah kebijakan yang diarahkan pada penguatan ekonomi yang kokoh dan pemantapan kualitas pelayanan dasar. Dalam konteks pencapaian visi dan misi RPJMD 2025–2029, sekaligus mengacu pada tema RKP Tahun 2026 yaitu : **Kedaulatann Pangan, Energi yang Produktif dan Inklusif,** Untuk mewujudkan tema RKP tersebut ditetapkan sasaran makro pembangunan nasional pada tahun 2026, yaitu: 1). Laju Pertumbuhan Ekonomi; 2). PDRB per kapita (juta); 3). Kontribusi PDRB Provinsi; 4). Tingkat Kemiskinan; 5). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT); 6). Indeks Rasio Gini; 7). Indeks Modal Manusia; 8). Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK dan 9). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah.

1.2. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2024 Nomor 194 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
20. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);
21. Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 382);
22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
23. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
24. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
25. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) ;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019);
33. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 264);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 543);
35. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 008) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 006, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0130);
36. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0045);
37. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2024 Nomor 005, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0133);
38. Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 007);
39. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
40. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Dalam konteks pembangunan berdimensi kewilayahan, dokumen perencanaan yang bersifat spasial dipadukan dengan dokumen yang bersifat a-spasial. Secara regulasi, penyusunan RKPD Tahun 2026 berpedoman pada Dokumen RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029, RKP Tahun 2026, Program Strategis Nasional dan Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2026. Kemudian, dalam kaitannya dengan keruangan, RKPD Tahun 2026 disinergikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023-2043, dengan tetap menjaga keselarasan dengan terhadap RTRW Nasional dan produk rencana tata ruang lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah (Provinsi maupun Kabupaten/Kota).

RKPD Tahun 2026 selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan dokumen KUA dan PPAS Provinsi NTT Tahun 2026. Dokumen KUA dan PPAS merupakan dasar untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah TA. 2026 serta dasar penyusunan RAPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur TA. 2026. Dengan demikian, dokumen RKPD ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan APBD Provinsi NTT TA 2026. Keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan terlihat pada Gambar 1.2 berikut.

Bagan Alur Keterkaitan RKPD dengan dokumen Perencanaan Lainnya

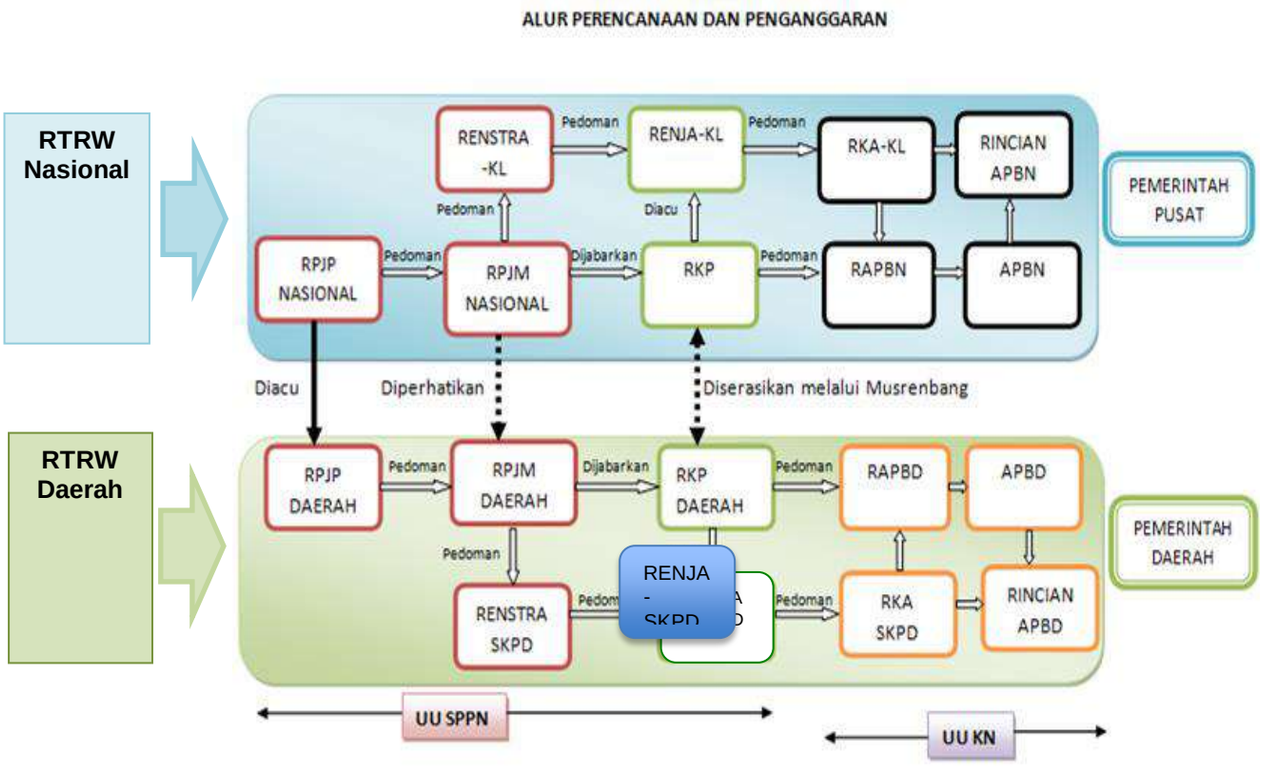

Gambar I.2
Bagan Alur Keterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud penyusunan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026 adalah sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan pembangunan daerah lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026, khususnya bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi. RKPD ini menjadi dasar sinkronisasi perencanaan dan penganggaran yang selanjutnya digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar penyusunan rancangan KUA dan PPAS dan bahan sinkronisasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026.

2. Tujuan

Tujuan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026 adalah:

1) Menjadi acuan bagi DPRD dan Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2026, Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026 dan RAPBD TA. 2026;
2) Acuan menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran;
3) Memperkuat koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antar perangkat daerah, serta antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Pusat;
4) Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan sumber daya dan keuangan publik.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

RKPD Tahun 2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan
Bab ini menguraikan tentang gambaran umum penyusunan RKPD yang terdiri dari latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan penyusunan dokumen RKPD serta sistematika dokumen RKPD.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah
Bab ini menguraikan tentang gambaran umum kondisi daerah, evaluasi pencapaian kinerja pembangunan daerah (seperti indikator makro pembangunan daerah), evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun Anggaran 2025 yang mengacu pada Dokumen RPD Tahun 2024-2026.

Bab III Kerangka Ekonomi Dan Keuangan Daerah
Bab ini menguraikan tentang kondisi ekonomi daerah tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup: indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dengan perincian sumber pendapatan tahun lalu dan satu tahun sebelumnya, tahun berjalan, tahun rencana dan satu tahun setelah tahun rencana sebagai perkiraan maju pendapatan daerah dan arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah (pendapatan, belanja dan pembiayaan).

Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
Bab ini menguraikan tentang Arah kebijakan dan prioritas Pembangunan Nasional (RPJMN) dan Arah Kebijakan, prioritas dan sasaran Pembangunan Provinsi NTT (RPJMD) sebagai pedoman dalam menyusun perencanaan pembangunan kabupaten/kota Tahun 2026.

Bab V Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota
Bab ini menguraikan tentang arahan kebijakan pembangunan kabupaten/kota yang ditetapkan oleh provinsi, yang nantinya akan menjadi pedoman bagi kabupaten/kota dalam menyusun perencanaan pembangunan kabupaten/kota Tahun 2026.

Bab VI Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Bab ini menguraikan tentang rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan pada RPJMD Tahun 2025-2029.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Bab ini menguraikan tentang indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai panduan dalam pencapaian kinerja tahunan.

Bab VIII Penutup

Bab ini menguraikan tentang arahan Gubernur, penegasan dalam menerapkan RKPD, serta arahan bagi Perangkat Daerah dalam mempedomani RKPD Tahun 2026 sebagai acuan untuk penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Geografi

Provinsi NTT terletak di sebelah selatan katulistiwa pada posisi 8°-12° Lintang Selatan dan 118°–125° Bujur Timur. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemuthakiran Kode, Data Wilayah Adminstrasi Pemerintahan dan Pulau, Provinsi NTT terdiri dari 609 Pulau yang meliputi 21 Kabupaten dan 1 Kota Madya, 315 Kecamatan, 305 Kelurahan dan 3.137 Desa dengan total luas wilayah yaitu 46.446,644 km². Kabupaten Sumba Timur merupakan wilayah terluas yaitu sebesar 6.984 km² dan Kota Kupang merupakan wilayah paling kecil dengan luas 159 km². Sebanyak 82 persen desa/kelurahan di NTT terletak didaerah lereng dengan rincian, 20 desa/kelurahan berada di lembah, 2.849 desa/ kelurahan berada di lereng dan 581 desa/kelurahan berada di dataran. Secara fisik batas wilayah Provinsi NTT, adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Berbatasan dengan Laut Flores.
- Sebelah Selatan: Berbasan dengan Samudera Hindia (Negara Australia)
- Sebelah Timur: Berbatasan dengan Negara Timor Leste dan Laut Timor
- Sebelah Barat: Berbatasan dengan Selat Sape (Provinsi Nusa Tenggara Barat)

2.1.1.1. Topografi Daratan

Kondisi topografis NTT sebagian besar berbukit-bukit dan bergunung. Kawasan yang tergolong datar hingga landai menyebar secara sporadis pada gugusan-gugusan yang sempit, di antara lekukan perbukitan atau memanjang mengikuti garis pantai. Lahan dengan kemiringan <40, yang cocok untuk kawasan budidaya mencapai 64,54 persen, sebagian besar di antaranya (38,07 persen dari total luas lahan) memiliki kemiringan 15 – 40 persen. Sisanya, 35,46 Persen merupakan lahan dengan kemiringan >40 persen, dan tidak dapat dikelola sebagai areal budidaya. Kondisi geomorfologis/bentang alam yang demikian menimbulkan potensi erosi yang sangat tinggi. Akibatnya, laju degradasi sumberdaya lahan yang tinggi.

Tabel 2.1.
Ketinggian Kabupaten/ Kota di Provinsi NTT (Mdpl) Tahun 2022

No	Kabupaten/ Kota	Nama Ibu Kota	Tinggi Wilayah (Mdpl)
1.	Ngada	Bajawa	1.204,50
2.	Manggarai	Ruteng	1.173,08
3.	Timor Tengah Selatan	So'e	901,60
4.	Sumba Tengah	Waibakul	437,30
5.	Sumba Barat	Waikabubak	436,50
6.	Belu	Atambua	398,78
7.	Timor Tengah Utara	Kefamenanu	389,29
8.	Manggarai Timur	Borong	266,08
9.	Rote Ndao	Ba'a	158,00
10.	Manggarai Barat	Labuan Bajo	78,23
11.	Sumba Timur	Waingapu	62,90
12.	Kota Kupang	Kupang	61,13

No	Kabupaten/ Kota	Nama Ibu Kota	Tinggi Wilayah (Mdpl)
13.	Sabu Raijua	Seba	56,66
14.	Sumba Barat Daya	Tambolaka	52,80
15.	Alor	Kalabahi	36,60
16.	Nagekeo	Mbay	34,93
17.	Ende	Ende	31,35
18.	Kupang	Oelamasi	28,85
19.	Flores Timur	Larantuka	27,06
20.	Sikka	Maumere	14,48
21.	Malaka	Betun	14,21
22.	Lembata	Lewoleba	12,35

Sumber: Badan Informasi Geospasial (BIG)

2.1.1.2. Topografi Lautan

Perairan pesisir NTT sampai batas 12 mil memiliki kedalaman yang bervariasi, dari yang dangkal sampai kedalaman lebih dari 300 m seperti peraian di selatan Lembata dan Tenggara Alor. Mengacu kepada kriteria laut dalam (kedalaman lebih dari 200 m), maka pada jarak sampai 4 mil diukur dari daratan, perairan yang berada di hadapan daratan sebagian besar kabupaten/kota di NTT merupakan perairan dangkal sampai perairan dalam.

Kabupaten yang tidak memiliki perairan dalam pada jarak 4 mil dari darat adalah Sumba Barat Daya, Malaka, TTS, dan Kota Kupang. Pada jarak antara 4-12 mil, kondisi batimetri perairan di NTT umumnya akan makin dalam lagi kecuali pada wilayah tertentu yang berdekatan dengan pulau-pulau lainnya atau bukit bawah laut yang umumnya terdapat di wilayah Flores. Perairan dangkal umumnya berada pada perairan yang berada pada wilayah selat dan yang berdampingan dengan daratan. Dari sudut lokasi, wilayah utara NTT seperti Flores sampai Alor memiliki kondisi batimetri yang lebih dalam dibanding bagian selatan NTT seperti dari Sumba sampai Timor.

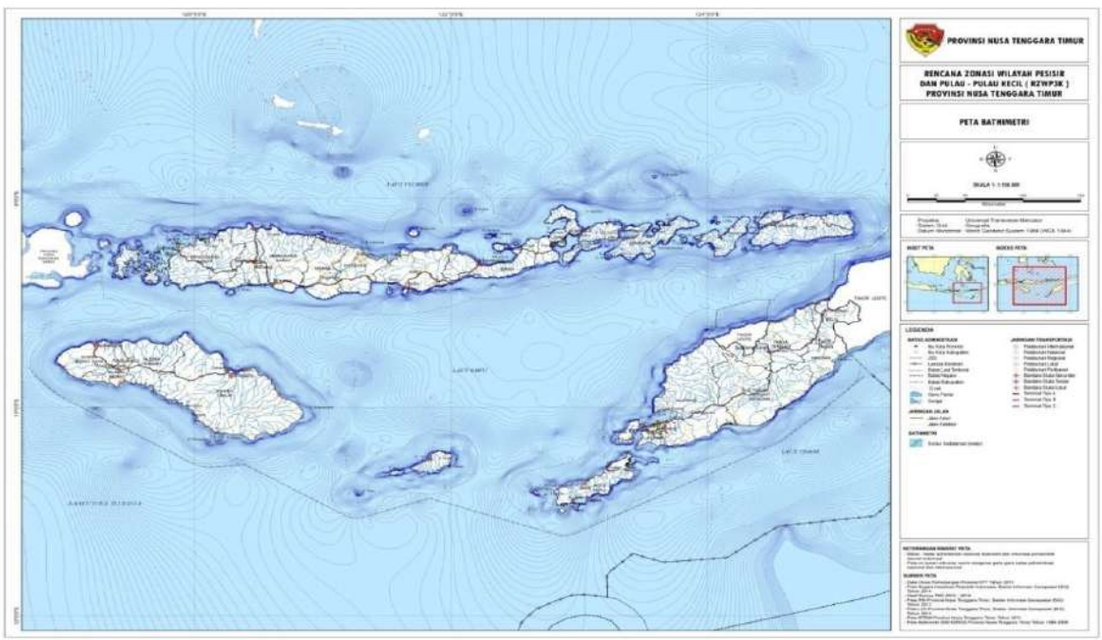

Sumber: Peta Batimetri, RZWP3K Tahun 2025-2029

Gambar 2.1.
Peta Kedalaman Laut di wilayah Provinsi NTT

2.1.1.3. Garis Pantai

Garis pantai adalah batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi. Garis laut dapat berubah karena adanya abrasi, yaitu pengikisan pantai oleh hantaman gelombang laut yang menyebabkan berkurangnya areal daratan. Berdasarkan data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT Tahun 2019, maka panjang garis pantai Provinsi NTT adalah 5.700 km.

2.1.1.4. Iklim

Perubahan iklim merupakan fenomena global yang dipicu oleh naiknya suhu rata-rata atmosfir bumi seiring meningkatnya gas rumah kaca di atmosfir. Perubahan suhu global ini berdampak pada perubahan iklim seperti perubahan pola hujan menjadikan tidak menentunya musim, naik dan turunnya hujan disuatu wilayah yang berpotensi menimbulkan bencana banjir maupun kekeringan. Selain itu wilayah NTT juga dipengaruhi oleh fenomena iklim global lain yang dapat memperngaruhi variabilitas iklim seperti fenomena *El Nino Southern Oscilation* (ENSO) dan *Indian Dipole Mode* (IOD).

Dampak variablitas dan perubahan iklim tersebut akan semakin buruk pada suatu wilayah yang memiliki kerentanan dengan kategori tinggi. Salah satu faktor yang menentukan kerentanan adalah kemampuan adaptasi suatu wilayah dan tingginya sentitivitas dan keterpaparan menjadikan wilayah tersebut menjadi rentan terhadap dampak perubahan iklim. Salah satu indikasi fenomena perubahan iklim dapat diamati dari perubahan pola curah hujan rata-rata pada suatu wilayah.

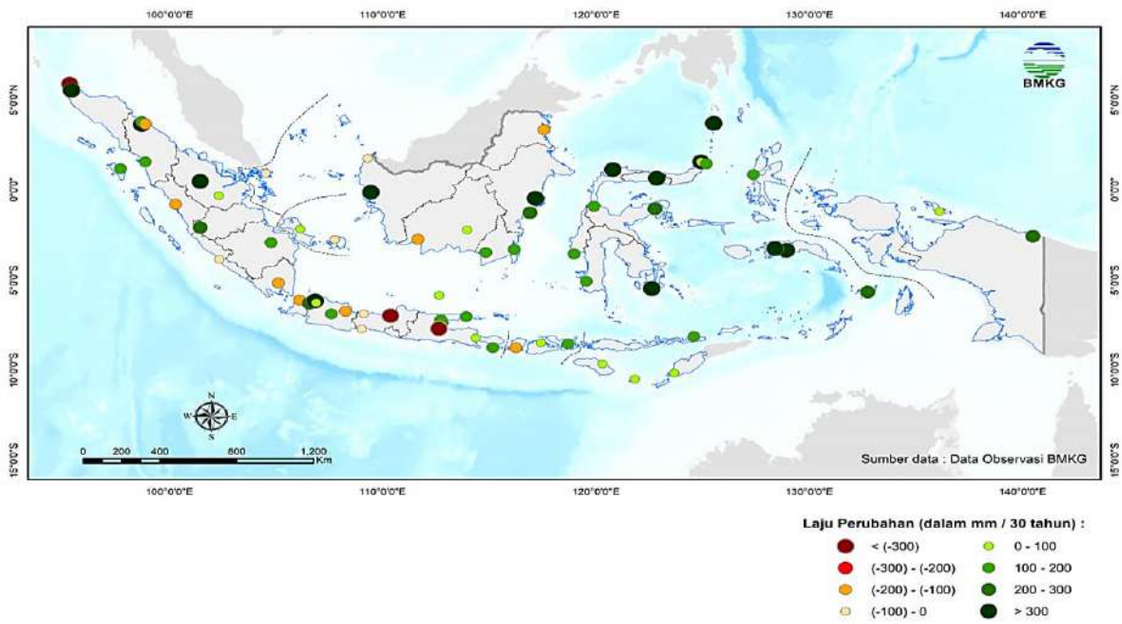

Sumber: BMKG 2023

Gambar 2.2.
Laju Perubahan Curah Hujan Tahunan Periode 1981-2022

Dari hasil analisis yang dilakukan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) untuk laju perubahan curah hujan tahunan periode 1981 sampai dengan 2022, Provinsi NTT khusus wilayah Timor, Sabu dan Sumba memiliki laju perubahan curah hujan tahunan atau mengalami kenaikan dalam rentang 0-100 mm/30 tahun. Sedangkan Pulau Alor memiliki laju perubahan curah hujan tahunan atau mengalami kenaikan dalam rentang 100-200 mm/30 tahun.

Demikian juga untuk kategori laju perubahan hari hujan dalam kurun waktu 1981 sampai dengan 2022, Provinsi NTT khususnya wilayah Timor, Sabu dan Alor memiliki laju perubahan hari hujan >6 hari/ 30 tahun. Sedangkan untuk wilayah Sumba memiliki laju perubahan hari hujan atau mengalami kenaikan dalam rentang (-3)-0 hari/30 tahun sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut ini.

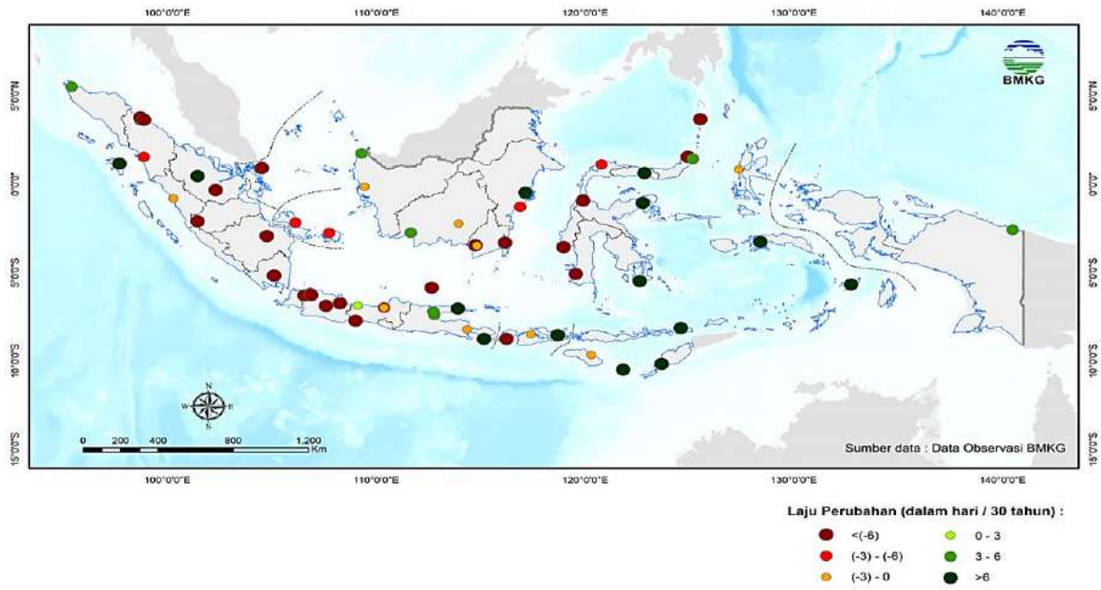

Sumber: BMKG 2023

Gambar 2.3.
Laju Perubahan Hari Hujan Periode 1981-2022

Proyeksi curah hujan musiman wilayah Provinsi NTT periode 2020-2049 terhadap 1976-2005 September, Oktober, November mengalami penurunan dalam rentang (-0,5)-0 sampai dengan (-25)-(-20) persen, sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut ini.

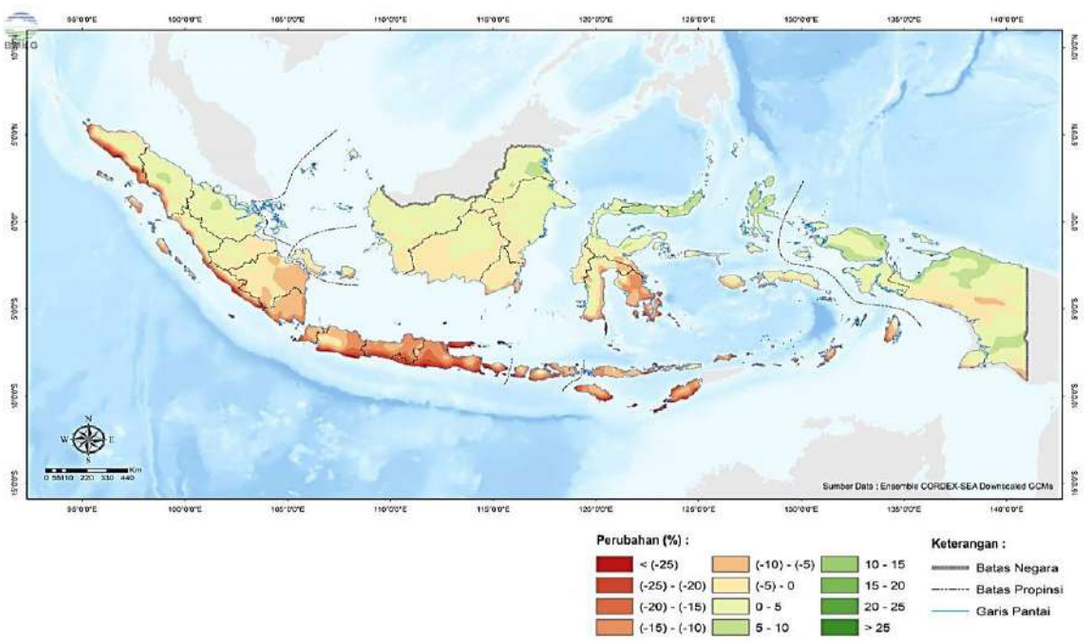

Sumber: BMKG 2023

Gambar 2.4.
Proyeksi Perubahan Curah Hujan Musiman Periode 2020-2049 Terhadap 1976-2005 September, Oktober, November Skenario RCP4.5

Proyeksi perubahan hari kering wilayah Provinsi NTT periode 2020-2049 terhadap 1976-2005 September, Oktober, November mengalami kenaikan dalam rentang 0-5 persen, sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut ini.

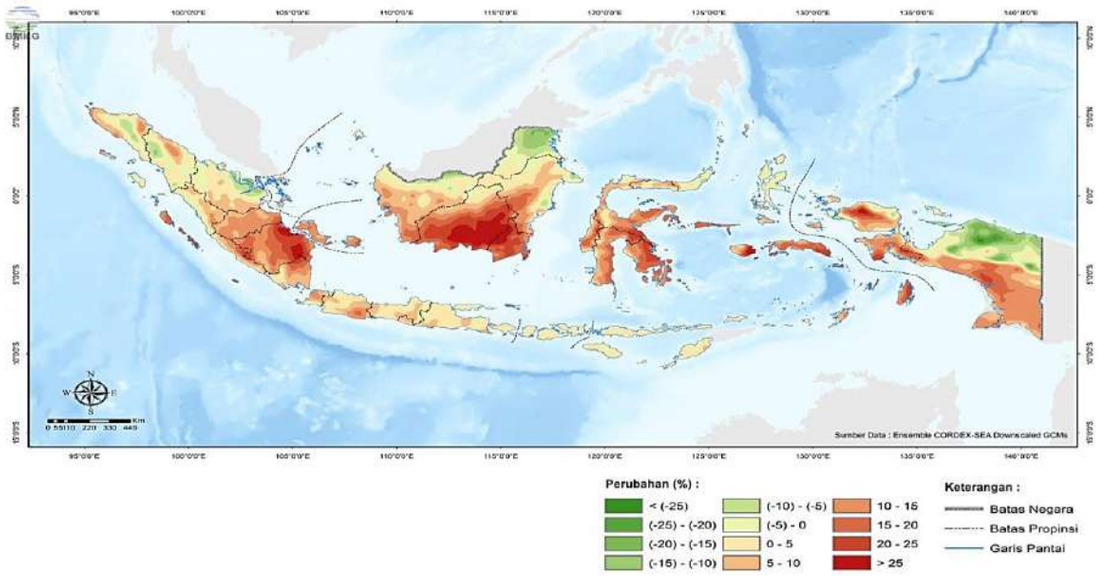

Sumber: BMKG 2023

Gambar 2.5.
Proyeksi Perubahan Hari Kering Periode 2020-2049 Terhadap 1976-2005 September, Oktober, November Skenario RCP4.5

Proyeksi perubahan awal musim hujan wilayah Provinsi NTT periode 2020-2049 terhadap 1976-2005 September, Oktober, November mengalami kemajuan dalam kategori rentang maju lebih dari 2 dasarian sampai cenderung tetap, sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut ini.

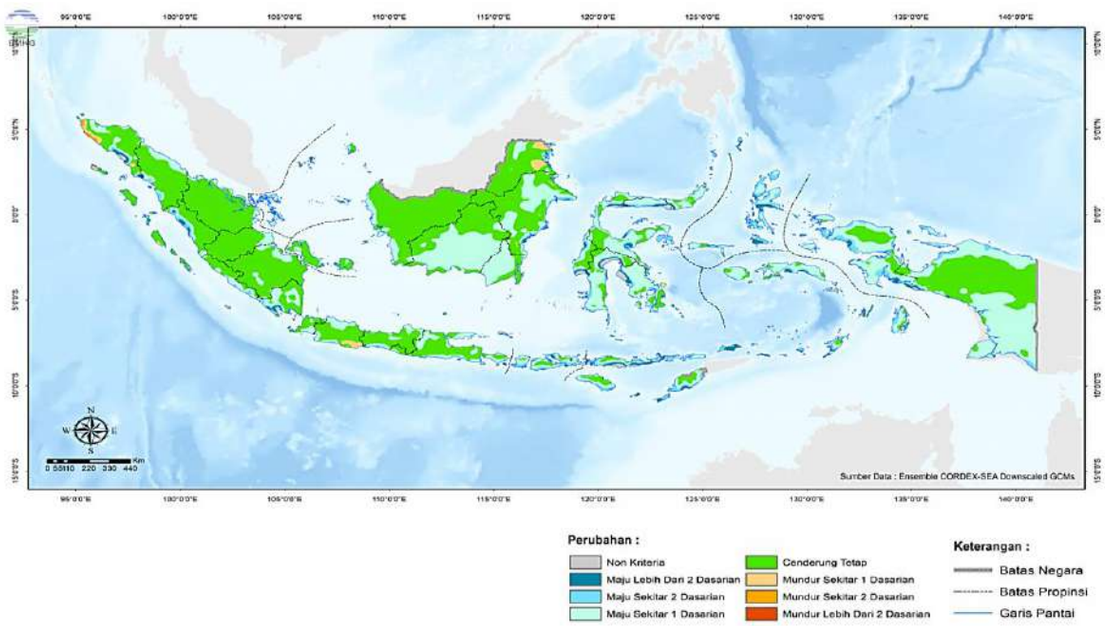

Sumber: BMKG 2023

Gambar 2.6.
Proyeksi Perubahan Awal Musim Hujan Periode 2020-2049 Terhadap 1976-2005 September, Oktober, November Skenario RCP4.5

Proyeksi perubahan panjang musim hujan wilayah Provinsi NTT periode 2020-2049 terhadap 1976-2005 September, Oktober, November cukup bervariasi, sebagian besar wilayah di Provinsi NTT mengalami pengurangan dalam kategori rentang berkurang lebih dari 2 dasarian sampai cenderung tetap, dan sebagian kecil bertambah dalam rentang 1 sampai 2 dasarian, sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut ini.

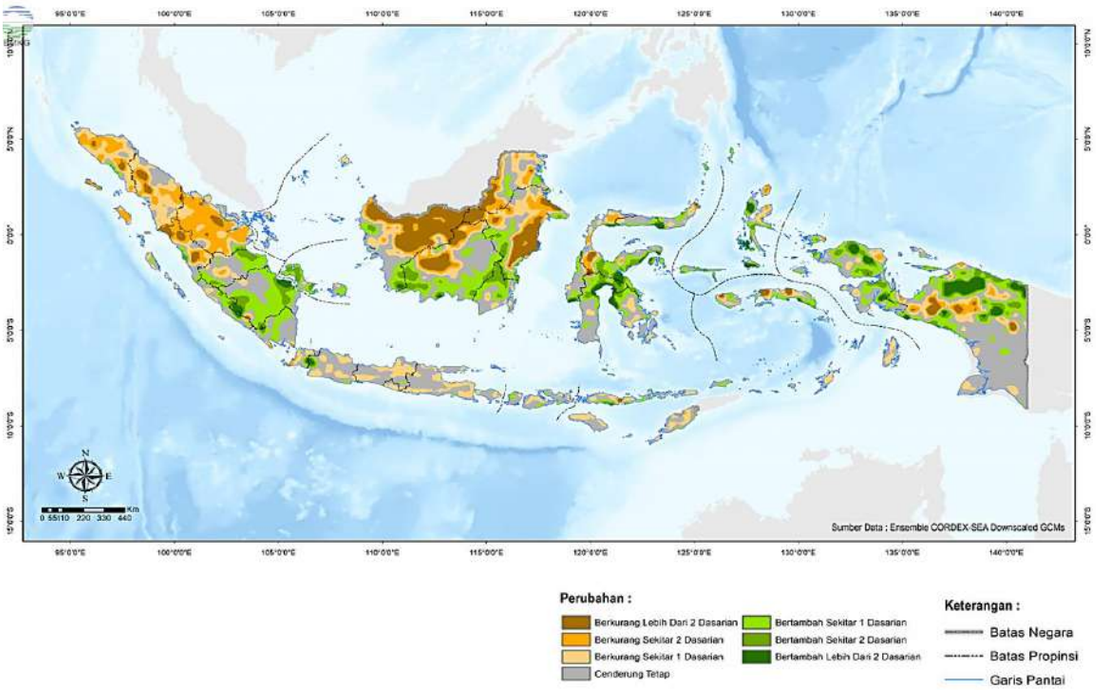

Sumber: BMKG 2023

Gambar 2.7.
Proyeksi Perubahan Panjang Musim Hujan Periode 2020-2049 Terhadap 1976-2005 September, Oktober, November Skenario RCP4.5

2.1.1.5. Suhu Udara

Perubahan iklim juga identik dengan meningkatnya suhu udara yang berdampak pada perubahan musim dan peningkatan frekuensi kejadian cuaca ekstrim. Peningkatan nilai suhu udara dapat terjadi akibat meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca (GRK) seperti CO_2, CH_2, N_2O, HFC, PFC, dan SF_6 di amosfer. Selin dari alam, emisi GRK dapat bersumber dari buatan manusia seperti sektor industri dan energi serta akibat dari adanya migrasi penduduk sehingga terjadi peningkatan konsentrasi jumlah penduduk pada suatu wilayah yang turut memberikan kontribusi salah satunya dalam penggunaan kendaraan bermotor.

Peningkatan suhu udara permukaan memberikan respon baik buruk yang cukup signifikan terhadap kondisi alam dan pola hidup manusia. Berdasarkan analisis BMKG terkait laju perubahan suhu rata-rata tahunan periode 1981 sampai dengan 2022 untuk wilayah Provinsi NTT pada umumnya meningkat. Wilayah Timor, Flores dan Sumba berada dalam rentang 0,6-0,8°C/ 30 Tahun, wilayah Sabu Raijua berada dalam rentang 0,4-0,6°C/ 30 Tahun. Sedangkan untuk wilayah Alor berada dalam rentang 0,2-0,4°C/ 30 Tahun. Rincian selengkapnya terkait lanjut perubahan suhu rata-rata Tahunan Periode 1981-2022, dapat dilihat pada gambar berikut ini.

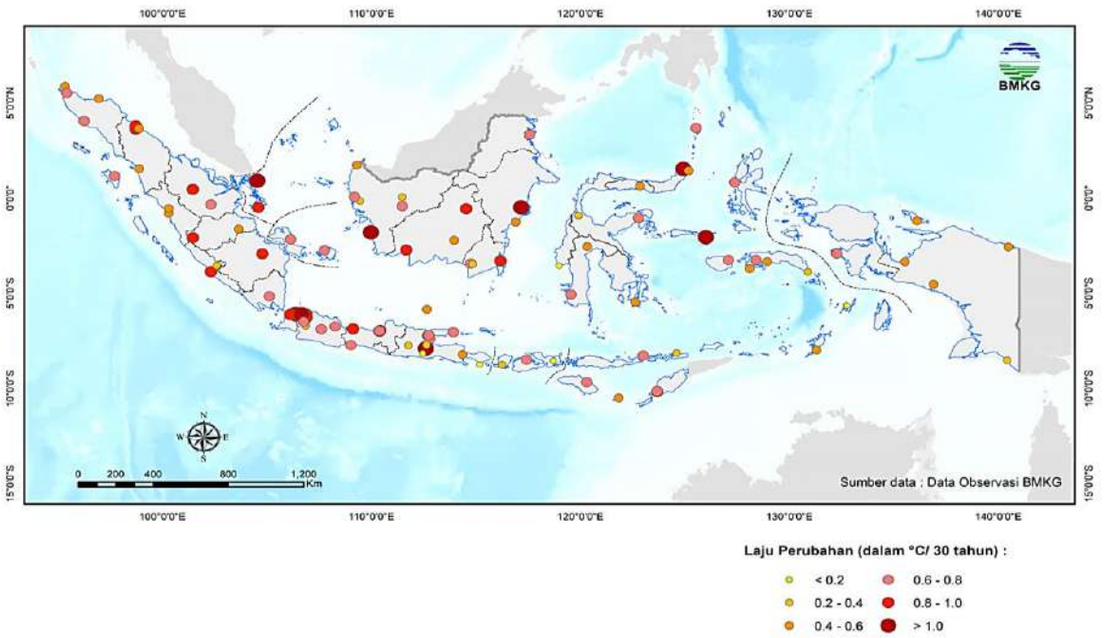

Sumber: BMKG 2023

Gambar 2.8.
Laju Perubahan Suhu Rata-Rata Tahunan Periode 1981-2022

2.1.1.6. Tutupan Lahan

Tutupan lahan di Provinsi NTT terbagi menjadi 21 tipe tutupan lahan, yaitu Badan Air, Bandara/Pelabuhan, Awan, Belukar, Belukar Rawa, Hutan Lahan Kering Primer, Hutan Lahan Kering Sekunder, Hutan Mangrove Primer, Hutan Mangrove Sekunder, Hutan Rawa Primer, Hutan Rawa Sekunder, Hutan Tanaman, Permukiman, Perkebunan, Pertanian Lahan Kering, Pertanian Lahan Kering Campur, Rawa, Savanna/Padang Rumput, Sawah, Tambak dan

Tutupan lahan dominan yang menempati posisi pertama di Provinsi NTT adalah hutan lahan kering sekunder yaitu seluas 1.603.390,22 ha (34,67 Persen), kemudian semak/belukar seluas 1.219.989,79 ha (26,38 Persen) serta savanna/padang rumput seluas 820.995,28 ha (17,75 Persen. Sedangkan tutupan lahan paling sempit adalah hutan rawa primer seluas 89,85 ha (0,002 Persen).

Tabel 2.2.
Komponen Tutupan Lahan Provinsi NTT

No.	Tutupan Lahan	Luas (Ha)	Persen
1.	Awan	96,21	0,00
2.	Badan Air	3.147,92	0,07
3.	Bandara/ Pelabuhan	588,21	0,01
4.	Belukar	1.219.989,79	26,38
5.	Belukar Rawa	8.126,63	0,18
6.	Hutan Lahan Kering Primer	268.180,46	5,80
7.	Hutan Lahan Kering Sekunder	1.603.390,22	34,67
8.	Hutan Mangrove Primer	14.601,43	0,32
9.	Hutan Mangrove Sekunder	7.857,17	0,17
10.	Hutan Rawa Primer	89,85	0,00
11.	Hutan Rawa Sekunder	698,18	0,02
12.	Hutan Tanaman	18.984,08	0,41
13.	Permukiman	31.581,84	0,68

No.	Tutupan Lahan	Luas (Ha)	Persen
14.	Perkebunan	2.462,11	0,05
15.	Pertanian Lahan Kering	192.482,82	4,16
16.	Pertanian Lahan Kering Campur	319.967,72	6,92
17.	Rawa	5.817,40	0,13
18.	Savanna/ Padang rumput	820.955,28	17,75
19.	Sawah	52.052,66	1,13
20.	Tambak	1.036,12	0,02
21.	Tanah Terbuka	52.505,44	1,14
	Total	4.624.611,54	100,00

Sumber: Daya Dukung dan Daya Tampung Provinsi NTT Tahun 2019

2.1.1.7. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Indeks Kualitas Hidup (IKLH) merupakan nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup suatu wilayah pada waktu tertentu yang merupakan komposi dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan dan Indeks Kualitas Air Laut. IKLH Provinsi NTT dalam kurun waktu sejak 2010 sampai dengan 2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dimana pada Tahun 2010 nilai IKLH Provinsi NTT senilai 50,72 yang naik menjadi 73,49 pada Tahun 2022. Rincian selengkapnya, dapat dilihat pada Gambar berikut ini.

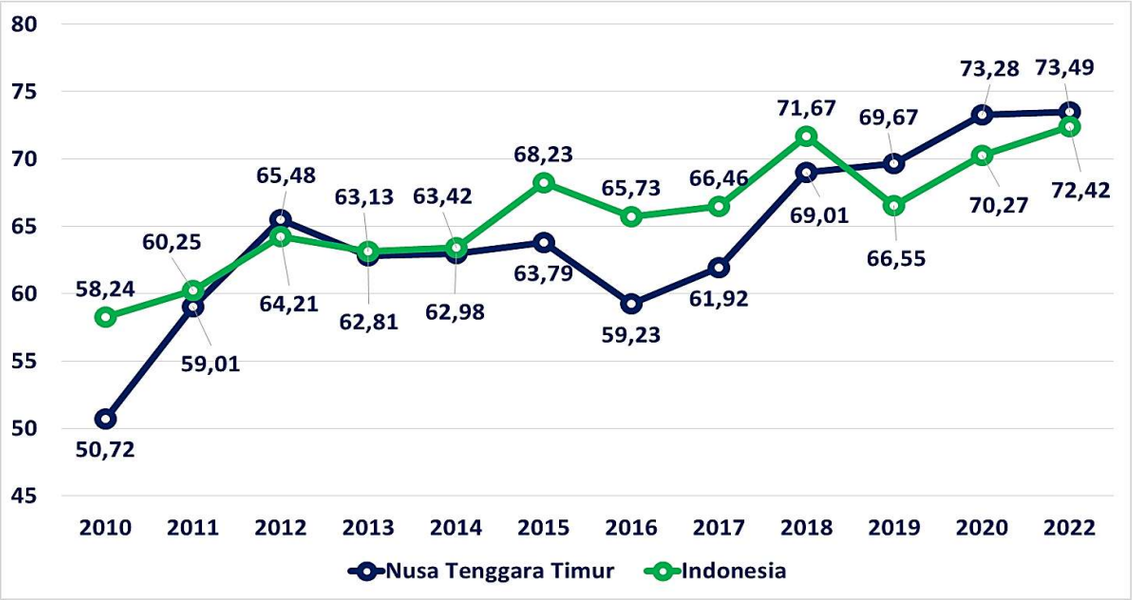

Sumber: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia, KLHK RI

Gambar 2.9.
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Provinsi NTT 2010-2022

2.1.1.8. Indeks Resiko Bencana

Wilayah Provinsi NTT dilewati oleh patahan sesar *Flores Back Arc Thrust*, sesar *Bondowatu Fault*, sesar *Sumba Strike-slip Fault*, sesar *Sumba Ridge Thrust*, sesar *Savu Thrust*, sesar *Semau Fault* dan sesar *Sape Strike-slip Fault* (PusGen, 2017). Dalam perspektif klimatologi, arus angin yang banyak mengandung uap air dari Asia dan Samudera Pasifik sampai di wilayah NTT kandungan uap airnya sudah berkurang yang mengakibatkan hari hujan di NTT lebih sedikit dibanding wilayah yang dekat dengan Asia. Hal ini menjadikan NTT sebagai wilayah yang tergolong kering di mana hanya 4 bulan

(Januari s.d Maret, dan Desember) yang keadaannya relatif basah (BPS NTT 2022). Secara historis, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir terlah terjadi 576 kejadian bencana di NTT. bencana yang paling sering terjadi adalah angin puting beliung, diikuti oleh banjir, tanah longsor dan kekeringan.

Sejak Tahun 2015 nilai Indeks Risiko Bencana Provinsi NTT memiliki indeks risiko senilai 157,16 dengan kategori tinggi kemudian turun menjadi 139,23 pada Tahun 2022 dengan kategori sedang. Ancaman Bencana pada wilayah ini meliputi: Gempa Bumi, Tsunami, Gunung Api, Banjir, Tanah Longsor, Kekeringan, Gelombang Ekstrim/ Abrasi, Kebakaran Hutan dan Lahan serta Cuaca Ekstrim. Rincian perkembangan nilai Indeks Resiko Bencana Provinsi NTT Tahun 2015-2022 selengkapnya, dapat dilihat pada gambar berikut ini.

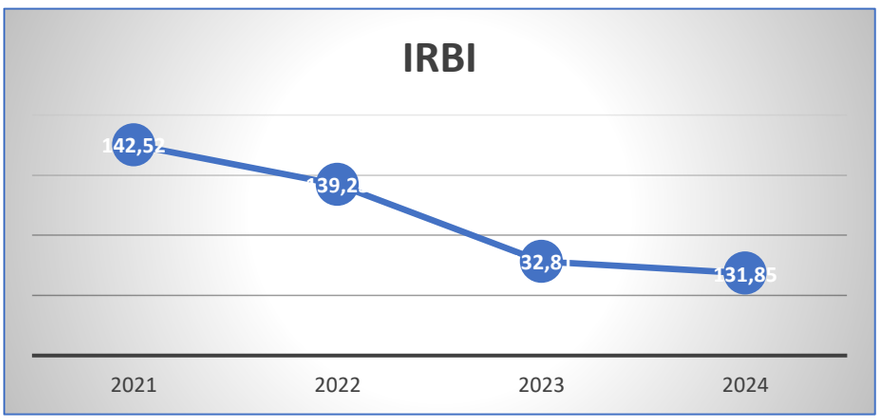

Sumber: Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI 2025, BNPB)

Gambar 2.10.
Indeks Resiko Bencana Provinsi NTT 2021-2024

2.1.1.9. Indeks Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Dalam rangka mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk IKP yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan.

Pada tahun 2022, nilai Indeks Ketahanan Pangan NTT mencapai 68,42, yakni mengalami peningkatan dari nilai IKP pada tahun 2019 senilai 50,69. Meski telah mengalami peningkatan yang baik, rata-rata nilai IKP per kabupaten/kota di NTT dan indikator pembentuknya masih jauh lebih rendah daripada rata-rata nasional. Beberapa komponen pembentuk IKP yang nilainya di NTT masih jauh lebih rendah dibanding rata-rata nasional, meliputi tingginya proporsi masyarakat dengan pengeluaran untuk pangan lebih dari 65% dari total pengeluaran, tingginya masyarakat yang hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, tingginya proporsi masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan, rendahnya angka harapan hidup, lama sekolah perempuan, rasio tenaga kesehatan dan tingginya prevalensi stunting. rincian selengkapnya, dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029

Gambar 2.11.
Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Provinsi NTT

2.1.1.10. Ketahanan Energi

Berdasarkan Peraturan Gubernur NTT Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi NTT Tahun 2019-2050, menggambarkan aspek penyediaan, pemanfataan dan pengembangan konservasi energi daerah yang disesuaikan dengan potensidan sumber daya lokal yang dimiliki. Secara garis besar pemodelan dalam RUED Provinsi NTT menunjukan target bauran energi primer tahun 2025 adalah 24 Persen kontribusi dari energi baru dan terbarukan (EBT), 12 persen dipasok dari batu bara dan 10 persen pasokan dari gas bumi dan sisanya sebesar 54 persen masih dipasok dari minyak bumi. Sedangkan pada tahun 2050 diharapkan sebesar 39 persen kontribusi dari EBT, 16 persen dipasok dari batu bara dan 14 persen pasokan dari Gas Bumi dan sisanya sebesar 31 persen masih tetap membutuhkan minyak bumi sebagai pemasok energi primer.

Tabel 2.3.
Hasil Pemodelan Kebutuhan Energi Final Per Sektor
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015-2050
(Million Tonnes of Oil Equivalent/ MTOE)

No.	Sektor	2025	2035	2050
1.	Rumah Tangga	0,32	5,56	9,78
2.	Komersial	0,46	0,97	2,72
3.	Transportasi	6,71	10,13	17,29
4.	Industri	3,32	0,63	1,52
5.	Sektor Lainnya	0,22	0,37	0,72
	Total	11,03	17,66	32,03

Sumber: Pedoman Umum Rencana Umum Energi Daerah NTT 2019-2050

Secara kuantitas nilai absolut dari total pasokan energi primer tahun 2025 untuk provinsi NTT diperkirankan sebesar 2,6 MTOE (juta ton setara minyak) dimana dapat menghasilkan pembangkit listrik sebesar 1 GW dengan porsi EBT sekitar 0,54 GW. Sedangkan untuk tahun 2050 diperkirankan sebesar 8,3 MTOE dimana dapat menghasilkan pembangkit sebesar 4,24 GW dengan porsi EBT sekitar 2,24 GW.

Tabel 2.4.
Hasil Pemodelan Kebutuhan Energi Final Per Jenis Untuk Seluruh Sektor Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015-2050

(Million Tonnes of Oil Equivalent/ MTOE)

No.	Sektor	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050
1.	Listrik	597	1.431	2.342	3.391	4.738	6.389	8.405	10.750
2.	Gas Bumi	39	254	611	853	1.164	1.154	2.038	2.622
3.	Premium	1.990	1.789	798	883	938	960	950	907
4.	Avtur	311	417	295	336	354	327	223	-
5.	Minyak Tanah	83	2	1	1	-	-	-	-
6.	Minyak Solar	1.558	1.241	685	18	13	9	4	-
7.	Minyak Bakar	8	6	6	6	4	4	4	4
8.	LPG	539	1.029	1.114	1.171	1.219	1.259	1.289	1.214
9.	Batu Bara	99	126	171	242	336	462	620	822
10.	Avgas	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,4
11.	Bio Solar	274	976	2.001	3.300	4.036	4.888	5.861	6.960
12.	Bio Premium	-	929	2.347	2.815	3.247	3.660	4.065	4.473
13.	Minyal Diesel	1	-	-	-	-	-	-	-
14.	Biomasa Komersial	26	35	49	70	98	134	186	249
15.	Bioavtur	-	-	295	504	826	1.307	2.007	3.001
16.	EBT Lainnya	-	28	217	307	403	505	610	724
	Total	5.525	8.235	10.715	13.590	16.973	20.553	26.262	31.726

Sumber: Pedoman Umum Rencana Umum Energi Daerah NTT 2019-2050

Dalam RUED Provinsi NTT hasil pemodelan untuk konservasi energi pada sisi kebutuhan tahun 2025 sebesar 7,06 persen dan sebesar 25 persen pada tahun 2050. Sedangkan elastisitas energi tahun 2025 dan tahun 2050 sebesar 0,74 dan 0,65 yakin sejalan dengan tren nasional dalam RUEN yang berjalan flat ditahun 2025 sampai dengan 2050.

Gambaran kelistrikan di Provinsi NTT meliputi kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik, daya mampu pembangkit listrik, serta jaringan transmisi periode 2011 sampai dengan 2021 guna mencapai rasio elektrifikasi serta desa berlistrik 100% dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.5.
Gambaran Indikator Kelistrikan di NTT 2011-2021

No.	Komponen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik Nasional (MW)	n.a.	n.a.	413,54	467,77	519,05	534,39
2.	Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik PLN (MW)	216,79	276,79	374,85	424,54	475,82	488,55
3.	Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik Non PLN (MW)	8,77	39,77	38,69	43,22	43,22	45,85
4.	Daya Mampu Pembangkit Tenaga Listrik Nasional (MW)	n.a.	n.a.	328,07	328,07	433,58	448,02
5.	Daya Mampu Pembangkit Listrik PLN (MW)	79,06	92,74	289,88	339,57	390,85	403,58
6.	Daya Mampu Pembangkit Listrik Non PLN (MW)	n.a.	n.a.	38,19	42,72	42,72	45,35

No.	Komponen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
7.	Jumlah Pembangkit Tenaga Listrik PLN (Unit)	447	441	437	437	474	493
8.	Jumlah Transmisi PLN (Kms)	256,2	624,87	776,06	1164,76	1335,06	1589,91
9.	Jumlah Transmisi PLN Gardu Induk (MVA)	270	195	405	565	565	745
10.	Rasio Elektrifikasi (%)	58,93	59,85	61,9	85,84	87,62	89,91
11.	Rasio Desa Berlistrik (%)	99,45	99,48	99,82	99,85	100	100

Sumber: Statistik Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM

2.2.1.11. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Perencanaan pembangunan rendah karbon merupakan transformasi strategi dari penyelenggafraan nilai ekonomi karbon untuk pencapaian target kontribusi yang ditetapkan secara nasional dan pengendalian emisi gas rumah kaca dalam pembangunan nasional. Capaian total penurunan emisi GRK Provinsi NTT sejak Tahun 2000 sampai dengan Tahun 2021 mengalami penurunan. Total emisi GRK Provinsi NTT pada Tahun 2000 sejumlah 1.297.758,66 Gg CO^2 yang turun menjadi 805.301,73 Gg CO^2 pada Tahun 2021. Rincian perkembangan emisi GRK Provinsi NTT Tahun 2000 sampai dengan Tahun 2021 selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

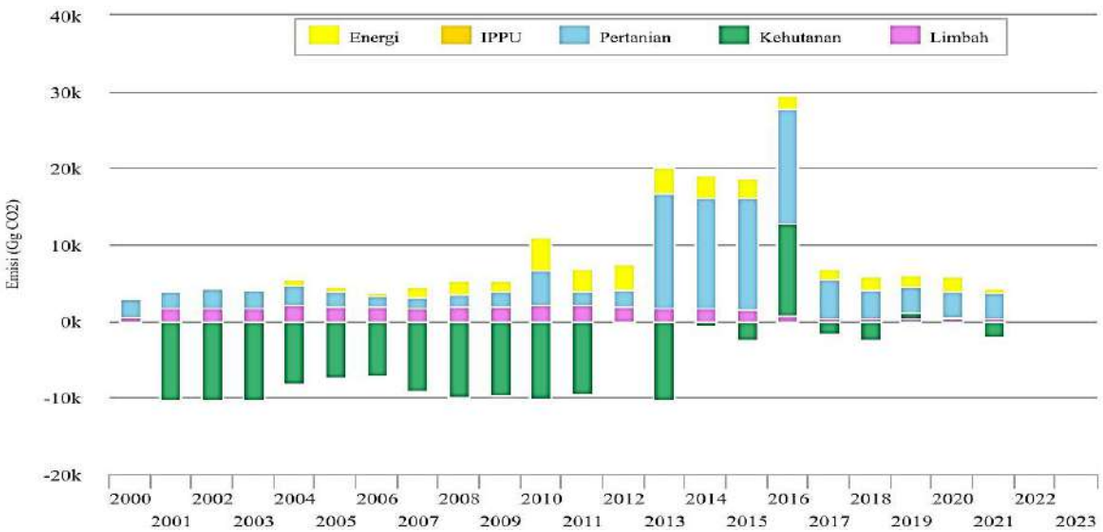

Sumber: KLHK 2024

Gambar 2.12.
Emisi dari Sektor Energi, IPPU, Pertanian, Kehutanan dan Limbah Provinsi NTT Tahun 2000-2021

2.1.1.12. Ketahanan Air

Berdasarkan studi oleh *World Bank* dan Bappenas yang dilakukan pada Tahun 2021, gambaran Status Kelangkaan air di wilayah sungai untuk region Bali dan NTT pada Tahun 2022 yaitu 89 persen kategori parah, 0,3 persen kategori tinggi, 0,1 kategori Sedang dan 0,7 persen tidak memiliki kelangkaan air di wilayah sungai. Sedangkan untuk status pemanfaatan region bali dan NTT terdapat 92 persen rumah tangga dengan akses ke air yang lebih baik, 28 persen rumah tangga dengan akses ke air perpipaan, 88 persen rumah tangga dengan akses ke sanitasi yang lebih baik, 0,6 persen daerah irigasi dari total daerah irigasi nasional, 0,3 persen memilik penyimpanan air dari total penyimpanan air nasional serta terdapat 12 persen memiliki Stasiun pemantauan air permukaan sangat tercemar.

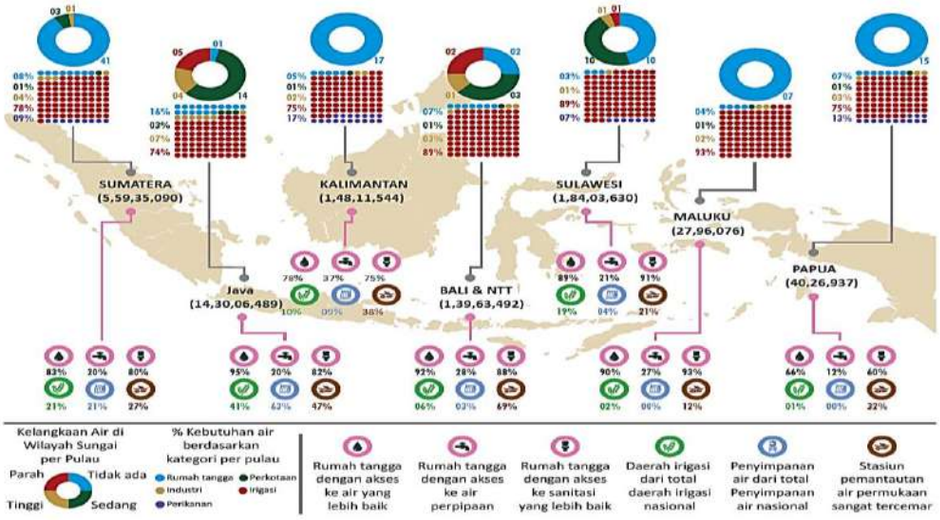

Sumber: Visi Indonesia 2045 Menuju Ketahanan Air, 2022

Gambar 2.13.
Gambaran Umum Tantangan Terkait air diseluruh Wilayah Indonesia Tahun 2022

Meskipun *sumber daya* air pada umumnya melimpah di Indonesia, namun penyebarannya tidak merata. Kini, setengah dari total PDB dihasilkan dari wilayah sungai yang mengalami kelangkaan air 'tinggi' atau 'parah' di musim kemarau. Jika tidak ada perubahan, diperkirakan dua pertiga (67 persen) dari PDB akan dihasilkan dari wilayah sungai yang mengalami kelangkaan air yang sangat tinggi atau sangat parah pada tahun 2045.

Sumber: Visi Indonesia 2045 Menuju Ketahanan Air, 2022

Gambar 2.14.
Kelangkaan air pada musim kemarau di Indonesia dalam kaitannya dengan wilayah sungai menyumbang 60 Persen dari PDB Tahun 2045

Lebih dari separuh sungai di Indonesia mengalami pencemaran yang cukup parah, dan dua sistem sungai utama di Indonesia termasuk dalam sungai yang paling tercemar di dunia. Berdasarkan pengujian air, sekitar 85 persen populasi terpapar polusi tinja koliform di sumber air. Lebih dari 70 persen PDB dihasilkan di wilayah sungai dengan sebagian besar sampel airnya dikategorikan sebagai 'tercemar parah'. Kualitas air tanah memburuk, dengan lebih dari empat perlima (93 persen) sampel air tanah melebihi ambang batas polutan. Sekitar 70 persen pencemaran air tanah di Indonesia berasal dari tangki kakus yang bocor dan limbah yang sengaja dibuang ke saluran air. Sungai menyumbang lebih dari 80 persen plastik yang mengalir ke lingkungan laut dari sumber berbasis darat di Indonesia.

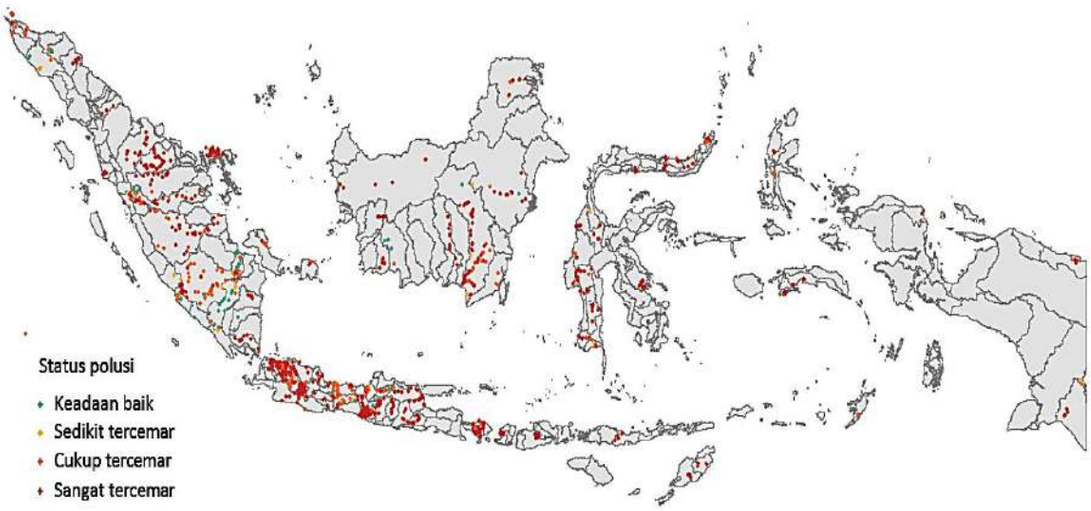

Sumber: Visi Indonesia 2045 Menuju Ketahanan Air, 2022

Gambar 2.15
Status Pencemaran Air Permukaan di Seluruh Indonesia Tahun 2021

Tujuan pembangunan bendungan ada dua yaitu *single purpose dam* dan *multi purpose dam*. *Single purpose dam* merupakan bendungan yang dibangun dengan tujuan khusus, misal hanya sebagai penyedia air irigasi atau pengendali banjir. *Multi purpose dam* dibangun dengan manfaat beragam seperti penyedia air irigasi, air baku atau air minum, sebagai pembangkit listrik, dan tempat wisata disaat yang bersamaan. Provinsi NTT memiliki 18 bendungan beroperasi yang telah dibangun sejak Tahun 1981 sampai dengan 2016 dan 3 bendungan pada tahun 2023 masih dalam tahap konstruksi yaitu bendungan Mbay, Manikin dan Temef. Rincian selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.6.
Jumlah Bendungan di Provinsi NTT 1981-2023

No.	BENDUNGAN	PENINGKATAN STATUS		LOKASI			TAMPUNGAN				FUNGSI						STATUS	
		Embung Tahun Konstruksi	Bendungan Tahun Konstruksi	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Total		Manfaat		Pengendali banjir		IRIGASI		AIR BAKU		TAHUN	BEROPERASI
													Total	Existing				
1	Danau Tua	1981	2018	Laiukoen	Rote Barat Daya	Rote Ndao	1.236.466,62	M3	1.198.233,71	M3			-	- 171,00	Ha	- -	1981	Beroperasi
2	Kapalangga	1987	2018	Busalangga	Rote Barat Laut	Rote Ndao	582.643,06	M3	416.691,49	M3			-	- 33,00	Ha	- -	1987	Beroperasi
3	Matasio	1997	2018	Matasio	Rote Timur	Rote Ndao	48.446,67	M3	436.100,00	M3			-	- 75,00	ha	- -	1997	Beroperasi
4	Manubulu	1994	2018	Maubesi	Rote Tengah	Rote Ndao	578.012,27	M3	357.734,15	M3			-	- 110,00	Ha	- -	1994	Beroperasi
5	Raknamo		2014-2018	Raknamo	Amabi Oefeto	Kupang	14.090.000,00	M3	9.310.000,00	M3	100,00	M3/dtk	1.323,00	Ha 841,00	Ha	100,00 l/dtk	2019	Beroperasi
6	Manikin		2019	Kuaklalo	Taebenu	Kupang	28.200.000,00	M3	20.450.000,00	M3	169,45	M3/dtk	310,00	Ha 310,00	Ha	700,00 l/dtk	On Going	
7	Tilong		1998-2001	Oelnasi	Kupang Tengah	kupang	16.940.000,00	M3	16.970.000,00	M3	100,00	M3/dtk	1.484,00	Ha 1.484,00	Ha	150,00 l/dtk	2001	Beroperasi
8	Ceitua	1997	2018	Ceitua	Taebenu	Kupang	95.650,00	M3	79.576,00	M3	-	-	-	- -	-	5,00 l/dtk	1997	Beroperasi
9	Temef		2018-2024	Oenino/konbaki	Oenino&Polen	TTS	45.785.000,00	M3	45.785.000,00	M3	230,00	M3/dtk	4.500,00	Ha 4.500,00	Ha	130,00 l/dtk	On Going	
10	Benkoko	1996	2018	Letmafo	Insana	TTU	361.537,00	M3	243.950,00	M3			75,00	ha 70,00	ha	5,00 l/dtk	1996	Beroperasi
11	Rotiklot		2015-2018	Fatuketi	Kakuluk Mesak	Belu	3.300.000,00	M3	2.330.000,00	M3	500,00	M3/dtk	500,00	Ha 139,00	Ha	40,00 l/dtk	2019	Beroperasi
12	Haekrit	2007-2009	2018	Manleten	Tasifeto Timur	Belu	2.270.000,00	M3	2.100.000,00	M3	-	-	300,00	Ha 277,00	Ha	30,00 l/dtk	2009	Beroperasi
13	Haliwen	2007-2009	2018	Umaklaran	Tasifeto Timur	Belu	2.780.000,00	M3	1.430.000,00	M3	-	-	259,00	Ha 259,00	Ha	10,00 l/dtk	2009	Beroperasi
14	Lere	1994	2018	Lobocaju	Sabu Tengah	Sabu Raijua											Tidak	Beroperasi
15	Padang Panjang	1997	2018	Padang panjang	Alor Timur	Alor	334.099,00	M3	249.984,00	M3	-	-	200,00	Ha 200,00	Ha	- l/dtk	1997	Beroperasi
16	Napungete		2016-2021	Ilin Medo/Werang	Waiblama	Sikka	14.340.000,00	M3	11.220.000,00	M3	58,59	M3/dtk	300,00	Ha 300,00	Ha	214,00 l/dtk	2022	Beroperasi
17	Waerita	1991	2018	Waebleler	Waegete	Sikka	1.278.264,00	M3	1.252.699,00	M3			174,00	Ha 174,00	Ha	5,00 l/dtk	2019	Beroperasi
18	Mbay/Lambo		2018-2024	Oenino/konbaki	Oenino&Polen	TTS	45.785.000,00	M3	45.785.000,00	M3	230,00	M3/dtk	4.500,00	Ha 4.500,00	Ha	130,00 l/dtk	On Going	
19	Lokojange	1995	2018	Umbu Pabal Selatan	Umbu Ratu Nggay Barat	Sumba Tengah	538.000,00	M3	406.000,00	M3	-	-	1.000,00	Ha 420,00	Ha	5,00 l/dtk	1995	Beroperasi
20	Karinga	1991	2018	Palanggai	Pahungalodu	Sumba Timur	276.000,00	M3	276.000,00	M3	-	-	70,00	Ha 70,00	Ha	5,00 l/dtk	1991	Beroperasi
21	Rakawatu	1992	2018	Kondamara	Iewa	Sumba Timur											Tidak	Beroperasi

Sumber: Dirjen SDA, Kementerian PUPR, 2025

Neraca air adalah keseimbangan antara kebutuhan air dan jumlah air yang tersedia. Dengan memahami neraca air pada suatu wilayah sungai, maka dapat diidentifikasi seberapa kritis kondisi kekurangan air yang dapat terjadi atau seberapa rawan terhadap ancaman kekeringan pada wilayah sungai yang bersangkutan. Berikut ini adalah neraca air pada 15 sungai yang

berada pada wilayah Provinsi NTT dimana berdasarkan hasil analisis, terdapat 2 sungai dengan kategori Tidak Kritis, 6 Sungai dengan kategori Kritis ringan, 5 Sungai dengan kategori kritis Sedang dan 2 sungai dengan kategori kritis berat.

Tabel 2.7.
Neraca Air pada wilayah Sungai di Provinsi NTT Tahun 2016

No	Nama Neraca Air	Ketersediaan Air Total (m3/det)	Kebutuhan Air Total (m3/det)	Neraca Air Permukaan (Surplus, Defisit)	Indeks Pemakaian Air (%)	Klasifikasi Indeks Pemakaian Air (%)
1.	WD Golo Ketak Nangalili	30,4	30,57	-0,17	100,55	Kritis Berat
2.	WD Pocong Sangan Kalo	67,51	31,09	36,43	46,05	Kritis Ringan
3.	WD Sumba Barat	43,38	18,41	24,97	42,45	Kritis Ringan
4.	WD Sumba Timur	57,12	29,3	27,82	51,29	Kritis Sedang
5.	WD Aesesa	41,53	26,16	15,37	63,00	Kritis Sedang
6.	WD Alor	19	5	14	26,33	Kritis Ringan
7.	WD Flotim	6,96	1,69	5,27	24,32	Tidak Kritis
8.	WD Lembata	10,04	3,15	6,89	31,39	Kritis Ringan
9.	WD Nebe Waiwajo	24,22	10	14,22	41,29	Kritis Ringan
10	WD Rotendao	3,87	3,14	0,73	81,18	Kritis Sedang
11.	WD Sabu Raijua	5,7	1,08	4,63	18,89	Tidak Kritis
12.	WD Bima	12,35	29,84	-17,5	241,72	Kritis Berat
13.	WD Benanain A	16,53	6,51	10,02	39,38	Kritis Ringan
14.	WD Benanain B	40,08	16,46	23,62	41,08	Kritis Ringan
15.	WD Kupang	71,76	28,21	43,56	39,31	Kritis Ringan

Sumber: https://sigi.pu.go.id/, Kementerian PUPR 2023

Penyelenggaran Sistem Penyedia Air Minum (SPAM) bisa dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), UPT, UPTD, Kelompok Masyarakat dan Badan Usaha. Di Provinsi NTT penyelenggaraan SPAM dilakukan oleh BUMD Air Minum dengan cakupan layanan sejak Tahun 2012 hingga Tahun 2021 cenderung berfluktuatif. Pada Tahun 2012, cakupan layanan BUMD Air Minum di Provinsi NTT mencapai 21,32 persen yang meningkat menjadi 42,84 persen pada Tahun 2015 dan 2016 dan turun menjadi 26,68 persen pada Tahun 2021.

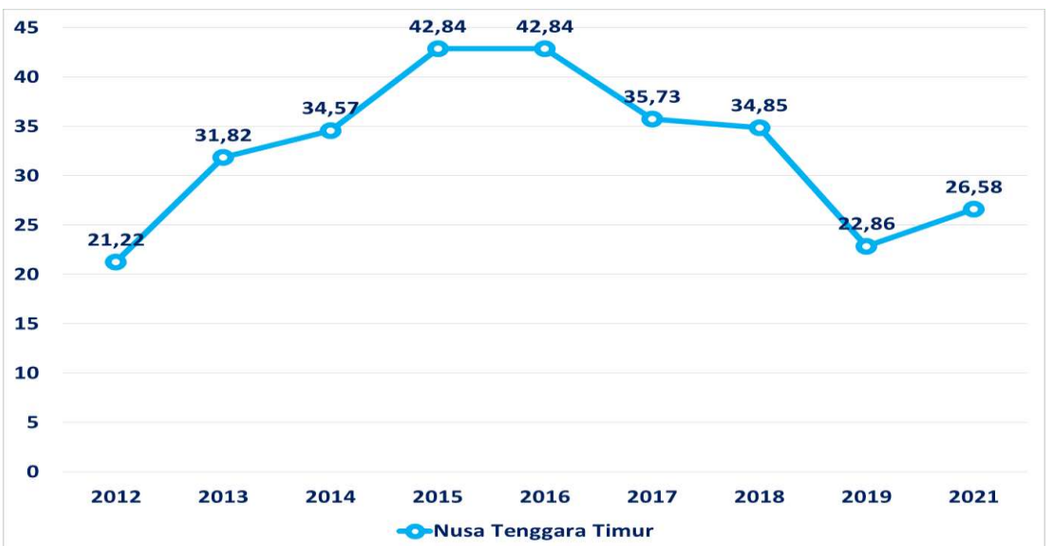

Sumber: Kinerja BUMD Air Minum, Kementeriaan PUPR

Gambar 2.16.
Persentase Penduduk Yang Terlayani BUMD Air Minum
Provinsi NTT Tahun 2012-2021

Demikian juga dengan hasil penilaian atas kinerja BUMD Air minum Provinsi NTT yang dilakukan secara rutin oleh Direktorat Air Minum Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR diperoleh informasi bahwa pada Tahun 2021 terdapat 38,46 persen BUMD dengan kategori sehat, 46,15 persen BUMD Penyedia Air Minum dengan kategori kinerja kurang sehat serta sebanyak 15,38 persen BUMD Air Minum dengan kategori sakit. Rincian selengkapnya tentang Kinerja BUMD Air Minum di Provinsi NTT selengkapnya, dapat dilihat pada gambar berikut ini.

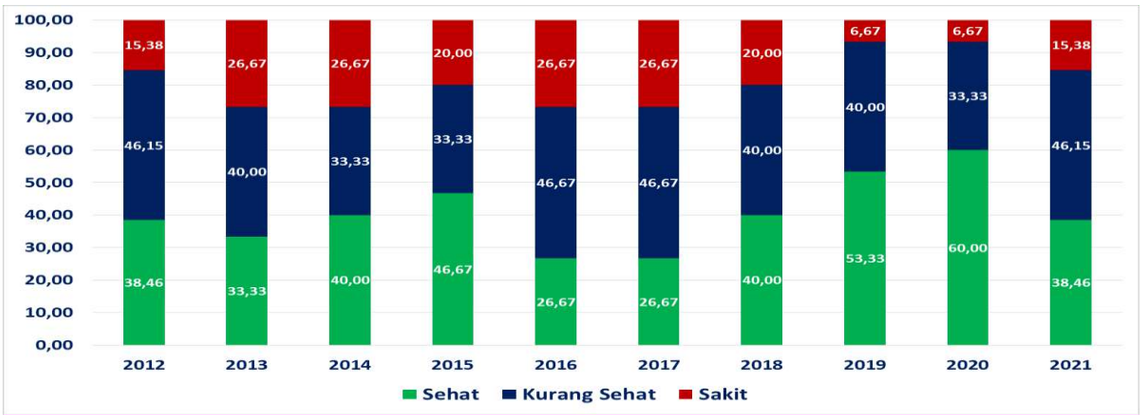

Sumber: Kinerja BUMD Air Minum, Kementeriaan PUPR

Gambar 2.17.
Kinerja BUMD Air Minum Provinsi NTT Tahun 2012-2021

2.1.2. Demografi

2.1.2.1. Laju Pertumbuhan Penduduk

Proyeksi Laju pertumbuhan penduduk NTT Tahun sejak Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2022 cenderung menurun. Pada Tahun 2011 diproyeksikan laju pertumbuhan penduduk NTT sebesar 1,75% yang terus menurun hingga Tahun 2022 sebesar 1,50%. Rincian selengkapnya, dapat dilihat pada gambar berikut ini.

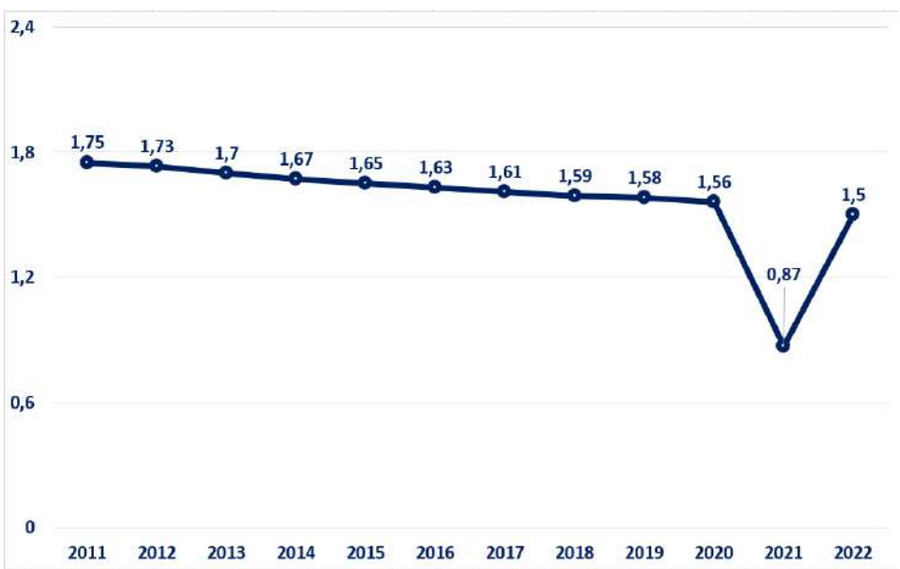

Sumber BPS NTT Tahun 2023

Gambar 2.18.
Laju pertumbuhan penduduk Nusa Tenggara Timur

2.1.2.2. Komposisi Penduduk

Komposisi penduduk Provinsi NTT Tahun 2024 berdasarkan kelompok umur didominasi oleh penduduk dengan rentang usia 0-4 tahun diikuti oleh 5-9 tahun dan terus berkurang sampai kategori usia 75 tahun keatas. Sedangkan untuk komposisi penduduk Provinsi NTT Tahun 2024 berdasarkan jenis kelamin didominasi oleh penduduk jenis kelamin laki-laki.

Gambar 2.19.
Komposisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Provinsi NTT Tahun 2024

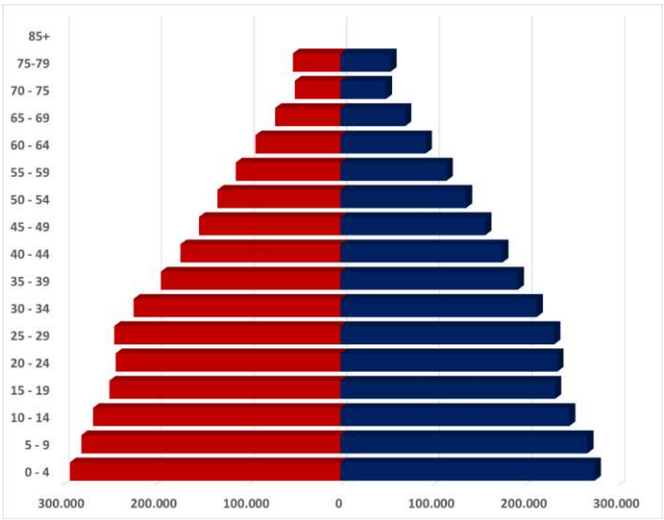

Sumber : BPS NTT 2024

2.1.2.3. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk Provinsi NTT dalam kurun waktu 20 tahun terakhir cenderung meningkat. Pada Tahun 2002 kepadatan penduduk Provinsi NTT senilai 78 jiwa/km^2 yang mengalami peningkatan sampai Tahun 2010 menjadi 98 jiwa/km^2 dan terus meningkat hingga Tahun 2024 senilai 122 jiwa/km^2. Kepadatan Provinsi NTT sejak Tahun 2002 sampai dengan Tahun 2024 masih berada dibawah kepadatan penduduk secara nasional.

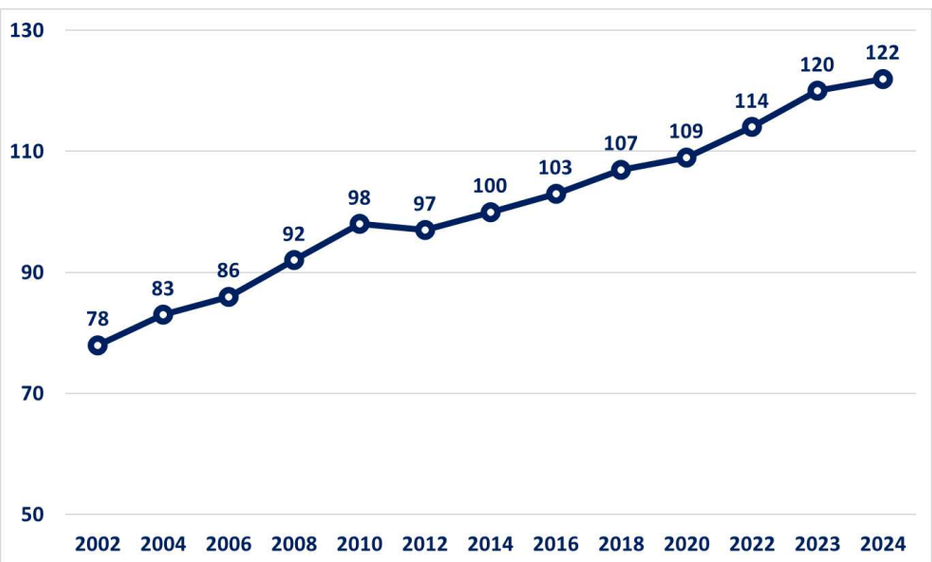

Sumber BPS NTT 2024

Gambar 2.20.

2.1.2.4. Keberadaan Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang dalam bentuknya sebagai persekutuan hukum, terikat dalam kesatuan nilai dan hidup bersama pada wilayah geografis tertentu, memiliki ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, serta memiliki pranata adat dan pemerintahan adat sedangkan wilayah adat adalah satu kesatuan geografis dan social berupa tanah, air dan/atau perairan beserta sumber daya alam yang ada diatasnya dengan batas-batas tertentu yang secara turun temurun dan berkelanjutan dikuasai, dihuni, dikelola dan atau dimanfaatkan oleh masyarakat hukum adat sebagai penyangga sumber-sumber penghidupan yang diwarisi dari leluhurnya atau melalui kesepakatan dengan masyarakat hukum adat lainnya.

Table 2.8.
Jumlah Wilayah Adat pada BRWA dengan status Teregistrasi, Terverifikasi dan Tersertifikasi Berdasarkan Kabupaten/ Kota di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur kondisi sampai dengan Tahun 2023

No.	Nama Kabupaten/ Kota	Jumlah Wilayah Adat pada BRWA dengan status: Teregistrasi	Jumlah Wilayah Adat pada BRWA dengan status: Terverifikasi	Jumlah Wilayah Adat pada BRWA dengan status: Tersertifikasi	Status Pengakuan
1.	Alor	3	-	-	1
2.	Ende	1	5	-	6
3.	Flores Timur	1	-	-	-
4.	Manggarai	2	-	-	2
5.	Manggarai Barat	1	-	-	1
6.	Manggarai Timur	4	6	5	15
7.	Sikka	11	-	-	6
	Total	23	11	5	31

Sumber: Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) 2023

Di wilayah Provinsi Nusa Tenggatra Timur sampai dengan Tahun 2023, terdapat 39 masyarakat hukum adat dengan status teregistrasi pada BRWA sejumlah 23 masyarakat hukum adat, status terverifikasi sejumlah 11 masyarakat hukum adat, serta dengan status terteverifikasi sejumlah 5 masyarakat hukum adat yang berada pada 7 kabupaten. Dari ke 39 masyarakat hukum adat tersebut, terdapat 31 masyarakat hukum adat yang terlah memperoleh pengakuan, dan 8 lainnya belum memperoleh pengakuan. Rincian selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

2.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Selama periode 2020-2024, pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) secara umum mengalami kenaikan. Capaian pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2020 sebesar -0,84 persen terus mengalami peningkatan, dan mengalami penurunan sedikit apda tahun 2023 sebesar 2,08 % yang kemudian meningkat perlahan menjadi 3,73 persen pada Tahun 2024.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2020 mengalami konstraksi ke level -0,84 %, sangat menurun jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2018 sebesar 5,11 % dan di tahun 2019 5,24 %. Pertumbuhan ekonomi NTT tahun 2020 yang mengalami konstraksi tersebut masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi nasional yang juga mengalami konstraksi hingga -2,07 %. Tingginya tingkat konstraksi pertumbuhan ekonomi tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi pandemi covid 19. Pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan ke level 2,52% dan terus menigkat di tahun 2022 yaitu menjadi 3,45% dan mengalami perlambatan pada tahun 2023 menjadi 2,08% mengalami peningkatan pada tahun 2024 sebesar 3,73. Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT mengalami peningkatan signifikan hingga mencapai 3,73% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 2,08% pada tahun 2023. Kenaikan ini menunjukkan pemulihan ekonomi yang lebih stabil pascapandemi COVID-19, dengan kontribusi sektor pertanian dan pariwisata sebagai pendorong utama pertumbuhan.

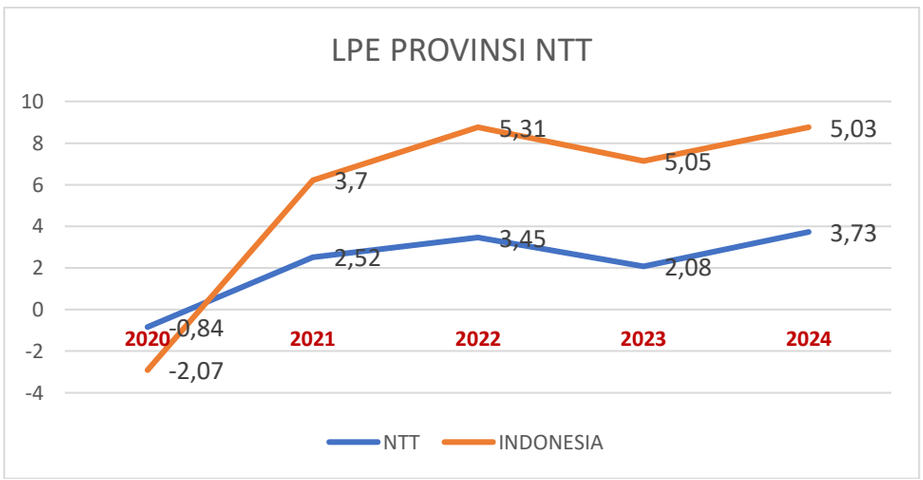

Sumber: BPS Provinsi NTT, 2025 (diolah)

Gambar 2.21.
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTT Tahun 2020-2024

2.2.1.2. Ketimpangan

Secara umum, sejak Maret 2017, angka Gini Ratio cenderung mengalami penurunan sampai dengan Maret 2018. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama periode tersebut terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran rumah tangga di Provinsi NTT. Meskipun sempat mengalami peningkatan yang cukup tajam pada September 2018, angka Gini Ratio berhasil menurun kembali pada Maret 2019 hingga Maret 2020. Namun demikian, pada masa pandemi Covid-19, angka Gini Ratio mengalami kenaikan pada September 2020. Setelah kembali mengalami penurunan pada Maret 2021 hingga Maret 2022, angka Gini Ratio meningkat lagi pada September 2022. Namun, pada periode selanjutnya, angka Gini Ratio kembali mengalami penurunan menjadi 0,325 pada Maret 2023 dan 0,316 pada Maret 2024 (Gambar 1). Jika dilihat berdasarkan daerah, Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2024 adalah sebesar 0,281. Hal ini menunjukkan terjadi penurunan sebesar 0,018 poin dibanding kondisi Maret 2023 yang sebesar 0,299. Sementara itu, Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2024 tercatat sebesar 0,305, terjadi penurunan dari kondisi Maret 2023 sebesar 0,002 poin.

Sumber: BRS No.42/07/53, 1 Juli 2024

Gambar 2.22.
Gini Ratio Provinsi NTT Tahun 2017-2024

Ketimpangan pembangunan antar wilayah dapat diukur dengan indeks Williamson menggunakan PDRB per kapita sebagai data dasar. Alasannya jelas karena yang diperbandingkan adalah tingkat pembangunan antar wilayah dan bukan tingkat distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat. Perkembangan nilai indeks Williamson Provinsi NTT sejak tahun 2011 sampai dengan 2019 cenderung meningkat dan pada periode 2019 sampai dengan 2022 mengalami Penurunan sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Sumber: BPS Provinsi NTT, 2023 (diolah)

Gambar 2.23.
Indeks Williamson Provinsi NTT Tahun 2009-2022

2.2.1.3. Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani (NTP) yang diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib) (dalam persentase) merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di pedesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (*terms of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP secara relative semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani. Jika NTP lebih besar dari 100 maka dapat diartikan kemampuan daya beli petani

periode tersebut relative lebih baik dibandingkan dengan periode tahun dasar, sebaliknya jika NTP lebih kecil atau dibawah 100 berarti terjadi penurunan daya beli petani.

NTP Provinsi NTT sejak Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2022 cenderung bergerak secara fluktuasi. Pada Tahun 2008 nilai NTP Provinsi NTT senilai 96,03 yang naik pada 2019 menjadi 106,14 dan turun secara signifikan menjadi 95,98. Secara umum dapat disimpulkan bahwa apabila nilai NTP <100 maka indeks harga yang diterima oleh petani lebih kecil dari pada indeks harga yang dibayar oleh petani sehingga petani mengalami penurunan daya beli atau dengan kata lain terjadi penurunan tingkat kesejahteraan petani. Rincian perkembangan NTP Provinsi NTT selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Sumber: BPS Provinsi NTT, 2023 (diolah)

Gambar 2.24.
Nilai Tukar Petani Provinsi NTT Tahun 2008-2022

2.2.1.4. Angka Kemiskinan

Dalam mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Konsep ini mengacu pada *hand book on poverty and inequality* yang diterbitkan oleh *world bank*. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Secara kumulatif, perkembangan penurunan persentase kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam kurun waktu 2005 sampai dengan 2023 yaitu sebesar 8,23% dari tahun *baseline* 2005 sebesar 28,19% menjadi 19,96% pada bulan Maret 2023 atau masih berada diatas capaian kumulatif penurunan kemiskinan nasional yaitu sebesar 6,61% pada periode yang sama. Rincian penurunan persentase kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nasional selengkapnya, dapat dilihat pada Gambar dibawah ini.

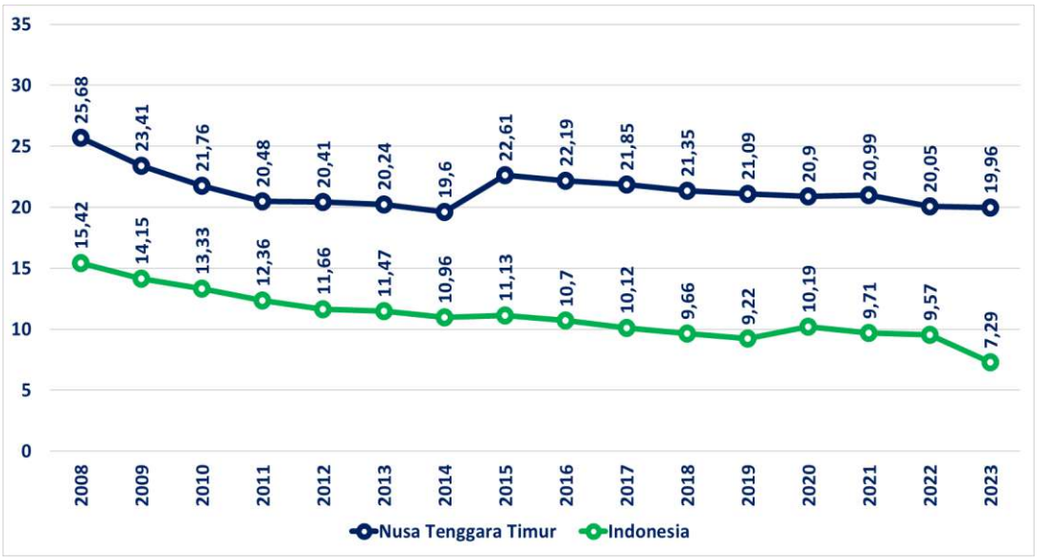

Sumber: BPS Provinsi NTT, 2023 (diolah)

Gambar 2.25.
Persentase Penduduk Miskin Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2023

2.2.1.5. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Nusa Tenggara Timur sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2023 cenderung mengalami penurunan. Pada Tahun 2008 TPT Provinsi NTT senilai 3,37 persen dan menurun menjadi 3,14 persen pada Tahun 2023 dan masih berada jauh dibawah TPT nasional untuk periode yang sama, yaitu senilai 5,79%.

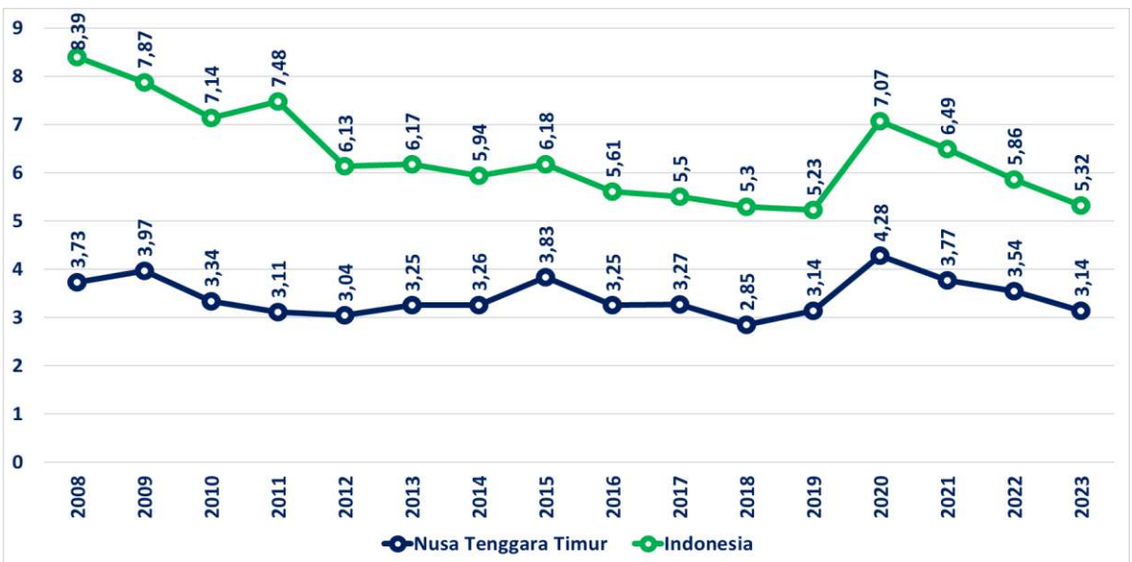

Sumber: BPS Provinsi NTT, 2023 (diolah)

Gambar 2.26.
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi NTT Tahun 2005-2023

2.2.1.6. Indeks Pembangunan Manusia

IPM Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami peningkatan sejak Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2022. Jika diamati secara kumulatif, IPM Provinsi Nusa Tenggara Timur meningkat sebesar 6,69 Poin atau 59,21 pada Tahun 2010 yang menjadi 66,68 di Tahun 2023. Peningkatan kumulatif ini masih berada diatas nasional untuk periode yang sama, yaitu sebesar 6,38 poin dari tahun 2020 senilai 66,53 menjadi 74,39 pada Tahun 2023. Rincian pertumbuhan IPM Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nasional selama periode 2010 sampai dengan 2023, dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Sumber: BPS Provinsi NTT, 2023 (diolah)

Gambar 2.27.
Perkembangan IPM Provinsi NTT Tahun 2010-2023

2.1.7. Mata Pencaharian Penduduk

Rata-rata mata pencaharian utama di Provinsi NTT menyumbang sebesar 40 persen pendapatan rumah tangga. Mata pencaharian di wilayah Flores lebih beragam apabila dibandingkan dengan di wilayah Timor dan Sumba yang kemungkinan disebabkan karena akses, ketersediaan infrastruktur dan kondisi tanah serta iklim yang lebih baik sehingga memberikan peluang yang lebih baik bagi perkembangan berbagai mata pencaharian.

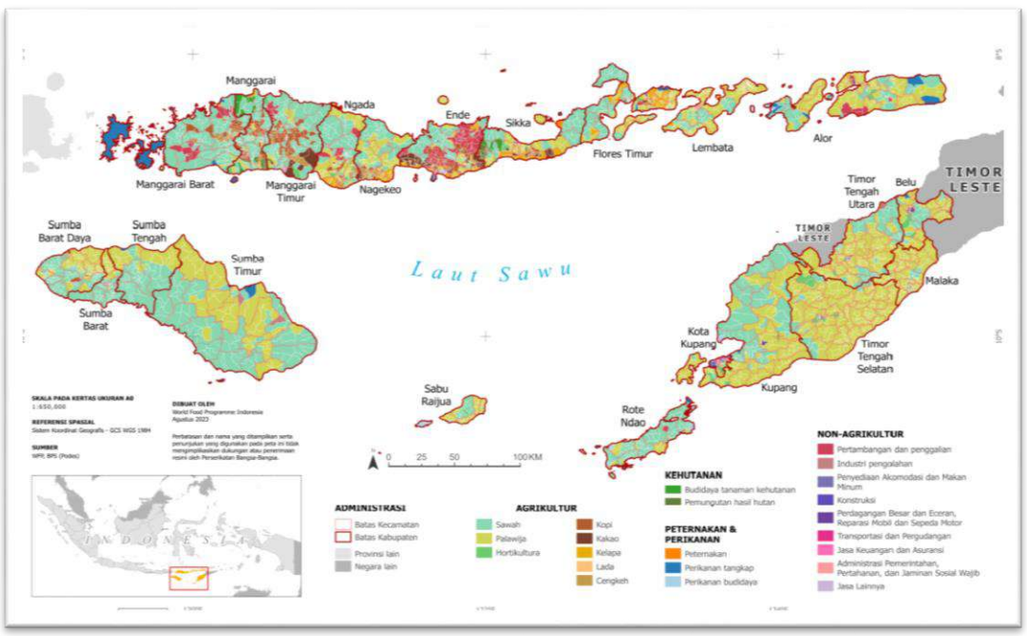

Sumber: WFP Indonesia,2024

Gambar 2.28.
Mata Pencaharian Penduduk Provinsi NTT Tahun 2023

Pulau Sumba dan Pulau Timor mempunyai sensitivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan Pulau Flores, dimana terlihat sebagian besar Pulau Sumba dan Pulau Timor didominasi oleh warna orange. Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik unik dari masing-masing kelompok pulau di NTT (yaitu

Pulau Flores, Sumba, dan Timor) berdampak pada sensitivitas mata pencaharian. Sensitivitas sektor pertanian di NTT lebih tinggi dibandingkan non-pertanian dengan mata pencaharian pada pertanian musiman dan perikanan menjadi kategori mata pencaharian paling sensitif. Kondisi ini dianggap wajar karena sektor pertanian pada umumnya rentan terhadap bencana, variabilitas cuaca, dan iklim. Sedangkan mata pencaharian Non-pertanian walaupun sensitivitasnya lebih rendah dibandingkan mata pencaharian lain, namun secara keseluruhan sensitivitasnya masih tinggi. Kemudian, kelompok masyarakat yang memiliki lebih banyak alternatif mata pencaharian juga lebih sensitif. Sehingga baik pertanian maupun non pertanian dan yang memiliki alternatif mata pencaharian pun tetap memiliki sensivitas terhadap perubahan iklim.

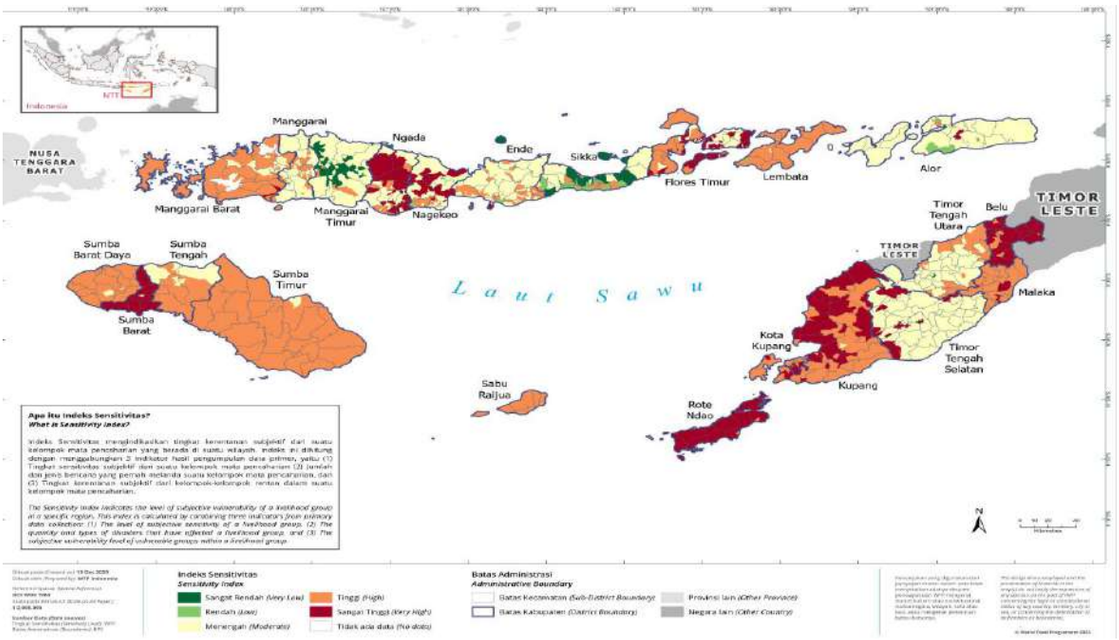

Sumber: WFP Indonesia,2024

Gambar 2.29.
Mata Pencaharian Penduduk Provinsi NTT Tahun 2023

2.2.2. Kesejahteraan Sosial Budaya

2.2.2.1. Indeks Kualitas Keluarga

Mengukur ketahanan dan kualitas keluarga digunakan indikator-indikator kualitas keluaraga mencakup kecukupan akses terhadap ekonomi, pendidikan, kesehatan, aspek legalitas, serta relasi setara gender, hingga ketahanan terhadap rasa peduli dan keeratan sosial. Pekembangan nilai Indeks Kualitas Keluarga Provinsi NTT sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 mengalami pertumbuhan yang positif walaupun masih berada dibawah capaian nasional untuk periode yang sama. Rincian selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

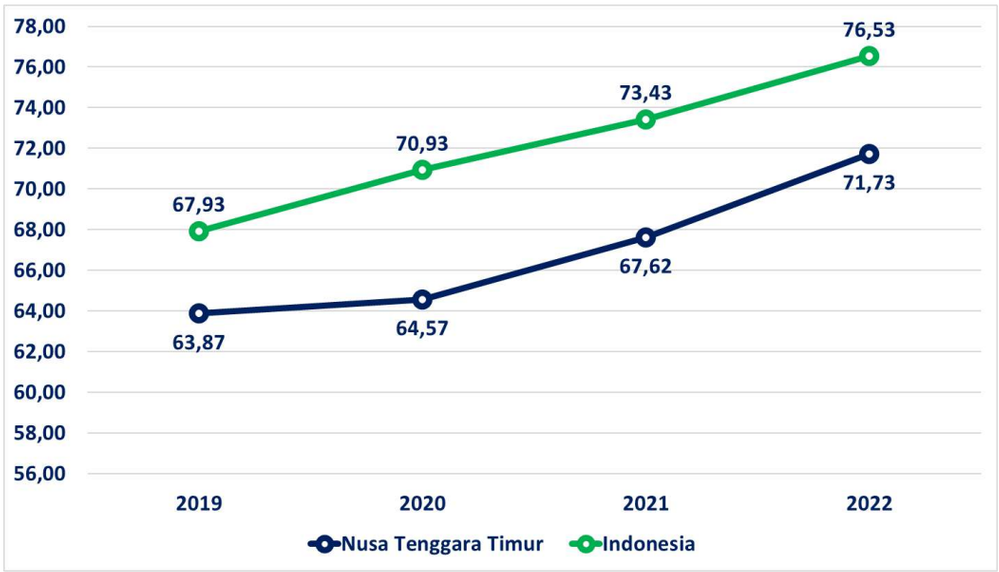

Sumber: BPS dan KemenPPA, 2023

Gambar 2.30.
Indeks Kualitas Keluarga Provinsi NTT Tahun 2019-2022

Secara umum, komponen pembantuk Indeks Kualitas Keluarga Provinsi NTT tahun 2020 dan 2021 cenderung membaik. Komponen yang mengalami peningkatan cukup tinggi yaitu komponen Ketahanan Fisik dan komponen Kualitas Kehatanan Sosial Budaya sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut ini.

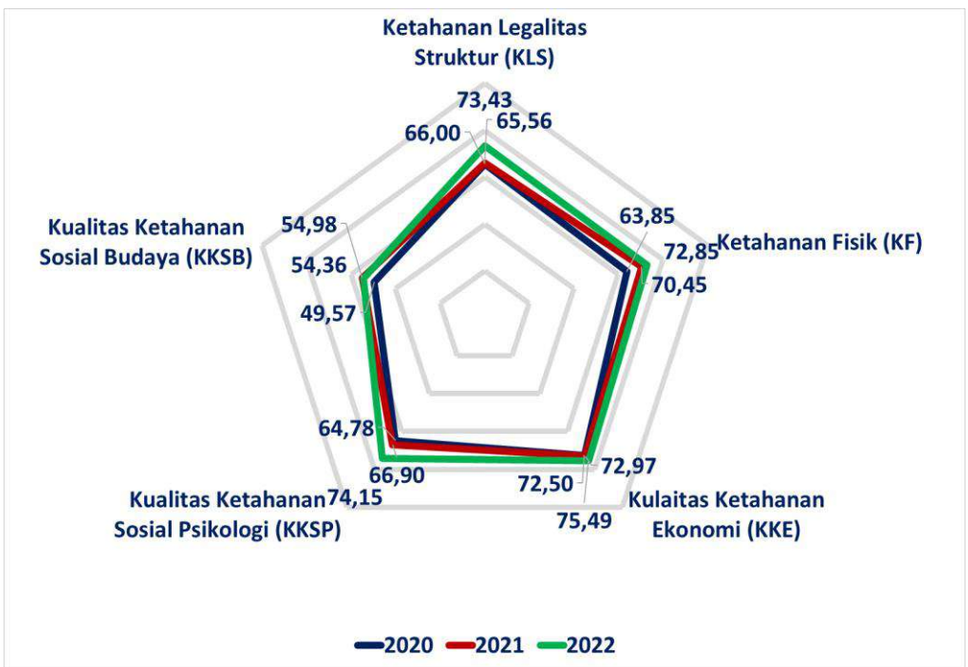

Sumber: BPS dan KemenPPA, 2023

Gambar 2.31.
Komponen Indeks Kualitas Keluarga Provinsi NTT Tahun 2021 dan 2022

2.2.2.2. Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak (IPA) adalah ukuran baku untuk menghitung capaian pembangunan perlindungan anak di Indonesia yang meliputi Hak Sipili dan Kebebasan, Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Pendidikan, Pemanfaatan Waktu luang dan Kegiatan Budaya, dan Perlindungan Khusus. Dalam 3 Tahun terakhir

nilai IPA Provinsi NTT terjadi penurunan. Pada Tahun 2019 nilai IPA Provinsi NTT senilai 51,15 yang turun menjadi 48,12 pada Tahun 2021 dan kemudian naik menjadi 50,87 pada Tahun 2022. Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) menunjukan tingkat realisasi pemenuhan hak anak yang meliputi hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. Pada Tahun 2019 nilai IPHA Provinsi NTT senilai 49,26 yang meningkat menjadi 50,14 pada Tahun 2020 dan terus meningkat menjadi 52,03 pada Tahun 2022.

Indeks Pemenuhan Hak Khusus Anak (IPKA) merupakan indikator yang menggambarkan kondisi anak yang membutuhkan perlindungan khusus, seperti anak penyandan disabilitas, pekerja anak, dan anak terlantar. Nilai IPKA Provinsi NTT juga mengalami penurunan dalam 3 tahun terakhir, dimana pada Tahun 2019 nilai IPKA Provinsi NTT yaitu 57,84 yang turun menjadi 44,90 pada Tahun 2020 dan turun menjadi 48,23 pada Tahun 2022.

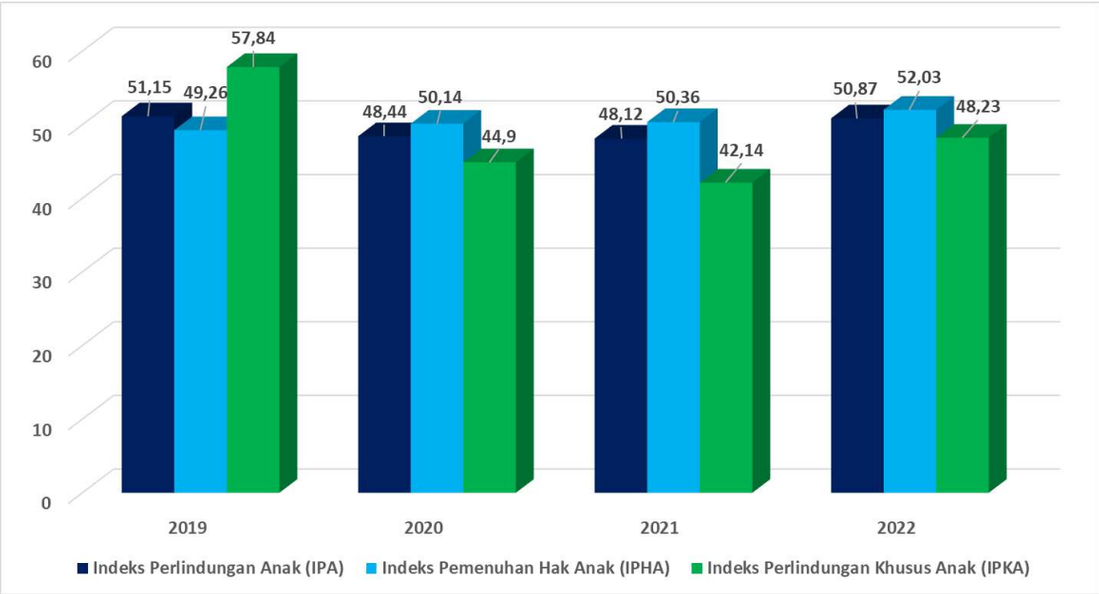

Sumber: Indeks Perlindungan Anak Indonesia 2022, KemenPPPA & BPS 2022

Gambar 2.32.
Indeks Perlindungan Anak (IPA), Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Provinsi NTT Tahun 2019-2022

2.2.2.3. Indeks Pembangunan Gender

Kesetaraan gender dalam pembangunan manusia adalah terpenuhinya hak dasar yang setara bagi laki-laki maupun Perempuan. Hak dasar yang dimaksud di antaranya terpenuhinya pendidikan, kesehatan, sandang, pangan, papan dan lingkungan sosial yang layak. Dengan hak dasar yang setara ini, laki-laki dan Perempuan memiliki hak yang sama dalam meningkatkan kapabilitasnya dalam menciptakan pembangunan sosial ekonomi suatu negara.

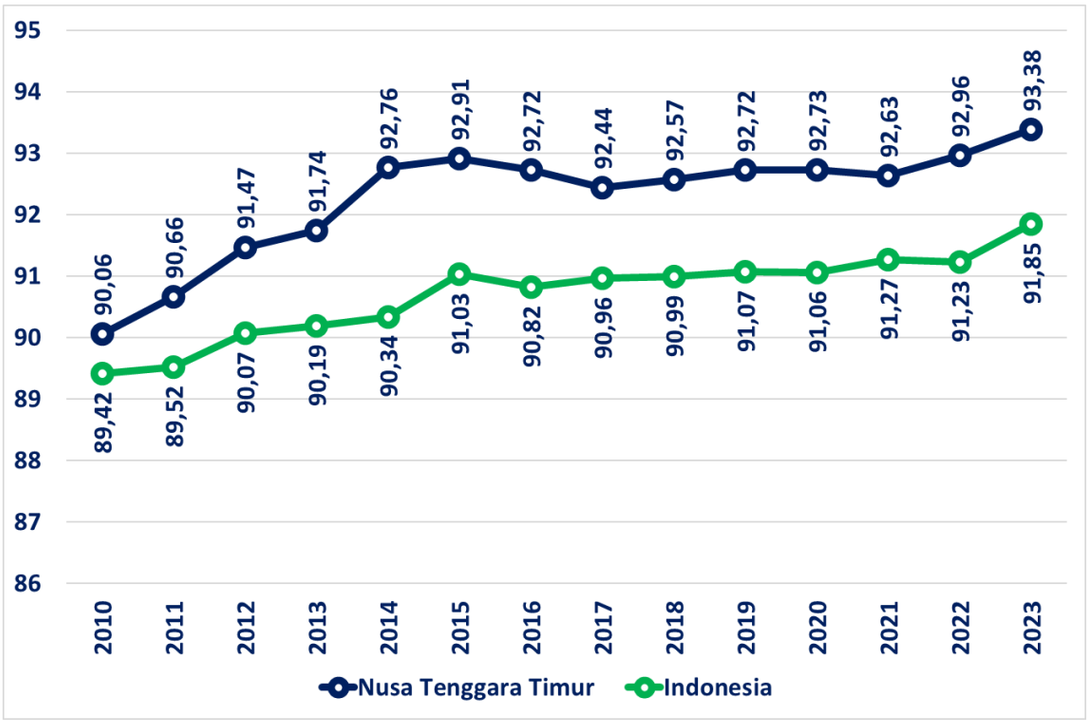

Sumber: BPS NTT, 2024

Gambar 2.33.
Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2023

Capaian IPD Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami peningkatan selama pada periode 2010-2023. Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa di awal periode (2010) IPD NTT sebesar 90,06 poin dan mengalami kenaikan secara bertahap mencapai 92,91 poin pada 2015. Perkembangan IPD NTT mengalami stagnansi pada 2015-2022 dimana IPD bergerak di kisaran 92 poin dengan kondisi terakhir 93,38 poin pada 2023. Dibandingkan dengan capaian nasional, perkembangan IPD NTT berada di atas capaian nasional. Capaian IPD nasional pada 2010 sebesar 89,42 dan secara bertahap naik menjadi 91,85 poin pada 2023. Hal ini mengindikasikan kondisi pembangunan gender di NTT sedikit lebih baik dibandingkan dengan kondisi secara nasional.

2.2.2.4. Indeks Pemberdayaan Gender

Selain Indeks Pembangunan Gender (IPG), UNDP juga memperkenalkan ukuran komposit lainnya yang juga terkait dengan gender, yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IDG merupakan indikator kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam hal peranan aktif dan *power* dari sisi politik, ekonomi, pendapatan dan pengambilan Keputusan. Peran gender dari sisi politik dan pengambilan Keputusan dilakukan proksi dengan keterlibatan perempuan di parlemen. Selanjutnya keterlibatan perempuan sebagai tenaga professional merupakan pendekatan dari sisi ekonomi sementara sisi pendapatan dilakukan pendekatan dengan kontribusi pendapatan yang dihasilkan perempuan.

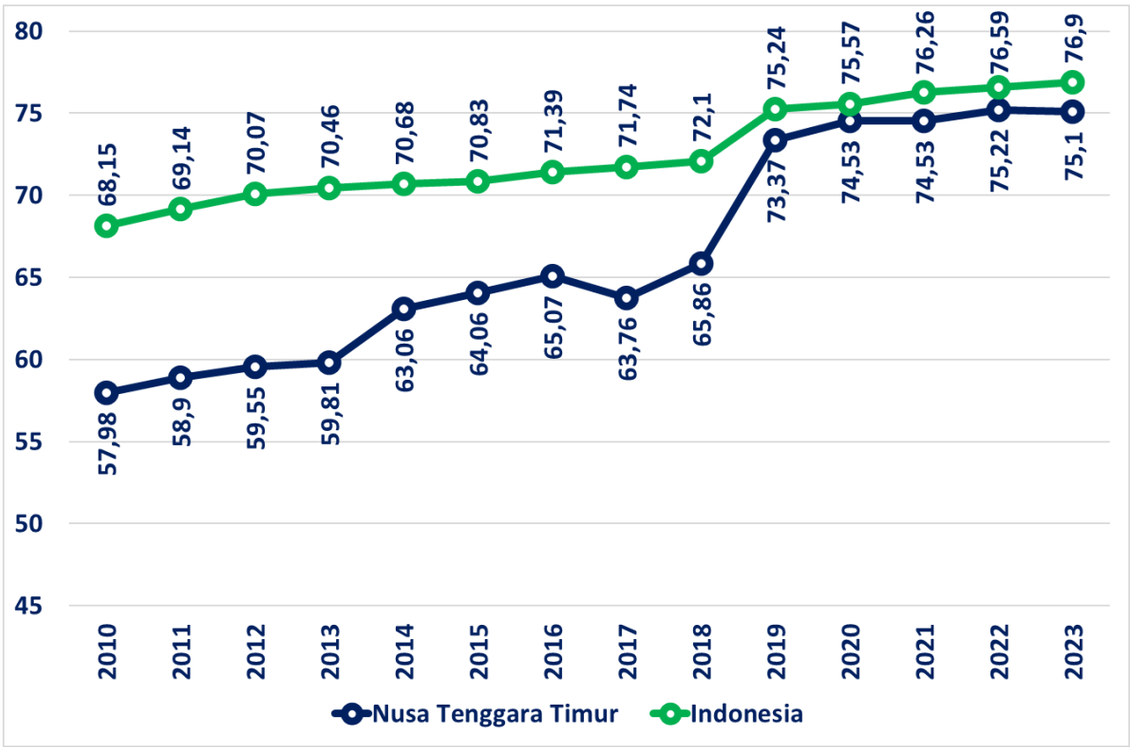

Sumber: BPS NTT, 2024

Gambar 2.34.
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2023

Berdasarkan gambar diatas terlihat bahwa di awal periode (2010) capaian IDG Provinsi NTT sebesar 57,98 poin, sementara di tingkat nasional sebesar 68,15 poin. IDG NTT terus mengalami peningkatan yang signifikan hingga mencapai 73,37 poin pada 2019, sedikit di bawah capaian nasional sebesar 75,24 poin di di tahun yang sama. Selanjutnya perkembangan IDG NTT maupun nasional mengalami peningkatan secara stagnan dengan kondisi di akhir periode (2023) masing-masing sebesar 76,9 poin dan 75,1 poin.

2.2.2.5. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks ketimpangan gender menggambarkan kerugian/kegagalan (loss) dari pencapaian pembangunan manusia akibat adanya ketidaksetaraan gender yang diukur dari aspek kesehatan, pemberdayaan, serta akses dalam pasar tenaga kerja. Ketimpangan gender Provinsi NTT sejak tahun 2018 hingga 2022 secara konsisten menurun. Sejak tahun 2018, IKG berkurang sebesar 0,075 poin, rata-rata turun 0,019 poin per tahun. Hal ini mengidikasikan ketimpangan gender yang semakin mengecil atau kesetaraan yang semakin membaik.

Ketimpangan gender Provinsi NTT sejak tahun 2018 hingga 2023 secara konsisten menurun. Pada tahun 2023, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 0,428, turun sebanyak 0,008 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 0,436. Penurunan sebesar 0,008 poin tahun ini lebih kecil dibandingkan penurunan IKG pada tahun 2021 yaitu sebesar 0,034 poin. Selain itu, penurunan IKG pada tahun 2023 ini melanjutkan perbaikan yang telah dicapai sejak tahun 2018, selama lima tahun terakhir IKG Provinsi Nusa Tenggara Timur secara konsisten mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender di Provinsi Nusa Tenggara Timur terus mengalami peningkatan. Sejak tahun 2018, IKG Provinsi Nusa Tenggara Timur

mengalami penurunan rata-rata per tahun sebesar 0,017 poin per tahun sehingga totalnya mencapai 0,083 poin selama enam tahun terkahir.

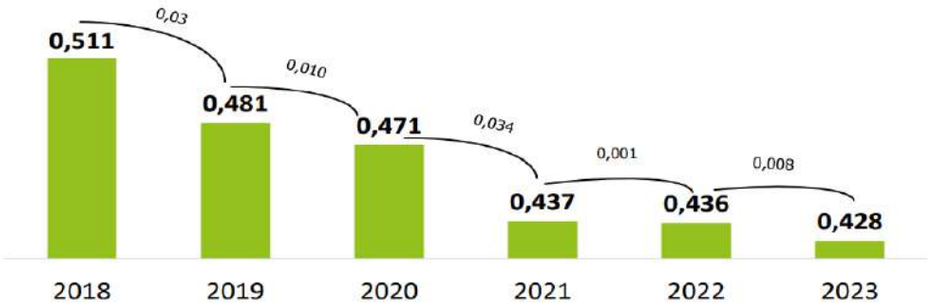

Sumber: BPS NTT, 2024

Gambar 2.35.
Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023

2.2.2.6. Indeks Pembangunan Pemuda

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah sebuah instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pemuda di Indonesia. IPP terdiri dari komponen pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, gender dan diskriminasi. Indeks Pembangunan Olahraga mengalami fluktuasi yang mencerminkan dinamika dalam perkembangan sektor olahraga nasional. Tercatat, indeks tersebut mengalami penurunan sebesar 0,04 poin pada periode 2021–2022, disusul peningkatan yang sangat tipis sebesar 0,003 poin pada 2022–2023, dan kembali mengalami penurunan sebesar 0,012 poin pada periode 2023–2024. Penurunan indeks ini sebagian besar disumbang oleh penurunan pada beberapa dimensi kunci, yakni dimensi Sumber Daya Manusia (SDM) olahraga, yang mencakup pelatih, guru pendidikan jasmani, instruktur, dan relawan olahraga sebagai elemen penting dalam sistem pembinaan dan pengembangan olahraga. Selain itu, penurunan juga terjadi pada dimensi ruang terbuka olahraga, yang merujuk pada ketersediaan fasilitas pendukung aktivitas fisik, serta dimensi literasi fisik yang mencerminkan tingkat pengetahuan, keterampilan, keterlibatan, dan tanggung jawab individu dalam beraktivitas fisik. Dimensi kebugaran, yang menunjukkan kemampuan fisik individu untuk melakukan aktivitas tanpa kelelahan yang berarti, serta dimensi performa, yang mengukur capaian atlet termasuk penyandang disabilitas, juga menunjukkan tren penurunan.

Namun demikian, terdapat pula dimensi-dimensi yang mengalami peningkatan selama periode yang sama. Dimensi partisipasi mencatatkan kenaikan sebesar 0,018 poin, yang menunjukkan peningkatan keterlibatan individu dalam aktivitas olahraga fisik, khususnya dalam kurun waktu satu minggu terakhir sebelum pengukuran. Peningkatan ini turut didukung oleh tren positif pada aspek kesehatan fisik dan psikis masyarakat. Lebih lanjut, dimensi perkembangan personal mengalami peningkatan sebesar 0,033 poin, mengindikasikan adanya kemajuan dalam pembentukan kepribadian yang konstruktif melalui aktivitas olahraga. Dimensi ekonomi mencatatkan peningkatan paling signifikan, yakni sebesar 0,102 poin, yang menggambarkan bertambahnya pengeluaran individu untuk mendukung aktivitas olahraga, baik dalam bentuk pembelian perlengkapan, biaya keanggotaan, maupun layanan terkait lainnya. Data ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat penurunan pada aspek-aspek struktural dan kualitas, terdapat peningkatan pada aspek partisipatif dan ekonomi yang dapat menjadi pijakan untuk perumusan kebijakan pembangunan olahraga ke depan

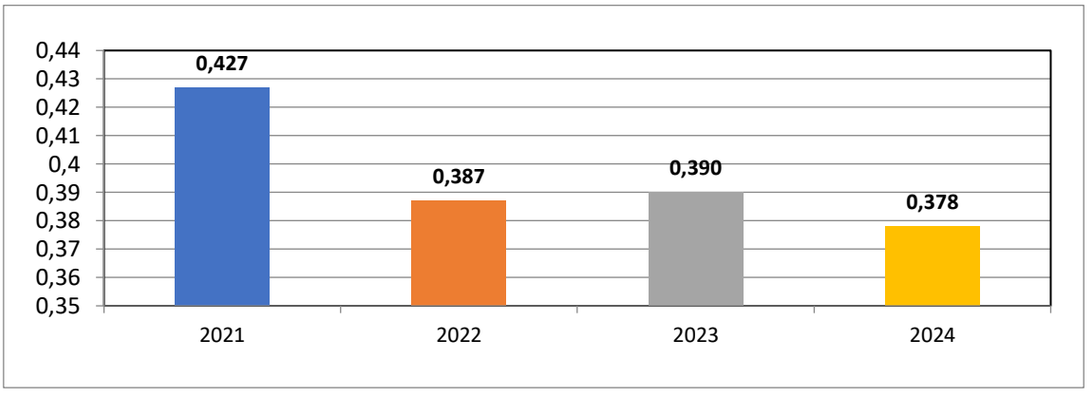

Sumber: Kementrian Pemuda dan Olahraga

Gambar 2.36.
Perkembangan Indeks Pembangunan Pemuda
Provinsi NTT

Komponen pembentuk IPP di Provinsi NTT Tahun 2022 antara lain komponen pendidikan senilai 67, komponen kesehatan dan kesejahteraan senilai 53, komponen lapangan dan kesempatan kerja senilai 45, komponen partisipasi dan kepemimpinan senilai 50, serta komponen gender dan diskriminasi senilai 50 sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut ini.

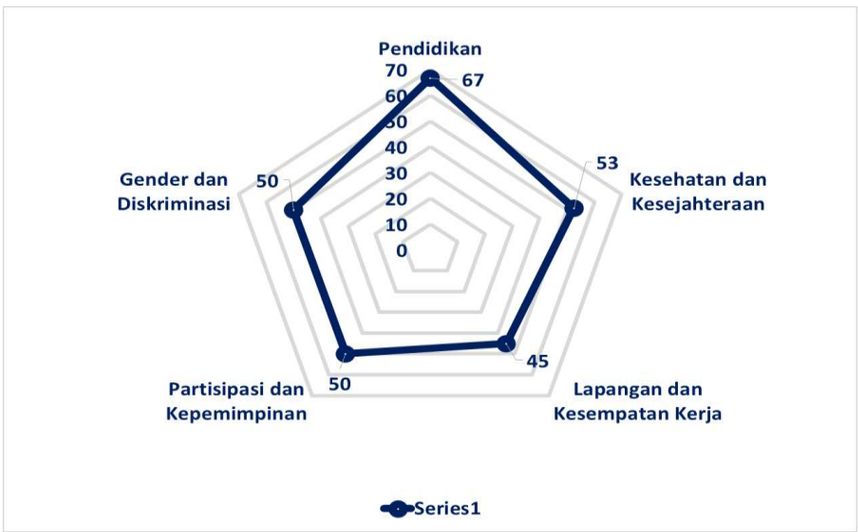

Sumber: Kemenpora, 2023

Gambar 2.37.
Komponen Indeks Pembangunan Pemuda
Provinsi NTT Tahun 2022

2.2.2.7. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) disusun sebagai salah satu indstrumen dalam memberikan gambaran terkait kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan. Sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 nilai IPK Provinsi NTT mengalami pertumbuhan yang berfluktuasi dimana pada Tahun 2018 nilai IPK Provinsi NTT senilai 49,13 naik menjadi 50,48, turun menjadi 48,93 pada Tahun 2020 dan kemudian meningkat menjadi 50,70 pada Tahun 2022.

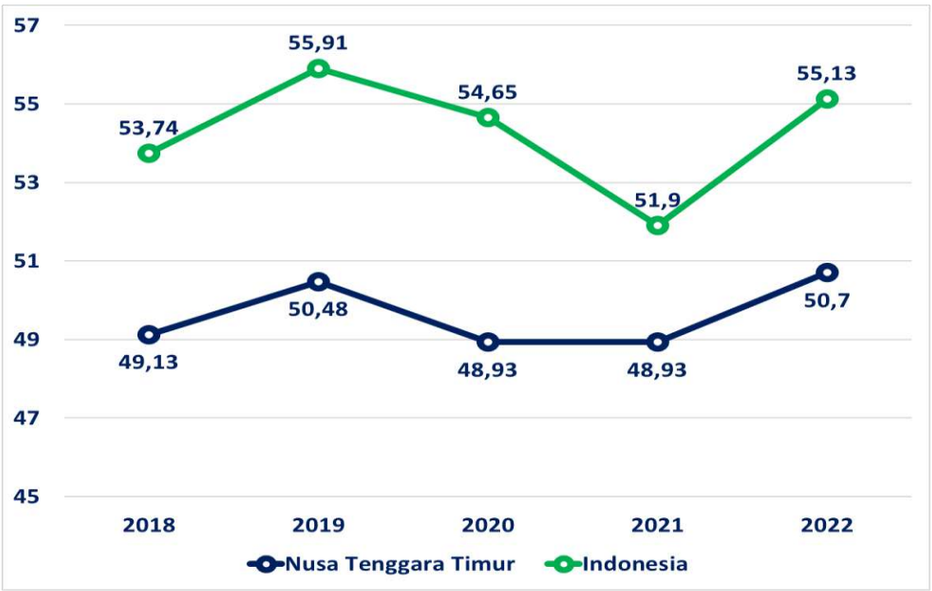

Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Gambar 2.38.
Perkembangan Indeks Pembangunan Kebudayaan
Provinsi NTT Tahun 2018-2022

Komponen IPK terdiri dari komponen ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosia budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, budaya literasi serta gender. Nilai komponen IPK di Provinsi NTT Tahun 2022 yang masih tergolon rendah yaitu komponen ekonomi budaya, warisan budaya serta ekspresi budaya sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut ini.

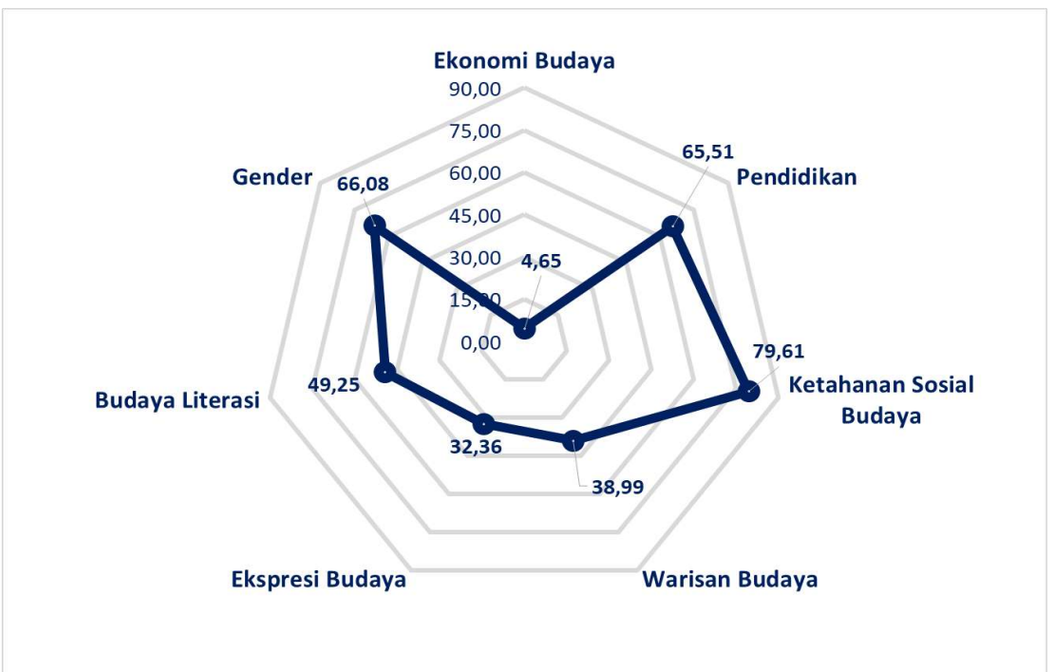

Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Gambar 2.39.
Komponen Indeks Pembangunan Kebudayaan
Provinsi NTT Tahun 2022

2.3. Aspek Daya Saing Daerah

2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah

2.3.1.1. PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan data statistika atas pertumbuhan maupun tingkat pendapatan masyarakat yang merangkum keseluruhan akibat dari kegiatan ekonomi yang berupa perolehan nilai tambah, selama periode waktu tertentu di suatu wilayah. PDRB juga berguna sebagai alat yang dapat menjadikan evaluasi dari hasil pembangunan ekonomi, pemahaman atas akibat dari fenomena yang terjadi, maupun bahan kajian atas rencana pembangunan selanjutnya baik dalam sektor nasional maupun regional yang melibatkan pemerintah pusat atau daerah, termaksud swasta.

PDRB sendiri dihitung melalui dua cara, yaitu PDRB harga konstan di mana perhitungan menggunakan harga tahun dasar, dan PDRB harga berlaku dimana perhitungan menggunakan harga barang dan jasa tahun berjalan. PDRB atas dasar harga konstan mencerminkan pertumbuhan ekonomi tahunan riil yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. Sementara itu, PDRB atas dasar harga berlaku mencerminkan kapasitas sumber daya ekonomi, pergeseran atau perubahan, dan struktur ekonomi suatu wilayah.

Tabel 2.9
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Harga Berlaku Provinsi Nusa Tenggara Timur menurut Lapangan Usaha, 2020-2024

	Distribusi PDRB Triwulanan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Provinsi NTT (Persen)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Lapangan Usaha [Seri 2010]	Tahunan	Tahunan	Tahunan	Tahunan	Tahunan
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	28,51	29,17	29,6	29,32	28,87
Pertambangan dan Penggalian	1,08	1,07	1,06	1,05	1,02
Industri Pengolahan	1,28	1,18	1,21	1,31	1,4
Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Konstruksi	9,82	10,36	10,2	10,56	10,17
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,16	11,48	12,05	12,52	12,8
Transportasi dan Pergudangan	4,62	4,56	4,84	5,07	5,2
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,56	0,55	0,62	0,66	0,71
Informasi dan Komunikasi	7,44	7,41	7,28	6,98	6,87
Jasa Keuangan dan Asuransi	4,36	4,46	4,53	4,36	4,29
Real Estate	2,28	2,23	2,32	2,38	2,49
Jasa Perusahaan	0,18	0,15	0,15	0,15	0,15

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	14,26	13,41	12,82	12,41	12,74
Jasa Pendidikan	10,08	9,56	9,07	8,9	8,88
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,4	2,58	2,44	2,55	2,68
Jasa lainnya	1,83	1,69	1,67	1,65	1,59
PDRB	100	100	100	100	100

Sumber: BPS NTT, 2025

Tabel 2.8. merincikan Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Harga Berlaku Provinsi Nusa Tenggara Timur menurut 17 Sektor atau Lapangan Usaha tahun 2017 – 2023. Selama periode ini, terdapat tiga sektor yang mengalami tren peningkatan proporsi/ share pada distribusi Produk Domestik Regional Bruto Harga Berlaku Provinsi Nusa Tenggara Timur, yakni 1) Pengadaan Listrik dan Gas, 2) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, dan 3) Jasa Keuangan dan Asuransi. Di sisi lain, terdapat enam sektor yang mengalami tren penurunan proporsi/ share pada distribusi Produk Domestik Regional Bruto, yakni 1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, 2) Pertambangan dan Penggalian, 3) Industri Pengolahan, 4) Real Estate, 5) Jasa Perusahaan, dan 6) Jasa lainnya. Semetara itu, sektor lainnya mengalami flukstuasi selama periode dimaksud.

2.3.1.2. PDRB Perkapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita mengukur pendapatan rata-rata penduduk pada sebuah wilayah. PDRB per Kapita diperoleh dari pembagian antara PDRB suatu daerah dengan jumlah orang yang tinggal di daerah tersebut. Semakin tinggi nilai PDRB per Kapita maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan penduduk pada sebuah wilayah.

Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Menurut Lapangan Usaha di level Provinsi pada tahun 2022. Tampak pada Gambar dinawah ini bahwa Provinsi DKI Jakarta memiliki PDRB per Kapita tertinggi di Indonesia, yakni sebesar Rp 192,13 juta, disusul oleh provinsi Kalimantan Timur (Rp 137,5 juta) dan provinsi Kalimantan Utara (Rp 95,6 juta). Sementara itu, provinsi NTT merupakan provinsi dengan PDRB per Kapita terendah kedua di Indonesia di tahun 2023, yakni hanya sebesar Rp 13,5 juta, disusul provinsi Maluku (18,3 juta) dan provinsi NTB (18,6 juta). Rincian selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

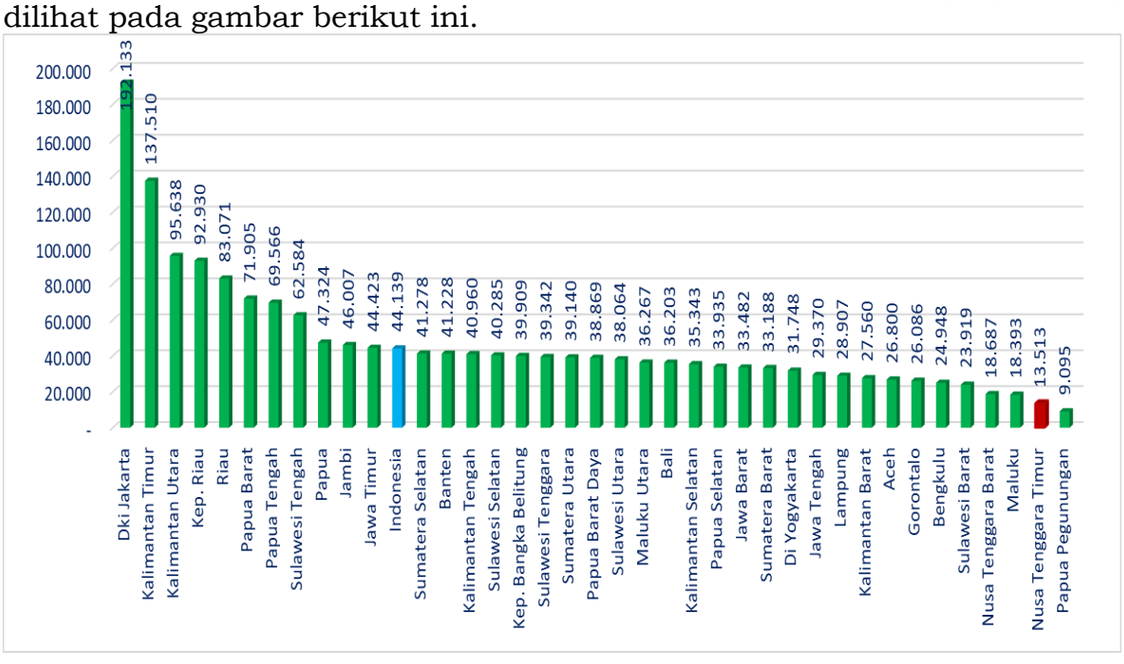

Sumber: BPS Provinsi NTT, 2024 (diolah)

Gambar 2.40.
Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Menurut Lapangan Usaha di level Provinsi (Ribu Rupiah), 2023

Secara umum, PDRB per kapita Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami peningkatan selama periode 2010-2023. Pada Tahun 2010, PDRB riil per kapita sebesar 9.317 ribu rupiah kemudian meningkat menjadi 13.513 ribu rupiah pada Tahun 2023. Selain itu, PDRB nominal per kapita juga meningkat dari 9.317 ribu rupiah pada Tahun 2010 menjadi 23.078 ribu rupiah pada Tahun 2023. Rincian selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

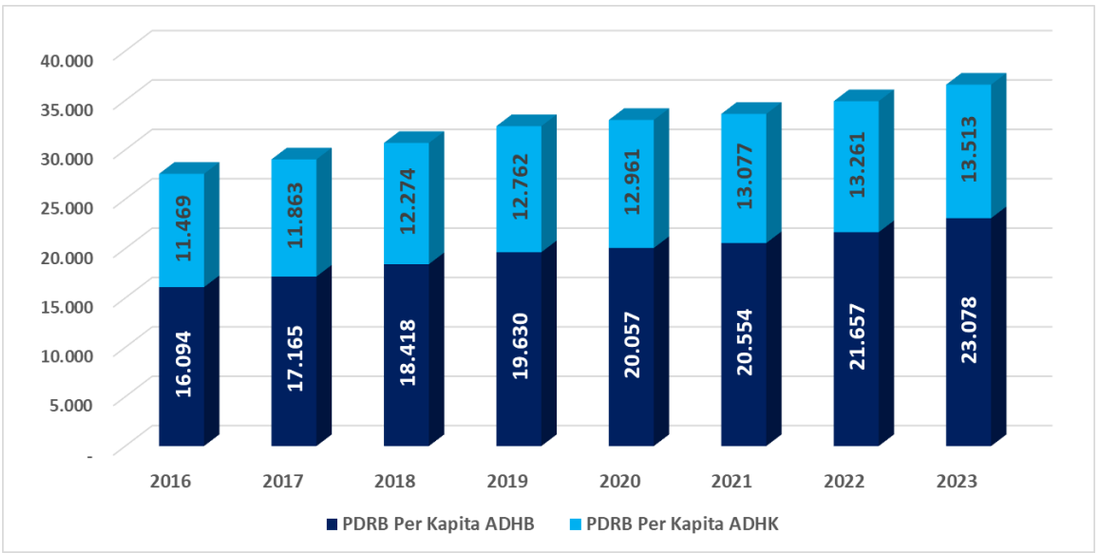

Sumber: BPS Provinsi NTT, 2023 (diolah)

Gambar 2.41.

Perkembangan PDRB Per Kapita Provinsi NTT Tahun 2010-2023

2.3.1.4. Indeks Ekonomi Hijau

Indeks ekonomi hijau (Green Economy index/ GEI) merupakan salah satu alat untuk mengukur transformasi ekonomi guna menilai interaksi sosial ekonomi lingkungan dalam lingkup ekonomi hijau serta mengidentifikasi potensi risiko dan peluang untuk merancang kebijakan ekonomi hijau yang lebih baik pada masa yang akan datang. Indeks ekonomi hijau terdiri dari 15 indikator terpilih yang memiliki 3 pilar sustainable development yaitu ekonomi, social dan lingkungan.

Tabel 2.10.
Indikator Kinerja Utama Yang Mendukung Tiga Pilar Ekonomi Hijau Provinsi NTT Tahun 2024-2026

PILAR	INDIKATOR	Target Nusa Tenggara Timur		
		2024	2025	2026
SOSIAL	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA	2,66%–3,37%	2,51%-2,35%	2,25% -2,05%
	TINGKAT KEMISKINAN	20,00%-19,63%	19,35% - 18,85%	18,50% - 17,03%
	ANGKA HARAPAN HIDUP	67,5 tahun	68 tahun	69 tahun
	RATA-RATA LAMA SEKOLAH	7,75 tahun	7,93 tahun	8,2 tahun
EKONOMI	PERTUMBUHAN EKONOMI	4,55%-5,35%	4,75%-5,65%	5.15%-6,01%
	SKOR POLA PANGAN HARAPAN (SPPH)	68 Poin	68,25 Poin	68,5 Poin
	PENGELUARAN PERKAPITA	Rp7.598.000,00	Rp7.762.000,00	Rp7.954.000,00
	KONTRIBUSI SEKTOR PERTANIAN DALAM PDRB	31	32	33
LINGKUNGAN	RASIO ELEKTRIFIKASI	93%	94%	95%
	INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	73,62 Poin	73,95 poin	74,28 poin
	INDEKS RISIKO BENCANA	140 Poin	138 Poin	135 Poin

Sumber : RPJPD Provinsi NTT Tahun 2025-2045

2.3.1.5. Indeks Ekonomi Biru

Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) merupakan alat untuk mengukur kemajuan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup dalam sektor ekonomi biru. Indeks ekonomi biru terdiri dari 35 indikator yang mewakili 3 pilar yaitu pilar ekonomi yang menekankan pada analisis rantai nilai produksi dan perdagangan antar daerah, pilar sosial yang menekankan pada potensi perempuan dan kelompok marginal untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap sector ekonomi biru, serta pilar lingkungan yang menekankan pada pengelolaan sampah khususnya sampah laut.

2.3.2. Daya Saing Sumber Daya Manusia

2.3.2.1. Indeks Modal Manusia

Indeks modal manusia (IMM) merupakan indeks yang mengukur Tingkat produktivitas sumber daya manusia yang dapat dicapai oleh seorang anak yang dilahirkan saat ini pada usia 18 tahun. Nilai IMM Provinsi NTT masih berada dibawah capaian nasional. Pada Tahun 2023, nilai IMM NTT sebesar 0,46, berada di bawah capaian nasional sebesar 0,54. Artinya setiap anak yang lahir di Provinsi NTT pada Tahun 2023 akan menjadi lebih produktif 46 persen ketika ia tumbuh dewasa, dengan catatan mereka menyelesaikan pendidikan dan mendapatkan akses kesehatan yang baik.

Sumber: Bappenas, 2024

Sumber: Kajian Indeks Modal Manusia dan Peranannya Dalam Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2023

Gambar 2.42.
Indeks Modal Manusia (Human Capital Index) Provinsi NTT Tahun 2023

2.3.2.2. Indeks Pendidikan

Pencapaian indeks pendidikan Provinsi NTT sejak Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2018 mengalami peningkatan. Pada Tahun 2010 nilai indeks pendidikan Provinsi NTT sebesar 51,81 dan meningkat menjadi 60,72 pada Tahun 2018. Rincian selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

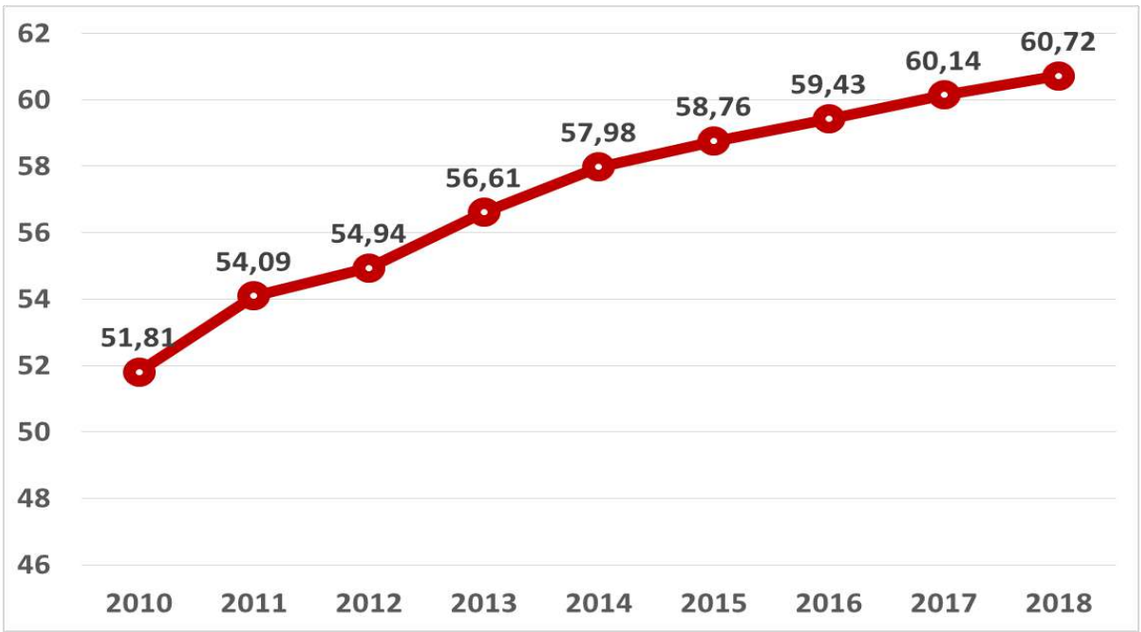

Sumber: BPS 2023

Gambar 2.43.
Indeks Pendidikan Provinsi NTT Tahun 2010-2018

2.3.2.3. Angka Literasi dan Numerasi

Pada Tahun 2023, kurang dari 40 persen peserta didik di Provinsi NTT yang telah mencapai kompetensi minimum untuk literasi membaca dan kurang dari 25 persen peserta didik yang telah mencapai kompetensi minimum untuk numerasi.

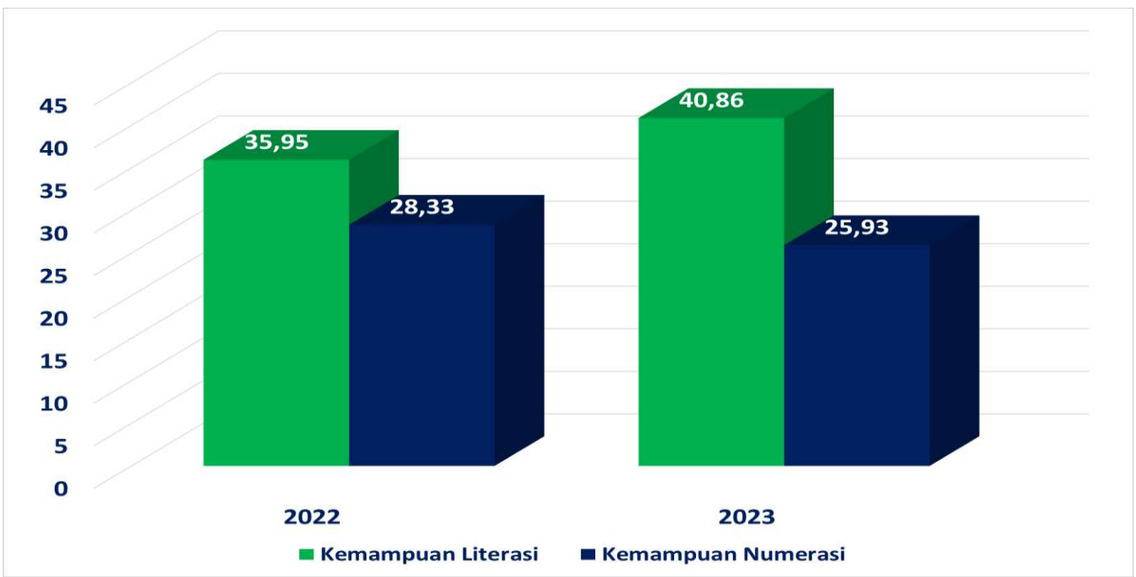

Sumber: Asesmen Nasional Kemendibudristek RI 2023

Gambar 2.44.
Angka Literasi dan Numerasi Provinsi NTT Tahun 2022-2023

2.3.2.4. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) merupakan hasil agregasi 7 unsur pembangunan literasi masyarakat, yaitu: Pemerataan layanan perpustakaan, Ketercukupan koleksi, Ketercukupan tenaga perpustakaan, Tingkat kunjungan masyarakat per hari, Jumlah perpustakaan ber-SNP, Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi/ promosi, dan Anggota perpustakaan.

Capaian IPLM berdasarkan Kabupaten/Kota tertinggi Tahun 2023 yakini Kabupaten Sumba Timur dengan nilai 94,48 diikuti oleh Kabupaten Malaka dengan nilai 87,51. Sedangkan capaian terendah Tahun 2023 yaitu Kabupaten Manggarai dengan nilai 25,53, Kabupaten Sumba Barat Daya dengan nilai 43,31 serta Kabupaten Ende dengan nilai 45,31. Rincian selenmgkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

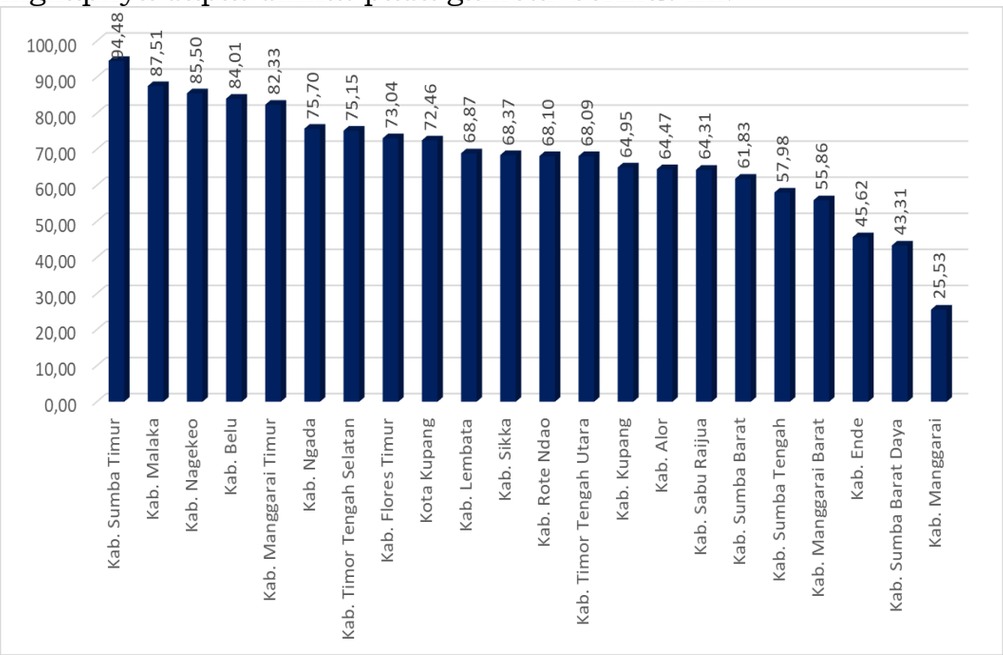

Sumber: Perpustakaan Nasional RI, 2024

Gambar 2.45.
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Berdasarkan Kabupaten/ Kota lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023

2.3.2.5. Indeks Literasi Digital

Dalam Laporan Status Literasi Digital di Indonesia yang dirilis oleh Kementerian Kominfo RI, dijelaskan bahwa pengukuran Indeks Literasi Digital Indonesia mengacu kepada kerangka kerja dalam Road Map Literasi Digital 2020-2024. Kerangka kerja ini digunakan sebagai basis untuk merancang program dan kurikulum Program Gerakan Nasional Literasi Digital Indonesia 2020-2024.

Pada tahun 2020, Indeks Literasi Digital Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 3,76, dimana lebih tinggi dibanding rata-rata nasional, yakni 3,47. Pada tahun selanjutnya, Indeks Literasi Digital Provinsi ini mengalami penurunan menjadi 3,6. Sementara itu, IPLM nasional sedikit mengalami peningkatan menjadi 3,49. Pada tahun 2022, Indeks Literasi Digital Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami penurunan kembali menjadi 3,39 dan berada di bawah rata-rata nasional, yang terus mengalami peningkatan menjadi 3,54.

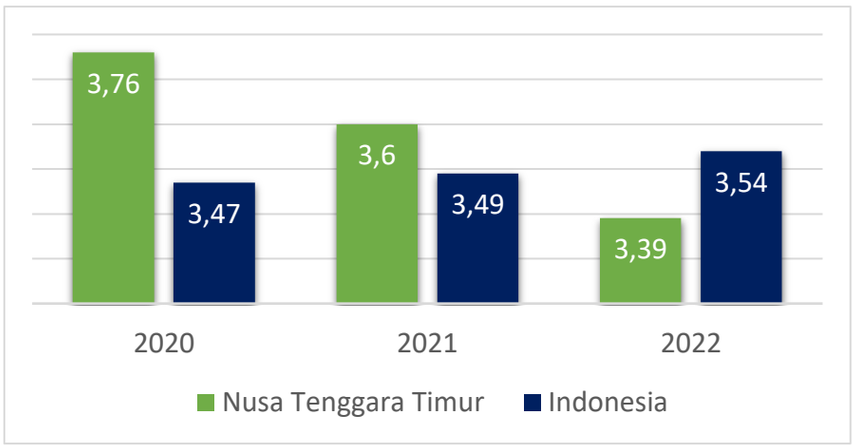

Sumber: Kementerian Kominfo (2022)

Gambar 2.46.
Indeks Literasi Digital Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Indonesia, Tahun 2020-2022

2.3.2.6. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Pada awal periode, tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 73,11, berada jauh di atas rata-rata nasional, yakni 63,21. Pada tahun-tahun selanjutnya, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur maupun Indonesia sama-sama mengalami fluktuasi namun Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur cenderung berada di atas rata-rata nasional. Pada akhir periode, 2024, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 77,5, sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Indonesia sebesar 68,63.

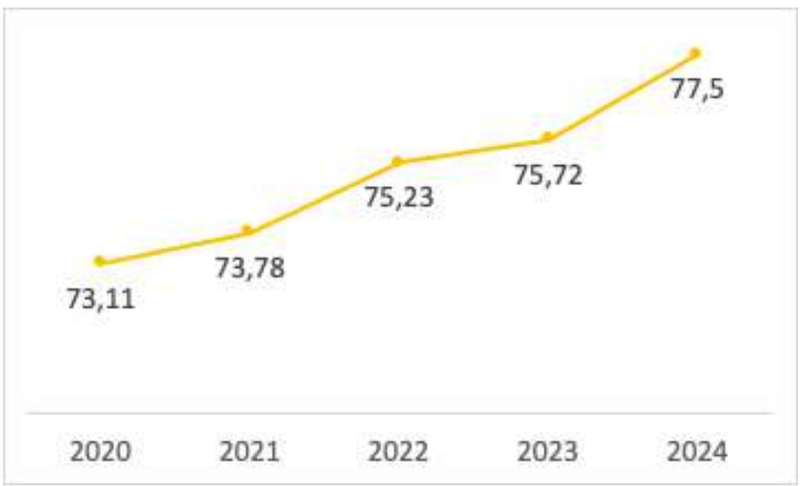

Sumber: BPS NTT, 2025

Gambar 2.47.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Indonesia, 2020-2024

2.3.2.7. Angka Ketergantungan

Pada tahun 2010, Rasio Ketergantungan provinsi ini sebesar 70,6 poin, dimana masih berada jauh lebih tinggi dibanding Rasio Ketergantungan Indonesia 50,5. Pada lima tahun selanjutnya, Rasio Ketergantungan Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami penurunan menjadi 66,7, yang terus menurun sampai Tahun 2035 senilai 61,6. Sementara itu, Rasio Ketergantungan Indonesia mengalami penurunan pada Tahun 2010 senilai 50,5 yang terus menurun menjadi 48,6 pada Tahun 2015 atau telah memasuki periode bonus demografi.

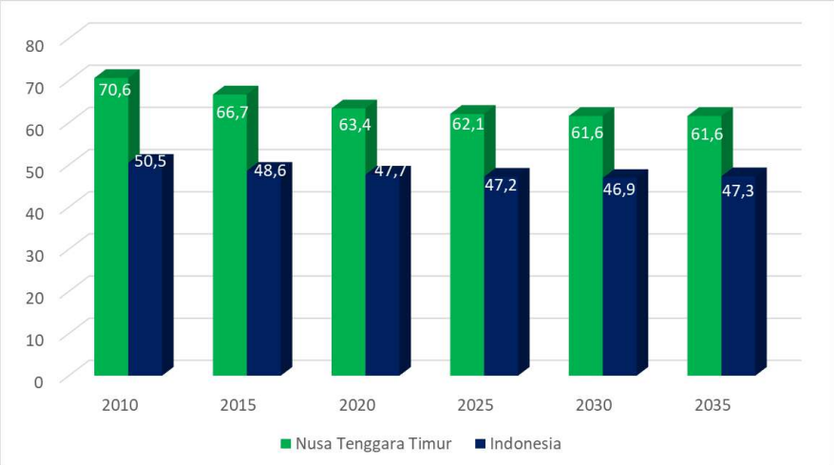

Sumber: BPS NTT, 2023

Gambar 2.48.
Rasio Ketergantungan Hasil Proyeksi Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Indonesia, 2010-2035

2.3.3. Daya Saing Infrastruktur Wilayah

2.3.3.1. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pengukuran IKLI memberikan informasi baik dalam perspektif masyarakat secara obyektif, komprehensif, dan kredibel, baik dalam aspek pembangunan fisik maupun aspek manfaat. Saat ini, perkembangan pembangunan cukup pesat sehingga membuat terjadinya perubahan lingkungan, kebutuhan dan kepuasan masyarakat. Komponen IKLI terdiri atas ketersediaan fisik (availability), kualitas fisik (quality), kesesuaian (appropriateness), efektivitas pemanfaatan (utility), penyerapan tenaga kerja (job creation) dan kontribusi pada perekonomian.

2.3.4. Daya Saing Iklim Investasi

2.3.4.1. Indeks Demokrasi

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah alat ukur kuantitatif yang digunakan untuk mengeavluasi sejauh mana perkembangan dan penerapan demokrasi baik di nasional maupun di tingkat daerah. Perkembangan IDI di Provinsi NTT sejak Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2022 mengalami fluktuasi dimana pada Tahun 2009, nilai IDI Provinsi NTT sebesar 71,64 yang meningkat menjadi 82,49 pada Tahun 2016 dan kemudian mengalami penurunan menjadi 77,83 pada Tahun 2022. Rincian selengkapnya, dapat dilihat pada gambar berikut ini.

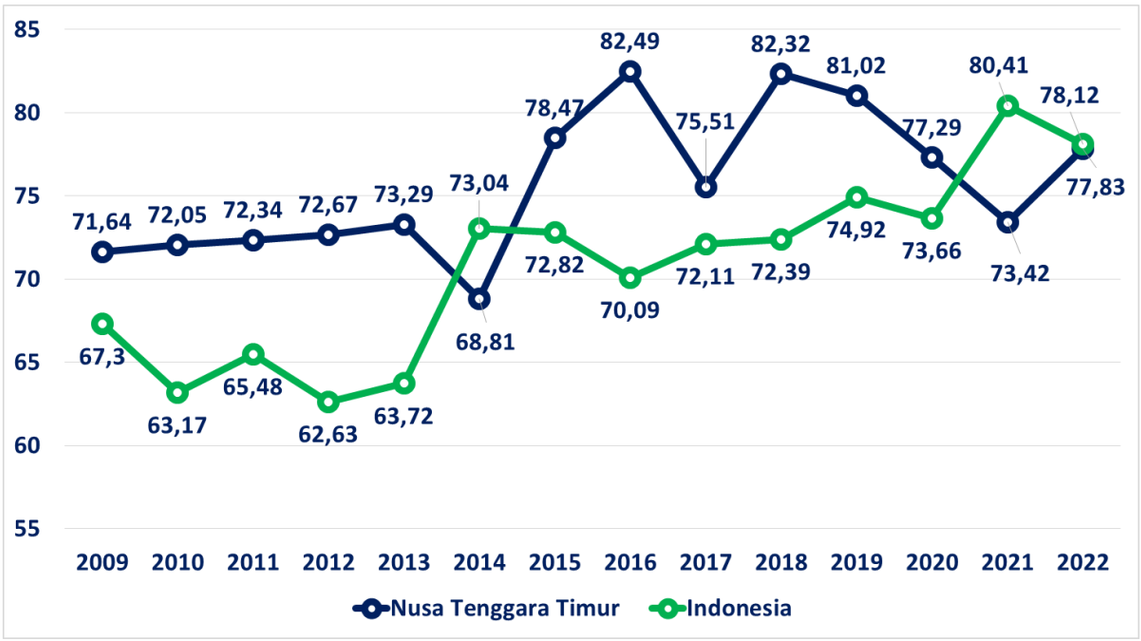

Sumber: BPS, 2023

Gambar 2.49.

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi NTT Tahun 2009-2022

2.3.4.4. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks kerukunan umat beragama (KUB) merupakan ukuran tingkat kerukunan masyarakat dalam beragama yang meliputi dimensi tolerasi, kerjasama dan kesetaraan. Provinsi NTT merupakan provinsi dengan capaian indeks KUB tertinggi secara nasional. Rincian selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

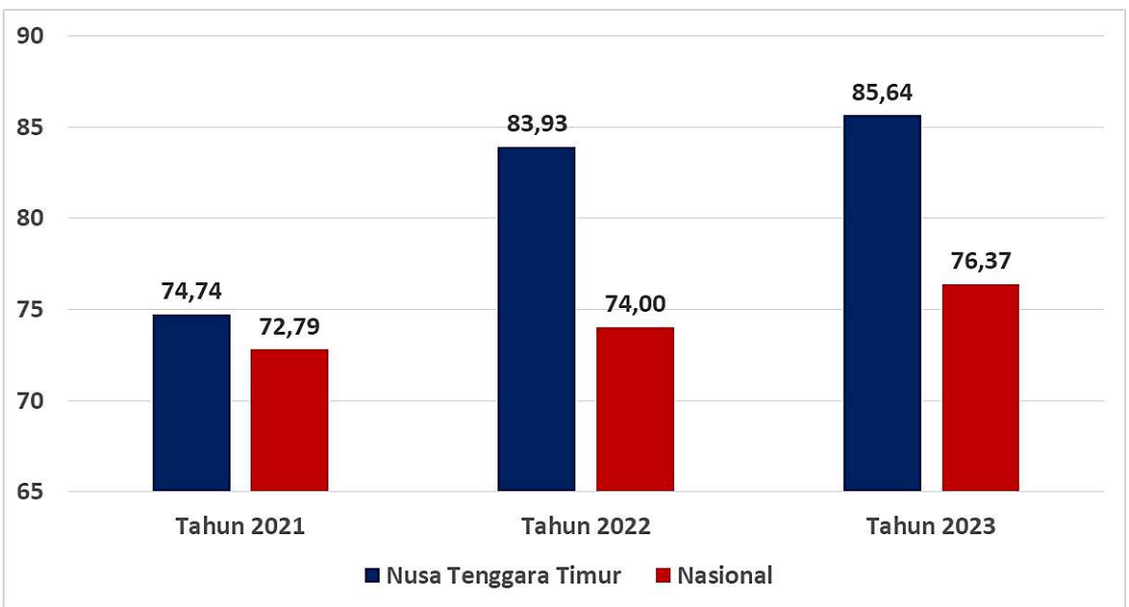

Sumber: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI

Gambar 2.50.
Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) Provinsi NTT Tahun 2021-2023

Perkembangan capaian komponen Indeks KUB Provinsi NTT dalam tiga tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang baik khususnya untuk dimensi kesetaraan dan kerjasama. Pada Tahun 2022 dimensi toleransi Provinsi NTT

sebesar 83, 93 yang naik menjadi 83,95 pada Tahun 2023, dimensi Kesetaraan Tahun 2022 senilai 81,20 yang naik menjadi 87,19 pada Tahun 2023, serta dimensi Kerjasama pada Tahun 2022 senilai 83,16 yang naik menjadi 85,77 pada Tahun 2023.

2.3.4.5. Indeks Daya Saing Daerah (2020-2024)

Dalam konsep pembangunan berkelanjutan, Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk mengetahui lebih spesifik kondisi suatu daerah. Model pengukuran IDSD ini dikembangkan oleh Kementerian Riset dan Teknologi-BRIN untuk mengukur potensi dan kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. IDSD menggambarkan bagaimana produktivitas, kemajuan, persaingan, dan kemandirian suatu daerah.

Capaian IDSD Provinsi NTT sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 mengalami penurunan dimana nilai IDSD Provinsi NTT Tahun 2019 senilai 3,91 yang turun menjadi 3,20 pada Tahun 2022 dan Turun menjadi 3,42 pada Tahun 2023. Rincian selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

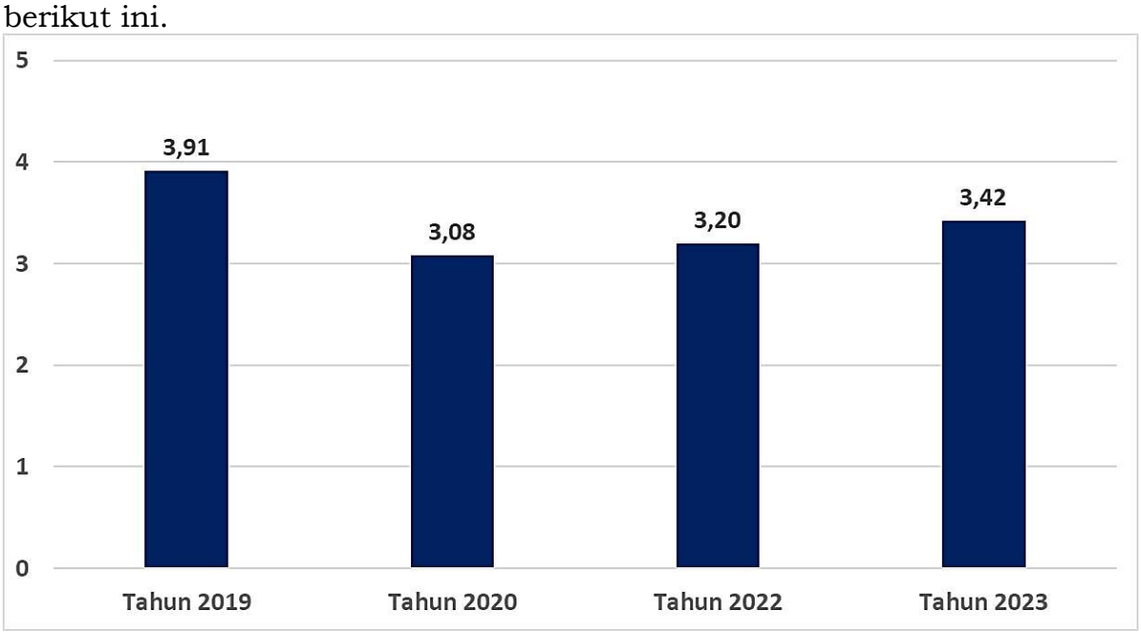

Sumber: BRIN 2024

Gambar 2.51.
Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Provinsi NTT Tahun 2019-2023

Komponen IDSD meliputi 12 komponen diantaranya Instisusi, Infastruktur, Adposi TIK, Stabilitas Ekonomi Makro, Kesehatan, Keterampilan, Pasar Produk, Pasar Tenaga Kerja, Sistem Keuangan, Ukuran Pasar, Dinamisme Bisnis serta Kapabilitas Inovasi. Komponen IDSD Provinsi NTT Tahun 2023 selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

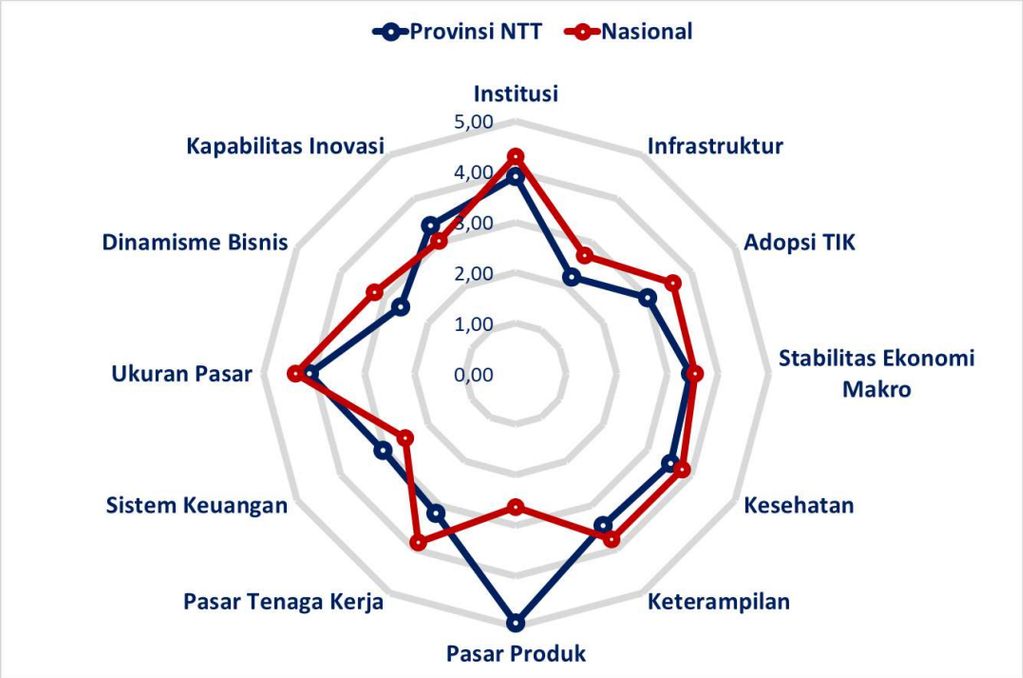

Sumber: BRIN 2024

Gambar 2.52.
Komponen IDSD Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2023

2.3.4.6. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IPTIK) merupakan salah satu indikator proksi untuk mengukur perkembangan digitalisasi suatu wilayah. Dalam 4 Tahun terakhir, perkembangan IPTIK Provinsi NTT mengalami peningkatan dimana pada Tahun 2020 nilai IPTIK Provinsi NTT sebesar 4,49 kemudian meningkat menjadi 5,33 pada Tahun 2023 sebagaimana dapat dilihat pada Gambar berikut ini.

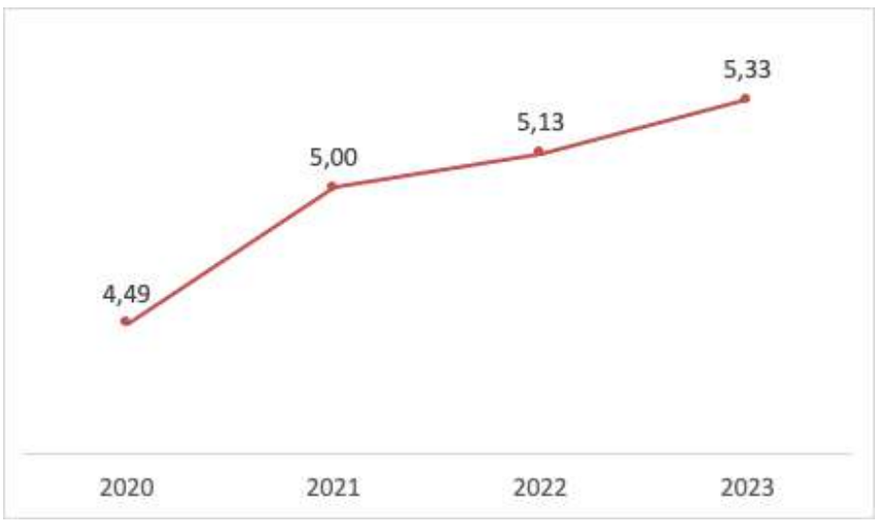

Sumber: BPS, 2024

Gambar 2.53.
Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IPTIK)
Provinsi NTT Tahun 2020-2023

IPTIK terdiri dari 3 komponen subindeks yaitu akses dan infrastruktur TIK, Penggunaan TIK dan Keahlian TIK. Komponen subindeks akses dan infrastruktur meningkat dari 5,15 menjadi 5,61, komponen subindeks penggunaan meningkat dari 3,19 menjadi 4,75, dan komponen subindeks

keahlian meningkat dari 5,75 menjadi 5,92. Rincian selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

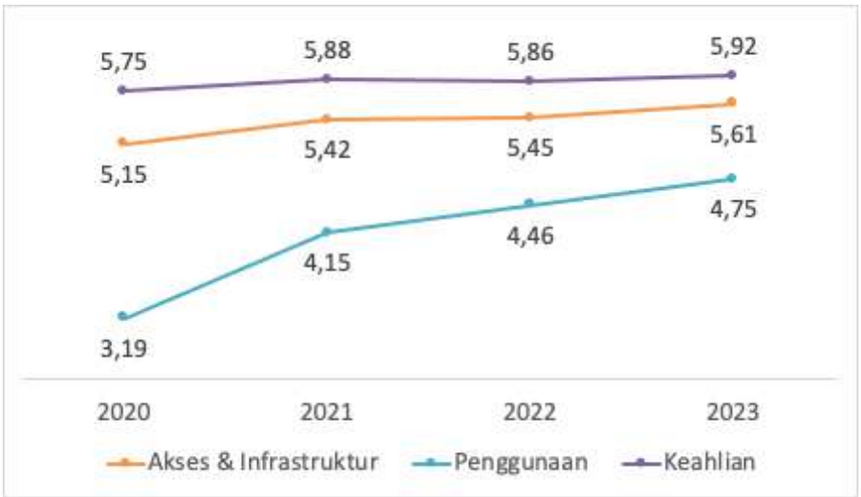

Sumber: BPS,2024

Gambar 2.54.
Komponen Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi Provinsi NTT Tahun 2020-2023

2.3.4.7. Penanaman Modal

Penanaman modal merupakan kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Indonesia yang dilakukan oleh baik oleh penanam modal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Sejak Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2020 realisasi penanaman modal dalam negeri dari sisi jumlah proyek, Provinsi NTT masih mendapatkan proporsi yang tergolong sangat kecil atau dibawah 1 persen. Demikian juga dengan realisasi investasi penanaman modal dalam negeri di Provinsi NTT sejak Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2022 juga masih mendapatkan proporsi dibawah 1 persen kecuali pada Tahun 2018 senilai 1,3 persen. Sedangkan untuk jumlah proyek penaman modal luar negeri di Provinsi NTT sejak Tahun 2010 sampai dengan 2022 juga masih mendapatkan Proporsi dibawah 1 persen, demikian juga dengan realisasi nilai investasi Provinsi NTT mendapatkan porsi dibawah 0,4 persen. Rincian selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.11.
Jumlah Proyek dan Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Luar Negeri Di Provinsi NTT Tahun 2010-2023

No.	Komponen Penanaman Modal	2010	2016	2020	2023
1.	Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri di Provinsi NTT (Proyek)	4	29	761	2.350
2.	Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri secara Nasional (Proyek)	875	7.511	96.623	266.722
	Proporsi Jumlah Proyek Penanaman Modal Dalam Negeri Nusa Tenggara Timur terhadap Nasional (%)	0,46	0,39	0,79	0,88
3.	Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri di Provinsi NTT (Miliar Rupiah)	0,1	822,2	3.028,5	3.407
4.	Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri secara Nasional (Miliar Rupiah)	60.626	216.231	413.536	674.923
	Proporsi Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri Nusa Tenggara Timur terhadap Nasional (%)	0,0002	0,4	0,7	0,5
5.	Realisasi Penanaman Modal Luar Negeri di Provinsi NTT (Proyek)	12	164	520	466

No.	Komponen Penanaman Modal	2010	2016	2020	2023
6.	Realisasi Penanaman Modal Luar Negeri secara Nasional (Proyek)	3.076	25.321	56.726	70.898
	Proporsi Jumlah Proyek Penanaman Modal Luar Negeri Nusa Tenggara Timur terhadap Nasional (%)	0,39	0,65	0,92	0,66
7.	Realisasi Penanaman Modal Luar Negeri di Provinsi NTT (USD)	3,8	58,2	81,3	124,3
8.	Realisasi Penanaman Modal Luar Negeri secara Nasional (USD)	16214,8	28964,1	28666,3	50267,0
	Proporsi Nilai Investasi Penanaman Modal Luar Negeri Nusa Tenggara Timur terhadap Nasional (%)	0,02	0,20	0,28	0,25

Sumber: BPS 2024, diolah

2.3.5. Daya Saing Sektor Unggulan Daerah

2.3.5.1. Pariwisata

Pemerintah Indonesia telah menetapkan lima kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) atau Bali Baru dengan status super prioritas (DSP) yaitu Danau Toba, Bodobudur, Mandalika, Labuan Bajo dan Likupang. Kelima DSP ini merupakan bagian dari program "10 Bali baru" yang diharapkan menjadi diversifikasi destinasi selain Bali yang lebih dulu identik sebagai destinasi utama wisata Indonesia. Berdasarkan statistik dalam kurun waktu 20 Tahun terakhir, jumlah tamu wisatawan baik mancanegara maupun domestik yang berkunjung ke Provinsi NTT mengalami pasang surut. Pada Tahun 2010 jumlah total wisatawan yang berkunjung ke Provinsi NTT sejumlah 578.999 jiwa yang naik menjadi 1.239.432 jiwa pada Tahun 2018 kemudian turun secara signifikan menjadi 387.066 pada Tahun 2020 akibat Pandemi Covid-19 dan pasca Pandemi Covid-19, jumlah wisawatan naik menjadi 956.127 jiwa pada Tahun 2023.

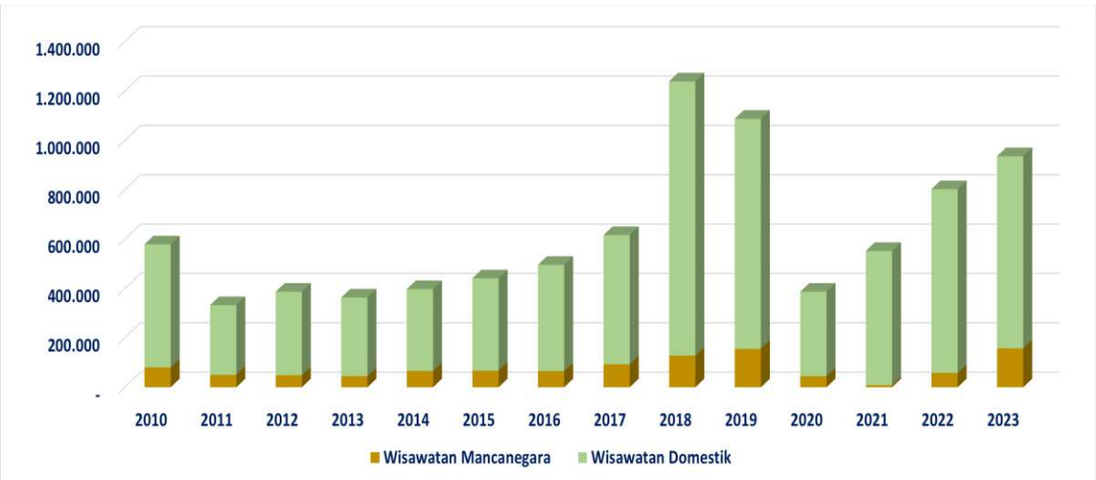

Sumber: BPS 2024

Gambar 2.55.
Jumlah Tamu Hotel Wisatawan Mancanegara dan Domestik Provinsi NTT Tahun 2020-2023

Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel di Provinsi NTT juga turut terdampak akibat Pandemi Covid-19. TPK Hotel Bintang Provinsi NTT Tahun 2010 senilai 50,38 persen yang turun menjadi 30,90 persen pada Tahun 2020 dan kemudian perlahan naik menjadi 341,80 persen pada Tahun 2023. Demikian juga TPK Hotel Non Bintang Provinsi NTT pada Tahun 2010 senilai

20,49 persen yang turun menjadi 9,62 persen pada Tahun 2020 dan kemudian naik perlahan menjadi 16,81 persen pada Tahun 2023.

Sumber: BPS

Gambar 2.56.
Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel di Provinsi NTT Tahun 2020-2023 (%)

Perkembangan rata-rata lama menginap tamu di Provinsi NTT secara umum berada diatas rata-rata lama menginap secara nasional. Pada Tahun 200O rata-rata lama menginap tamu di hotel bintang selama 3.04 hari yang turun menjadi 2,59 hari pada Tahun 2012 lalu kemudian turun menjadi 1,74 hari pada Tahun 2023.

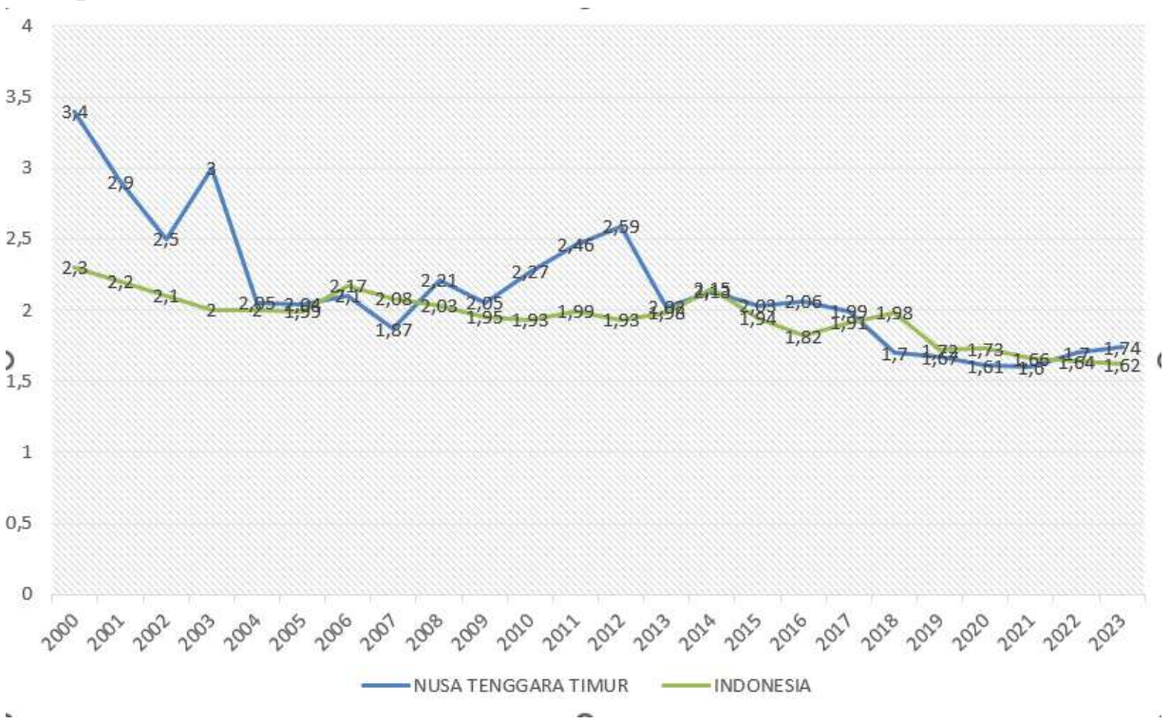

Sumber: BPS

Gambar 2.57.
Rata-Rata Lama Menginap Tamu Pada Hotel Bintang Di Provinsi NTT Tahun 2020-2023 (hari)

2.3.5.2. Peternakan

Pertenakan termasuk dalam sector usaha yang dijalankan oleh masyarakat di Provinsi NTT. Perternakan merupakan kegiatan untuk mengembangbiakan serta budidaya hewan untuk mendapatkan manfaatnya. Provinsi NTT merupakan salah satu Provinsi dengan kontribusi peternakan besar yang cukup signifikan secara nasional. Terdapat 5 ternak di Provinsi NTT yang telah menjadi komoditas unggulan sejak Tahun 2000 sampai dengan saat ini meliputi Babi, Kerbau, Kuda, Sapi Potong serta Kambing. Pada Tahun 2022 Provinsi NTT memiliki populasi Babi dan Kerbau yang terbesar secara nasional, diikuti oleh Kuda, Sapi Potong serta Kambing. Rincian selengkapnya dapat sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.12.
Populasi Ternak Unggulan Provinsi NTT Tahun 2000 sampai dengan 2022

No.	Provinsi	2000	2010	2020	2022	Peringkat Nasional Tahun 2022
1.	Populasi Babi Provinsi NTT (Ekor)	725.457	1.724.591	2.352.441	2.325.020	
	Populasi Babi Nasional (Ekor)	5.356.834	7.476.665	7.622.724	7.280.310	
	% Terhadap Populasi Nasional	13,54	23,07	30,86	31,94	Peringkat 1
2.	Populasi Kerbau Provinsi NTT (Ekor)	124.049	163.551	179.708	172.850	
	Populasi Kerbau Nasional (Ekor)	2.405.277	1.999.604	1.154.226	1.170.209	
	% Terhadap Populasi Nasional	5,16	8,18	15,57	14,77	Peringkat 1
3.	Populasi Kuda Provinsi NTT (Ekor)	82.814	113.367	118.338	125.302	
	Populasi Kuda Nasional (Ekor)	412.384	418.618	384.109	394.341	
	% Terhadap Populasi Nasional	20,08	27,08	30,81	31,78	Peringkat 2
4.	Populasi Sapi Potong Provinsi NTT (Ekor)	485.329	600.923	1.176.317	1.243.884	
	Populasi Potong Indonesia (Ekor)	11.008.017	13.581.570	17.440.393	18.610.148	
	% Terhadap Populasi Nasional	4,41	4,42	6,74	6,68	Peringkat 5
5.	Populasi Kambing Provinsi NTT (Ekor)	361.714	579.376	964.350	1.059.223	
	Populasi Kambing Indonesia (Ekor)	12.565.569	16.619.599	18.689.711	19.397.960	
	% Terhadap Populasi Nasional	2,88	3,49	5,16	5,46	Peringkat 5

Sumber: Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementan RI, 2023 diolah

2.3.5.3. Perkebunan

Usaha Perkebunan termasuk dalam sektor unggulan Provinsi NTT dengan hasil utama meliputi Kelapa, Kopi serta Kakao. Sejak Tahun 2013 ketiga produk tanaman perkebunan unggulan Provinsi NTT tersebut mengalami peningkatan dalam hal luas Tanaman dalam lima tahun terakhir kecuali Kelapa. Pada Tahun 2013 Luas areal tanaman perkebunan Kelapa di Provinsi NTT seluas 152,72 turun menjadi 136,3 ribu hektar pada Tahun 2023. Luas tanaman perkebunan komoditas Kopi pada Tahun 2013 seluas 72,10 ribu hektar yang meningkat menjadi 76,8 ribu hektar pada Tahun 2023 serta Kakao pada Tahun 2013 memiliki luas areal tanam sebesar 53,95 persen yang meningkat menjadi 63,40 ribu hektar pada Tahun 2023.

Tabel 2.13.
Luas Tanaman Perkebunan Unggulan Provinsi NTT Tahun 2013-2023
(Ribu Ha)

No.	Komoditas Perkebunan Unggulan	2013	2015	2017	2019	2021	2023	Peringkat Nasional Tahun 2023
1.	Kelapa	152,72	140,20	143,90	144,30	140,10	136,3	Peringkat 8
2.	Kopi	72,10	65,70	70,30	71,10	80,70	76,8	Peringkat 8
3.	Kakao	53,95	53,90	57,30	61,80	63,90	63,4	Peringkat 8

Sumber: BPS 2024

2.3.5.4. Kelautan dan Perikanan

Kelautan dan perikanan termasuk dalam sektor unggulan Provinsi NTT yang dijalankan oleh 62.502 rumah tangga perikanan di Provinsi NTT pada Tahun 2022. Komoditas unggulan sektor kelautan dan perikanan di Provinsi NTT meliputi Rumput Laut, Ikan Tuna, Ikan Tongkol, serta Ikan Cakalang. Pada tahun 2022, Provinsi NTT merupakan Provinsi kedua tertinggi secara nasional dalam hal jumlah produksi rumput laut sebesar 1.392.539 Ton atau sebesar 19 persen dari total produksi rumput laut secara nasional. Komoditas unggulan kelautan dan perikanan lainnya juga menunjukan peningkatan jumlah produksi sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021. Rincian selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.14.
Jumlah Produksi Komoditas Utama Kelautan dan Perikanan
Provinsi NTT Tahun 2017-2022

No.	Komponen	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Produksi Rumput Laut Provinsi NTT (Ton)	1.803.806	1.600.028	2.158.903	1.392.539
	Jumlah Produksi Rumput Laut Nasional (Ton)	9.187.331	8.547.212	8.445.264	7.245.731
	% Terhadap Produksi Nasional	19,63	18,72	25,56	19,22
2.	Jumlah Produksi Ikan Tuna Provinsi NTT (Ton)	2.612	3.213	3.422	6.904
	Jumlah Produksi Ikan Tuna Nasional (Ton)	409.016	323.884	300.803	359.143
	% Terhadap Produksi Nasional	0,64	0,99	1,14	1,92
3.	Jumlah Produksi Ikan Tongkol Provinsi NTT (Ton)	19.866	13.190	20.418	24.350
	Jumlah Produksi Ikan Tongkol Nasional (Ton)	542.782	503.564	580.804	593.901
	% Terhadap Produksi Nasional	3,66	2,62	3,52	4,10
4.	Jumlah Produksi Ikan Cakalang Provinsi NTT (Ton)	2.453	24.433	13.315	21.316
	Jumlah Produksi Ikan Cakalang Nasional (Ton)	510.686	512.846	468.269	432.851
	% Terhadap Produksi Nasional	0,48	4,76	2,84	4,92

Sumber: Database Validasi Nasional Satu Data Kelautan Perikanan

2.4. Aspek Pelayanan Umum

2.4.1. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah di Indonesia berdasarkan aspek kebijakan pelayanan, aspek profesionalisme SDM, aspek sarana prasarana, aspek sistem informasi pelayanan publik, aspek konsultasi dan pengaduan serta aspek inovasi. Provinsi NTT pada Tahun 2024 mendapatkan nilai Indeks Pelayanan Publik denan kategori Baik.

2.4.2. Indeks Inovasi Daerah (RIDA)

Indeks inovasi daerah Provinsi NTT mengalami peningkatan pada periode 2021 dan 2022 dimana nilai capaian pada Tahun 2021 sebesar 53,35 dan

meningkat menjadi 59,76 pada Tahun 2022 sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut ini.

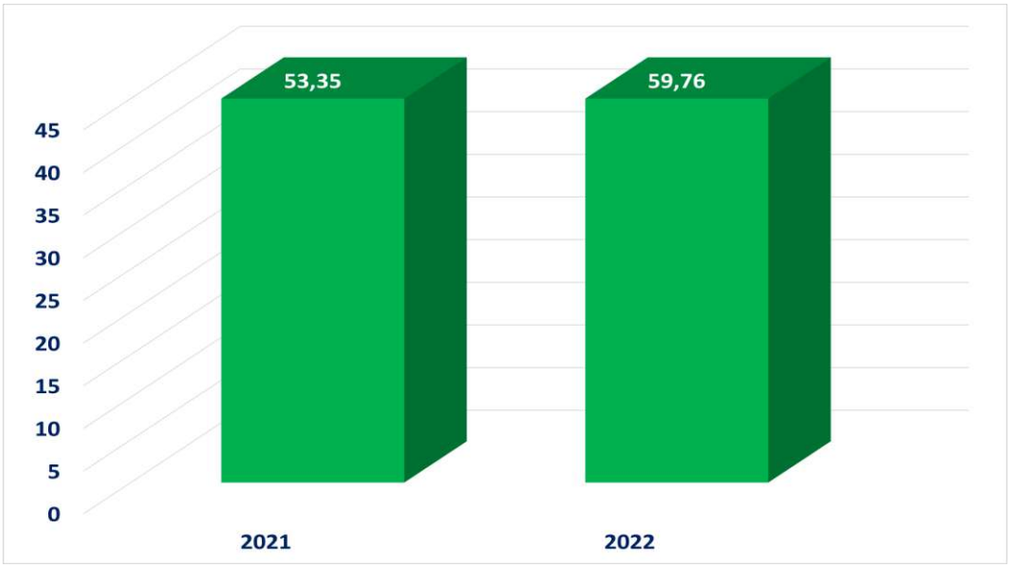

Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2023

Gambar 2.58.
Indeks Inovasi Daerah Provinsi NTT Tahun 2021-2022

2.4.3. Indeks SPBE

Sistem Pemerintahan Berbasis Eklekronik (SPBE) merupakan suatu sistem tata kelola pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi secara menyeluruh dan terpadu dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan pada suatu instansi pemerintahan. Nilai Indeks SPBE Provinsi NTT pada Tahun 2020 sebesar 3,26 yang turun menjadi 2,28 pada Tahun 2021 dan naik menjadi 3,83 pada Tahun 2023 dengan predikat Sangat Baik.

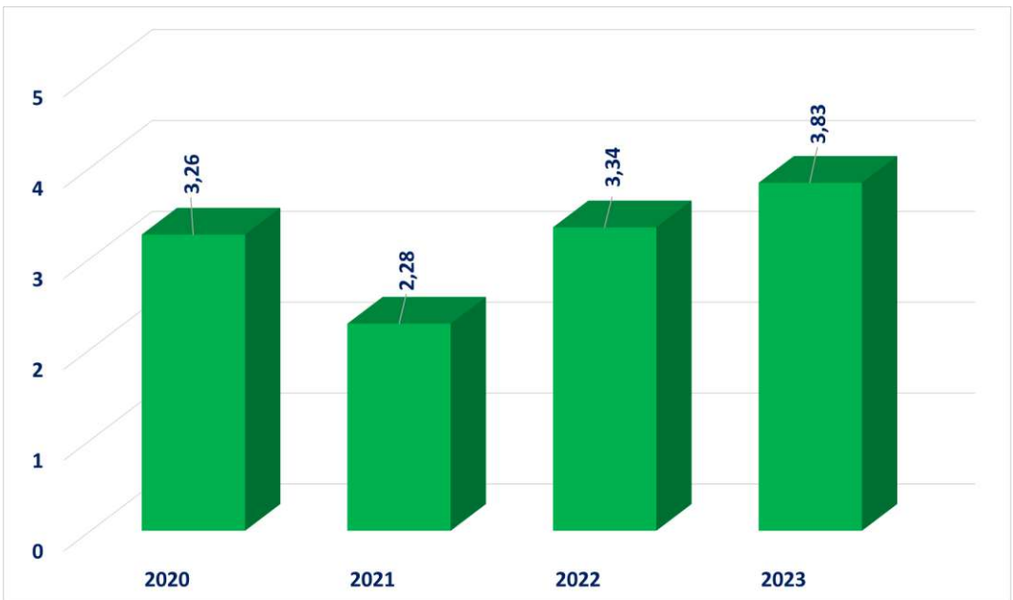

Sumber: KemenpanRB 2024

Gambar 2.59.
Indeks SPBE Provinsi NTT Tahun 2020-2023

2.4.4. Indeks SAKIP

Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan alat ukur penting dalam mengevaluasi kinerja instansi pemerintah daerah. Nilai SAKIP yang tinggi menunjukan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan publik, serta komitmen dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Provinsi NTT dalam 5 Tahun terakhir memiliki nilai Indeks SAKIP senilai 63 atau berada dalam rentang >60-70 dengan predikat Baik.

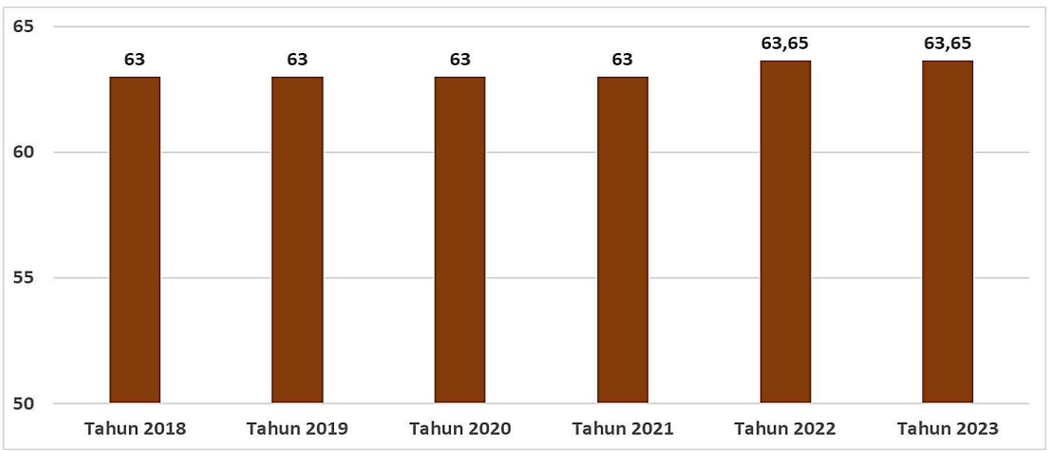

Sumber: KemenpanRB 2024

Gambar 2.60.
Indeks SAKIP Provinsi NTT Tahun 2018-2023

2.4.5 Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi digunakan untuk mengukur keberhasilan reformasi birokrasi pada suatu instansi pemerintah. Reformasi Birokrasi merupakan proses penataan ulang birokrasi pemerintah yang meliputi organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, pola pikir serta budaya kerja. Pada Tahun 2019 nilai Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi NTT senilai 60 dan terus mengalami peninkatan sampai dengan Tahun 2023 dengan capaian 66,18 kategori Baik.

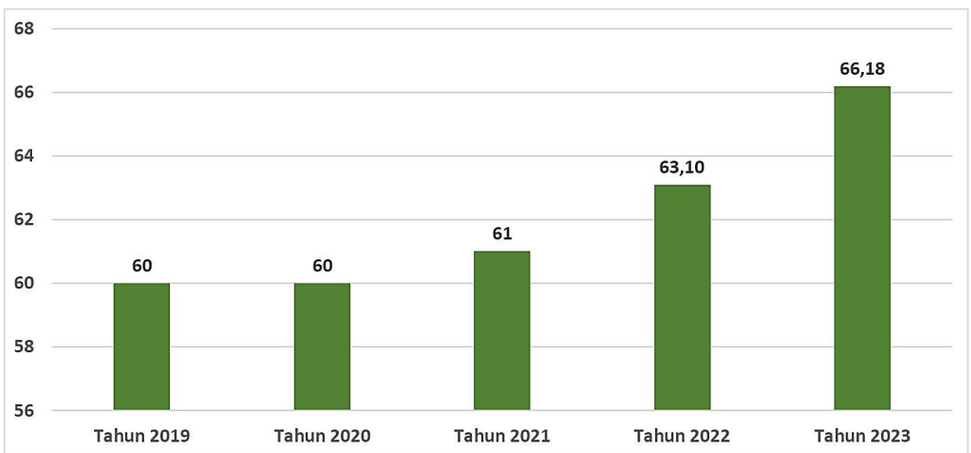

Sumber: KemenpanRB 2024

Gambar 2.61.
Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi NTT Tahun 2019-2023

2.4.6. Standar Pelayanan Minimal

Sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 Provinsi NTT memiliki tren kenaikan dalam capaian SPM, akan tetapi pada Tahun 2024 terjadi

penurunan dari tahun 2023 sebesar 95,43 persen menjadi menjadi 84,1 persen. Rincian selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

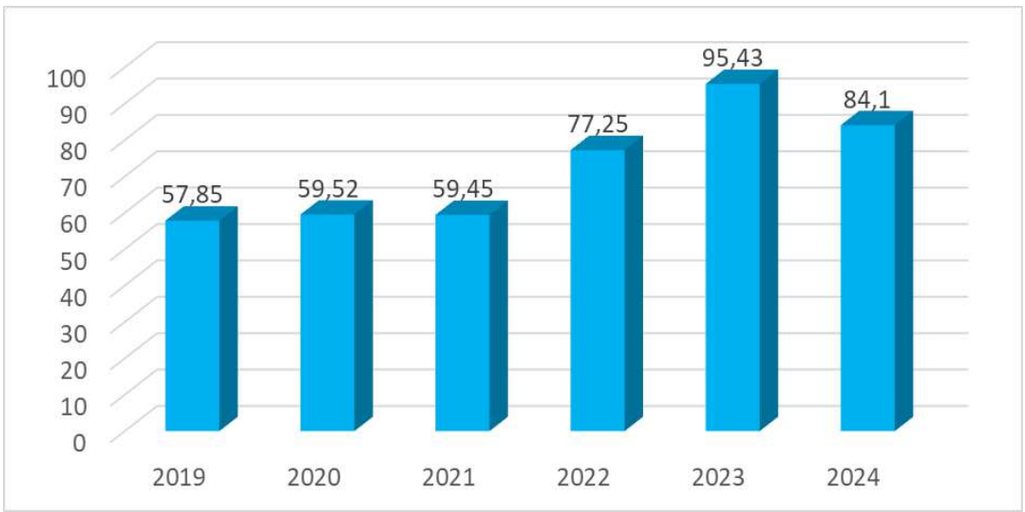

Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2025

Gambar 2.62.
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi NTT Tahun 2019-2024 (%)

2.4.6.1 Pendidikan

SPM bidang pendidikan untuk provinsi meliputi pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Capaian SPM bidang pendidikan Provinsi NTT pada Tahun sejak Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 cenderung berfluktuasi. Pada Tahun 2024 capaian SPM bidang Pendidikan provinsi NTT sebesar 84 persen. Rincian selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

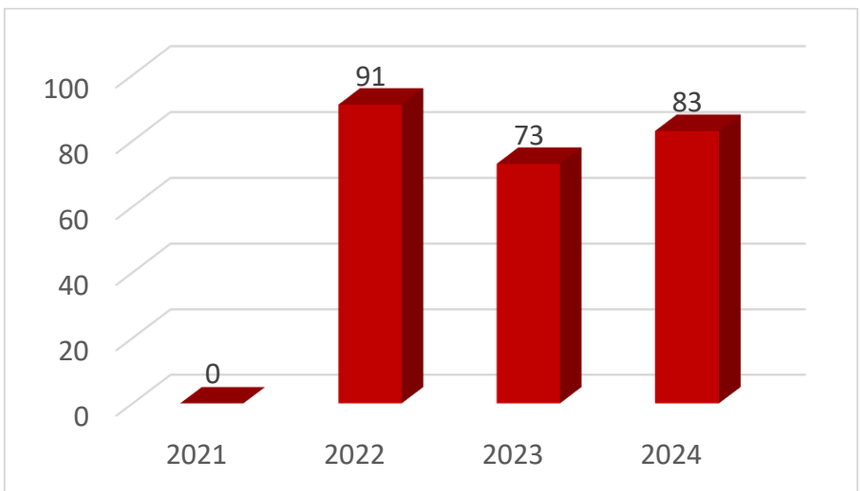

Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2025

Gambar 2.63.
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Provinsi NTT Tahun 2021-2024 (%)

2.4.6.2. Kesehatan

SPM bidang kesehatan untuk provinsi meliputi pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana provinsi, pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi. SPM bidang kesehatan untuk kabupaten/ kota meliputi

pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan kesehatan ibu bersalin, pelayanan kesehatan bayi baru lahir, pelayanan kesehatan balita, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, pelayanan kesehatan pada usia produktif, pelayanan kesehatan pada usia lanjut, pelayanan kesehatan penderita hipertensi, pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus, pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat, pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis, serta pelayanan kesehatan dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia.

Capaian SPM bidang kesehatan Provinsi NTT pada Tahun 2021 sebesar 54 persen yang terus mengalami kenaikan sampai Tahun 2023 sebesar 100 persen, akan tetapi mengalami penurunan pada Tahun 2024 menjadi 95 persen.

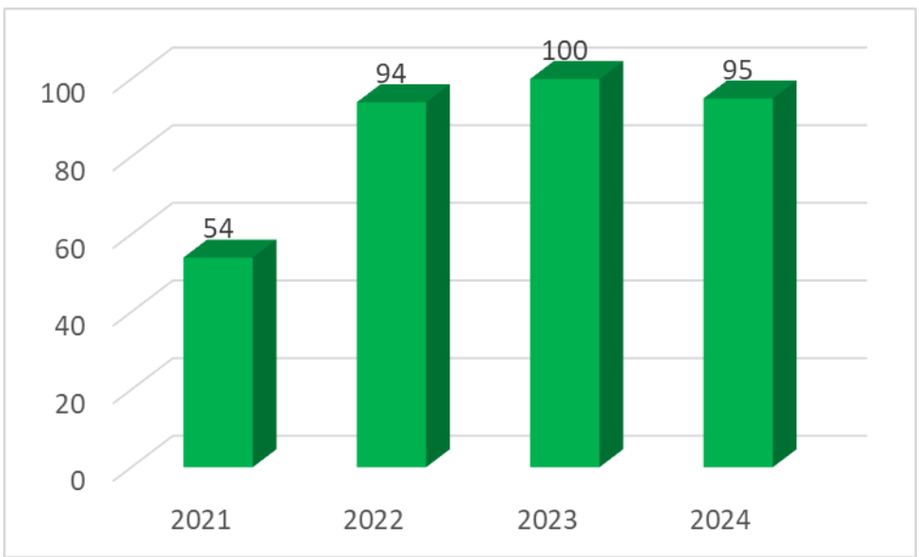

Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2025

Gambar 2.64.
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan Provinsi NTT Tahun 2021-2024 (%)

2.4.6.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang provinsi meliputi pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/ kota dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/ kota. Sedangkan SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten/ kota meliputi penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari, dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

Capaian SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang Provinsi NTT pada Tahun 2023 sebesar 100 persen. Capaian SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten/ kota pada Tahun 2023 yang tertinggi yaitu Kabupaten Belu, Manggarai Barat sdan Kota Kupang senilai 100 persen. Rincian selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

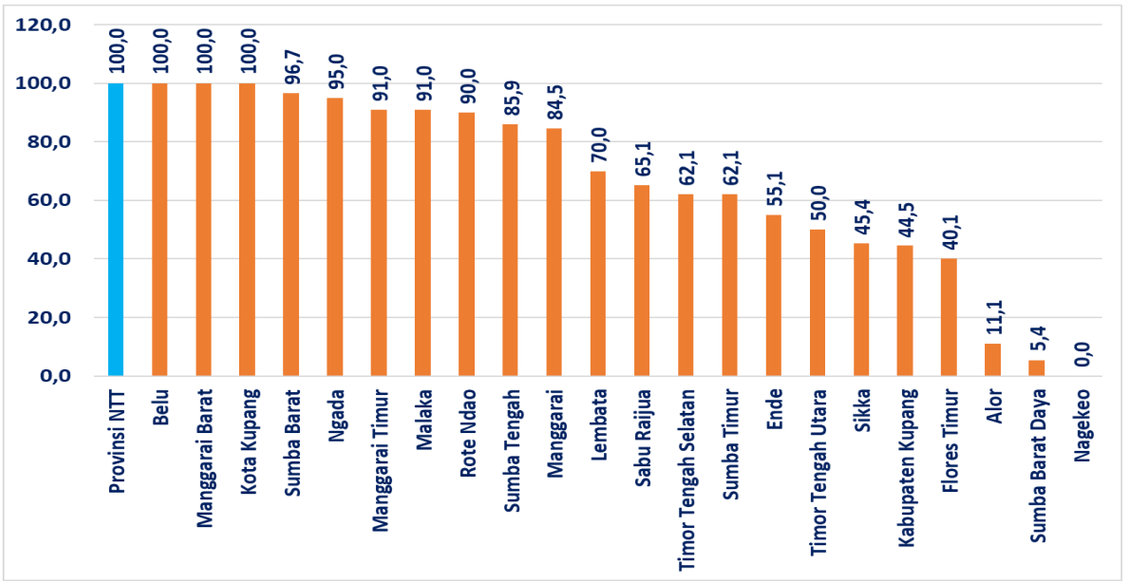

Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2024

Gambar 2.65.
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Berdasarkan Kabupaten/ Kota di Provinsi NTT Tahun 2023 (%)

2.4.6.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

SPM bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman provinsi meliputi penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi serta fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah provinsi.

Capaian SPM bidang perumahan Provinsi NTT Tahun 2021 sebesar 0 persen yang terus mengalami peningkatan sampai dengan Tahun 2023 dan 2024 senilai 100 persen. Rincian selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

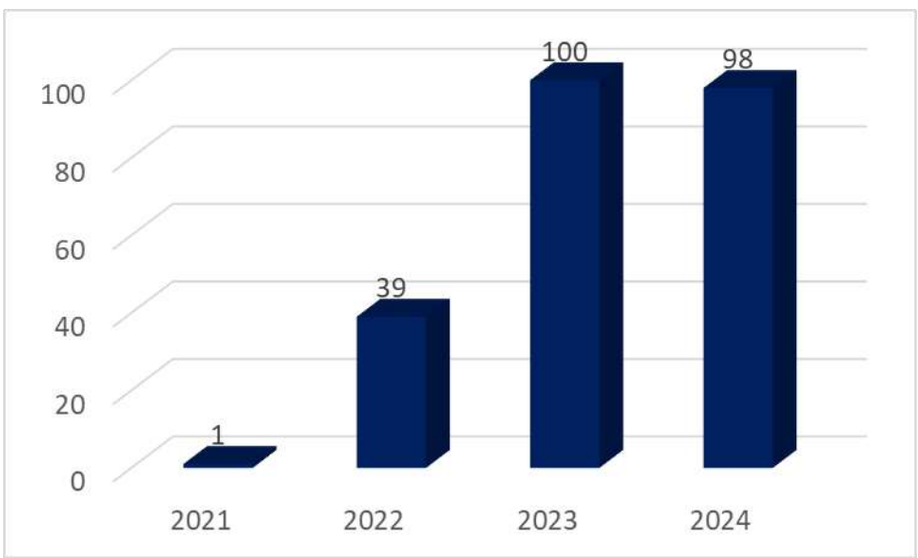

Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2025

Gambar 2.66.
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT Tahun 2021-2024 (%)

2.4.6.5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

SPM bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat provinsi meliputi pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum

provinsi sedangkan SPM bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat kabupaten/ kota meliputi pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat kabupaten/ kota, pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegaan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, serta pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Capaian SPM bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Provinsi NTT pada Tahun 2021 sebesar 54 persen yang terus mengalami peningkatan sampai dengan Tahun 2023 sebesar 100 persen, akan tetapi terjadi penurunan pada Tahun 2024 menjadi 97 persen. Rincian selengkapnya, dapat dilihat pada gambar berikut ini.

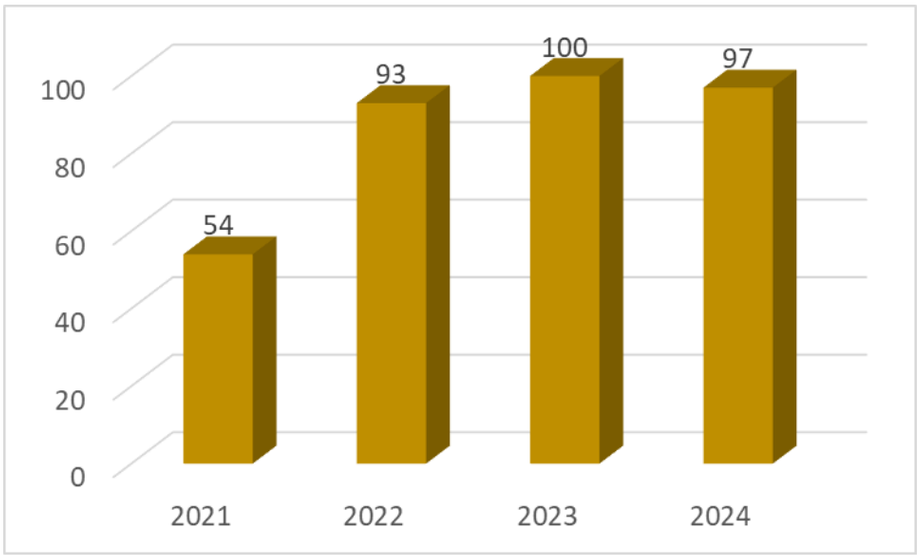

Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2025

Gambar 2.67.
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Provinsi NTT Tahun 2021-2024 (%)

2.4.6.6. Sosial

SPM bidang sosial provinsi meliputi rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti, rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti, rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti, rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti, dan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi. SPM bidang sosial kabupaten/ kota meliputi rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti, rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti, rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti, rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti, serta perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap darurat dan pasca bencana bagi korban bencana kabupaten/ kota.

Capaian SPM bidang sosial Provinsi NTT pada Tahun 2021 sebesar 72 persen yang terus mengalami peningkatan sampai dengan Tahun 2023 sebesar 100 persen dan kemudian terjadi penurunan pada Tahun 2024 menjadi 95 persen. Ricnian selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

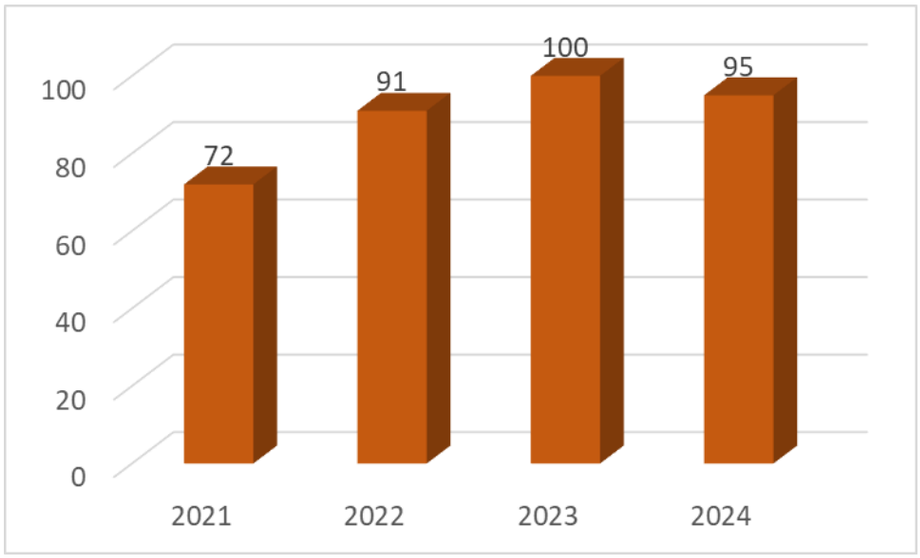

Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2025

Gambar 2.68.
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial Provinsi NTT Tahun 2021-2024 (%)

2.5 EVALUSASI RKPD TRIWULAN I TAHUN 2025

Capaian target Kinerja dan Anggaran Triwulan I lingkup Pemerintah Provinsi NTT sesuai urusan Pemerintahan (Wajib dan Pilihan) untuk belanja langsung tahun 2025. Capaian Realisasi Anggaran dihitung berdasarkan Realisasi Keuangan (belanja) dibagi Pagu sedangkan Realisasi Kinerja dihitung berdasarkan Capaian Indikator Kinerja Program (Outcome) yang merupakan perbandingan antara realisasi dan target kinerja. Untuk Mengetahui Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja berdasarkan Persentase Capaian Realisasi dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 2.15
Interval dan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
91% ≤ 100%	SANGAT TINGGI (ST)
76% ≤ 90%	TINGGI (T)
66% ≤ 75%	SEDANG (S)
51% ≤ 65%	RENDAH (R)
≤ 50%	SANGAT RENDAH (SR)

Kriteria ini berlaku pada kondisi Triwulan II dan Skala Intensitas kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut :

1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

Menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja yang telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

2) Hasil Sedang

Menunjukan pencapaian/realisasi kinerja telah memenuhi persyaratan minimal

3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah.

Menunjukan pencapaian/realisasi kinerja belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Sehubungan dengan pelaksanaan Evaluasi Hasil RKPD Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2025, maka Bapperida Provinsi NTT telah melakukan penyampaian Instrumen Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan dan cara pengisian Matriks Evaluasi RKPD. Sedangkan penyampaian laporan dilakukan secara offline maupun melalui Aplikasi *E-monev performance* dengan Link URL : http://bapperida.nttprov.go.id/e-kinerja

Realisasi belanja pada tiap Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, sebagaimana dapat dilihat ditabel berikut ini:

Tabel 2.16
Pagu, Realisasi dan Tingkat Capaian Anggaran Triwulan I
Tahun 2025

No	Perangkat Daerah	Pagu Anggaran 2023	Target Realisasi Hingga Tw-I	Realisasi Anggaran Hingga TW-I	%		Predikat	
					Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2,387.119.606.310	596.779.901.578	235.081.132.574	9,85	39.39	SR	SR
2	Dinas Kesehatan,	504.542.847.870	1256.135.711.968	36.093.842.809	7.15	28.62	SR	SR
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	180.537.025.513	45.134.256.378	7.626.434.354	4.22	16.90	SR	SR
4	Satuan Polisi Pamong Praja	15.186.742.500	3.796.685.625	2.362.038.941	15.55	62.21	SR	R
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.585.354.846	2.396.338.712	1.574.469.499	16.43	65.70	SR	R
6	Dinas Sosial	41.996.503.960	10.499.125.990	6.636.433.297	15.80	63.21	SR	R
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB	22.453.285.257	5.613.321.314	1.579.867.777	7.04	28.14	SR	SR
8	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	101.172.779.080	25.293.194.770	16.873.391.392	16.68	66.71	SR	S
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	13.306.493.800	3.326.623.450	1.739.018 460	13.07	52.28	SR	R
10	Dinas Perhubungan	65.277.524.596	16.319.381.149	3.552.834.010	5.44	21.77	SR	SR
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	17.716.695.880	4.429.173.970	3.566.494.296	20.13	80.52	SR	T
12	Dinas Koperasi, Usah Kecil dan Menengah	8.774.782.650	2.193.695.663	1.358.751.829	15.48	61.94	SR	R
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8.983.085.880	2.245.771.470	1.408.553.385	15.68	62.72	SR	R
14	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	53.944.349.880	13.486.087.470	2.337.602.935	4.33	17.33	SR	SR

No	Perangkat Daerah	Pagu Anggaran 2023	Target Realisasi Hingga Tw-I	Realisasi Anggaran Hingga TW-I	%		Predikat	
					Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja
15	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	13.995.661.240	3.498.915.310	1.990.174.517	14.22	56.88	SR	R
16	Dinas Kelautan dan Perikanan	55.958.303.600	13.989.575.900	3.754.175.001	6,71	26.84	SR	SR
17	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	16.535.095.696	4.133.773.924	2.059.476.487	12.46	49.82	SR	SR
18	Dinas Peternakan	42.695.762.700	10.673.940.675	4.518.370.365	10.58	42.33	SR	SR
19	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	75.625.470.220	18.906.367.555	10.030.895.392	13.26	53.06	SR	R
20	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	18.707.496.120	4.676.874.030	2.952.164.255	15.78	63.12	SR	R
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	15.518.450.270	3.879.612.568	2.040.696.520	13.15	52.60	SR	R
22	Sekretariat Daerah	122.022.723.534	30.505.680.884	20.648.336.543	16.92	67.69	SR	S
23	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	11.391.989.200	2.847.997.300	1.993.974.596	17.50	70.01	SR	S
24	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	177.181.785.347	44.295.446.337	46.554.646.324	26.28	100	SR	ST
25	Badan Perencanaan Pembangunan, riset dan Inovasi Daerah	26.524.952.840	6.631.238.210	3.655.029.001	13.78	55.12	SR	R
26	Badan Keuangan Daerah	781.634.764.109	195.408.691.027	52.729.436.072	6.75	26.98	SR	SR
27	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	134.627.431.370	33.656.857.843	12.554.249.501	9.33	37.30	SR	SR
28	Badan Kepegawaian Daerah	13.809.922.000	3.452.480.500	2.381.163.520	17.24	68.97	SR	S
29	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	30.093.008.860	7.523.252.215	3.183.470.034	10.58	42.32	SR	SR
30	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	7.560.766.240	1.890.191.560	1.136.431.960	15.03	60.12	SR	R
31	Inspektorat Daerah	32.353.238.653	8.088.309.663	4.902.677.731	15.15	60.61	SR	R
32	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	17.485.625.160	4.371.406.290	1.311.813.339	7.50	30.01	SR	SR
33	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	21.824..465.690	5.455.366.423	3.184.550.451	14.59	58.37	SR	R
34	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10.366.297.920	2.591.574.480	366.722.069	3.54	14.15	SR	SR

Sumber: Aplikasi e-monev Performance

Realisasi Keuangan diasumsikan sama dengan Realisasi Kinerja, dimana Presentase Realisasi tersebut merupakan perbandingan antara capaian dan target hingga Triwulan I. Target Realisasi dimasukan 25% dari Total Pagu Tahun 2025.

Dari Tabel diatas, dapat dilihat bahwa realisasi capaian anggaran dari 34 Perangkat Daerah pada triwulan I ini adalah sebesar 25.01 % atau Rp. 1,264,126,822,198.00 dari total anggaran sebesar Rp 5,056,507,288,791.00 sedangkan rata-rata capaian dari seluruh PD adalah sebesar 39.85 % dengan Predikat Sangat Rendah (SR).

2.6 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

A. Kondisi Permasalahan Pembangunan

Berdasarkan data kondisi umum perkembangan pembangunan Provinsi NTT, pembangunan Nasional dan perkembangan global serta sesuai hasil Evaluasi RPJMD Provinsi NTT Tahun 2024-2026 dan evaluasi RKPD 2024 I, pada bagian ini disampaikan data dan analisis atas permasalahan-permasalahan pembangunan di Provinsi NTT.

Permasalahan pembangunan merupakan kesenjangan antara harapan dengan realisasi tujuan pembangunan yang terjadi sampai dengan tahun 2023, yang terkandung dalam indikator-indikator kinerja pembangunan. Tidak tercapainya tujuan ini disebabkan karena rendahnya kapasitas kelembagaan, keuangan dan pengaruh faktor-faktor eksternal yang tidak dapat diantisipasi serta sulit dikendalikan seperti adanya pandemi Covid-19, Badai Seroja, Krisis Ekonomi dan Perang Rusia-Ukraina.

Selain faktor-faktor eksternal tersebut juga terdapat faktor internal yang berkaitan dengan kondisi geografis NTT yang berbeda dengan daerah lainnya yang ada di Indonesia. Kondisi geografis dan topografis Nusa Tenggara Timur, terutama kondisi-kondisi yang meliputi iklim, topografi, jenis dan kualitas tanah, hutan dan vegetasi, serta kondisi perairan dan keanakeragaman hayati yang sangat mempengaruhi aktivitas penduduk.

Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang berciri kepulauan yang mempunyai 1.192 pulau dengan kondisi topografis yang kurang menguntungkan. Dengan kondisi tersebut, NTT masih menghadapi berbagai keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan dasar, sarana dan prasarana transportasi laut dan udara, biaya transportasi yang mahal dalam rangka pelayanan pemerintahan, terbatasnya aksesibilitas masyarakat secara umum, dan masih adanya wilayah yang terisolasi secara fisik dan sosial pada musim-musim tertentu.

2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, antara lain:

1. Masih tingginya angka kemiskinan
   Tingkat kemiskinan penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur masih tinggi, masih sebesar 19,96 % atau berjumlah 1,117 juta orang pada maret tahun 2023 dibandingkan dengan prosentase kemiskinan nasional yang sudah mencapai single digit yaitu 7,29 %.
2. Masih tingginya Stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur
   Pemerintah pusat melalui Bappenas telah merubah target penurunan stunting di seluruh Indonesia termasuk Provinsi NTT dengan merujuk pada data hasil Survey Kesehatan Indonesia(SKI) Tahun 2023. Berdasarkan hasil Survey Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023, prevalensi Stunting provinsi NTT sebsesar 37,9 dan tahun 2024 diberikan target penurunan stunting menjadi 35,5. Kemudian pada Tahun 2025, provinsi NTT juga telah diberikan target penurunan Stunting sebesar 33,1. Sedangkan Data

e-PPGBM digunakan untuk pemberian intervensi program dan kegiatan percepatan penurunan stunting. Tujuan pendekatan e-PPGBM agar status gizi anak terpantau dengan baik dan dapat diberi intervensi lebih tepat sasaran.

3. Masih rendahnya pendapatan masyarakat
   Rendahnya pendapatan masyarakat disebabkan belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam serta masih rendahnya kualitas sumber daya manusia dan belum optimalnya upaya pemberdayaan masyarakat.
   Selain itu rendahnya pendapatan masyarakat akan berimbas pada rendahnya kinerja perekonomian, yang disebabkan rendahnya daya saing daerah. Daya saing daerah menunjukkan kemampuan suatu daerah menciptakan nilai tambah untuk mencapai kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan bagi masyarakat dan daerah. Secara umum, PDRB per kapita Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami peningkatan selama periode 2010-2023. Pada Tahun 2010, PDRB riil per kapita sebesar 9.317 ribu rupiah kemudian meningkat menjadi 13.513 ribu rupiah pada Tahun 2023. Selain itu, PDRB nominal per kapita juga meningkat dari 9.317 ribu rupiah pada Tahun 2010 menjadi 23.078 ribu rupiah pada Tahun 2023, sedangkan pertumbuhan Ekonomi NTT pada tahun 2023 adalah sebesar 3,52 persen.

4. Masih rendahnya Rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk 15 tahun keatas di Nusa Tenggara Timur (NTT) Capaian Rata-rata Lama Sekolah tahun 2020-2023 menunjukkan tren yang cukup baik dimana capaian 7,63 tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 7,82 tahun 2023 atau terjadi peningkatan sebesar 0,19. Angka tersebut memberi makna bahwa rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal adalah baru mencapai pada janjang Kelas VII SMP. Apabila dibandingkan dengan capaian Nasional, maka capaian provinsi masih dibawah rerata capaian Nasional yang mencapai 8,77 tahun 2023. Angkanya meningkat 0,01% dibandingkan pada 2021 yang mencapai 13,20 tahun. Hal tersebut menandakan bahwa setiap penduduk NTT yang berusia 7 tahun ke atas diharapkan mampu mencapai 13 tahun masa sekolah atau tamat Diploma 1 (D1). Angka HLS di NTT sedikit lebih rendah dari rata-rata secara nasional yang sebesar 13,28 tahun.
5. Infrastruktur yang masih belum memadai. Pembangunan infrasturktur jalan ini juga dilakukan dengan koordinasi dan kolabarasi pembangunan dimana pemerintah kabupaten menyelesaikan jalan kabupaten yang terhubung dengan jalan provinsi menuju ke lokasi-lokasi potensial agar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dapat tumbuh dan berkembang.
6. Nusa Tenggara timur merupakan daerah kepulauan yang sekaligus menjadi daerah terluar dan terdepan, sebagian besar (13 dari 22) kabupaten/kota masih merupakan daerah tertinggal. Selain itu Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan daerah rawan bencana.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelengaraan Pemerintah Daerah

Adapun permasalahan pembangunan menurut urusan pemerintahan daerah dapat dijabarkan sebagai berikut:
Pembangunan daerah dilaksanakan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang diidentifikasi dari adanya gap antara kondisi yang ada dengan kondisi ideal. Mengacu pada kondisi sebagaimana tergambarkan pada Sub Bab 2.1 dia atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan pokok pembangunan di Nusa Tengara Timur antara lain sebagai berikut: **(1) Masih tingginya tingkat kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial; (2) Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia; (3) Masih belum optimalnya pelayanan**

infrastruktur; (4) Pertumbuhan ekonomi daerah mengalami perlambatan; (5) Masih belum optimalnya kinerja pemerintah daerah dan pelayanan publik kepada masyarakat. Kelima masalah pokok pembangunan tersebut di atas dipetakan dalam beberapa transformasi pembangunan sekaligus menggambarkan 4 aspek seperti aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan aspek daya saing**.**

2.8.1.1 Transformasi Sosial

A. Kesehatan untuk Semua

Pembangunan kesehatan menjadi salah satu faktor strategis dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia secara paripurna. Pembangunan kesehatan dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan pada semua kelompok masyarakat sesuai siklus kehidup an yang dimulai dari ibu hamil sampai dengan lanjut usia. Upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Nusa Tenggara Timur telah dilakukan selama ini, namun masih ditemui berbagai tantangan dan permasalahan antara lain sebagai berikut;

a. masih terbatasnya Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana;
b. masih terbatasnya Pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi Kejadian Luar Biasa(KLB) Provinsi;
c. masih terbatasnya kualitas layanan Usaha Kesehatan Masyarakat(UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan(UKP);
d. masih tingginya Prevalensi Stunting;
e. masih tingginya Kasus Kematian Ibu, bayi dan Balita;
f. masih tingginya angka Wasting (Gizi Buruk dan Gizi Kurang) dan Underweight;
g. rendahnya cakupan pelayanan kesehatan masyarakat melalui layanan kesehatan bergerak di DTPK (Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan)
h. terbatasnya Fasilitas Pelayanan, Sarana Prasarana dan Alkes untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Provinsi;
i. terbatasnya temuan Kasus dan pengobatan HIV dan Tuberculosis yang diobati;
j. terbatasnya Kabupaten / Kota mencapai Eliminasi Malaria;
k. terbatasnya Kabupaten/kota dengan angka keberhasilan pengobatan (success RPJMD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 Rate) TBC>85% ;
l. rendahnya Persentase Puskesmas dengan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar;
m. rendahnya Persentasi Rumah Sakit dengan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar;
n. rendahnya cakupan kesehatan berbasis Masyarakat**;**
o. belum optimalnya Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
p. belum optimalnya kemampuan penyedia layanan Kesehatan untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas dan kelompok rentan.

B. Pendidikan Berkualitas dan Merata

Masalah pokok pembangunan pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur antara lain: (1) Belum meratanya akses pendidikan; (2) Belum optimalnya mutu pendidikan; (3) Belum optimalnya tata kelola pendidikan; (4) Belum terjadi *link and match* antara lulusan pendidikan Vokasi dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri; dan (5) Belum terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan. (6) Masih rendahnya angka Rata-rata Lama Sekolah; (7) Masih rendahnya angka Harapan Lama Sekolah. Ketujuh masalah pokok tersebut disebabkan oleh beberapa akar masalah yang dapat dikelompokan sebagai berikut;

1) Permasalahan Akses layanan Pendidikan antara lain sebagai berikut:

a. terbatasnya jumlah sarana-prasana Pendididikan;
b. rendahnya kualitas sarana prasana Pendidikan;
c. belum meratanya distribusi tenaga pendidik;
d. masih rendahnya kesejahteraan tenaga pendidik di daerah 3 T (Terpencil, Terluar dan Terdepan);
e. terbatasnya akses digitalisasi dalam pembelajaran di sekolah;
f. minimnya analisis dalam pembukaan Unit Sekolah Baru.

2) Permasalahan Mutu layanan Pendidikan antara lain sebagai berikut:
a. rendahnya capaian literasi dan numerasi;
b. Kualitas dan kuantitas tenaga Pendidik masih relatif rendah dan terbatas;
c. rendahnya kualitas manajemen sekolah
d. rendahnya kompetensi guru;
e. rendahnya daya saing lulusan
f. masih rendahnya jumlah Sekolah Menengah dan Kejuruan yang berakreditasi B;

3) Permasalahan Khusus Sekolah Vokasi antara lain sebagai berikut;
a. belum tersediannya Sekolah Menengah Vokasi Unggulan;
b. terbatasnya sarana dan prasarana praktek bagi siswa SMK;
c. Belum optimalnya daya saing / lulusan SMK (Sekolah Vokasi);
d. rendahnya kompetensi guru produktif pada sekolah menengah Vokasi;
e. terbatasnya ketersediaan dunia usaha dan industri yang dapat mendukung pembelajaran (magang) bagi siswa SMK;
f. terbatasnya sumber daya listrik dan air di sekolah untuk mendukung pembelajaran praktik.
g. minimnya dana operasional praktek di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

C. Perlindungan Sosial yang Adaptif

Hakekat perlindungan sosial yang adaptif yakni meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi resiko sosial. Impelementasi perlindungan sosial yang adaptif belum optimal. Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan salah satu upaya dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang layak, bermartabat, dan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Pembangunan kesejahteraan sosial diselenggarakan melalui perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, serta pemberdayaan sosial termasuk subyek didalamnya lansia dan penyandang disabilitas. Pembangunan kesejahteraan sosial di Nusa Tenggara Timur dilakukan oleh pemerintah daerah, namun demikian masih dijumpai beberapa permasalahan penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial antara lain;

a. masih tingginya angka kemiskinan;
b. rendahnya Cakupan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
c. terbatasnya penanganan warga negara pekerja migran korban tindak kekerasan;
d. terbatasnya Cakupan Jaminan Sosial bagi PMKS;
e. terbatasnya Cakupan Penanganan Korban Bencana Skala Provinsi;
f. Cakupan program kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas miskin dan rentan yang belum terjangkau secara menyeluruh.
g. Belum optimalnya pembangunan Gender, Equalitas, Disabilitas, dan Social Inkluasi (GEDSI) sehingga menyebabkan kesempatan yang belum merata untuk berpartisipasi dalam pembangunan bagi penyandang disabilitas, lansia dan kelompok rentan

h. Belum optimalnya cakupan jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan;
i. Belum optimalnya akurasi data yang mempengaruhi ketepatan intervensi;
j. Belum optimalnya pemberdayaan terhadap kelompok masyarakat miskin;
k. Masih banyak rumah masyarakat yang masuk kategori rumah tidak layak huni;
l. Belum ramahnya fasilitas umum terhadap penyandang Disabilitas dan kelompok rentan;
m. belum optimalnya perlindungan penyandang disabilitas dari kekerasan, eksploitasi dan penelantaran;
n. belum optimalnya penyediaan dan perluasan akses lapangan kerja termasuk untuk penduduk disabilitas.

2.8.1.2. Transformasi Ekonomi

A. Produksi dan Produktivitas Sektor Primer

Belum optimalnya produksi dan produktivitas sektor primer yang disebabkan oleh:

a) Pola pertanian, peternakan, dan perikanan masih bersifat subsisten, belum berorientasi komersil.
b) Belum optimalnya adopsi teknologi pada sektor pertanian, peternakan, dan perikanan.
c) Dominasi petani gurem dimana, pusat-pusat produksi pertanian masih sporadis dan dalam skala kecil
d) Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan potensi sektor primer.
e) Lemahnya rantai pasok dalam sistem agribisnis yakni, penyediaan dan akses terhadap sarana produksi utama dalam sistem agribisnis di NTT masih lemah.
f) Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasana termasuk ketersediaan pupuk, benih, jalan usaha tani, ketersediaan air dan irigasi.
g) Belum optimalnya penanganan hama penyakit pada sektor pertanian dan peternakan.
h) Keselerasan hubungan hulu-hilir (produsen dan pengguna produk pertanian dan perikanan) yang belum terjalin.
i) Ancaman hama penyakit yang berdampak luas, khususnya ASF pada ternak babi dan hama belalang kembara (*locusta migrotoria manilensis meyen*).
j) Dampak perubahan iklim terhadap pola tanam dan masa tanam sehingga menyebabkan fenomena gagal panen.
k) Jaringan irigasi yang tidak efisien di sentra produksi padi (sawah).

B. Industri

1. Belum optimalnya pengolahan hasil-hasil produksi sektor primer.
2. Masih rendahnya pembangunan dan pengembangan industri menegnah besar di daerah, disebabkan oleh:
   a) Daya tarik investasi masih rendah, disebabkan oleh insentif berinvestasi belum menarik minat investor akibat tingginya biaya logistik,
   b) Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia trampil yang dipelukan dalam sektor industri,
   c) Masih terbatasnya adopsi tekhnologi modern serta penguasaan tekhnologi dan literasi tekhnologi tenaga kerja di industri pengolahan masih rendah,
   d) Sektor industry masih bertumpu pada industri kecil dan menengah,

e) Belum optimalnya pemanfaatan akses pembiayaan, dimana sudah banyak program-program pembiayaan yang diluncurkan oleh Pemerintah, salah satunya Kredit Usaha Rakyat (KUR), namun belum dimanfaatkan secara maksimal oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan masyarakat,
f) Produksi dan produktifitas sektor primer yang bersifat sporadis, termasuk rendahnya rantai pasok sehingga menyebabkan lemahnya ketersediaan dan kontinuitas bahan baku industri yang menjamin keberlanjutan supply faktor produksi yang diperlukan dalam pengembangan industri, dan
g) Faktor geografis dan keterbatasan infrastruktur, serta belum optimalnya konektivitas antardaerah.

3. Belum optimalnya realisasi PMA dan PMDN.
4. Masih terbatasnya pengembangan pasar yang inkulsif pada sektor primer maupun hasil produksi sektor industri.
5. Belum optimalnya transaksi produk lokal.

C. Pariwisata

1. Belum optimalnya pengembangan dan pengelolaan potensi pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan yang disebabkan oleh:
   a) Belum optimalnya pembangunan dan pengembangan destinasi pariwisata unggulan,
   b) Belum optimalnya promosi dan pemasaran pariwisata baik dalam maupun luar negeri,
   c) Rendahnya kualitas sumber daya manusia terampil yang terlatih untuk pengembangan pariwisata,
   d) Industri pariwisata belum berkembang secara merata pada setiap destinasi wisata,
   e) Belum optimalnya kerja sama antardaerah dalam pengembangan pemasaran pariwisata melalui penyediaan paket-paket wisata antardaerah.
   f) Belum meratanya infarstuktur yang mendukung pariwisata berupa aksesibilitas, konektivitas, dan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) pada daerah-daerah yang memiliki potensi pariwisata, dan
   g) Masih terbatasnya informasi pariwisata akibat terbatasnya pusat-pusat informasi pariwisata (*Tourism Information Center*-TIC).
2. Belum optimalnya kontribusi pariwisata terhadap perekonomian daerah.
3. Industri pariwisata belum mampu menciptakan lapangan kerja baru.

D. Ekonomi Kreatif

1. Belum optimalnya pengelolaan potensi ekonomi kreatif akibat:
   a) Belum optimalnya sumber daya manusia yang trampil, kreatif dan inovasi serta rendahnya literasi wirausaha termasuk kemampuan tekhnologi yang belum optimal,
   b) Belum optimalnya kelembagaan ekonomi kreatif dan manejemen pengelolaan usaha,
   c) Masih lemahnya perlindungan terhadap produk usaha ekonomi kreatif melalui pendaftaran hak kekayaan intelektual hasil budaya tradisonal,
   d) Daya saing SDM ekonomi kreatif yang masih lemah dalam hal komersialisasi kekayaan intelektual,
   e) Rendahnya akses permodalan yakni, terbatasnya akses pada pembiayaan atau modal untuk usaha kecil dan menengah di sektor ekonomi kreatif, dan
   f) Kurangnya adopsi teknologi dan inovasi dalam proses produksi dan distribusi.

2. Belum optimalnya promosi dan pemasaran produk kreatif dari NTT dengan memanfaatkan pasar didital.
3. Belum optimalnya kontribusi ekonomi kreatif terhadap perekonomian daerah.

E. Ekonomi Biru dan Ekonomi Hijau

1. Masih rendahnya pengembangan ekonomi biru dan ekonomi hijau yang ditandai dengan pola produksi pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek keberlanjutan.
2. Tingginya biaya pengelolaan lingkungan di darat dan laut.
3. Masih lemahnya pemahaman dan aktualisasi pengembangan indeks ekonomi biru dan indeks ekonomi hijau.
4. Perevelensi kemiskinan yang masih tinggi di masyarakat pesisir, petani dan peternak.
5. Masih rendahnya pola pembangunan yang menjawab tuntutan pembangunan berkelanjutan yang melihat kemajuan secara holistik dari sisi ekonomi, sosial, dan lingkungan.
6. Belum optimalnya pelestarian ekosistem hutan guna menjamin keseimbangan ekosistem hutan untuk mempertahankan fungsi ekologis hutan, seperti penyerapan karbon, pengaturan siklus air, dan konservasi keanekaragaman hayati.

F. UMKM dan Koperasi

1. Belum optimalnya pengambangan UMKM dan Koperasi yang ditunjukan dengan masih lemahnya daya saing UMKM dan Koperasi yang dapat memberikan sumbangan bagi perekonomi daerah.
2. Rendahnya keterikatan UMKM pada rantai pasok dan rantai nilai produksi.
3. Jumlah koperasi yang bergerak di sektor riil masih rendah.
4. Terbatasnya jumlah koperasi perempuan yang terbentuk.
5. Terbatasnya kelompok perempuan yang mendapat bantuan modal usaha dan pelatihan kewirausahaan.
6. Tingkat produktivitas UKM belum optimal akibat keterbatasan permodalan serta rendahnya penguasaaan proses produksi dan teknologi.

G. Ketengakerjaan

1. Rendahnya daya saing tenaga kerja akibat rendahnya tingkat pendidikan dan/atau tingkat keterampilan yang tidak sesuai dengan kebutuhan kebutuhan *cluster* kompetensi tenaga kerja.
2. Masih tingginya tenaga kerja tidak berbayar.
3. Tingginya permasalahan *Central Post-Migration Integration* (CPMI) dan *Post-Migration Integration* (PMI)
4. Masih tingginya tenaga kerja yang bekerja pada lapangan pekerjaan berkualitas rendah di sektor informal dengan kondisi kerja yang tidak stabil dan kurangnya jaminan social dengan upah yang rendah.
5. Masih rendahnya literasi wirausaha dan penguasaan tekhnologi oleh tenaga kerja di NTT.
6. Terbatasnya penyerapan eks peserta pelatihan di pasar kerja.
7. Kurangnya minat dan kemampuan dalam menciptakan lapangan kerja sendiri (wirausaha baru)
8. Masih terdapat perusahaan yang belum Melaksanakan Upah Minimum Provinsi.
9. Masih tingginya perselisihan hak, kepentingan, pemutusan hubungan kerja (PHK) dan antar serikat pekerja atau buruh dalam satu perusahaan
10. Terbatasnya Jumlah SDM Pengawas Ketenagakerjaan untuk menilai perusahaan yang melaksanakan norma kerja.

H. Badan Usaha Milik Daerah

1. Belum optimalnya kinerja BUMD:
   a) Masih rendahnya ROA BUD, dan
   b) Masih rendahnya kontribusi BUMD terhadap Penerimaan Daerah.
2. Belum Optimalnya Daya Saing BUMD:
   a) Masih rendahnya Total Asset Turnover BUMD.
3. Peran BUMD Sebagai Agen Pembangunan:
   a) Masih Rendahnya Rasio capaian BUMD terhadap PDRB, dan
   b) Belum Opttimalnya pemanfaatan program CSR.

I. Percepatan Transmisi Energi

1. Masih tingginya ketergantungan terhadap energi fosil yang cadangannya terus menurun.
2. Potensi energi terbarukan yang sangat besar tetapi pemanfaatan masih sangat rendah.
3. Kualitas infrastruktur ketenagalistrikan yang belum memadai.
4. Tingginya biaya investasi terkait EBT.
5. Terbatasnya rantai nilai domestik pendukung transisi energi.

J. Digital

1. Belum optimalnya digitaliasi sektor strategis, yakni:
   a) Terdapat layanan pendidikan dan kesehatan belum berbasis digital,
   b) Belum otpimalnya penguatan System Pemerintah Berbasis Digital (SPBE) dan Sistem Distribusi Informasi (SDI),
   c) Adposi digital bagi para pelaku UMKM masih rendah (*e-commerce*),
   d) Pemahamanan masayrakat tentang inovasi dan pengembangan keuangan digital (*Fin Tech*) masih rendah, dan
   e) Pengelolaan destinasi wisata, pertanian, perikanan, dan industry berbasis tekhnologi masih rendah.
2. Masih terbatasnya aspek pendukung dan akselerator transformasi digital, yakni:
   a) Masih rendanhya infrastruktur dan sarana prasarana dasar digital,
   b) Literasi digital masyarakat belum merata yakni, kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait pemanfaatan digital, dan
   c) Rendahnya pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI), *Big Data Analytics, Blackhain.*

K. Integrasi Ekonomi Domestik dan Nasional

1. Masih rendahnya mengembangkan ekonomi lokal yang kuat dan terintegrasi yang disebabkan oleh:
   a) Infrastruktur konektivitas belum memadai dan terintegrasi, yakni, belum optimal dukungan infrastruktur transportasi, seperti jalan, pelabuhan, dan bandara, menghambat mobilitas barang dan orang serta meningkatkan biaya logistik,
   b) Belum optimalnya kerjasama antar daerah untuk mengatasi ketimpangan antardaerah, dan
   c) Rantai pasok yang tidak efisien dan kurang terintegrasi membuat distribusi barang lebih sulit dan mahal rendah.
2. Masih renahnya daya saing ekonomi daerah dan ketergantungan terhadap ekonomi nasional masih sangat tinggi.

3. Perdagangan antarwilayah dan ekspor serta partisipasi dalam rantai nilai nasional masih belum optimal, disebabkan oleh:
   a) Belum otimalnya keterkaitan rantai nilai antarwilayah dan ekspor produk lokal masih rendah, dan
   b) Belum optimalnya pengembangan industry pengolahan di daerah yang mengakibatkan banyak hasil Sumber Daya Alam (SDA) diantarpulaukan dalam bentuk mentah
4. Masih lemahnya daya dukung tercapainya integrasi ekonomi domestik dan konektivitas nasional, yakni:
   a) Belum optimalnya regulasi perbaikan iklim berusaha dan investasi, dan
   b) Terbatasnya investasi produktif dan berkualitas yang mendukung upaya transformasi ekonomi.

L. Perkotaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

1. Pusat-pusat pertumbuhan belum memberikan dampak signifikan pada perekonomian daerah.
2. Pembangunan yang dilakukan belum merata menyebabkan ketimpangan antarwilayah.
3. Pengembangan sentra pengolahan di wilayah perkotaan belum optimal karena belum terpetakannya sentra produksi.
4. Belum optimalnya pengembangan pemasaran dan dukungan sarana prasarana terhadap sentra produksi dan sentra pengolahan.

M. Infrastruktur

1. Masih rendahnya penyediaan infrastruktur pelayanan dasar ke-PU-an dan perumahan.
2. Disparitas kualitas dan kuantitas infrastruktur antar wilayah masih tinggi.
3. Keterbatasan pembangunan teknis keirigasian dan kelembagaan pada daerah irigasi kewenangan Provinsi.
4. Minimnya penyediaan bangunan air baku dalam menunjang produktifitas sektor primer
5. Tingginya kesenjangan pemanfaatan ruang berdasarkan dokumen tata ruang.
6. Konsolidasi yang terbatas antara pemerintah pusat dan daerah serta lintas sektor dalam pemanfaatan ruang sesuai rencana wilayah dan tata ruang.
7. Rendahnya kepatuhan jasa kontruksi sesuai ketentuan yang berlaku
8. Keamanan dan keselamatan transportasi masih rendah.
9. Interkoneksi laut khususnya yang mendukung pariwisata (sumba, Labuan Bajo, Timor dan alor) masih belum tersedia.
10. Masih rendahnya persentase rumah layak huni.
11. Masih terdapat rumah tangga yang belum mendapatkan akses elektrifikasi.
12. Sistim jaringan transportasi darat dan laut yang belum maksimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
13. Belum memadai sarana prasarana dan berikut fasilitas penunjang transportasi darat dan laut sesuai dengan kebutuhan.
14. Fungsi pembinaan, pengawasan dan koordinasi lintas sektor sesuai kewenangan untuk pengelolaan transportasi belum berjalan optimal

2.8.1.3.Tranfromasi Tata Kelola

a. Kemampuan Fiskal Daerah

1. Masih rendahnya derajat kemandirian fiskal daerah yang ditandai dengan masih tingginya angka ketergantungan pada dana transfer pusat.
2. Belum optimalnya pengelolaan terhadap potensi PAD.
3. Belum dikembangkannya investasi dalam kaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.
4. Belum optimalnya pengelolaan asset daerah.

b. Pelayanan Publik

1. Belum optimalnya implemtasi reformasi birokrasi
2. Belum optimalnya Implementasi SAKIP
3. Masih rendahnya akses pelayanan pubik berbasis digital yang merata bagi masyarakat.
4. Pelayanan yang berbasis kepuasan masyarakat belum optimal
5. Belum otpimalnya inovasi pelayanan public
6. Belum optimalnya pendekatan pembangunan yang ramah GEDSI pada berbagai urusan pelayanan umum
7. Belum optimalnya pendekatan pembangunan yang tahan teradap resiko bencana pada berbagai urusan pelayanan
8. Belum optimalnya pembangunan dan layanan dasar di kawasan perbatasan negara.

c. Manajemen Talenta

1. Belum optimalnya indeks profesionalisme ASN.
2. Belum optimalnya pengembangan SDM birokrasi berbasis manajemen talenta.

d. Kualitas Regulasi

1. Belum optimalnya ketersediaan SDM regulasi.

e. Keberlanjutan Pembangunan

1. Belum terintegrasinya proses bisnis perencanaan, pengaggaran, akuntabilitas kinerja, pemantauan dan evaluasi.
2. Belum optimalnya perencanaan dan penganggaran dalam memastikan keberlanjutan pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku.

2.8.1.4. Transformasi Supermasi hukum, Stabilitas Makro dan Kepemimpinan Daerah

A. Stabilitas Makro

Hakekat Stabilitas Makro adalah menciptakan kondisi ekonomi yang stabil dan seimbang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi risiko ekonomi dan meningkatkan investasi. Stabilitas makro dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain kondisi ekonomi global yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan inflasi; Kebijakan fiskal yang mengatur pengeluaran pemerintah dan pajak; serta perdagangan internasional yang mempengaruhi neraca pembayaran dan pertumbuhan ekonomi. Kondisi fiskal daerah Nusa Tenggara Timur dihadapkan pada permasalahan antara lain;

a. terbatasnya kemampuan fiskal daerah (fiskal rendah) sehingga membutuhkan dukungan intervensi pemerintah pusat melalui Dana Transter daerah(DAU, DAK dan Dekon);
b. masih rendahnya daya saing ekonomi daerah yang disebakan oleh lemahnya investasi dan penciptaan nilai tambah.

2.8.1.5. Tranfromasi Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi

A. Budaya

1. Penurunan (degradasi) nilai sakral budaya dari substansi seharusnya karena berbagai faktor diantaranya faktor pembelaharan arti budaya

yang tidak diturunkan secara baik ke generasi seterusnya.

2. Masih rentannya karakter dan jati diri, budaya dan kearifan lokal terhadap meningkatnya ancaman negatif budaya global.
2. Budaya dan kearifan lokal belum menjadi pertimbangan sebagai modal dasar pembangunan dan penggerak transformasi masyarakat.
3. Masih kurangnya pengakuan dan perlindungan terhadap hak masyarakat adat.

B. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

1. Kualitas hidup keluarga yang semakin terdegradasi oleh dampak lingkungan. Peran dan fungsi keluarga yang belum optimal menyebabkan ancaman krisis moral dan karakter kalangan generasi muda.
2. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, pemuda dan perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia belum optimal.
3. Pembangunan Gender, Equality, Disabilitas dan Sosial Inklusi (GEDSI) belum optimal. Ketimpangan akses
4. Belum optimalnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta belum kuatnya sinergi layanan untuk penanganan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

C. Kualitas Lingkungan Hidup dan Keanekaragaman Hayati

1. Kurangnya pengelolaan lingkungan hidup, pemanfaatan sumber daya alam yang lestari serta pembangungan yang belum memperhatikan aspek resiko bencana.
2. Menurunnya kualitas air, udara, tutupan lahan, dan air laut.
3. Resiko krisis kelangkaan air pada beberapa daerah akibat belum optimalnya pemanfaatan daya tampung air di daerah secara merata.
4. Pengelolaan sampah dan limbah yang belum optimal.
5. Sektor lahan selalu menjadi sumber emisi tertinggi di NTT.
6. Ketergantungan lingkungan dan alam terhadap iklim dan curah hujan sementara perubahan iklim semakin tidak menentu yang diperparah dengan risiko kegagalan mitigasi dan lemahnya adaptasi perubahan iklim.
7. Tingginya resiko bencana terhadap aktifitas masyarakat dan pembangunan daerah
8. Keterbatasan akses informasi dan koordinasi kebencanaan lintas sektor terkait penyediaan layanan dasar dan layanan public.
9. Belum optimalnya implementasi perencanaan tata ruang dan pembangunan rendah karbon yang ditandai dengan:
   a) Belum optimalnya pengendalian terhadap pemanfaatan ruang (fungsi, struktur dan pola ruang);
   b) Cakupan penyimpangan terhadap RUTR dan RDTR pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota masih tinggi;
   c) Meningkatnya emisi gas rumah kaca yang didominasi oleh sektor energi dan transportasi;
   d) Rendahnya perhatian terhadap aspek keberlanjutan lingkungan dapat memperparah rusaknya ekosistem;
   e) Masih rendahnya cakupan pencegahan dan penanggulangan daerah berpotensi rawan kebakaran setiap tahun;
   f) Masih terbatasnya cakupan pemasangan rambu peringatan dini pada daerah rawan bencana;
   g) Masih terbatasnya cakupan desa/kelurahan tangguh bencana pada kawasan pariwisata,
   h) Masih minimnya cakupan daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang memiliki rencana kontinjensi kebencanaan.

D. Energi

1. Masih rendahnya pemerataan akses terhadap energi.
2. Masih rendahnya pemanfaatan energi baru terbarukan.
3. Masih rendahnya efisiensi penggunaan dan pemanfaatan energi.
4. Ketergantungan daerah terhadap supply energi berbasis fosil masih tinggi.
5. Belum optimalnya pengelolaan energi dan sumber daya mineral yang berkelanjutan.
6. Minimnya ketersediaan sistem komunikasi, informasi dan edukasi pembangunan dan pemanfaatn energi terbarukan

F. Pangan

1. Belum optimalnya produksi dan produktivitas sektor pertanian penghasil pangan yang menyebabkan terbatasnya ketersediaan pangan.
2. Belum optimalnya akses dan distribusi pangan.
3. Belum optimalnya pengelolaan sistem pangan yang berdampak pada pemanfaatan pangan.
4. Belum memetakan resiko terhadap perubahan iklim dan kebencanaan.

G. Perubahan Iklim dan Bencana

1. Ancaman pada ketahanan pangan, kepunahan pada keaneragaman hayati daerah NTT.
2. Belum optimal dan minimnya infrastruktur yang resilient bencana dan perubahan iklim.
3. Belum optimalnya pemanfaatan ruang dan lahan berdasarkan daya dukung dan daya tampung (DDDT) yang berbasis penanggulangan resiko bencana.
4. Pranata kuat masih berkutat pada kesiapan dokumen aksi daripada sarana-prasarana kebencanaan.
5. Masih berpatok pada aksi setelah bencana dari pada mitigasi dan adaptasi.
6. Rencana pemulihan penghidupan masyrakat pasca bencana yang belum mempertimbangkan prinsip-prinsip resiko bencana jangka Panjang.
7. Minimnya ketersediaan sistem komunikasi, informasi dan edukasi kebencanaan dan perubahan iklim yang inklusi

BAB III
KERANGKA EKONOMI
DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi dan keuangan daerah tahun 2026 meliputi kerangka ekonomi makro dan kerangka pendanaan. Kerangka ekonomi makro memberikan gambaran kondisi ekonomi daerah yang ditunjukkan oleh indikator pembangunan berupa laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, kondisi ketenagakerjaan, dan derajat kesejahteraan masyarakat yang diindikasikan oleh angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka dan Indeks Gini. Indikator-indikator yang membentuk kerangka ekonomi ini, digunakan sebagai dasar bagi penyusunan proyeksi ekonomi di tahun 2026. Sedangkan kerangka pendanaan daerah memuat arah kebijakan keuangan daerah meliputi analisis terkait sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan belanja, dan pembiayaan untuk pembangunan tahun 2024.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan pembangunan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026 mempertimbangkan evaluasi capaian kinerja pembangunan ekonomi pada tahun 2024 dan kondisi ekonomi pada awal tahun 2025. Selain itu arah kebijakan ekonomi daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026 diselaraskan dengan kebijakan ekonomi nasional dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTT Tahun 2025-2029. Kebijakan ekonomi daerah disusun dengan tujuan untuk mengimplementasikan program serta mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi makro yang ada.

Kebijakan perekonomian Provinsi NTT dipengaruhi oleh dinamika perkembangan ekonomi nasional yang mempertimbangkan hasil analisis terhadap kinerja perekonomian nasional dan daerah tahun 2024. Analisis ekonomi daerah dimaksudkan untuk menilai sejauh mana realisasi pembangunan daerah dapat mempengaruhi kinerja ekonomi daerah pada tahun 2026.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2024

a) Ekonomi Makro Regional

Kinerja perekonomian Provinsi NTT pada triwulan IV 2024 tumbuh positif, mendukung keberlangsungan pemulihan ekonomi NTT pada keseluruhan tahun 2024. Perekonomian Provinsi NTT triwulan IV 2024 tumbuh 3,03% (yoy), terjaga dengan baik meski pada triwulan sebelumnya mampu tumbuh 3,61% (yoy). Kinerja Konsumsi Rumah Tangga (RT) menopang perekonomian Provinsi NTT triwulan IV 2024, yang didukung perbaikan pendapatan petani. Sementara itu, kinerja komponen sisi pengeluaran lainnya pada triwulan laporan mengalami deselerasi, terutama untuk Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi. Dari sisi lapangan usaha (LU), LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menjadi penopang utama pertumbuhan positif perekonomian NTT pada triwulan IV 2024. Pada keseluruhan tahun 2024, kinerja perekonomian Provinsi NTT meningkat di tengah perlambatan perekonomian nasional. Perekonomian NTT tahun 2024 tumbuh 3,73% (yoy), meningkat jika dibandingkan 3,47% (yoy) pada tahun sebelumnya. Perkembangan ini menunjukkan tetap kuatnya kinerja pemulihan ekonomi NTT, di tengah perekonomian nasional yang tumbuh melambat, menjadi sebesar 5,03% (yoy) dari 5,05% (yoy) pada tahun

2023. Meski demikian, pemulihan ekonomi NTT perlu terus diperkuat untuk tumbuh lebih tinggi dibandingkan periode pra-pandemi Covid-19.

b) Keuangan Pemerintah Daerah

Realisasi total belanja pemerintah (APBD dan APBN) di Provinsi NTT pada tahun 2024 mencapai Rp64,11 triliun atau tumbuh sebesar 3,38% (yoy). Nominal realisasi belanja tersebut mencapai 90,90% dari anggaran tahun 2024, lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 92,70%. Penurunan realisasi terjadi pada belanja APBN dan APBD Kabupaten/Kota di Provinsi NTT, sedangkan realisasi pertumbuhan belanja APBD Provinsi NTT mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan realisasi utamanya didukung dengan realisasi belanja hibah untuk pelaksanaan Pilkada serentak November 2024. Sementara itu, penurunan belanja APBN dan APBD Kabupaten/Kota seiring dengan melambatnya realisasi belanja modal disebabkan *refocusing* anggaran pada tahun politik. Dari sisi realisasi pendapatan, realisasi pendapatan pemerintah pada tahun 2024 tercatat tumbuh sebesar 3,17% (yoy), melambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tumbuh 4,44% (yoy). Realisasi pendapatan ini mencapai 91,53% dari total pagu anggaran pendapatan APBD Provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi NTT. Tingginya realisasi pendapatan ini seiring dengan upaya optimalisasi pendapatan transfer pada Dana Alokasi Umum (DAU), khususnya pada pemerintah kabupaten/kota sebagai salah satu sumber pendapatan utama.

c) Perkembangan Inflasi

Inflasi Provinsi NTT pada triwulan IV 2024 tercatat sebesar 1,19% (yoy), lebih tinggi dibandingkan inflasi pada triwulan sebelumnya sebesar 1,07% (yoy), namun lebih rendah dibandingkan dengan inflasi nasional yang sebesar 1,57% (yoy). Inflasi utamanya disebabkan oleh peningkatan IHK pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Di sisi lain, kelompok transportasi tercatat mengalami deflasi. Inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau utamanya didorong oleh peningkatan harga komoditas hortikultura akibat penurunan produksi pada akhir tahun. Pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, komoditas yang dominan memberikan andil inflasi adalah emas perhiasan dan sirih. Sementara itu, tarif angkutan udara yang berada pada kelompok transportasi menjadi penyumbang deflasi yang cukup besar pada triwulan IV 2024.

Inflasi Provinsi NTT pada tahun 2024 yang sebesar 1,19% (yoy) tersebut menurun apabila dibandingkan dengan tingkat inflasi pada tahun 2023 yang sebesar 2,42% (yoy). Penurunan utamanya disebabkan pada oleh kelompok transportasi dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dengan pemberian diskon tarif angkutan udara pada periode Nataru 2024. Sejalan dengan hal tersebut, inflasi pada kelompok makanan, minuman dan tembakau juga turut melandai seiring dengan pemenuhan stok yang terjaga sepanjang tahun melalui impor beras dan hasil produksi hortikultura yang meningkat di tengah *el nino*. Sementara itu, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami peningkatan inflasi dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan masih tingginya tingginya harga emas dunia yang menyebabkan peningkatan pada komoditas emas perhiasan.

d) Stabilitas Sistem Keuangan Daerah

Secara umum, stabilitas sistem keuangan di Provinsi NTT pada triwulan IV 2024 masih tetap terjaga. Hal ini tercermin dari pertumbuhan penyaluran kredit Bank Umum yang tercatat sebesar 2,58% dan Bank Syariah

yang tercatat sebesar 5,25%. Adapun fungsi intermediasi perbankan tetap tinggi, dengan LDR mencapai 135,67%. DPK tercatat mengalami kontraksi sebesar 0,25% (yoy), yang ditopang oleh pertumbuhan tabungan sebesar 4,17% (yoy). Sementara itu, penyaluran kredit tercatat tumbuh melambat sebesar 1,38% (yoy), didorong oleh peningkatan pada konsumsi. Tingkat risiko masih terjaga, dengan rasio NPL (*gross*) sebesar 2,18% dan masih berada di bawah level 5%.

e) Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Dan Pengelolaan Uang Rupiah

Kinerja sistem pembayaran nontunai dan tunai Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami penurunan pada triwulan IV 2024. Hal ini ditunjukkan oleh indikator sistem pembayaran nontunai utamanya pada SKNBI juga masih mengalami kontraksi, meskipun tidak sedalam triwulan sebelumnya. Di sisi lain, transaksi nilai besar atau BI-RTGS menunjukkan kontraksi yang lebih dalam pada triwulan IV 2024 dibandingkan triwulan sebelumnya. Lebih lanjut, sistem pembayaran tunai yang mengalami penurunan, tercermin dari pertumbuhan inflow uang tunai yang terkontraksi.

Secara keseluruhan tahun 2024, kinerja sistem pembayaran nontunai dan tunai mengalami penurunan apabila dibandingkan tahun 2023. Hal tersebut tercermin dari nominal transaksi RTGS dan SKNBI yang terkontraksi dibandingkan tahun sebelumnya. Dari sisi sistem pembayaran tunai, inflow mengalami kontraksi dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

f) Ketenagakerjaan Dan Kesejahteraan

Kondisi ketenagakerjaan per Agustus 2024 masih menunjukkan tren peningkatan yang tercermin dari peningkatan jumlah angkatan kerja serta jumlah orang bekerja. Pada Agustus 2024, jumlah angkatan kerja di Provinsi NTT meningkat sebesar 1,74% (yoy) menjadi 4,02 juta orang, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan sebesar 0,12% poin dibandingkan dengan Agustus 2023 menjadi 3,02%. Adapun kenaikan jumlah angkatan kerja tercatat dari Agustus 2023 sebesar 2,99 juta orang menjadi 3,12 juta orang pada Agustus 2024. Jumlah orang yang bekerja pada periode Agustus 2024 juga meningkat sebesar 4,14% (yoy) atau bertambah 0,12 juta orang menjadi 3,02 juta orang, dari periode Agustus 2023 yang sebesar 2,90 juta orang. Demikian pula kondisi kesejahteraan menunjukkan peningkatan. Rasio kemiskinan di Provinsi NTT pada September 2024 tercatat sebesar 19,02%, menurun dibandingkan 19,48% pada periode Maret 2024. Lebih lanjut, Nilai Tukar Petani (NTP) pada triwulan IV 2024 tercatat membaik dengan indeks sebesar 101,32.

g) Prospek Perekonomian

Akselerasi perekonomian Provinsi NTT pada keseluruhan tahun 2025 diprakirakan terus berlanjut. Pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT pada tahun 2025 diproyeksikan tumbuh meningkat dalam kisaran 3,60 – 4,40% (yoy). Dari sisi pengeluaran, perekonomian Provinsi NTT 2025 ditopang oleh pertumbuhan dari sisi konsumsi rumah tangga dan perbaikan defisit neraca perdagangan. Sementara itu, dari sisi Lapangan Usaha (LU), prospek menguatnya kinerja LU Pertanian, Perikanan dan Kehutanan menjadi sumber pertumbuhan utama Provinsi NTT tahun 2025. Kinerja perekonomian keseluruhan tahun juga didukung oleh pertumbuhan positif kinerja LU Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Konstruksi; Industri Pengolahan; dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.

Inflasi Provinsi NTT pada tahun 2025 diprakirakan berada dalam rentang sasaran 2,5±1 % (yoy). Berdasarkan kelompok pengeluarannya, melandainya tekanan inflasi utamanya didukung oleh kelompok: Makanan, Minuman dan Tembakau; Transportasi; Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya. Meredanya intensitas El Nino diprakirakan dapat menekan laju inflasi kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau dengan hasil produksi yang kembali meningkat pasca dimulainya musim hujan pada akhir tahun 2024 s.d awal tahun 2025. Sinergi dan kolaborasi berbagai upaya yang dilakukan pemangku kepentingan menjadi kunci untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan komoditas pangan, serta penguatan sinergi dan koordinasi kebijakan yang erat melalui TPIP – TPID dalam pelaksanaan GNPIP yang terus berlanjut pada tahun 2025.

3.1.1.1. PDRB/Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan Nilai tambah dari barang dan jasa yang dihasilkan dalam satu tahun. Semakin besar pertumbuhan ekonomi tahunan menunjukkan semakin besar nilai tambah dari output barang dan jasa yang dihasilkan ekonomi daerah dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT pada Tw. IV 2023 meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dan searah dengan kinerja perekonomian Nasional. Perekonomian Provinsi NTT pada triwulan IV mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,14% (yoy), meningkat dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 2,08% (yoy). Perekonomian Provinsi NTT Triwulan IV 2024 Tumbuh 3,03% (yoy) Kondisi ini sejalan dengan perekonomian Nasional yang tumbuh sebesar 5,05% (yoy), setelah tumbuh sebesar 4,94% (yoy) pada triwulan III 2023.

Secara tahunan, perekonomian Provinsi NTT Tahun 2024 mencatatkan pertumbuhan sebesar 3,73 (ctc), kembali melanjutkan tren pertumbuhan pasca pandemi covid-19. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 didorong oleh pertumbuhan pada hampir seluruh komponen sisi lapangan usaha sejalan dengan aktivitas ekonomi yang meningkat. Di sisi lain, peningkatan pada sisi investasi dan konsumsi pemerintah untuk mendukung dalam percepatan pembangunan infrastruktur menjadi salah satu faktor pendorong dalam pertumbuhan dan realisasi pendanaan dan penyerapan tenaga kerja.

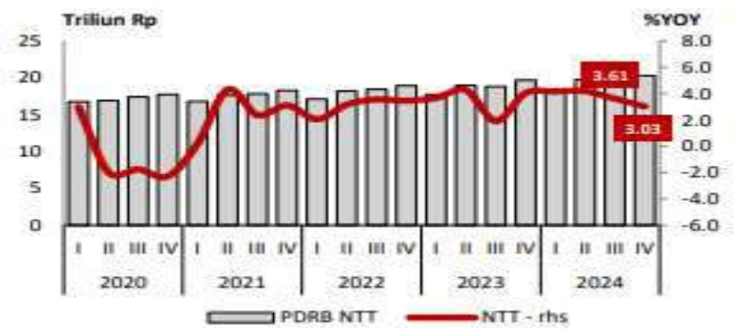

Sumber: Buku Laporan Perekonomian NTT, 2025

Gambar 3.1. Pertumbuhan Ekonomi NTT dan Nasional secara Triwulan Tahun 2024

Tabel 3.1. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pengeluaran (y-on-y) Tahun Dasar 2024

Komponen Pengeluaran	Triwulan I 2024	Triwulan II 2024	Triwulan III 2024	Triwulan IV 2024	Tahunan 2024
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3.90	4.18	3.71	4.38	4.05
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	20.05	8.75	11.06	6.25	11.29
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	18.94	8.63	6.63	2.23	7.32
Pembentukan Modal Tetap Bruto	-0.14	5.88	2.69	-2.33	1.35
Perubahan Inventori	4.97	-8.50	9.16	-1.03	4.74
Ekspor	15.45	24.49	-14.37	-21.66	-398
Impor	6.28	10.12	2.34	-2.82	3.14
Produk Domestik Regional Bruto	4.16	4.19	3,61	3,03	3.73

Sumber: https://ntt.bps.go.id

Struktur Ekonomi NTT pada tahun 2023 masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 29,31 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran masih didominasi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yaitu sebesar 67,48 persen.

Pertumbuhan ekonomi NTT triwulan IV-2023 menurut lapangan usaha tertinggi dicapai oleh Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 16,39 persen. Hal ini dapat dilihat pada tabel 3.2

Tabel 3.2. Laju Pertumbuhan PDRB menurut Lapangan Usaha (yoy) Tahun 2023 seri 2010

Lapangan Usaha	Triwulan I 2023	Triwulan II 2023	Triwulan III 2023	Triwulan IV 2023	Tahunan
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.59	3.34	1.45	1.49	2.46
Pertambangan dan Penggalian	2.41	2.10	4.37	5.69	3.65
Industri Pengolahan	6.53	9.39	6.78	6.61	7.33
Pengadaan Listrik dan Gas	0.43	14.81	17.02	16.39	12.15
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.62	0.50	1.55	7.19	2.46
Konstruksi	3.83	4.53	8.26	14.73	8.16
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.68	8.93	4.56	3.91	5.50
Transportasi dan Pergudangan	2.99	4.24	3.04	4.35	3.66
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.50	10.92	12.41	14.57	10.71
Informasi dan Komunikasi	4.18	3.05	2.28	2.90	3.10

Lapangan Usaha	Triwulan I 2023	Triwulan II 2023	Triwulan III 2023	Triwulan IV 2023	Tahunan
Jasa Keuangan dan Asuransi	-0.89	0.72	4.15	3.61	1.87
Real Estate	1.88	3.23	1.93	2.18	2.30
Jasa Perusahaan	1.34	3.45	3.41	5.35	3.40
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.94	3.61	-7.03	3.29	1.00
Jasa Pendidikan	3.51	2.32	2.65	2.27	2.66
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4.66	7.19	3.38	1.29	4.06
Jasa lainnya	2.25	4.40	5.28	5.26	4.30
PDRB	3.71	4.21	2.04	4.14	3.52

Sumber: https://ntt.bps.go.id, 2024

3.1.1.2. Inflasi

Inflasi yang merupakan indikator Perbandingan jumlah uang beredar dann jumlah baranng jasa di pasar yang mempengaruhi pergeseran permintaan dan penawaran di pasar. Tingkat Inflasi mempunyai keterkaitan dengan tingkat suku bunga produktivitas ekonomi, nilai tukar rupiah dengan valuta asing, indeksasi upah/gaji, kemampuan Export, Asumsi APBN dan sebagainya.

Pada April 2025 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 1,77 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 108,06. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Timor Tengah Selatan sebesar 3,41 persen dengan IHK sebesar 109,70 dan Inflasi terendah terjadi di Kota Kupang sebesar 0,91 persen dengan IHK sebesar 107,15.

Sumber: BPS, Mei 2025

Gambar 3.2. Tingkat Inflasi Year-OnYear (y-on-y) Provinsi Nusa Tenggara Timur April 2024-2025

Inflasi y-on-y April 2025 terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya 9 dari 11 indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 3,52 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,53 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,08 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,12 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,97 persen; Kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 0,11 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,46 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/ restoran sebesar 2,06 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 9,34 persen. Sementara, kelompok yang mengalami penurunan harga, yaitu: kelompok transportasi sebesar 1,68 persen dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 1,00 persen pada April 2025

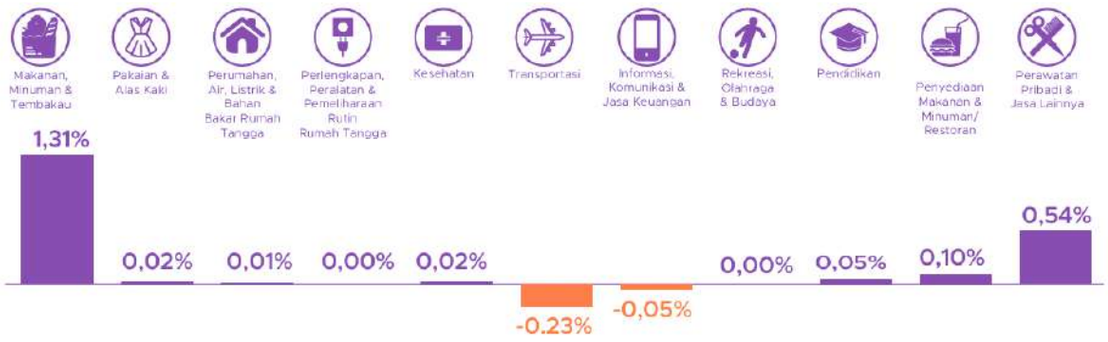

Sumber: BPS, Mei 2025

Gambar 3.3. Andil Inflasi Year-on-Year (y-on-y) Provinsi Nusa Tenggara Timur menurut kelompok pengeluaran

Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami inflasi month to month (m-to-m) sebesar0,22 persen pada April 2025. Dan juga terjadi inflasi year-to-date (y-to-d) sebesar 1,56 persen pada April 2025. Pada April 2025 terjadi Inflasi year-on-year (y-on-y) Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 1,77 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 108,06. Inflasi y-on-y tertinggi terjadi di Kab. Timos Tengah Selatan sebesar 3,41 persen dengan IHK sebesar 109,70 dan Inflasi y-on-y terendah terjadi di Kota Kupang sebesar 0,91 persen dengan IHK sebesar 107,15.

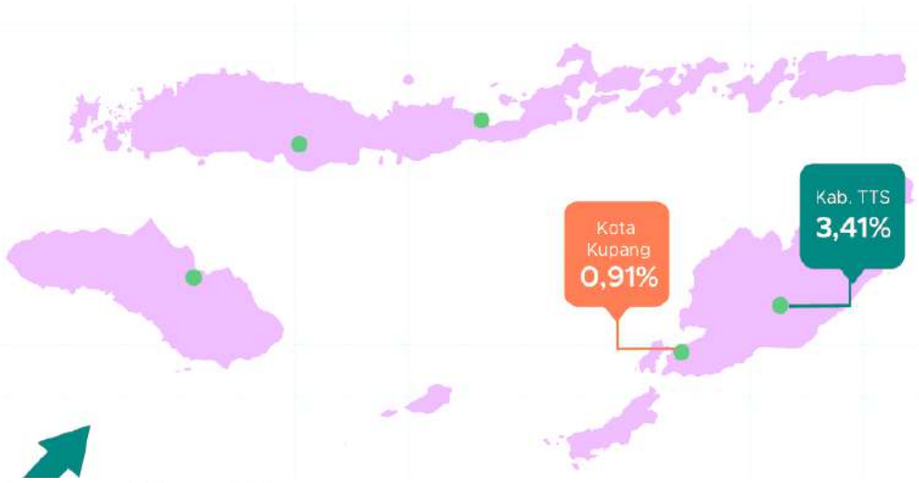

Sumber: BPS,Mei 2025

Gambar 3.4 Inflasi dan Terendah Provinsi NTT

3.1.1.3. Penduduk Miskin

Tingkat Kemiskinan adalah presentase jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan yaitu minimum untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu negara. Tingkat kemiskinan dan ketimpangan merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan menekan laju pertumbuhannya menjadi salah satu tujuan pembangunan ekonomi.

Secara umum, pada periode September 2013–September 2024, tingkat kemiskinan di Provinsi NTT mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode Maret 2015 dan September 2022 terjadi setelah adanya kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Sementara itu, kenaikan jumlah dan persentase penduduk

miskin pada periode Maret 2020 dan September 2020 terjadi ketika ada pembatasan mobilitas penduduk saat pandemi Covid-19 yang melanda Provinsi NTT.

Jumlah penduduk miskin di Provinsi NTT pada September 2024 mencapai 1,11 juta orang. Dibandingkan Maret 2024, jumlah penduduk miskin menurun 19,63 ribu orang. Sementara jika dibandingkan dengan Maret 2023, jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 33,17 ribu orang. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan Maret 2024 antara lain adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2024 sebesar 3,02 persen atau turun jika dibandingkan TPT Agustus 2023 yang sebesar 3,14 persen.
2. Ekonomi Provinsi NTT Triwulan III-2024 dibandingkan dengan Triwulan I-2024 tumbuh sebesar 5,66 persen. Sementara itu, konsumsi rumah tangga pada Triwulan III-2024 meningkat sebesar 5,39 persen dibandingkan Triwulan I-2024.
3. Nilai Tukar Petani (NTP) pada September 2024 sebesar 101,43, meningkat sebesar 3,55 persen dibandingkan Maret 2024 yang sebesar 97,95
4. Selama periode Maret - September 2024, Provinsi NTT tercatat mengalami deflasi sebesar 0,75 persen. Sementara, kelompok makanan, minuman, dan tembakau pada periode yang sama mengalami deflasi sebesar 3,10 persen.
5. Perubahan indeks konsumsi rumah tangga pada periode Maret - September 2024 tercatat mengalami deflasi sebesar 0,98 persen.
6. Bantuan sosial tetap diupayakan untuk mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin. Persentase penerima Bantuan Tunai Non Pangan (BPNT) pada September 2024 sebesar 31,89 persen, meningkat 1,56 persen poin jika dibandingkan Maret 2024.

Pemerintah pusat dalam Ranwal RKP Tahun 2025 menargetkan presentase kemiskinan Provinsi NTT Tahun 2025 sebesar 15,3 – 15,8 persen.

Tabel 3.3 Jumlah dan presentase Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota Provinsi NTT Tahun 2021-2023

Wilayah	2021		2022		2023	
	Jumlah (Ribu Jiwa)	%	Jumlah (Ribu Jiwa)	%	Jumlah (Ribu Jiwa)	%
Sumba Barat	37.78	28.39	37.06	27.47	37.15	27.17
Sumba Timur	78.33	29.68	75.28	28.22	75.66	28.08
Kupang	91.25	22.98	88.02	21.70	90.23	21.78
Timor Tengah Selatan	125.68	26.64	120.45	25.45	119.51	25.18
Timor Tengah Utara	58.33	22.62	55.88	21.50	57.19	21.85
Belu	35.41	15.68	33.98	14.84	33.19	14.30
Alor	43.83	21.09	42.30	20.25	41.91	19.97
Lembata	38.75	26.21	37.88	25.18	37.94	24.78
Flores Timur	28.90	11.14	28.08	10.75	30.93	11.77
Sikka	43.09	13.35	40.87	12.61	40.81	12.56
Ende	66.38	24.13	63.40	23.00	63.10	22.86
Ngada	20.98	12.58	20.14	11.93	20.57	12.06
Manggarai	71.03	20.48	69.68	19.84	70.00	19.69
Rote Ndao	51.71	28.08	52.43	27.45	53.55	27.05
Manggarai Barat	51.15	17.92	49.95	17.15	49.95	16.82
Sumba Tengah	25.48	34.27	24.49	32.51	24.24	31.78
Sumba Barat Daya	100.42	28.18	98.50	27.16	101.40	27.48

Wilayah	2021		2022		2023	
	Jumlah (Ribu Jiwa)	%	Jumlah (Ribu Jiwa)	%	Jumlah (Ribu Jiwa)	%
Nagekeo	19.11	12.91	18.01	12.05	18.57	12.33
Manggarai Timur	77.17	26.50	74.55	25.35	74.40	25.06
Sabu Raijua	30.60	30.13	30.00	28.73	30.43	28.37
Malaka	32.17	16.33	30.48	15.26	29.19	14.42
Kota Kupang	41.77	9.17	40.20	8.61	41.20	8.61
NTT	1169.31	20.99	1131.62	20.05	1141.11	19.96

Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), 2024

Berdasarkan daerah tempat tinggal, jika dibandingkan antara Maret 2022 dengan Maret 2023, jumlah penduduk miskin perkotaan naik sebesar 8,8 ribu orang, sedangkan di perdesaan turun sebesar 0,7 ribu orang. Persentase kemiskinan di perkotaan naik dari 8,84 persen pada Maret 2022 menjadi 9,12 persen pada Maret 2023. Sementara itu, di perdesaan turun dari 23,86 persen pada Maret 2022 menjadi 23,76 persen pada Maret 2023.

Tabel 3.4 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin menurut Daerah, Maret 2023 dan September 2024

Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin (%)
(1)	(2)	(3)
Perkotaan		
Maret 2023	135,57	9,12
Maret 2024	131,61	8,57
September 2024	126,91	8,11
Perdesaan		
Maret 2023	1.005,55	23,76
Maret 2024	995,96	23,41
September 2024	981,02	23,02
Total		
Maret 2023	1.141,11	19,96
Maret 2024	1.127,57	19,48
September 2024	1.107,94	19,02

Sumber : Diolah dari data Suvei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023-September 2024

3.1.1.4. *Tingkat Pengangguran Terbuka*

Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Nusa Tenggara Timur sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2023 cenderung mengalami penurunan. Pada Tahun 2008 TPT Provinsi NTT senilai 3,37 persen dan menurun menjadi 3,14 persen pada Tahun 2023 dan masih berada jauh dibawah TPT nasional untuk periode yang sama, yaitu senilai 5,32% dan pada tahun 2024 sebesar 3,02.

TPT NTT tahun 2024 sebesar 3,02 persen, yang berarti dari 100 orang Angkatan Kerja terdapat sekitar tiga orang yang menganggur. Rata–rata TPT selama periode 2022–2024 sebesar 3,23 persen, dengan TPT di perkotaan lebih tinggi hampir tiga kali lipat dibanding perdesaan.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT hasil Sakernas Agustus 2023 sebesar 3,14 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar tiga orang penganggur.

Pada Agustus 2023, TPT mengalami penurunan sebesar 0,40 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2022. Pada Agustus 2023, TPT laki-laki sebesar 2,95 persen, lebih rendah dibanding TPT perempuan yang sebesar 3,36 persen. Dibandingkan Agustus 2022, TPT laki-laki mengalami penurunan sebesar 0,87 persen poin. Sementara itu, TPT perempuan mengalami peningkatan sebesar 0,14 persen poin.

Apabila dilihat menurut daerah tempat tinggal, TPT perkotaan (5,26 persen) jauh lebih tinggi dibandingkan TPT di daerah pedesaan (2,40 persen). TPT perkotaan dan perdesaan memiliki pola yang sama dengan TPT provinsi yaitu turun dibandingkan Agustus 2022, masing- masing sebesar 2,02 persen poin dan 0,01 persen poin.

Tabel 3.5. Karakteristik Pengangguran di Provinsi NTT, Agustus 2021-Agustus 2023

Karakteristik Pengangguran	Agustus 2021 (%)	Agustus 2022 (%)	Agustus 2023 (%)	Agustus 2024 (%)	Perubahan Ags 2021-Ags 2022 (% poin)	Perubahan Ags 2022-Ags 2023 (%)	Perubahan Aga 2023-2024
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,77	3,54	3,14	3,02	-0,23	-0,40	0,12
TPT Menurut Jenis Kelamin							
- Laki-Laki	3,71	3,82	2,95	2,91	0,11	-0,87	0,04
- Perempuan	3,84	3,22	3,36	3,16	-0,62	0,14	0,2
TPT Menurut Daerah Tempat Tinggal							
- Perkotaan	7,88	7,28	5,26	5,99	-0,60	-2,02	-0,73
- Perdesaan	2,51	2,41	2,40	1,91	-0,10	-0,01	0,49

Sumber : Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik No. 60/11/53/Th. XXVI, 06 November 2023

3.1.1.5. Rasio Gini

Indeks Gini atau Rasio Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Nilai Rasio Gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Rasio Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa.

Secara umum, sejak Maret 2017, angka Gini Ratio cenderung mengalami penurunan sampai dengan Maret 2018. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama periode tersebut terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran rumah tangga di Provinsi NTT. Meskipun sempat mengalami peningkatan yang cukup tajam pada September 2018, angka Gini Ratio berhasil menurun kembali pada Maret 2019 hingga Maret 2020. Namun demikian, pada masa pandemi Covid-19, angka Gini Ratio mengalami kenaikan pada September 2020. Setelah kembali mengalami penurunan pada Maret 2021 hingga Maret 2022, angka Gini Ratio meningkat lagi pada September 2022. Namun, pada periode selanjutnya, angka Gini Ratio kembali mengalami penurunan menjadi 0,325 pada Maret 2023 dan 0,316 pada Maret 2024 (Gambar 3.4). Jika dilihat berdasarkan daerah, Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2024 adalah sebesar 0,281. Hal ini menunjukkan terjadi penurunan sebesar 0,018 poin

dibanding kondisi Maret 2023 yang sebesar 0,299. Sementara itu, Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2024 tercatat sebesar 0,305, terjadi penurunan dari kondisi Maret 2023 sebesar 0,002 poin. Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.5 berikut ini:

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Gambar 3.5 Gini Rasio Provinsi NTT, Maret 2017- Maret 2024

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan daerah memiliki peranan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat kemampuannya akan mencerminkan daya dukung manajemen pemerintahan daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Sedangkan Pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.

Gambaran pengelolaan keuangan daerah diperlukan untuk bisa mengetahui kinerja pengelolaan keuangan daerah yang menjadi dasar proyeksi kerangka pendanaan jangka menengah. Kerangka pendanaan jangka menengah inilah yang digunakan dalam merencanakan kebijakan dan program untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang telah ditetapkan. Hasil kajian keuangan daerah ini merupakan pagu indikatif yang akan menjadi dasar pengalokasian sumber daya sebagai input dalam melaksanakan program. Dengan demikian akan tergambar arah kebijakan, strategi dan program apa yang menjadi prioritas melalui pengalokasian anggaran sebagai langkah operasional dari kebijakan yang telah ditetapkan.

Gambaran pengelolaan keuangan daerah juga menunjukkan upaya pemerintah daerah untuk menganalisis capaian untuk memperoleh proyeksi yang tepat dalam mendanai perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, pengelolaan keuangan daerah merupakan upaya untuk meningkatkan

efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah baik dari sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD menunjukkan bahwa daerah itu mampu melaksanakan desentralisasi dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang. PAD diartikan sebagai penerimaan dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, yang dipungut berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terdiri dari : (a). Pajak daerah, (b) Retribusi daerah, (c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, (d) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pada tahun anggaran 2025, dilakukan penyesuaian terhadap struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mencakup perubahan pada komponen pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah mengalami penurunan sebesar Rp135,47 miliar, dari semula Rp5,22 triliun menjadi Rp5,08 triliun. Penurunan ini terjadi pada dua sumber utama:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) turun sebesar Rp151,93 miliar, terutama disebabkan oleh penurunan penerimaan dari pajak daerah.
b. Pendapatan Transfer dari pemerintah pusat juga mengalami penurunan sebesar Rp184,56 miliar.
Namun demikian, terdapat tambahan pendapatan dari pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp201,01 miliar, yang sebelumnya tidak dianggarkan. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 3.6

Tabel 3.6. Realisasi Pendapatan Provinsi NTT Tahun 2025

KODE	URAIAN	2022	2023	2024
1	2	RP	RP	RP
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**4.426.473.562.255**	**4.624.897.387.195**	**4.834.764.527.205,52**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**1.363.737.981.851**	**1.427.035.167.291**	**1.451.674.792.810**
4.1.01	Pajak Daerah	1.095.501.455.474	1.164.822.144.629	1.222.849.908.092
4.1.02	Retribusi Daerah	61.613.862.027	44.202.047.251	26.995.208.576
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	37.175.980.457	60.645.290.853	31.749.907.192
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	169.446.683.893	167.365.684.558	170.079.768.950
4.2	**PENDAPATAN PERIMBANGAN**	**3.053.836.755.861**	**3.194.678.968.455**	**3.380.193.914.696**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.053.836.755.861	3.194.678.968.455	3.380.193.914.696
4.2.02	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya			
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**8.898.824.543**	**3.183.251.449**	**2.895.819.700**
4.3.01	Pendapatan Hibah	8.898.824.543	3.183.251.449	2.895.819.700
4.3.03	Dana darurat			

	Dana Hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya			
	Dana penyesuaian dan otonomi khusus			
	Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya			
	Jumlah Pendapatan			

Mendasarkan pada kondisi realisasi tahun 2025, dan kebijakan pemerintah pusat terkait dana transfer ke daerah, maka proyeksikan pendapatan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2027 dapat dilihat pada Tabel 3.7 berikut ini :

Tabel 3.7. Proyeksi Pendapatan Provinsi NTT Tahun 2025-2027

URAIAN	Pagu 2025	Proyeksi 2026	Prakiraan Maju 2027
PENDAPATAN	**5.219.986.855.755**	**6.362.283.934.165**	**6.366.642.450.238**
Pendapatan Asli Daerah	**1.923.350.420.755**	**2.800.000.000.000**	**2.811.298.608.000**
Pajak Daerah	1.567.588.247.801	2.087.674.000.000	2.091.849.348.000
Retribusi Daerah	218.587.260.975	401.626.000.000	405.642.260.000
Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan	62.519.178.857	168.860.000.000	170.548.600.000
Lain-lain PAD yang Sah	74.655.733.122	141.840.000.000	143.258.400.000
Dana Perimbangan	**3.296.636.435.000**	**3.561.718.097.991**	**3.554.759.955.890**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.296.636.435.000	3.561.718.097.991	3.554.759.955.890
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya			
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	**-**	**565.836.174**	**583.886.348**
Hibah	-	565.836.174	583.886.348
Dana darurat			
Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya ***)			
Dana penyesuaian dan otonomi khusus****)			
Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya			
Pendapatan Lainnya			
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya			

Sumber: Bapperida Provinsi NTT, 2025 diolah

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah juga merupakan cerminan dari kebijakan anggaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan sebagaimana tertera dalam dokumen perencanaan. Karena itu dengan mencermati realisasi belanja daerah, dapat diketahui sampai sejauh mana penganggaran konsisten dengan perencanaan pembangunan. Belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Kebijakan belanja daerah disesuaikan dengan kewenangan Provinsi sesuai dengan arahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah

Berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta pendekatan value of money dimana prinsip ekonomis, efektivitas dan efisiensi diacu dalam penyusunan anggaran program dan kegiatan.

Total belanja daerah hanya mengalami sedikit koreksi, yaitu meningkat sebesar Rp1,097 miliar, dari Rp5,056 triliun menjadi Rp6,153 triliun. Perubahan terbesar terdapat pada:

a. Belanja Operasi meningkat sebesar Rp512 miliar, terutama untuk belanja barang dan jasa.
b. Belanja Modal mengalami meningkat signifikan sebesar Rp592 miliar, khususnya pada belanja modal gedung dan bangunan.
c. Belanja Tidak Terduga juga menurun sebesar Rp 42 miliar.
d. Sementara itu, Belanja Transfer ke pemerintah kabupaten/kota meningkat sebesar Rp49 miliar, terutama pada belanja bagi hasil.

Gambaran mengenai belanja daerah yang menginformasikan mengenai proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.8. Realisasi Belanja Daerah tahun 2025-2027

URAIAN	Pagu 2025	Proyeksi 2026	Prakiraan Maju 2027
BELANJA	**5.056.507.288.791**	**6.153.855.227.862**	**5.913.813.743.935**
Belanja Operasi	**3.964.259.077.875**	**4.476.567.600.054**	**4.475.858.623.025**
Belanja Pegawai	2.434.609.539.949	2.891.027.113.399	2.900.578.067.846
Belanja Barang dan Jasa	942.887.980.442	1.287.176.778.486	1.287.176.778.486
Belanja Bunga	47.206.923.484	35.460.009.244	25.200.077.768
Belanja Hibah	529.694.634.000	71.547.503.195	71.547.503.195
Belanja Bantuan Sosial	9.860.000.000	191.356.195.730	191.356.195.730
Belanja Modal	**400.871.425.891**	**992.988.023.159**	**863.161.789.040**
Tanah	-		
Peralatan dan Mesin	54.366.315.333	157.084.631.100	143.655.477.411
Gedung dan Bangunan	240.986.243.000	428.035.555.150	338.081.586.702
Jalan, Jaringan dan Irigasi	99.017.331.408	301.353.297.687	298.845.040.312
Aset Tetap Lainnya	6.501.536.150	106.514.539.222	82.579.684.615
Belanja Tidak Terduga	**22.180.954.686**	**65.000.000.000**	**65.650.000.000**
Belanja Tidak Terduga	22.180.954.686	65.000.000.000	65.650.000.000
Belanja Transfer	**669.195.830.339**	**619.299.604.649**	**509.143.331.870**
Belanja Bagi Hasil	629.338.931.939	554.044.137.265	443.235.309.812
Belanja Bantuan Keuangan	39.856.898.400	65.255.467.384	65.908.022.058
SURPLUS/(DEFISIT)	**163.479.566.964**	**208.428.706.303**	**452.828.706.303**

Sumber: Badan Keuangan Daerah, diolah 2025

Belanja daerah tahun 2025 diproyeksikan dengan *baseline* penganggaran tahun 2021-2023 Dengan keterbatasan kapasitas fiskal yang ada, belanja daerah diarahkan untuk: 1) pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM), 2) membiayai kewajiban serta belanja wajib dan mengikat, 3) membiayai program yang akan berdampak pada peningkatan PAD.

Pemenuhan standar pelayanan minimal dilakukan melalui DAU yang sudah diarahkan, untuk memastikan alokasi anggaran secara konsisten dan kontinyu untuk membiayai SPM. Pemenuhan kewajiban serta belanja wajib dan mengikat seperti pembayaran hutang pinjaman daerah, , penyertaan modal, alokasi anggaran untuk menjawab arahan pusat, belanja gaji ASN, membiayai tugas belajar yang sudah berjalan, membiayai operasional kantor selama 1 tahun. Sedangkan anggaran program yang berdampak pada peningkatan PAD diarahkan untuk optimalisasi, rehabilitasi, peremajaan ataupun restocking asset-aset daerah yang akan mendatangkan PAD ataupun pengembangan potensi-potensi PAD. Proyeksi belanja tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.9 Proyeksi Belanja Provinsi NTT tahun 2024-2026

Uraian	Proyeksi Tahun 2024 (n-1)	Proyeksi Indikatif Belanja Daerah TAHUN 2025	Proyeksi tahun 2026
BELANJA	**5.290.514.318.980,00**	**4.863.263.009.774,00**	**5.020.778.868.560,33**
Belanja Operasi	**3.979.410.392.552,00**	**3.587.696.284.019,50**	**3.745.212.142.805,83**
Belanja Pegawai	1.912.331.130.070,00	1.912.331.130.070,00	2.007.947.686.573,50
Belanja Barang dan Jasa	1.577.288.702.242,00	1.212.192.205.556,50	1.272.801.815.834,33
Belanja Bunga	57.933.263.642,00	57.933.263.642,00	57.933.263.642,00
Belanja Hibah	407.291.734.598,00	379.445.844.651,00	379.445.844.651,00
Belanja Bantuan Sosial	24.565.562.000,00	25.793.840.100,00	27.083.532.105,00
Belanja Modal	**521.791.175.684,00**	**621.342.023.685,50**	**621.342.023.685,50**
Tanah	0,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	120.842.812.228,00	193.621.780.165,50	193.621.780.165,50
Gedung dan Bangunan	271.312.750.372,00	248.250.770.111,00	248.250.770.111,00
Jalan, Jaringan dan Irigasi	126.043.157.284,00	155.271.232.138,00	155.271.232.138,00
Aset Tetap Lainnya	3.592.455.800,00	24.198.241.271,00	24.198.241.271,00
Belanja Tidak Terduga	**73.045.924.489,00**	**707.344.000,00**	**707.344.000,00**
Belanja Tidak Terduga	73.045.924.489,00	707.344.000,00	707.344.000,00
Belanja Transfer	**716.266.826.255,00**	**653.517.358.069,00**	**653.517.358.069,00**
Belanja Bagi Hasil	711.191.312.255,00	653.517.358.069,00	653.517.358.069,00
Belanja Bantuan Keuangan	5.075.514.000,00		
urplus/Defisit	**(125.642.248.324,00)**	**229.917.940.187,00**	**103.612.062.772,50**

Sumber: Bapperida Provinsi NTT, 2024 diolah

3.2.3. Proyeksi Pembiayaan Daerah

Dalam perencanaan anggaran, pemerintah daerah dapat merencanakan anggaran pendapatan dan belanjanya defisit atau surplus.

Pada kenyataannya, di dalam perencanaan yang dilakukan seringkali terjadi defisit anggaran daerah. Defisit tersebut harus dapat ditutup dengan pembiayaan daerah. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berjalan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah terdiri dari dua pos yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pemerintah daerah memiliki kecenderungan untuk menutup defisit daerah dari Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya atau dengan melakukan pinjaman daerah atau obligasi daerah yang berada di pos penerimaan pembiayaan. Dalam perencanaan dokumen rencana jangka menengah, tidak diperkenankan untuk merencanakan apalagi memproyeksi SiLPA. Pos pengeluaran pembiayaan juga memiliki dua komponen utama yang banyak digunakan oleh pemda yaitu penyertaan modal (investasi daerah) dan pembayaran pokok utang :

Tabel 3.10 Proyeksi Pembiayaan Daerah

URAIAN	Pagu 2025	Proyeksi 2026	Prakiraan Maju 2027
PEMBIAYAAN			
Penerimaan Pembiayaan	-	-	-
Penerimaan pinjaman daerah	-		
Pencairan Dana Cadangan	-		
Investasi non permanen	-		
Penerimaan kembali pinjaman daerah	-		
Pengeluaran Pembiayaan	**163.479.566.964**	**208.428.706.303**	**452.828.706.303**
Pembentukan dana cadangan	-	50.000.000.000	244.400.000.000
Penyertaan Modal			50.000.000.000
Investasi non permanen			
Pembayaran pokok hutang	163.479.566.964	158.428.706.303	158.428.706.303
Pemberian pinjaman daerah			
Pembiayaan Netto	**-163.479.566.964**	**-208.428.706.303**	**-452.828.706.303**
SILPA / (SIKPA)	-	**0**	-

Sumber: Badan Keuangan Daerah, 2025, diolah

Pada Tahun 2026, pembiayaan netto daerah berkurang menjadi Rp. 208.428.706.303, yang berasal dari pembayaran pokok utang sebesar Rp. 158.428.706.303 dan pembentukan dana cadangan sebesar Rp. 50.000.000.000. Pembentukan dana cadangan ini merupakan langkah strategis daerah, salah satunya dalam rangka persiapan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) serta untuk meningkatkan kesiapsiagaan akan risiko fiskal di masa mendatang.

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus terkait dengan capaian akselerasi dalam rangka sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. Perumusan prioritas pembangunan daerah dilakukan dengan mengevaluasi permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah, baik yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan nasional dan daerah, tujuan dan sasaran pembangunan dari hasil pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan pada tahun sebelumnya, serta rancangan kerangka ekonomi daerah serta kerangka pendanaan.

Kebijakan pembangunan tahunan daerah yang dituangkan dalam dokumen RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026 ditetapkan dengan memperhatikan konsistensi dan sinkronisasi terhadap prioritas dan sasaran pembangunan Nasional tahun 2025 yang tentunya tidak terlepas dari sasaran RPJMN 2025-2029 dan RPJMD 2025-2029 Provinsi NTT untuk tahun rencana 2025. Dalam hal RPJMN 2025-2029 masih sementara berproses, maka arah pembangunan dalam RPJPN 2025-2045 dipedomani dalam proses penyusunan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026.

4.1. ARAHAN RPJPN TAHUN 2025-2045,RPJPD PROVINSI NTT TAHUN 2025-2045 RPJMN TAHUN 2025-2029 DAN RPJMD TAHUN 2025-2029 DAN RKP TAHUN 2026

4.1.1.ARAH KEBIJAKAN RPJPN TAHUN 2025-2045

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 memuat Arah Kebijakan Pembangunan Nasional dalam kurun waktu 20 tahun ke depan. RPJPN Tahun 2025-2045 merupakan pedoman bagi Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebagai tahapan-tahapan rencana pembangunan lima tahunan, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sehingga mendi acuan dalam menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun.

Arah Kebijakan Pembangunan Nasional jangka panjang sebagaimana termuat dalam RPJPN Tahun 2025-2045 bertujuan untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045, **"Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan".** Lima sasaran utama Visi Indonesia Emas 2045 antara lain; 1) Pendapatanan per kapita setara negara maju; 2) Kemiskinan menuju nol persen dan ketimpangan berkurang; 3) Kepemimpinan dan pengaruh di dunia menigkat; 4) Daya saing sumber daya manusia meningkat; dan 5) Intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju *net zero emission*. Selanjutnya, untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 diwujudkan melalui; 17 Arah (Tujuan), 8 Misi (Agenda) dan 45 Indikator Utama Pembangunan.

Sasaran pertama, pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan setara seperti negara maju sekitar US$30.300 dan masuk ke dalam ekonomi lima terbesar di dunia yang utamanya didcrong oleh peningkatan kontribusi PDB industri manufaktur menjadi 28,0 persen dan PDB kemaritiman sebesar 17,5 persen berbasis inovasi serta secara inklusif dan berkelanjutan. Lapangan

pekerjaan layak (decent job) yang tercipta akan meningkatkan jumlah penduduk berpendapatan menengah sekitar 80 persen.

Sasaran kedua, sejalan dengan peningkatan ekonomi yang tinggi, kesempatan kerja dan pendapatan kelas menengah meningkat, sehingga kemiskinan menuju nol persen pada kisaran 0,5-0,8 persen, yang diikuti penurunan secara signifikan jumlah penduduk rentan miskin. Ketimpangan pendapatan antar penduduk semakin menurun dengan Rasio Gini berkisar. Sementara itu, ketimpangan antarwilayah menurun dengan peningkatan kontribusi PDRB Kawasan Timur Indonesia menjadi 28,5 persen.

Sasaran ketiga, sejalan dengan kemajuan yang diraih oleh Indonesia, peran dan pengaruh di dunia internasional meningkat yang dicerminkan penguatan diplomasi internasional dan kepemimpinan global, pengaruh budaya, peran aktif dalam organiasi internasional, serta berkontribusi terhadap penyelesaian isu-isu global yang diukur dengan *Global Power Index* (GPI) di peringkat 15 besar dunia.

Sasaran keempat adalah meningkatnya daya saing sumber daya mausia untuk kesehateraan masyarakat yang dibentuk berdasarkan peningkatan pendidikan, pelatihan dan pengembangan, sikap dan etos kerja, inovasi dan kreatifitas, dan kesehatan yang utamanya diukur melalui peningkatan Indeks Modal manusia (*Human Capital Index*) menjadi 0,73 pada tahun 2045.

Sasaran kelima dalam mewujudkan Indonesia menjadi negara yang maju, Indonesia berkomitmen kuat untuk melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan sekaligus ramah lingkungan dalam rangka ekonomi hijau yang utamanya ditunjukan oleh menurunnya Intesitas Emisi GRK menjadi 93,5 persen pada tahun 2045 dibandingkan Intesitas Emisi Gas Rumah Kaca di tahun 2010, menju *zet zero emission* pada tahun 2060.

Pembangunan yang terdiri dari 5 sasaran, 8 misi (agenda}, 17 arah (tujuan), dan 45 indikator utama pembangunan, secara utuh mencerminkan semangat kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang berlandaskan Pancasila. Selanjutnya RPJPN Tahun 2025-2045 menggunakan paradigma baru merubah pendekatan pembangunan bahwa, langkah reformasi saja tidak cukup melainkan perlu diperkuat dengan transformasi menyeluruh di berbagai bidang pembangunan. Fokus utama transformasi meliputi aspek, social, ekonomi dan tata kelola yang merupakan 3 misi (agenda) pembangunan dalam kelompok pertama, yakni kelompok transformasi.

Secara lebih jelas, 8 misi (agenda) pembangunan untuk menjawab Visi Indonesia Emas 2045 terdiri dari 3 (tiga) kelompok utama, antara lain:

a. Transformasi Indonesia

1. Misi 1: Transformasi Sosial
   Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas kreatif, sejahtera dan berdaya saing.
2. Misi 2: Transformasi Ekonomi
   Mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi iptek, ekonomi produktif (termasuk industri manufaktur, ekonomi biru pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja serta BIJMN), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan konektivitas global, serta pembangunan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan.
3. Misi 3: Transformasi Tata Kelola

b. Landasan transformasi

1. Misi 4: Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Ketangguhan Diplomasi
   Memantapkan supremasi hukum. stabilitas, dan ketangguhan diplomasi dengan memantapkan stabilitas ekonomi, politik hukum dan

keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan d"diplomasi Indonesia di tingkat global.

2. Misi 5: Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
   Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga komunitas masyarakat pembangunan karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya dalam pengelolaan risiko bencana dan iklim, menjaga keberlanjutan sumber daya alam, serta tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan, dan guncangan.

c. Kerangka Implementasi Tranformasi

1. Misi 6: Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan
   Pembangunan kewilayahan diwujudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang dilengkapi dengan landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas, dan ketangguhan diplomasi, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Penerjemahan tersebut dilakukan sesuai karakteristik masing-masing wilayah.
2. Misi 7: Sarana dan prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
   Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai Pilar pendukung agenda transformasi.
3. Misi 8: Kesinambungan Pembangunan
   Kesinambungan pembangunan yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang serta pembiayaan pembangunan.

Kedelapan misi (agenda) tersebut dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) arah (tujuan) pembangunan yang didasarkan pada Kelompok Transformasi Indonesia dan Kelompok Landasan Transformasi yang dimuat dalam Tabel 4.1, sebagai berikut:

Tabel 4. 1
17 (tujuh Belas) Arah (Tujuan) Pembangunan didasarkan Pada Kelompok Tranformasi Indonesia dan Landasan Transformasi

TRANSFORMASI INDONESIA	
Transformasi Sosial	**Arah Tujuan Pembangunan** 1. Kesehatan untuk Semua 2. Pendidikan Berkualitas yang Merata 3. Perlindungan Sosial yang Adaptif
Transformasi Ekonomi	**Arah Tujuan Pembangunan** 4. Iptek, Inovasi, dan Produktifitas Ekonoi 5. Penerapan Ekonomi Hijau 6. Transformasi Digital 7. Integrasi Ekonomi Domesik dan Global 8. Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
Transformasi Tata Kelola	**Arah Tujuan Pembangunan** 9. Regulasi yang Adaptif dan Taat Asas serta Tata Kelola yang Berintegritas, Tangkas dan Kolaboratif

LANDASAN TRANSFORMASI	
SupermasiHukum, Stabilitas, dan Ketangguhan Diplomasi	**Arah Tujuan Pembangunan** 10. Hukum Berkeadilan, Ketahanan Budaya Gentar Kawasan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansi. 11. Stabilitas Ekonomi Makro 12. Ketangguhan Diplomasi
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	**Arah Tujuan Pembangunan** 13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju 14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusi 15. Lingkungan Hidup Berkualitas 16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan 17. Resiliansi terhadap Bencana dan Perubahan Iklm.

Sumber: RPJPN 2025-2045

Selain 17 arah (tujuan) pembangunan tersebut, pada Kerangka Implementasi Transformasi diarahkan untuk mewujudkan 3 (tiga) aspek utama yaitu: Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan, Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan, dan Kesinambungan Pembangunan.

Pentahapan Pembangunan dalam pelaksanaan RPJPN Tahun 2025-245 dilakukan secara terukur dan konsisten untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Di dalamnya terdapat 4 tahapan pembangunan, antara lain; Tahapan pertama (2025-2029) yaitu, Perkuatan Fondasi Transformasi, Tahapan kedua (2030-2034) yaitu, Akselerasi transformasi, Tahapan ketiga (2035-2039) yaitu, Ekspansi Global, dan Tahapan keempat (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas. Rencana tahunan termasuk pada level daerah mempedomani arah pembangunan pada masing-masing tahapan pembangunan. Dengan demikian, RKPD Provinsi NTT Tahun 2025 merupakan perencanaan pembangunan tahunan pada tahun pertama sekaligus tahapan pembangunan periode pertama rencana jangka panjang baik Nasional maupun Daerah. Penguatan Fondasi Transformasi menjadi target yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan pembangunan Tahapan pertama.

Dalam RPJPN Tahun 2025-245, **tahapan pertama (2025-2029) adalah penguatan fondasi transformasi**, Pada tahap ini, pertumbuhan ekonomi diperkirakan berada pada kisaran 5,7-5,9 persen per tahun. **Transformasi sosial** dititikberatkan pada penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, serta peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif. **Transformasi ekonomi** difokuskan pada upaya lanjutan proses hilirisasi sumber daya alam unggulan, peningkatan kapasitas riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja penerapan ekonomi hijau pemenuhan akses digital di seluruh wilayah Indonesia, pembangunan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan utamanya di luar pulau Jawa.

Transisi energi difokuskan pada tidak adanya penambahan PLTU batu bara yang baru; pemanfaatan *Energy Storage System* (ESS); pengembangan kapasitas PLT ET, yaitu PLTA, PLTS PLTP, dan PLT Biomassa; penyiapan kelembagaan dan kerangka kebijakan pengembangan energi baru seperti

hidrogen hijau, nuklir gas metana batubara, batu bara tercairkan; implementasi corbon credit secara luas; pengalihan subsidi fosil ke subsidi ET secara bertahap; peningkatan penggunaan gas bumi di sektor industri; dan peningkatan penggunaan kendaraan listrik beserta infrastruktur pendukungnya.

Transformasi tata kelola difokuskan pada perbaikan kelembagaan yang tepat fungsi, penyempurnaan fondasi penataan regulasi, pembentukan dan penguatan lembaga tunggal pengelola regulasi, peningkatan kualitas ASN berbasis merit kebijakan pembangunan berbasis bukti, penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan, peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, serta peningkatan kapasitas masyarakat sipil.

Supremasi hukum, stabilitas, dan ketangguhan diplomasi difokuskan pada penguatan stabilitas hukum, politik, dari keamanan yang mencakup pembaharuan substansi hukum dan transformasi kelembagaan, hukum (sistem v penegakan hukum, pemberantasan korupsi; HAM. serta budaya hukum), penguatan pilar-pilar keamanan nasional, lembaga demokrasi yang kuat, akuntabel berbasis digital, parlemen modern, parpol yang berbasis nilai, sedangkan, stabilitas ekonomi ditekankan untuk menjaga stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli masyarakat dan kepercayaan investor serta menjaga keberlanjutan fiskal yang adaptif untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Selanjutnya, pengembangan diplomasi Yang tangguh difokuskan pada penguatan infrastruktur diplomasi dan kelembagaan serta mengkonsolidasikan kebijakan dan langkah - langkah untuk memperkuat sinergi diplomasi.

Ketahanan sosial budaya dan ekologi difokuskan pada optimalisasi nilai agama dan budaya serta peran keluarga dalam pembangunan karakter manusia dan menggerakkan modal sosial dalam masyarakat; peningkatan ketangguhan manusia dan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana; penguatan riset, inovasi„ dan teknologi dalam meningkatkan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup; pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, termasuk untuk energi baru terbarukan; penguatan standardisasi 'dan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; akselerasi- pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan penurunan emisi GRK.

Pembangunan wilayah pada tahap ini difokuskan untuk peningkatan pembangunan wilayah potensi ekonomi tinggi utamanya melalui optimalisasi pemanfaatan infrastruktur angada, termasuk pemanfaatan potensi ketersediaan energi terutama dengan teknologi rendah karbon sesuai karakteristik wilayah (*Smart Grid*). Sementara itu, dalam kerangka transisi energi, secara bertahap pembangunan *Island Grid* (dimulai di Sumatera) dan *National Grid* (dimulai antara Sumatera-Jawa) untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya Energi Baru dan Terbarukan. Selanjutnya, dilakukan percepatan pembangunan konektivitas laut sebagai bockbone logistik domestik yang dilengkapi dengan konektivitas udara, darati dan digital- Melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Serta pengembangan kota besar dan metropolitan Yang dimulai dengan pendalaman rencana induk mengacu pada pembangunan IKN. Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar termasuk listrik dengan *micro griff*) terutama pada wilayah dengan prioritas tinggi untuk mengurangi ketimpangan antar kelompok. **Pembiayaan pembangunan** dioptimalkan melalui reformasi tata kelola fiskal serta mobilisasi dan optimalisasi pembiayaan pembangunan non pemerintah.

Arah pembangunan pada tahapan pertama (2025-2029) menjadi acuan bagi penyusunan rencana tahunan daerah guna menjaga konsistensi dan

sinkronisasi perencanaan di tingkat daerah terhadap prioritas dan sasaran pembangunan Nasional. Sebagai pedoman, RPJPN memuat 20 kerangka upaya transformasi super prioritas (*Game Changers*), yaitu:

Tabel 4. 2 Kerangka Upaya Transformasi Super Prioritas (*Game Changers*)

KELOMPOK TRANSFORMASI	UPAYA TRANSFORMASI
Transformasi Ekonomi	1. Peningkatan anggaran IPTEKIN termasuk swasta dan menuju komersialisasi oleh Industri 2. Industrialisasi hilirisasi komoditas unggulan hingga produk akhir dan industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasiŢ serta berorientasi ekspor 3. Sumber pertumbuhan ekonomi baru: ekonomi biru, bioekonomi, dan ekonomi kreatif berbasis kekayaan budaya dan intelektual 4. Percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik te rintegrasiî serta transportasi hijau 5. Superpet Form untuk percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital. 6. Integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi. 7. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)
Transformasi Sosial	1. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra-sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar) 2. Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM termasuk pemanfaatan dana abadi pendidikan 3. Restrukturisasi kewenangan pengelolaan pendidikan dan kesehatan seperti guru dan tenaga medis 4. Investasi pelayanan kesehatan primer serta menuntaskan stunting dan penyakit terabaikan (terutama: TBC dan Kusta) 5. Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem Reg Sostek dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi
Transformasi Tata Kelola	1. Pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi, manajemen ASN (terutama single salary dan sistem pensiun) serta pemberantasan korupsi 2. Penguatan sistem integritas partai politik
Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Ketangguhan Diplomasi	1. Transformasi lembaga kepolisian menuju organisasi sipil 2. Transformasi industri pertahanan menuju kemandirian melalui skema inovatif untuk adopsi teknologi dan penguatan *value chain* industri nasional
Ketahan Sosial Budaya dan Ekologi	1. Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir 2. Pendekatan terpadu FEW Nexus (*food, energy, water*)

Sumber: RPJPN 2025-2045

Dalam RPJPN 2025-2045 termuat pula arah kebijakan pembangunan wilayah mengingat Indonesia sebagai sebuah negara yang besar dengan masalah dan potensi yang beragam antar wilayah. Pembangunan wilayah sangat penting untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan, tetapi kesenjangan saat ini masih cukup tinggi utamanya antara Jawa dan Luar Jawa, serta antara wilayah barat dan timur. Oleh karena itu, pembangunan di luar Pulau Jawa lebih diintensifkan mengingat besarnya sumber daya alam yang belum optimal pemanfaatannya dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di Pulau Jawa Hal ini memungkinkan pertumbuhan di luar Pulau Jawa lebih tinggi dibandingkan di Pulau Jawa.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah, antar kelompok pendapatan, serta kelompok rentan, terdapat 3 indikator yang ditetapkan sebagai pengukur keberhasilan serta sebagai alat pemantauan dan evaluasi RPJPN 2025-2045, sebagai berikut:

1. Indikator Indeks Williamson dengan baseline tahun 2022 sebesar 0,778 dan target tahun 2045 sebesar 0,750.
2. Kontribusi KTU terhadap PDRB dengan baseline tahun 2022 sebesar 20,6 persen dan target 2045 sebesar 28,5 persen.
3. Stok Infrastruktur terhadap PDRB dengan baseline tahun 2022 sebesar 46 persen dan target 2045 sebesar 62 persen.

Telah ditetapkan dalam RPJPN mengenai trajektori pertumbuhan dan kontribusi ekonomi Kawasan dan wilayah pada setiap tahapan pembangunan 5 tahunan sampai dengan periode/tahapan terakhir (2041-2045). Pertumbuhan dan kontribusi ekonomi untuk Kawasan Timur Indonesia antara lain, sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi dengan baseline 2022 sebesar 6,1 persen dan target sebesar 6,8-7,1 persen untuk tahapan pertama (2025-2029) RPJPN Tahun 2025-2045.
2. Kontribusi ekonomi dengan baseline 2022 sebesar 21,5 persen dan target sebesar 23,3 persen untuk tahapan pertama (2025-2029) RPJPN Tahun 2025-2045.

Sementara tajektori pertumbuhan dan kontribusi ekonomi untuk Wilayah Bali-Nusa Tenggara adalah, sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi dengan baseline 2022 sebesar 5,1 persen dan target sebesar 6,4-6,8 persen untuk tahapan pertama (2025-2029) RPJPN Tahun 2025-2045.
2. Kontribusi ekonomi dengan baseline 2022 sebesar 2,7 persen dan target sebesar 3,0 persen untuk tahapan pertama (2025-2029) RPJPN Tahun 2025-2045.

RPJPN Tahun 2025-2045 juga menetapkan tematik pembangunan wilayah, dan untuk Wilayah Koridor Ekonomi Bali-Nusra diarahkan sebagai wilayah Superhub Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusantara.

4.1.2 ARAH KEBIJAKAN RPJPD PROVINSI NTT 2025-2045

Visi RPJPD Provinsi NTT Tahun 2025-2045 adalah Nusa Tenggara Timur Mandiri, Maju, dan Berkelanjutan guna mewujudkan Indonesia emas Tahun 2045. Adapun sasaran Visi dan Indikator Visi Nusa Tenggara Timur dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.3 Sasaran Visi dan Indikator Visi RPJPD Provinsi NTT Tahun 2025-2045

SASARAN VISI	INDIKATOR SASARAN VISI	BASELINE 2025	TARGET 2045
1. Pendapatan per kapita terus meningkat sebagai kontribusi terhadap pendapatan per kapita nasional setara negara maju	• PDRB per kapita (Rp Juta)	24,57 - 24,85	154,72 - 176,22
	• Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	60,41	233,21
	• Kontribusi PDRB sektor industri (%)	1,31 - 1,34	2,25 - 2,76
2. Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang	• Tingkat Kemiskinan (%)	15,32 – 15,82	0,01-1,01
	• Rasio gini (Indeks)	0,319 –0,324	0,257 – 0,308
	• Kontribusi PDRB Provinsi	0,62	0,79
	• Pertumbuhan Ekonomi	4,75-5,65	6,21-7,63
3. Daya Saing Daerah yang meningkat	• Indeks Daya Saing Daerah	3,20 (2022)	3,9 – 4,45
4. Sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, adaptif dan inovatif	• Indeks Modal Manusia	0,47	0,72
5. Pembangunan yang ramah lingkungan dan penurunan emisi GRK menuju net zero emission	• Penurunan intensitas emisi GRK (%)	61,82	98,59
	• Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	80,02	86,31

Sumber : RPJPD Provinsi NTT Tahun 2025-2045

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam RPJPN Tahun 2025-2045 merupakan bagian dari wilayah Bali-Nusa Tenggara. Wilayah Bali-Nusa Tenggara berkontribusi pada perekonomian Indonesia sebesar 2,7 persen pada tahun 2022. Selanjutnya, berdasarkan proyeksi, pada tahun 2045 Bali-Nusa Tenggara berpotensi meningkatkan kontribusinya terhadap PDB nasional menjadi 3,9 persen apabila rata-rata pertumbuhan pulau terjaga pada sekitar persen per tahun. Pembangunan Wilayah Bali-Nusa Tenggara selama 20 tahun ke depan diarahkan sebagai Koridor Ekonomi "**Superhub Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusantara**" yang akan mendorong pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif ke wilayah timur Indonesia Potensi wilayah lainnya akan tetap dikembangkan. Pembangunan ekosistem kepariwisataan di Wilayah Bali-Nusa Tenggara mencakup 5 (lima) prioritas.

Pertama, pengembangan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) lokal yang akan menjadi modal dasar pembangunan Wilayah Bali-Nusa Tenggara ke depan; khususnya disesuaikan dengan sektor potensial Wilayah Bali-Nusa ' Tenggara yaitu pariwisata, pertanian, peternakan dan perikanan. Kedua, pusat-pusat pertumbuhan baru yaitu kawasan pariwisata; sentra-sentra produksi komoditas unggulan di kawasan perdesaan serta sentra pengolahan dan sentra pemasaran di kawasan perkotaan; serta Optimalisasi kawasan eksisting dengan fokus pada peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal dan nilai investasi melalui PMA dan PMDN.

Ketiga, peningkatan infrastruktur dasar dan konektivitas intra dan antar wilayah Bali-Nusa Tenggara yang menjadi *backbone* pembangunan

pusat-pusat pertumbuhan wilayah didukung dengan penguatan infrastruktur ketenagalistrikan dan digital. Keempat, penguatan tata kelola pembangunan wilayah untuk mewujudkan regulasi yang adaptif dan taat asas serta tata kelola yang berintegritas, tangkas, dan kolaboratif, penuntasan RDTR kabupaten/kota serta perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, terutama mitigasi risiko pada wilayah perkotaan dan perdesaan. Kelima, peningkatan ketahanan sosial budaya dan ekologi untuk mewujudkan pembangunan wilayah yang adaptif dan berkelanjutan.

Kelima hal tersebut diterjemahkan menjadi arah kebijakan pembangunan Wilayah Bali-Nusa Tenggara.

Tabel 4. 4 Arah Kebijakan Transformasi Daerah

Periode I Tahun 2025-2029

Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045)		**Periode Pelaksanaan RPJMD**
TRANSFORMASI	**ARAH KEBIJAKAN**	**Periode 1 2025-2029**
TRANSFORMASI SOSIAL	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat.	V
	Perkuatan pemenuhan tenaga medis dan kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif dan afirmasi pendayagunaan tenaga medis dan kesehatan dari masyarakat lokal terutama di daerah afirmasi 3TP.	V
	Pencegahan dan pengendalian penyakit, serta masalah kesehatan akibat perubahan iklim.	V
	Penuntasan stunting dan eliminasi malaria.	V
	Pemenuhan sarana prasarana mendukung pola hidup sehat termasuk ruang terbuka hijau, sarana untuk aktivitas fisik, dan konektivitas transportasi, serta sarana prasarana penanganan limbah medis.	V
	Peningkatan akses pelayanan kesehatan melalui sistem rujukan kepulauan (termasuk RS Perairan) dan penguatan telemedicine serta sistem sister hospital dengan RS di wilayah lain.	V
	Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra-sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).	V
	Perluasan dan peningkatan kualitas PAUD HI untuk mendukung terpenuhnya kebutuhan esensial anak secara utuh, yang meliputi Kesehatan dan gizi, Pendidikan, perlindungan pengasuhan dan kesejahteraan anak usia dini.	V

Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045)		Periode Pelaksanaan RPJMD
TRANSFORMASI	**ARAH KEBIJAKAN**	**Periode 1 2025-2029**
	Pemerataan kualitas antarsatuan pendidikan dan antardaerah untuk memastikan lulusan dengan kualitas yang setara dan tingkat kebekerjaan tinggi.	V
	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi seperti pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif, serta keterkaitan dengan DUDI.	V
	Penyediaan afirmasi akses pendidikan, terutama untuk daerah kepulauan yang masih belum terjangkau termasuk pengembangan sistem pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan TIK yang menjangkau daerah terpencil, penyediaan asrama siswa dan guru, dan penguatan sekolah terbuka.	V
	Pengentasan kemiskinan pada daerah afirmasi 3TP melalui perlindungan sosial adaptif.	V
	Perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal antara lain melalui peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan, dan perlindungan pensiun bagi lansia miskin dan tidak mampu, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas.	V
	Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk program pusat maupun daerah dan desa agar tepat sasaran.	V
	Perencanaan, penganggaran melalui APBD dan APBDes, serta komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, terutama melalui pemenuhan SPM sosial.	V
	Pengembangan perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok rentan, terutama untuk daerah yang menghadapi risiko bencana dan perubahan iklim, melalui antara lain upaya pro aktif mendukung perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi usia pekerja, pengembangan perlindungan sosial daerah yang responsif, integrasi program perlindungan sosial daerah dengan	V

Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045)		Periode Pelaksanaan RPJMD
TRANSFORMASI	**ARAH KEBIJAKAN**	**Periode 1 2025-2029**
	program pemberdayaan ekonomi, program ketenagakerjaan, pencegahan dan penanggulangan bencana, serta program terkait perubahan iklim.	
	Memastikan lingkungan yang inklusif, termasuk perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan pemenuhan hak bagi penduduk lansia (terutama di wilayah dengan penuaan penduduk yang lebih cepat - setidaknya 10% penduduk adalah lansia) dan penyandang disabilitas.	V
TRANSFORMASI EKONOMI	Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru yaitu kawasan pariwisata unggulan dan pengembangan ekonomi kreatif sepanjang koridor daerah, sentra-sentra produksi komoditas unggulan di kawasan perdesaan, sentra-sentra pengolahan dan sentra pemasaran di kawasan perkotaan.	V
	Pengembangan sektor primer pada sentra-sentra produksi komoditas unggulan di kawasan perdesaan terdiri dari sector peternakan (sapi potong, kerbau, kuda babi dan kambing), pertanian (kelapa, kopi, kkao, jambu mete) kelautan dan perikanan (rumput laut, ikan tuna, ikan cakalang, ikan tongkol, garam).	V
	Pengembangan kawasan pariwisata premium seperti Labuan Bajo, serta pengembangan ekonomi kreatif tenun, kopi, dan mete.	V
	Pengembangan kawasan pariwisata massal (mass tourism) untuk meningkatkan jumlah dan minat wisatawan lokal, serta sebagai kawasan penyangga bagi kawasan pariwisata premium yang berfokus pada pemecahan konsentrasi dan perpanjangan lama tinggal wisatawan.	V
	Pengembangan tourism hub Bali-Nusa Tenggara melalui kerja sama multipihak yang didukung pengembangan paket perjalanan dan penambahan rute penerbangan domestic dan internasional.	V
	Pengembangan ekosistem pariwisata yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek kebencanaan dan perubahan iklim, kemudahan	V

Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045)		Periode Pelaksanaan RPJMD
TRANSFORMASI	**ARAH KEBIJAKAN**	**Periode 1 2025-2029**
	investasi, serta pertumbuhan industry pariwisata dan industri kreatif lainnya.	
	Pengembangan ekonomi kreatif penopang sektor pariwisata khususnya tenun, kopi, dan mete, pada sentra-sentra ekonomi lokal.	V
	Pelaksanaan afirmasi reskilling dan upskilling bagi angkatan kerja, terutama di bidang perikanan, perkebunan, pariwisata, dan industri.	V
	Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk memperluas jangkauan promosi dan pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif yang menargetkan segmen pasar tertentu seperti wisata premium berkelas dunia atau ecotourism.	V
	Penguatan BLK dan BRIDA dalam mempersiapkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing.	V
	Revitalisasi penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan pasar kerja.	V
	Penguatan konektivitas antara sentra produksi, pengolahan, dan pasar baik dalam dan luar negeri.	V
	Pengembangan kawasan perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakter wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung.	V
	Peningkatan akses dan ketersediaan fasilitas pendidikan yang menyeluruh dan sesuai standar untuk tiap jenjang pendidikan dengan memaksimalkan pemanfaatan TIK dalam kegiatan belajar-mengajar.	V
	Pemanfaatan TIK untuk memperluas jangkauan promosi dan pemasaran bagi pariwisata dan ekonomi kreatif.	V
	Penguatan TIK untuk memperluas akses pasar pada skala nasional hingga global, salah satunya dengan pemanfaatan e-commerce dan penguatan branding produk.	V
	Peningkatan anggaran IPTEKIN daerah menuju komersialisasi oleh industri.	V
	Industrialisasi koperasi melalui penguatan kemitraan usaha, proses bisnis, dan kelembagaan serta adopsi teknologi dan inovasi.	V

Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045)		Periode Pelaksanaan RPJMD
TRANSFORMASI	**ARAH KEBIJAKAN**	**Periode 1 2025-2029**
	Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.	V
	Kemudahan perizinan dalam proses penyediaan perumahan.	V
	Peningkatan produktivitas BUMD.	V
	Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/ cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan.	V
	Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok. (ii). peningkatan utilisasi dan	V

Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045)		Periode Pelaksanaan RPJMD
TRANSFORMASI	**ARAH KEBIJAKAN**	**Periode 1 2025-2029**
	pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran) serta, (iii). Peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital.	
TRANSFORMASI TATA KELOLA	Optimasi regulasi, termasuk proses pra-regulasi yang memadai di daerah.	V
	Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil penguatan dan masyarakat adat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan	V
	Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat	V
	Penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah	V
	Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital	V
	Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi. Transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa; serta transparansi layanan perizinan berbasis digital.	V
	Pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi.	V
	Penguatan kerja sama antar daerah, dengan mengoptimalkan kembali kerja sama yang telah dilakukan sebelumnya.	V
	Penguatan regulasi penataan jalur lalu lintas laut dan penangkapan ikan serta peningkatan kapasitas masyarakat.	V
	Penguatan Integritas Partai Politik.	V
KEAMANAN DAERAH	Peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan.	V

Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045)		Periode Pelaksanaan RPJMD
TRANSFORMASI	**ARAH KEBIJAKAN**	**Periode 1 2025-2029**
TANGGUH, DEMOKRASI SUBSTANSIAL DAN STABILITAS EKONOMI MAKRO DAERAH	Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal.	V
	Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), pemanfaatan pembiayaan alternatif terutama KPBU, peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.	V
	Penguatan pengendalian inflasi daerah.	V
	Optimalisasi ruang dialog untuk penyelesaian konflik sosial.	V
KETAHANAN SOSIAL, BUDAYA DAN EKOLOGI	Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama.	V
	Peningkatan pengakuan dan penghormatan pada lembaga-lembaga adat dan hak ulayat masyarakat.	V
	Peningkatan upaya pelestarian adat, tradisi, budaya, dan lingkungan sebagai identitas dan citra daerah dalam mendukung pengembangan destinasi pariwisata kebudayaan yang dapat menggerakkan perekonomian lokal.	V
	Penguatan kerja sama dan pelibatan tokoh adat/agama sebagai penggerak masyarakat dan mitra utama pemerintah dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan.	V
	Pengembangan pangan lokal untuk mendukung diversifikasi pangan (padi, jagung, dan sorgum) di sentra-sentra produksi pangan/food estate termasuk kawasan transmigrasi lokal yang didukung penyediaan sarana dan prasarana, SDM unggul dan kompeten, serta modernisasi pertanian dan irigasi yang berbasis teknologi termasuk pertanian regenerative sebagai penopang kegiatan ekonomi wilayah serta mendukung kemandirian pangan lokal.	V
	Pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan menerapkan prinsip rendah karbon dan berketahanan iklim, untuk mewujudkan masyarakat tangguh iklim dan lingkungan hidup yang berkelanjutan dalam mendukung ketahanan energi dan air.	V

Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045)		Periode Pelaksanaan RPJMD
TRANSFORMASI	**ARAH KEBIJAKAN**	**Periode 1 2025-2029**
	Pengelolaan risiko bencana melibatkan multiaktor pentahelix dalam pembangunan dengan memperkuat kesadaran masyarakat akan potensi bahaya dan pengembangan mitigasi struktural dan non-struktural di wilayah rawan bencana tinggi.	V
	Penguatan karakter dan jati diri bangsa.	V
	Penguatan kemandirian pangan dan ketahanan air melalui pengembangan infrastruktur penyimpanan, distribusi (seperti embung, bendungan, dll), konservasi air seperti rainwater harvesting, diversifikasi pangan, riset dan inovasi sistem dan teknologi pertanian dengan memperhatikan kelestarian lingkungan khususnya lokasi prioritas kekeringan.	V
	Modernisasi irigasi.	V
	Perlindungan pulau-pulau kecil dari risiko abrasi.	V
	Pengendalian banjir terpadu di wilayah pariwisata dan perlindungan pulau-pulau kecil dari risiko abrasi.	V
	Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir.	V
	Penjangkauan terhadap masyarakat yang masih belum memiliki dokumen kependudukan seperti KTP dan akta kelahiran.	V
IMPLEMENTASI TRANSFORMASI	Penuntasan RDTR kabupaten/kota serta kewenangan tata ruang laut.	V
	Peningkatan pelaksanaan reforma agraria.	V
	Pelaksanaan kerja sama antardaerah khususnya antar kabupaten/kota dalam menopang pembangunan pariwisata dan penggerak ekonomi lainnya serta meningkatkan kerja sama perdagangan antardaerah.	V
	Pengembangan pelabuhan-pelabuhan simpul utama untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi termasuk pariwisata di antaranya Pelabuhan Tenau Kupang (NTT) dan Labuan Bajo (NTT) secara terpadu.	V
	Pemanfaatan ALKI III secara optimal untuk menghubungkan rantai pasok/nilai domestik dan global.	V
	Peningkatan sarana dan prasarana transportasi laut dan penyeberangan	V

Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045)		Periode Pelaksanaan RPJMD
TRANSFORMASI	**ARAH KEBIJAKAN**	**Periode 1 2025-2029**
	antarpulau untuk penumpang dan logistik serta pengembangan konektivitas feeder angkutan laut termasuk melalui pembangunan infrastruktur dan sarana kapal RoRo (Roll-On/Roll-Off) angkutan barang untuk mengangkut komoditas perkebunan, perikanan dan peternakan sebagai bagian transportasi multimoda yang menjangkau seluruh daerah.	
	Pengembangan bandara utama Bandara Internasional El Tari di Kupang dan bandara lainnya yang terintegrasi dengan pengembangan wilayah termasuk aerocity serta pengembangan bandara perairan dan seaplane untuk mendukung pariwisata dan konektivitas daerah afirmasi 3TP.	V
	Penyelesaian Trans Flores (NTT) serta jalan trans pada pulau-pulau 3TP serta pembangunan dan peningkatan jalan termasuk jalan/daerah.	V
	Pengembangan transportasi perkotaan termasuk sistem angkutan umum massal perkotaan di Kota Kupang yang andal dan modern dalam melayani mobilitas penumpang.	V
	Peningkatan kegiatan ekonomi dan keamanan perbatasan.	V
	Pembangunan tampungan air serba guna yang memberikan manfaat secara cepat bagi kebutuhan air masyarakat sehari-hari.	V
	Penegakan standar keandalan bangunan serta peremajaan bangunan hunian yang berketahanan bencana dan iklim.	V
	Pemenuhan akses air minum aman serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah.	V
	Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman sesuai karakteristik daerah.	V
	Penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui system terpusat di wilayah perkotaan.	V
	Pelaksanaan pengawasan kualitas air minum.	V
	Persiapan lembaga pelaksana penyelenggara SPAM yang berkinerja baik dan optimal.	V

Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045)		Periode Pelaksanaan RPJMD
TRANSFORMASI	**ARAH KEBIJAKAN**	**Periode 1 2025-2029**
	Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga melalui pemicuan perubahan perilaku masyarakat yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan air minum dan sanitasi yang aman.	V
	Pengelolaan sampah terpadu untuk mencapai minimasi residu melalui pengumpulan dan pemilahan sejak dari sumber dan seluruh sampah terangkut dan terolah di fasilitas pengolahan sampah (minimal sepertiganya melalui daur ulang).	V
	Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.	V
	Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi.	V
	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional.	V
	Perkuatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen risiko.	V
	Penanganan permukiman kumuh melalui pemugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, serta permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.	V
	Penerapan bauran pendanaan dalam meningkatkan akses pembiayaan perumahan masyarakat untuk memperoleh hunian layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan.	V
	Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau yang sesuai dengan karakteristik wilayah, terutama untuk daerah kepulauan dan afirmasi.	V
	Meningkatkan kolaborasi antar pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam pengadaan perumahan.	V
	Pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi dalam rangka penegakan standar keandalan bangunan.	V

Sumber: Rancangan Akhir RPJPD Provinsi NTT Tahun 2025-2045

4.1.3 ARAH KEBIJAKAN RPJMN TAHUN 2025-2029

Arah Kebijakan Pembangunan Nasional, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. RPJMN 2025-2029 ini merupakan bagian tahapan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 karena merupakan RPJMN periode pertama yang dirumuskan melalui upaya-upaya transformatif sesuai dengan fokus arah kebijakan dalam Tahap I RPJPN Tahun 2025–2045. RPJMN Tahun 2025–2029 dilengkapi dengan sasaran pembangunan yang terukur. Sasaran pembangunan menggambarkan kondisi yang diharapkan dalam mencapai penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi tinggi berkelanjutan. Kondisi yang diharapkan juga diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan. Pencapaian sasaran pembangunan nasional tahun 2025–2029 merupakan manifestasi dari penguatan transformasi menuju Indonesia Emas 2045.

RPJMN 2025-2029 mempunyai visi **"Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045".** Visi tersebut akan diwujudkan melalui delapan Misi yang dikenal sebagai Asta Cita, meliputi :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur

Sebagai strategi dalam melaksanakan misi tersebut dan pencapaian sasaran visi Indonesia 2045, Presiden menetapkan 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan 8 (Delapan) Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) terlihat pada Tabel 4.5 berikut.

Tabel 4.5 Program Prioritas Nasional dan Program Hasil terbaik Cepat

NO	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT
1	Mencapai Swasembada Pangan,Energi, Dan Air	Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil
2	Penyempurnaan Sistem Penerimaan Negara	Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di kabupaten
3	Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi	Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional

NO	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT
4	Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi
5	Pemberantasan Kemiskinan	Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut
6	Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba	Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara
7	Menjamin Tersediannya Pelayanan Kesehatan bagi Seluruh Rakyat Indonesia: peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat	Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
8	Penguatan Pendidikan, Sains, dan Teknologi, serta Digitalisasi	Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%
9	Penguatan Pertahanan dan Keamanan Negara dan Pemeliharaan Hubungan Internasional dan Kondusif	
10	Penguatan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan, Anak serta Penyandang Disabilitas	
11	Menjamin Pelestarian Lingkungan Hidup	
12	Menjamin Ketersediaan Pupuk,Benih dan Pestisida Langsung ke Petani	
13	Menjamin Pembangunan Hunian Berkualitas Terjangkau Bersanitasi Baik untuk Masyarakat Pedesaan/Perkotaan dan Rakyat yang Membutukan	
14	Melanjutkan Pemerataan Ekonomi dan Penguatan UMKM melalui Program Kredit Usahan dan Pembangunan Ibu Kota Nusatara (IKN) serta Kota-Kota Inovatif-Karakteristik-Mandiri Lainnya	
15	Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasiskan Sumber Daya Alam (SDA), termasuk Sumber Daya Maritim untuk membukan Lapangan Kerja yang Seluas-Luasnya dalam memwujudkan Keadilan Ekonomi	
16	Memastikan Kerukunan Antarumat Beragama, Kebebasan Beribadah, Pendirian dan Perawatan Rumah Ibadah	

NO	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT
17	Pelestarian Seni Budaya , Peningkatan Ekonomi Kreatif, dan Peningkatan Prestasi Olahraga	

Di samping itu, perbaikan kualitas pembangunan akan menjadi modal bagi Indonesia dalam mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif dan berkelanjutan ditunjukan oleh Gambar 4.2. Pertumbuhan inklusif dicerminkan melalui penurunan tingkat kemiskinan, dan rasio gini sebagai indikator ketimpangan, seiring dengan peningkatan Indeks Modal Manusia yang dicapai melalui pemenuhan gizi dan peningkatan akses terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan. Pertumbuhan ekonomi tinggi juga memerhatikan aspek keberlanjutan lingkungan antara lain melalui penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru sebagai sumber-sumber pertumbuhan baru untuk mencapai target penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca dan peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Gambar 4.1 Sasaran makro Pembangunan Tahun 2025-2029

Sumber: Perhitungan Kementerian PPN/Bappenas

Indonesia diharapkan mampu mencapai pertumbuhan ekonomi 8,0 persen yang dilandasi dengan stabilitas ekonomi makro yang kuat. Dengan target pertumbuhan ekonomi tinggi tersebut, Gross lYational Incrne per kapita (Arlas MethoQ) diharapkan meningkat menjadi USD8.OOo pada tahun 2029.

Gambar 4.2 Skenario Pertumbuhan Ekonomi pada Tahun 2025-2029

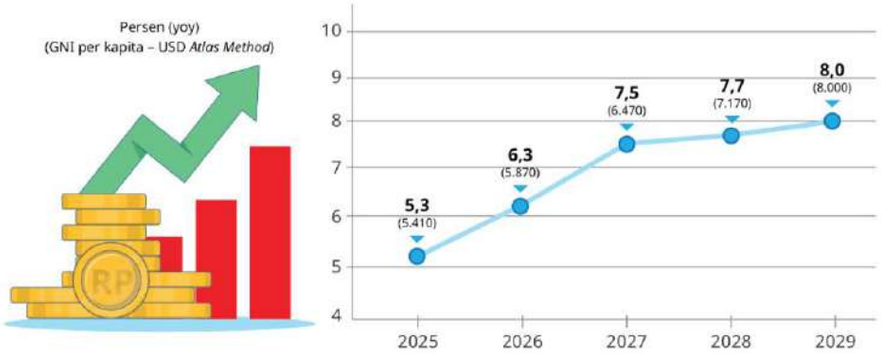

Sumber: Perhitungan Kementerian PPN/Bappenas

Berdasarkan target/sasaran besarpembangunan selarna lima tahun ke depan, maka kebijakan ekonomi makro akan didukung kebiiakan fiskal, moneter, dan reformasi struktural yang adaptif

Arah Kebijakan RPJMN 2025-2029 untuk Wilayah Bali-Nusra

Perencanaan pembangunan nasional merupakan agregasi dari pencapaian pembangunan wilayah. Pembangunan Wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur untuk tahun 2025-2029 bertema Superhub Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bertaraf Internasional.

Wilayah Bali–Nusa Tenggara memiliki keindahan alam, ekosistem bahari, serta kekayaan adat dan budaya yang menjadi magnet wisatawan nusantara maupun mancanegara. Pada tahun 2023, Pulau Bali (Bandara Ngurah Rai) masih menjadi pintu masuk utama wisatawan mancanegara ke Indonesia. NTB dan NTT juga memiliki pesona pariwisata kelas dunia seperti Sirkuit Mandalika, Pulau Gili, Satwa Komodo, hingga Taman Nasional Komodo. Selain pesona pariwisata, juga terdapat potensi ekonomi kreatif berbasis komoditas unggulan dan budaya tradisi lokal.

Gambar 4.3 Tema Pembangunan Wilayah Bali-Nusra

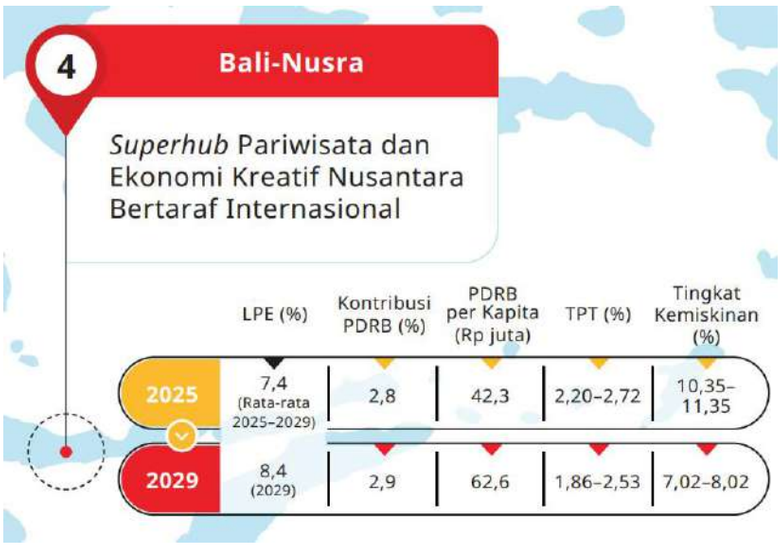

Sumber: Perhitungan Kementerian PPN/Bappenas

Terdapat 2 lokasi pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) di Kabupaten Belu dan Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan komoditas padi dan jagung yang menjadi potensi mendukung ketahanan pangan dengan produksi di Kabupaten Sumba Tengah pada 2021 sebesar 20.852ton untuk padi dan 13.322 ton. Sementara itu untuk Kabupaten Belu pada 2021 sebesar 24.427ton untuk padi dan 49.127ton untuk jagung.

Wilayah Bali-Nusa Tenggara memiliki beragam komoditas unggulan. NTT memiliki produksi rumput laut tertinggi ke-2 nasional (1,56 juta ton pada tahun 2023) yang telah mampu menembus pasar internasional.

Selain komoditas tersebut, NTB dan NTT merupakan produsen garam tertinggi ke-4 dan ke-5 nasional dengan produksi masing-masing mencapai 205.535 ton dan 22.983 ton pada tahun 2023.

Pembangunan di Nusa Tenggara Timur diprioritaskan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah berbasis hilirisasi pertanian, perikanan,

pertambangan, dan pariwisata dengan memperhatikan lokasi prioritas berdasarkan koridor pertumbuhan dan pemerataan

4.1.4 ARAHAN KEBIJAKAN RANCANGAN AKHIR RPJMD PROVINSI NTT TAHUN 2025-2029

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran dari strategi yang telah ditetapkan. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Arah kebijakan yang dilaksanakan selama lima tahun dapat dilihat pada Gambar 4.4 berikut.

Gambar 4.4 Arah Pembangunan Provinsi NTT 2025-2029

Sumber: Rancangan Akhir RPJMD Provinsi NTT 2025-2029

Tabel 4.6 Penahapan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026-2030

TAHAPAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN				
TAHAPAN PEMBANGUNAN				
Tahap I (2026)	**Tahap II (2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV (2029)**	**Tahap V (2030)**
Tema Umum: MEWUJUDKAN NUSA TENGGARA TIMUR YANG SEJAHTERA DAN TANGGUH MELALUI PEMBERDAYAAN EKONOMI LOKAL YANG BERDAYA SAING, SDM UNGGUL, TRANSFORMASI DIGITAL YANG MERATA SERTA TATAKELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, INOVATIF DAN BERMARTABAT MENUJU PEMBANGUNAN INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN				
Prioritas: Peningkatan Produktivitas Dalam Memenuhi Kebutuhan Pangan dan Energi untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	**Prioritas:** Peningkatan Pelayanan Dasar dan Sumber Daya Manusia Berkualitas	**Prioritas:** Transformasi Ekonomi dan Pariwisata yang Kreatif dan Kompetitif	**Prioritas:** Penguatan Ekonomi Lokal melalui Sentra Pangan, Energi Terbarukan dan Inovasi Digital	**Prioritas:** Pemantapan kolaborasi dan inovasi untuk kesejahteraan Masyarakat
ARAH KEBIJAKAN				
MISI 1: Infrastruktur berkelanjutan demi mewujudkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berdaya saing (MAJU)				
Pilar 3: Pemerataan Infrastruktur Berkelanjutan dan Pilar 7 Kolaborasi				
Cita 7: Jalan , air Listrik, rumah layak huni : Mewujudkan NTT yang Sejahtera				**Cita 9: Membangun NTT Digital : akses Merata, Komunikasi Lancar**
- Pembangunan dan pengembangan ruas jalan provinsi meliputi jalan akses simpul transportasi dan jalan strategis dengan pendekatan optimalisasi pola kemitraan (Pendekatan kolaboratif) yang menghubungkan pusat -pusat pertumbuhan baru, desa-desa wisata, wilayah sentra komoditi dan desa-desa yang memiliki produk unggulan. - Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan strategis dan 3 TP (Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Perbatasan) - Melaksanakan urusan Transmigrasi sesuai dengan kebijakan nasional dan peraturan yang berlaku di daerah afirmasi kawasan transmigrasi. - Peningkatan kapasitas tampungan air melalui penguatan koordinasi dalam pembangunan, pemanfaatan, pemeliharaan dan keberlanjutan infrastruktur sumber daya air: bendungan, embung, waduk, jalan usaha tani, jalan produksi dll untuk mendukung pengembangan sektor pertanian dan penyediaan air bersih - Pembangunan sistem pengelolaan air minum yang terintegrasi dari hulu ke hilir untuk pemenuhan air minum layak melalui peningkatan kapasitas dan tata kelola pemerintah dalam penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum. - Pemenuhan akses air minum layak bagi rumah tangga - Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman sesuai karakteristik daerah				- Peningkatan layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi - Peningkatan penyebaran informasi publik yang berkaitan dengan program prioritas pemerintah pusat dan provinsi - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi - Meningkatkan kualitas pelayanan publik,

TAHAPAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	
- Pemenuhan ketersediaan dan keberfungsian jaringan irigasi pertanian dan infrastruktur sumber daya air melalui perencanaan irigasi partisipatif, pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sumber daya air - Pemenuhan dan optimalisasi Wilayah Sungai di Provinsi NTT dalam menjaga kuantitas dan kualitas air - Koordinasi pemenuhan elektrifikasi berbasis pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan PLN bagi rumah tangga belum berlistrik - Peningkatan pemanfaatan riset PLN dan Non-PLN - Pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan - Peningkatan kualitas operasional instalasi tenaga listrik melalui kemitraan pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil *(isolated mini/ micro-grid)* untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas - Pembangunan jaringan infrastruktur pembangkit listrik dan sistem penyaluran berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk mempercepat transisi energy - Penguatan optimalisasi sumber Energi Baru Terbarukan sebagai sumber cadangan energi dalam mendukung transisi energi berbasis potensi Energi Baru Terbarukan sesuai potensi Daerah, yaitu *Timor Biomass Island, Flores Gheotermal Island, Sumba Iconic Island*, serta potensi gelombang laut, arus laut, temperatur laut dan hidrogen hijau - Penguatan peran dan kapasitas masyarakat lokal dalam pemanfaatan dan pengelolaan Energi Baru dan Terbarukan - Penguatan peran Pemerintah melalui dukungan regulasi dan kebijakan dalam mempercepat transisi energi berbasis potensi Energi Baru dan Terbarukan pada kawasan potensial swasembada energi. - Penguatan Peran Pemerintah dalam mendorong pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian kepemilikan lahan bersertifikat dan kemudahan perizinan dalam proses penyediaan rumah - Peningkatan efektivitas pengendalian untuk menjamin keandalan bangunan dan kesesuaian terhadap tata ruang - Meningkatkan kolaborasi lintas sektor dalam penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU, layanan akses sanitasi dan persampahan yang memenuhi standar kesehatan dan keselamatan sesuai dengan aturan yang berlaku - Penyediaan infrastruktur menuju sanitasi aman - Pengelolaan dan penetapan standar pengolahan limbah - Penguatan kolaborasi lintas sektor (hexahelix) dan kewenangan dalam pengelolaan sampah terpadu. - Optimalisasi regulasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang (kawasan lindung dan budidaya) untuk mendorong pembangunan yang tepat sasaran dalam mencapai keselarasan antara aspek ekonomi, sosial dan lingkungan (lingkungan tangguh) - Penciptaan iklim investasi yang kondusif melalui kemudahan perijinan investasi energi, sistem insentif dan menjaga kestabilan sosial/politik untuk mendorong pembangunan infrastruktur energi yang berkelanjutan - Mitigasi Pengurangan status keterancaman spesies dan ekosistem yang terancam punah - Peningkatan Pengawasan kegiatan dan penataan ruang kawasan konservasi melalui Pembinaan usaha dan/atau kegiatan terbangun di kawasan konservasi, pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan konservasi, kebijakan pengelolaan KKPRL (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut), dan pengawasan terhadap tindak pidana pelanggaran di kawasan konservasi - Pemanfaatan riset dan penguatan kapasitas SDM dalam pembangunan yang berketahanan iklim dan resilien terhadap bencana	transparansi dan akuntabilitas pemerintahan serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat sesuai dengan kewenangan provinsi - Penguatan komunitas lokal untuk Pemasaran produk digital UMKM dan kelembagaan - Mendorong perluasan dan pemerataan literasi digital serta integrasi layanan publik yang ramah terhadap perempuan untuk mempersempit kesenjangan dan mendorong kemandirian ekonomi. - Meningkatkan kemitraan dalam penguatan infrastruktur digital koperasi yang merata dan terjangkau - Meningkatkan literasi digital dan adopsi teknologi untuk pengembangan Koperasi - Mengoptimalkan platform dan aplikasi digital untuk pengembangan Koperasi - Koordinasi, Pembinaan dan pengawasan Koperasi Desa Merah Putih

TAHAPAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	
- Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana, serta adaptasi perubahan iklim melalui: (i) Peningkatan kapasitas dan keterlibatan masyarakat dalam mitigasi bencana dan perubahan iklim (ii) Pengembangan sistem dan sarana prasarana pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim (iii) Pelestarian hutan dan keanekaragaman hayati. (iv) Peningkatan Kapasitas institusi dan Kebijakan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan dengan mempertimbangkan resiko bencana - Pemanfaatan ruang budi daya berbasis risiko bencana melalui pemenuhan dokumen dasar perencanaan penanggulangan bencana yang tepat dan akurat serta pengendalian tata ruang berbasis risiko bencana , terutama pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil - Perluasan tutupan lahan kritis secara bertahap - Penguatan riset dan kapasitas SDM dalam pengembangan dan penerapan transportasi - Optimalisasi inventarisasi dan implementasi aksi mitigasi per sektor yang menyumbang penurunan Emisi GRK - Penguatan sistem ketahanan mata pencaharian penduduk terhadap bencana dan perubahan iklim. - Penguatan investasi pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan untuk membangun ketahanan ekonomi yang adaptif dan responsif. - Peningkatan pengawasan pembangunan infrastruktur publik yang adaptif terhadap resiko bencana sesuai rencana tata ruang. - Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Pemenuhan SPM Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana. - Pengembangan prasarana transportasi Darat, Laut, Udara dan ASDP yang berkeselamatan dan menghubungkan wilayah strategis - Keterpaduan Pengembangan pelabuhan simpul utama untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi termasuk pariwisata diantaranya pelabuhan Tenau dan Labuan Bajo secara terpadu - Pengembangan transportasi publik termasuk sistem angkutan umum massal perkotaan di Kota Kupang yang andal dan modern dalam melayani mobilitas penumpang melalui audit dan rencana peremajaan armada, serta pembenahan sistem layanan moda transportasi dan sistem informasi yang terintegrasi secara real time - Pengembangan Kawasan Sentra Produksi melalui peningkatan Jalan Usaha Tani dan Penguatan kerja sama intra daerah dengan kabupaten/kota dalam menjamin penyediaan rantai pasok - Penyiapan pengembangan sentra industri berbasis komoditas rumput laut dengan dukungan kontribusi produksi dari kabupaten sekitarnya melalui Peningkatan sarana prasarana pendukung dengan pengembangan pelabuhan pendukung industri rumput laut, pembangunan jalan dan infrastruktur TIK	- Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Layanan Publik Terpadu melalui: - Aplikasi yang mengintegrasikan layanan publik seperti kesehatan (BPJS, jadwal dokter), pendidikan (data siswa, e-learning), dan bantuan sosial dan pariwisata - Layanan Aspirasi dan Aduan Online dengan pengembangan aplikasi mobile phone yang akan ditindaklanjuti dengan penangan prioritas untuk masalah mendesak melalui platform MEJA RAKYAT - Koordinasi, pembinaan dan pengawasan dalam Pengembangan *Smart Village* dan *Smart City* melalui: (i) Penetapan Pilot Project Desa Digital (ii) Pengembangan Big Data dan Artificial Inteligence untuk Kebijakan Publik
MISI 2: Memperluas pelayanan kesehatan dan jaminan sosial yang lebih inklusif, terjangkau dan mudah diakses (SEHAT)	
Pilar 4: Kesehatan dan Pilar 7 Kolaborasi	
Cita 5: Posyandu Tangguh, Masyarakat Sehat dan Bebas Stunting	

TAHAPAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
- Peningkatan peran dan dukungan Pemerintah Desa dalam Promosi, pencegahan dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan AIDS, TBC, Malaria (ATM) dan penyakit menular lainnya serta tidak menular dengan pendekatan *one health*, termasuk masalah kesehatan akibat perubahan iklim melalui fasilitisasi dukungan kebijakan di tingkat kabupaten/kota dan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat Provinsi - Pemenuhan sarana dan prasarana untuk mendukung pola hidup sehat termasuk ruang terbuka hijau dan sarana untuk aktivitas fisik - Peningkatan fasilitas dan layanan kesehatan ibu dan anak melalui penguatan puskesmas, gedung pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta peningkatan kapasitas tenaga kesehatan - Inovasi dan pemanfaatan pengembangan kesehatan digital dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan melalui : penguatan tata kelola pelayanan kesehatan (implementasi Satu Sehat NTT Terintegrasi) - Penyediaan Promotif, Peningkatan dukungan Pemerintah Desa dalam promosi, pencegahan dan penyediaan layanan dasar kesehatan bagi lansia melalui fasilitisasi dukungan kebijakan di tingkat kabupaten/kota dan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat Provinsi. - Pemenuhan SPM Urusan Kesehatan. - Pelaksanaan intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif melalui pendekatan hexahelix . - Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui penyediaan sarana, prasarana, bangunan gedung, tata kelola, obat dan alat kesehatan, dan pembiayaan yang berkualitas di fasilitas kesehatan - Peningkatan kapasitas posyandu dalam pemenuhan 6 (enam) bidang SPM melalui Peningkatan peran pemerintah, masyarakat, dengan lembaga mitra - Meningkatkan Pusat layanan kesehatan yang aksesibel bagi penyandang disabilitas dan lansia yang memiliki hambatan mobilitas. - Upaya pencapaian Univeral Health Coverage (Jaminan Kesehatan) di seluruh NTT - Penguatan kerjasama dengan pemerintah desa dan lembaga masyarakat untuk meningkatkan cakupan kepesertaan PKRT, disabilitas lansia dalam JKN. - Meningkatkan kualitas dan sebaran tenaga kesehatan melalui penyediaan beasiswa dan pelatihan bagi tenaga kesehatan RSUD dan/atau fasilitas kesehatan pada Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK), serta peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan melalui insentif Tambahan Penghasilan (Tamsil)
MISI 3: Menghadirkan pendidikan berkualitas yang merata, partisipatif dan tepat sasaran (CERDAS)
Pilar 5 : Pendidikan dan Pilar 7 Kolaborasi
Cita 6: Sekolah Vokasi Unggulan berbasis potensi unggulan
- Koordinasi, pembinaan dan pengawasan percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra-sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) yang dilakukan melalui : (i) Perluasan layanan pendidikan anak usia dini yang holistik integratif; (ii) penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran; (iii) revitalisasi sarana dan prasarana sekolah yang berkualitas; (iv) Penanganan anak tidak sekolah yang meliputi anak yang belum pernah sekolah, pencegahan tingkat Drop Out (DO) serta penanganan peserta didik yang lulus tidak melanjutkan. - Pembangunan dan revitalisasi sekolah pendidikan khusus yang berkualitas untuk mendorong pendidikan yang inklusif bagi siswa berkebutuhan khusus;

TAHAPAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
- Peningkatan iklim inklusivitas untuk peserta didik berkebutuhan khusus di level pendidikan layanan khusus; - Penyiapan sarana, prasarana, dan peningkatan kualitas fasilitas dan layanan pendidikan, serta Penyediaan beasiswa afirmasi Pendidikan Menengah untuk daerah kepulauan yang masih belum terjangkau dengan afirmasi bagi perempuan ; - Mendorong tingkat partisipasi mahasiswa di Perguruan Tinggi berkualitas melalui Pemanfaatan beasiswa afirmasi Pendidikan Tinggi dengan afirmasi bagi perempuan ; - Optimalisasi pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran. - Penguatan kelembagaan dan peningkatan akses terhadap lima model penghidupan yang sensitif terhadap GEDSI (penghidupan berbasis masyarakat, penghidupan inklusif penghidupan berkelanjutan, penghidupan berbasis hak, dan penghidupan partisipatif. - Peningkatan kualitas pendidikan melalui Peningkatan akreditasi pendidikan menengah dan khusus berakreditasi minimal B - Pemenuhan SPM bidang Pendidikan. - Peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga pendidik - Revitalisasi sekolah vokasi sektor prioritas (pariwisata, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan (garam, rumput laut) berdasarkan potensi lokal dan pioritas pemerintah fasilitas pendidikan SMK, Politeknik dan Balai Latihan Kerja (BLK) - Pengembangan dan pelestarian budaya lokal melalui perlindungan dan pelestarian warisan budaya, pengembangan komunitas budaya dan daerah melalui kolaborasi dengan Diaspora, jaminan hak kebudayaan, ekspresi budaya dan pemberdayaan masyarakat hukum adat - Meningkatkan peran keluarga sebagai media sosialisasi primer dan kontrol sosial - Mengintegrasikan nilai-nilai agama dan pancasila dalam pembelajaran di sekolah - Internalisasi dan penguatan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat melalui kegiatan ekstrakurikuler berbasis budaya dan kearifan lokal serta pelestarian kegiatan perayaan hari besar kenegaraan - Peningkatan tata kelola pembangunan kebudayaan - Pelestarian cagar budaya, nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal
MISI 4: Mewujudkan kesejahteraan sosial, kesetaraan akses, serta kualitas hidup yang berkeadilan dan madani bagi seluruh lapisan masyarakat (SEJAHTERA)
Pilar 2 : Pemberdayaan Komunitas dan Pilar 7 Kolaborasi
Cita 2: Milenial dan Perempuan Motor Kreatifitas Lokal
- Mengoptimalkan integrasi program perlindungan sosial, pengembangan mata pencaharian, pemberdayaan sosial produktif dan inklusi keuangan dengan prioritisasi masyarakat desil 1 dan 2 DTSEN dan kesenjangan antara perempuan dan laki- laki. - Peningkatan skala ekonomi lewat pengelolaan usaha berbasis kelompok atau korporasi rakyat. - Pengembangan akses pasar, teknologi melalui pola kemitraan yang baik. - Pemberdayaan masyarakat untuk terlibat dalam rantai nilai bisnis yang lebih besar. - Pemenuhan SPM Urusan Sosial.

TAHAPAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN			
- Penguatan kapasitas kelembagaan dan pendampingan berkelanjutan bagi pelaku UMKM - Fasilitasi akses permodalan , pembiayaan dan literasi keuangan - Pengembangan sentra produksi berbasis komoditas unggulan perdesaan - Pembangunan rantai nilai dan jaringan kemitraan antara UMKM, pemerintah dan sektor swasta - Penguatan infrastruktur digital koperasi yang merata dan terjangkau - Peningkatan literasi digital dan kapasitas inovasi bagi pengurus dan anggota koperasi - Pemanfaatan platform dan aplikasi digital untuk efisiensi layanan dan ekspansi usaha koperasi - Pengembangan kemitraan strategis dalam ekosistem digital koperasi - Koordinasi, Pembinaan dan pengawasan Koperasi Desa Merah Putih - Penguatan pelatihan dan pendampingan keterampilan ekonomi, kreatif berbasis kebutuhan pasar khususnya bagi anak muda milenial dan Perempuan - Pengembangan youth campaign dan inkubator bisnis, kemitraan kreatif dan akses pembiyaaan bagi perempuan dan milenial - Peningkatan dan perluasan promosi, pemasaran digital, dan branding produk lokal berbasis budaya dan inovasi - Peningkatan partisipasi kepemudaan dalam ekonomi mandiri termasuk didalamnya kegiatan kewirausahaan, sosial dan budaya - Peningkatan akses dan kualitas fasilitas olahraga di daerah - Pengembangan sistem pembinaan atlet dan penyelenggaraan kompetisi olahraga berjenjang untuk mendukung PON Nusra XXII - Penguatan kelembagaan olahraga daerah untuk mendukung prestasi nasional			
MISI 5: Mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya alam dan manusia yang bijak serta pemenuhan HAM untuk menciptakan masa depan yang inklusif (BERKELANJUTAN)			
Pilar 1: Ekonomi Berkelanjutan, Pilar 6: Reformasi Birokrasi Dan Hak Azasi Manusia dan Pilar 7 Kolaborasi			
Cita 1: Dari ladang dan laut ke pasar : Efisien , modern dan aman	**Cita 3: Wisata NTT Penggerak Ekonomi Lokal**	**Cita 4: Kesejahteraan Bersama: Jaminan Kesehatan dan ketenagakerjaan untuk Masyarakat**	**Cita 8: Pendapatan Daerah Naik, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan ASN Terjamin**
- Meningkatkan pemanfaatan lahan - Meningkatkan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) tanaman pangan, penyakit hewan dan zoonosis - Pemanfaatan bibit/ benih unggul dan penerapan praktik pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan - Pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana prasarana pendukung	- Peningkatan aksesibilitas pariwisata - Pengembangan atraksi - Pengembangan keterampilan SDM,	- Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek	- Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah - Peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui SPM serta optimalisasi peran pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Pengawasan Masyarakat '

TAHAPAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN			
- Penguatan kapasitas SDM - Penguatan tata kelola dan kapasitas kelembagaan - Mendorong swasembada pangan sebagai dasar kedaulatan dan kemandirian pangan provinsi melalui penguatan produksi dalam daerah, perlindungan sumber daya pangan, serta pembangunan sistem pangan yang tangguh dan berkelanjutan guna menjamin ketahanan dan penyelamatan pangan jangka panjang. - Pengembangan komoditas unggulan daerah yang terintegrasi dari hulu ke hilir - Pengembangan sentra produksi di kawasan perdesaan, dan pengolahan dan pemasaran di kawasan perkotaan, serta keterkaitan antar desa dan kota - Peningkatan akses pasar dan nilai tambah produk melalui penguatan sistem logistik, standardisasi kualitas, dan promosi produk unggulan daerah. - Mendorong iklim kebijakan yang kondusif dengan peningkatan investasi guna penciptaan lapangan kerja - Penguatan peran BLK dalam meningkatkan kompetensi angkatan kerja - Pengembangan sistem pelatihan melalui BLK dan BLK Komunitas serta penciptaan lapangan kerja baru dengan sektor swasta - Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja dan potensi ekonomi daerah, yang berfokus pada sektor Pertanian/Perkebunan, Peternakan, Pariwisata dan Perikanan/Kemaritiman - Penguatan koordinasi peningkatan perlindungan dan kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI). - Pendataan penduduk usia kerja untuk penerbitan administrasi kependudukan berupa NIK dan KTP. - Mendorong iklim kebijakan yang kondusif dengan peningkatan investasi guna penciptaan lapangan kerja. - Pendampingan wirausaha baru yang intensif dan berkelanjutan	layanan dan tata Kelola pariwisata - Penguatan dan perluasan pemasaran pariwisata - Pengembangan industri, usaha masyarakat dan investasi pariwisata - Penguatan akses permodalan, pelatihan, dan promosi bagi pelaku ekonomi kreatif - Mendorong kemitraan pelaku ekonomi kreatif dengan sektor swasta - Peningkatan pemanfaatan teknologi dalam penguatan pemasaran dan promosi produk ekonomi kreatif	- Pengembangan sistem pelatihan melalui BLK serta penciptaan lapangan kerja baru dengan sektor swasta - Pendataan penduduk usia kerja untuk penerbitan administrasi kependudukan berupa NIK dan KTP - Peningkatan Pengawasan tenaga kerja melalui K/L dan OPD ketenagakerjaan (BP2MI) dan Swasta - Menyiapkan skema pembiayaan inovatif	- Peningkatan Penerapan Tata Kelola Pemerintah yang baik - Evaluasi produk-produk regulasi daerah - Peningkatan cakupan layanan pengukuran Indeks keterbukaan informasi publik - Peningkatan akses informasi dan layanan yang akurat dan up to date melalui MEJA Rakyat & Sekber - Peningkatan Profesionalime ASN melalui pola karier dan merit sistem - Tersusunnya Paket Regulasi untuk SKPD dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; - Pembinaan ASN dalam rangka peningkatan kapasitas agar mempu mengelola keuangan sesuai standar regulasi yang ada; - Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia. - Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana baik fisik maupun digital untuk mendukung pengelolaan keuangan dan administrasi berbasis akrual. - Pemenuhan SPM Urusan Trantibumlinmas. - Mengintensifkan Peningkatan pendapatan pajak, retribusi, BUMD dan sumber-sumber lainnya - Optimalisasi sumber-sumber pendapatan (aset) secara terpadu - Pengembangan kapasitas SDM ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi - mendorong keberlanjutan pemberian tunjangan kinerja untuk peningkatan profesionalitas

TAHAPAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN			
- Peningkatan akses pembiayaan yang inklusif melalui kerja sama dengan lembaga keuangan dan pengembangan skema pembiayaan alternatif - Penguatan literasi digital dan adopsi teknologi untuk meningkatkan daya saing wirausaha dalam ekonomi digital.			- Menentukan indikator dan target kinerja realistis dan terukur sebagai patokan pemberian tunjangan kinerja - Deregulasi terkait akses terhadap lapangan kerja - Optimalisasi Pengawasan terkait tenaga kerja perempuan dan disabilitas - Peningkatan dan perluasan pelayanan FKUB - Memperkuat kolaborasi lintas sektor antara Pemerintah, Organisasi Masyarakat sipil dan swasta dalam penegakan hukum, edukasi migrasi aman serta peningkatan dan pemerataan akses layanan yang inklusif dan berkelanjutan bagia korban KTPA/A dan PMI.

4.1.4.1 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

4.1.4.1.1 VISI DAN MISI

Visi pembangunan jangka menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Visi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 merupakan gambaran keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Nusa Tenggara Timur sampai dengan Tahun 2029 difokuskan untuk mewujudkan Visi. Adapun Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029, adalah :

"NTT Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera dan Berkelanjutan"

Pernyataan Visi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 memiliki makna sebagai berikut:

Makna NTT Maju : Kemajuan yang mencakup berbagai aspek di Nusa Tenggara Timur, seperti ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadikan NTT sebagai provinsi yang maju dan berkarakter. Memastikan pembangunan infrastruktur berkelanjutan, demi mewujudkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berdaya saing.
Makna Filosofisnya: Kemajuan adalah gerak menuju masa depan yang lebih baik tanpa meninggalkan akar budaya dan nilai-nilai kearifan lokal.

Makna NTT Sehat : Upaya bersama untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di Nusa Tenggara Timur serta Memperluas pelayanan kesehatan dan jaminan sosial yang lebih inklusif, terjangkau, dan mudah diakses.
Makna Filosofisnya: Kesehatan adalah pondasi kehidupan, tubuh yang sehat menciptakan masyarakat yang kuat.

Makna NTT Cerdas : Berkomitmen menghadirkan pendidikan berkualitas yang merata, partisipatif, dan tepat sasaran membangun sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing dan inovatif.
Makna Filosofisnya: Kecerdasan bukan sekedar ilmu melainkan kebijaksanaan dalam bertindak demi kebaikan bersama.

Makna NTT Sejahtera : Membuka lebih banyak peluang kerja dan meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan, sehingga setiap individu memiliki kesempatan untuk berkembang, berinovasi dan berkontribusi bagi kemajuan daerah serta kualitas hidup yang berkeadilan dan madani bagi seluruh lapisan masyarakat Nusa Tenggara Timur.
Makna Filosofisnya: Kesejahteraan tercapai saat semua warga hidup layak dan saling menguatkan dalam keadilan.

Makna NTT Berkelanjutan : Keberlanjutan bukan hanya soal mempertahankan kebijakan, tetapi tentang membangun ekosistem yang mampu berkembang secara mandiri dan memberikan manfaat jangka

panjang bagi generasi mendatang. Keberlanjutan berarti memastikan bahwa setiap kemajuan yang kita capai baik di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan maupun kesejahteraan sosial tidak sekedar bertahan tetapi juga memperkuat masyarakat agar tidak terus menerus bergantung pada intervensi pemerintah sehingga menciptakan inisiatif yang tumbuh berkembang dan diwariskan pada generasi berikutnya.

Makna Filosofisnya: Keberlanjutan adalah warisan bumi, budaya dan kemanusiaan yang akan tetap lestari.

Dalam mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah, maka ditetapkan beberapa Misi Pembangunan Jangka Menengah Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Memastikan Infrastruktur berkelanjutan demi mewujudkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berdaya saing (MAJU);
2. Memperluas pelayanan kesehatan dan jaminan sosial yang lebih inklusif, terjangkau dan mudah diakses (SEHAT);
3. Menghadirkan pendidikan berkualitas yang merata, partisipatif, dan tepat sasaran (CERDAS);
4. Mewujudkan Kesejahteraan sosial, kesetaraan akses serta kualitas hidup yang berkeadilan dan madani bagi seluruh lapisan Masyarakat (SEJAHTERA); dan
5. Mewujudkan Pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya alam dan manusia yang bijak serta pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk menciptakan masa depan yang inklusif (BERKELANJUTAN).

Persandingan Visi, Misi dan Program Prioritas (Pilar Pembangunan) dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar.4.5
Persandingan Visi,Misi dan Program Prioritas

4.1.4.1.2 TUJUAN DAN SASARAN RPJMD TAHUN 2025-2029

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib pelayanan dasar dan wajib non-pelayanan dasar maupun urusan pilihan serta fungsi penunjang

urusan pemerintahan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sedangkan sasaran pembangunan disusun untuk mencapai tujuan strategis masing-masing misi yang menunjukkan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan dan selanjutnya menjadi dasar penetapan program dan kegiatan prioritas pembangunan NTT Tahun 2025-2029. Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan ke dalam sasaran.

Dalam rangka mewujudkan Visi **"NTT Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera, dan Berkelanjutan"** pada periode 2025–2030, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan sejumlah sasaran strategis yang menjadi landasan pencapaian pembangunan daerah. Sasaran-sasaran tersebut dirumuskan secara terukur dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat serta keberlanjutan pembangunan. Berikut adalah sasaran visi yang akan dicapai :

1. MAJU

- Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah secara inklusif dengan target rata-rata 8% per tahun, didorong oleh penguatan sektor unggulan seperti pertanian, kelautan, perikanan, dan pariwisata berbasis potensi lokal;
- Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar dan penunjang yang berkelanjutan, termasuk jalan, air bersih, listrik, dan jaringan digital, guna mengurangi kesenjangan antarwilayah; dan
- Menciptakan 50.000 lapangan kerja baru melalui pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, serta program kewirausahaan yang berorientasi pada pemberdayaan generasi muda dan perempuan.

2. SEHAT

- Menurunkan prevalensi stunting secara signifikan hingga di bawah 20% melalui intervensi terpadu di bidang kesehatan, gizi, dan sanitasi, dengan fokus pada penguatan peran Posyandu sebagai garda terdepan;
- Meningkatkan cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan hingga 95% penduduk NTT untuk menjamin akses layanan kesehatan yang merata dan terjangkau; dan
- Memperluas dan memodernisasi fasilitas kesehatan dasar, termasuk pembangunan 100 Puskesmas baru serta peningkatan kompetensi tenaga medis dan kader kesehatan.

3. CERDAS

- Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTT hingga 72 melalui pemerataan akses pendidikan berkualitas, pelatihan vokasi, dan peningkatan kapasitas tenaga pendidik;
- Mengembangkan 20 sekolah vokasi unggulan berbasis potensi daerah untuk menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan siap kerja (link and match dengan kebutuhan industri); dan
- Memastikan 90% sekolah di NTT memiliki sarana dan prasarana pendidikan yang layak serta didukung oleh tenaga pengajar yang tersertifikasi.

4. SEJAHTERA

- Menurunkan angka kemiskinan hingga di bawah 15% melalui pendekatan graduasi dengan mengintegrasikan program perlindungan sosial, pengembangan mata pencaharian yang meliputi akses permodalan dan transfer aset, pemberdayaan sosial yang meliputi penguatan efikasi, motivasi dan pendampingan intensif dan inklusi keuangan dengan prioritisasi masyarakat desil 1 dan 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSEN);
- Meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat sebesar 15% per tahun dengan mendorong produktivitas sektor riil dan perluasan kesempatan kerja; dan
- Memastikan 100% pekerja terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan sosial bagi tenaga kerja.

5. BERKELANJUTAN

- Menerapkan prinsip infrastruktur hijau dan biru (*green and blue infrastructure*) dalam 70% proyek pembangunan untuk mendukung ketahanan lingkungan dan mitigasi perubahan iklim;
- Melestarikan 30% kawasan konservasi serta mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam berbasis partisipasi masyarakat; dan
- Mewujudkan NTT Digital dengan menyediakan akses internet merata di 100% desa/kelurahan guna mendukung pendidikan, ekonomi, dan pelayanan publik berbasis teknologi.

6. KOLABORASI DAN SINERGI

- Melibatkan diaspora NTT dan sektor swasta dalam 80% program pembangunan melalui inisiatif seperti platform “Ayo Bangun NTT!” dan kemitraan strategis; dan
- Menyelaraskan 100% program pemerintah kabupaten/kota dengan kebijakan provinsi untuk memastikan konsistensi dan efektivitas pencapaian target pembangunan.

Dengan pencapaian sasaran-sasaran tersebut, Provinsi Nusa Tenggara Timur diharapkan dapat menjadi wilayah yang unggul, mandiri, dan berkeadilan, sekaligus meletakkan fondasi yang kuat bagi pembangunan jangka panjang yang inklusif dan berkelanjutan.

Tabel 4.7
Sasaran Visi dan Indikator Visi RPJMD Provinsi NTT
Tahun 2025-2029

Sasaran Visi	Indikator Sasaran Visi	Target per Tahun
		2026
1. Pendapatan per kapita terus meningkat sebagai kontribusi terhadap pendapatan per kapita nasional setara negara maju	• PDRB per kapita (Rp Juta)	24,71-25,25
	• Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI/Poin)	69,05

	• Kontribusi PDRB Sektor Industri (%)	1,36 - 1,41
2. Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang	• Tingkat Kemiskinan (%)	18,12-18,74
	• Rasio Gini (Indeks)	0,302-0,308
	• Kontribusi PDRB Provinsi (%)	0,6285
	• Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,43-5,01
3. Daya Saing Daerah yang meningkat	• Indeks Daya Saing Daerah	3,43
4. Sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, adaptif dan inovatif	• Indeks Modal Manusia (Poin)	0,463
5. Pembangunan yang ramah lingkungan dan penurunan emisi GRK menuju *net zero emission*	• Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	63,19
	• Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	80,19

Sumber : Olahan Tim Penyusunan RPJMD Provinsi NTT, 2025

Pemetaan tujuan, sasaran , Strategi dan Arah kebijakan masing-masing misi, Pilar dan Dasa Cita sebagai berikut:

Tabel 4.8

Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi NTT Tahun 2025-2029

TUJUAN (T)		SASARAN (S)		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
MISI 1: Infrastruktur berkelanjutan demi mewujudkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berdaya saing (MAJU)					
Pilar 3: Pemerataan Infrastruktur Berkelanjutan dan Pilar 7: Kolaborasi					
Cita 7: Jalan , air Listrik, rumah layak huni : Mewujudkan NTT yang Sejahtera					
T.1.1	**Pemenuhan Pemerataan Infrastruktur Berkelanjutan**	S.1.1.1	Meningkatnya Kinerja Infrastruktur: Tersedianya infrastruktur jalan, sumber daya air, air minum bersih,kelistrikan, dan rumah layak huni dengan partisipasi bersama melalui skema penerapan infrastruktur hijau dan biru (*green and blue infrastructure*), serta pertimbangan resiliensi bencana dan perubahan iklim.		
		A.	Meningkatnya kualitas Infrastruktur Jalan dalam menunjang aksesibilitas wilayah	Meningkatkan kapasitas dan kualitas sistem jaringan infrastruktur jalan melalui optimalisasi kemitraan dalam pembangunan dan pengembangan prasarana jalan yang menghubungkan wilayah potensial, serta meningkatkan kemantapan Jalan sampai ke pelosok sesuai prioritas dan program unggulan daerah dan bersinergi dengan	- Pembangunan dan pengembangan ruas jalan provinsi meliputi jalan akses simpul transportasi dan jalan strategis dengan pendekatan optimalisasi pola kemitraan (Pendekatan kolaboratif) yang menghubungkan pusat -pusat pertumbuhan baru,

				program strategis nasional dan kabupaten/kota.	desa-desa wisata, wilayah sentra komoditi dan desa-desa yang memiliki produk unggulan. - Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan strategis dan 3 TP (Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Perbatasan). - Melaksanakan urusan Transmigrasi sesuai dengan kebijakan nasional dan peraturan yang berlaku di daerah afirmasi kawasan transmigrasi.
		B.	Meningkatnya fungsi pelayanan infrastruktur sumber daya air	Meningkatkan kemitraan dalam pendayagunaan dan kelestarian sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat dan mendukung produktivitas ekonomi menuju ketahanan air termasuk mendukung penerapan SPM Urusan Pekerjaan Umum.	- Peningkatan kapasitas tampungan air melalui penguatan koordinasi dalam pembangunan, pemanfaatan, pemeliharaan dan keberlanjutan infrastruktur sumber daya air: bendungan, embung, waduk, jalan usaha tani, jalan produksi dll untuk mendukung pengembangan sektor pertanian dan penyediaan air bersih. - Pembangunan sistem pengelolaan air minum yang terintegrasi dari hulu ke hilir untuk pemenuhan air minum layak melalui peningkatan kapasitas dan tata kelola pemerintah dalam penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum

					- Pemenuhan akses air minum layak bagi rumah tangga - Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman sesuai karakteristik daerah - Pemenuhan ketersediaan dan keberfungsian jaringan irigasi pertanian dan infrastruktur sumber daya air melalui perencanaan irigasi partisipatif, pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sumber daya air - Pemenuhan dan optimalisasi Wilayah Sungai di Provinsi NTT dalam menjaga kuantitas dan kualitas air.
		C.	Terpenuhinya kebutuhan energi daerah	Meningkatkan kemitraan dalam pemenuhan akses dan kualitas layanan listrik yang merata dan berkelanjutan berbasis Energi Baru Terbarukan menuju Swasembada Energi.	- Koordinasi pemenuhan elektrifikasi berbasis pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan PLN bagi rumah tangga belum berlistrik - Peningkatan pemanfaatan riset PLN dan Non-PLN - Pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan - Peningkatan kualitas operasional instalasi tenaga listrik melalui

					kemitraan pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (*isolated mini/ micro-grid)* untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas - Pembangunan jaringan infrastruktur pembangkit listrik dan sistem penyaluran berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk mempercepat transisi energi - Penguatan optimalisasi sumber Energi Baru Terbarukan sebagai sumber cadangan energi dalam mendukung transisi energi berbasis potensi Energi Baru Terbarukan sesuai potensi Daerah, yaitu *Timor Biomass Island, Flores Gheotermal Island, Sumba Iconic Island*, serta potensi gelombang laut, arus laut temperatur laut dan hidrogen hijau - Penguatan peran dan kapasitas masyarakat lokal dalam pemanfaatan dan pengelolaan Energi Baru dan Terbarukan - Penguatan peran Pemerintah melalui dukungan regulasi dan kebijakan dalam mempercepat transisi energi berbasis potensi Energi Baru dan

					Terbarukan pada kawasan potensial swasembada energi.
		D.	Tersedianya Rumah Layak Huni	Meningkatkan kualitas pemukiman yang aman dan berkelanjutan melalui pembangunan rumah bersanitasi layak yang terintegrasi dengan PSU termasuk mendukung penerapan SPM Urusan Pekerjaan Umum.	- Penguatan Peran Pemerintah dalam mendorong pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian kepemilikan lahan bersertifikat dan kemudahan perizinan dalam proses penyediaan rumah - Peningkatan efektivitas pengendalian untuk menjamin keandalan bangunan dan kesesuaian terhadap tata ruang - Meningkatkan kolaborasi lintas sektor dalam penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU, layanan akses sanitasi dan persampahan yang memenuhi standar kesehatan dan keselamatan sesuai dengan aturan yang berlaku - Penyediaan infrastruktur menuju sanitasi aman - Pengelolaan dan penetapan standar pengolahan limbah - Penguatan kolaborasi lintas sektor (hexahelix) dan kewenangan dalam pengelolaan sampah terpadu
		E.	Meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan melalui penerapan ekonomi hijau (*green*	Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup melalui pembangunan berkelanjutan,berketahana	- Optimalisasi regulasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam

			economy) dan ekonomi biru (*blue economy*)	n iklim dan resiliensi terhadap bencana	pengendalian pemanfaatan ruang (kawasan lindung dan budidaya) untuk mendorong pembangunan yang tepat sasaran dalam mencapai keselarasan antara aspek ekonomi, sosial dan lingkungan (lingkungan tangguh) - Penciptaan iklim investasi yang kondusif melalui kemudahan perijinan investasi energi, sistem insentif dan menjaga kestabilan sosial/politik untuk mendorong pembangunan infrastruktur energi yang berkelanjutan - Mitigasi Pengurangan status keterancaman spesies dan ekosistem yang terancam punah - Peningkatan Pengawasan kegiatan dan penataan ruang kawasan konservasi melalui Pembinaan usaha dan/atau kegiatan terbangun di kawasan konservasi, pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan konservasi, Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut), dan
		F.	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan, Resiliensi Bencana dan Perubahan Iklim		
					pengawasan terhadap tindak pidana pelanggaran di kawasan konservasi. - Pemanfaatan riset dan penguatan

					kapasitas SDM dalam pembangunan yang berketahanan iklim dan resilien terhadap bencana - Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana, serta adaptasi perubahan iklim melalui: (i) Peningkatan kapasitas dan keterlibatan masyarakat dalam mitigasi bencana dan perubahan iklim (ii) Pengembangan sistem dan sarana prasarana pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim (iii) Pelestarian hutan dan keanekaragaman hayati (iv) Peningkatan Kapasitas institusi dan Kebijakan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan dengan mempertimbangkan resiko bencana - Pemanfaatan ruang budi daya berbasis risiko bencana melalui pemenuhan dokumen dasar perencanaan penanggulangan bencana yang tepat dan akurat serta pengendalian tata ruang berbasis risiko bencana , terutama pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kebijakan pengelolaan KKPRL (Kesesuaian

					Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut), dan pengawasan terhadap tindak pidana pelanggaran di kawasan konservasi. - Perluasan tutupan lahan kritis secara bertahap - Penguatan riset dan kapasitas SDM dalam pengembangan dan penerapan transportasi Optimalisasi inventarisasi dan implementasi aksi mitigasi per sektor yang menyumbang penurunan Emisi GRK.
					- Penguatan sistem ketahanan mata pencaharian penduduk terhadap bencana dan perubahan iklim - Penguatan investasi pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan untuk membangun ketahanan ekonomi yang adaptif dan responsif - Peningkatan pengawasan pembangunan infrastruktur publik yang adaptif terhadap resiko bencana sesuai rencana tata ruang. - Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Pemenuhan SPM Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana.
		1.1.2	**Meningkatnya daya saing antar wilayah**	- Meningkatkan pengembangan Pusat Pertumbuhan yang terintegrasi melalui peningkatan kemitraan dalam pengembangan Infrastruktur Transportasi Darat, Laut dan Udara untuk meningkatkan aksesibilitas dan	- Pengembangan prasarana transportasi Darat, Laut, Udara dan ASDP yang berkeselamatan dan menghubungkan wilayah strategis. - Keterpaduan Pengembangan

				konektivitas antarwilayah, terutama wilayah strategis dan daerah afirmasi secara merata dan berkelanjutan. - Meningkatkan pengembangan infrastruktur untuk mendukung penciptaan nilai tambah ekonomi dan *multiplier effect* serta akselerasi pembangunan industri.	pelabuhan simpul utama untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi termasuk pariwisata diantaranya pelabuhan Tenau dan Labuan Bajo secara terpadu. - Pengembangan transportasi publik termasuk sistem angkutan umum massal perkotaan di Kota Kupang yang andal dan modern dalam melayani mobilitas penumpang melalui audit dan rencana peremajaan armada, serta pembenahan sistem layanan moda transportasi dan sistem informasi yang terintegrasi secara real time. - Pengembangan Kawasan Sentra Produksi melalui peningkatan Jalan Usaha Tani dan Penguatan kerja sama intra daerah dengan kabupaten/kota dalam menjamin penyediaan rantai pasok. - Penyiapan pengembangan sentra industri berbasis komoditas rumput laut dengan dukungan kontribusi produksi dari kabupaten sekitarnya melalui Peningkatan sarana prasarana pendukung dengan pengembangan pelabuhan pendukung industri rumput laut, pembangunan jalan dan infrastruktur TIK.
Cita 9: Membangun NTT Digital : akses Merata, Komunikasi Lancar					

T.1.2	**Peningkatan akses dan Infrastruktur Digital**	S.1.2.1	Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan teknologi teknologi digital untuk menunjang pelayanan publik dan aktivitas ekonomi	- Meningkatkan kemitraan dalam penguatan Infrastruktur TIK/Digital Berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan, budaya, sosial, politik dan ekonomi masyarakat. - Meningkatkan literasi difital dan akses teknologi informasi bagi seluruh penduduk khusus perempuan untuk mendukung partisipasi inklusif dan ekonomi digital. - Meningkatkan kemitraan usaha, proses bisnis, dan kelembagaan serta adopsi teknologi dan inovasi. Meningkatkan kemitraan dalam pengembangan teknologi digital yang adaptif dalam mendukung Pelayanan Publik dan Percepatan Pembangunan.	- Peningkatan layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi - Peningkatan penyebaran informasi publik yang berkaitan dengan program prioritas pemerintah pusat dan provinsi - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi - Meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat sesuai dengan kewenangan provinsi - Penguatan komunitas lokal untuk Pemasaran produk digital UMKM dan kelembagaan - Mendorong perluasan dan pemerataan literasi digital serta integrasi layanan publik yang ramah terhadap perempuan untuk mempersempit kesenjangan dan mendorong kemandirian ekonomi. - Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Layanan Publik Terpadu melalui: Aplikasi yang mengintegrasikan layanan publik seperti kesehatan (BPJS, jadwal dokter), pendidikan (data siswa, e-learning), dan bantuan sosial dan pariwisata

					- Layanan Aspirasi dan Aduan Online dengan pengembangan aplikasi mobile phone yang akan ditindaklanjuti dengan penangan prioritas untuk masalah mendesak melalui platform MEJA RAKYAT - Koordinasi, pembinaan dan pengawasan dalam Pengembangan *Smart Village* dan *Smart City* melalui: (i) Penetapan Pilot Project Desa Digital (ii) Pengembangan Big Data dan *Artificial Inteligence* untuk Kebijakan Publik
MISI 2: Memperluas pelayanan kesehatan dan jaminan sosial yang lebih inklusif, terjangkau dan mudah diakses (SEHAT)					
Pilar 4: Kesehatan dan Pilar 7: Kolaborasi					
Cita 5: Posyandu Tangguh, Masyarakat Sehat dan Bebas Stunting					
T.2.1	**Pemenuhan pelayanan kesehatan yang inklusif, terjangkau dan mudah diakses**	S.2.1.1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang inklusif, terjangkau dan mudah diakses		
		a.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	- Meningkatkan akses dan kualitas Layanan Kesehatan yang inklusif, terjangkau dan mudah diakses - Meningkatkan layanan promotif, pencegahan dan penyediaan layanan bagi lansia yang terjangkau dan inklusif.	- Peningkatan peran dan dukungan Pemerintah Desa dalam Promosi, pencegahan dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan AIDS, TBC, Malaria (ATM) dan penyakit menular lainnya serta tidak menular dengan pendekatan *one health*, termasuk masalah kesehatan akibat perubahan iklim melalui fasilitisasi dukungan kebijakan di tingkat kabupaten/kota dan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya

					manusia di tingkat Provinsi - Pemenuhan sarana dan prasarana untuk mendukung pola hidup sehat termasuk ruang terbuka hijau dan sarana untuk aktivitas fisik - Peningkatan fasilitas dan layanan kesehatan ibu dan anak melalui penguatan puskesmas, gedung pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta peningkatan kapasitas tenaga kesehatan.
					- Inovasi dan pemanfaatan pengembangan kesehatan digital dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan melalui : penguatan tata kelola pelayanan kesehatan (implementasi Satu Sehat NTT Terintegrasi) - Penyediaan Promotif, Peningkatan dukungan Pemerintah Desa dalam promosi, pencegahan dan penyediaan layanan dasar kesehatan bagi lansia melalui fasilitisasi dukungan kebijakan di tingkat kabupaten/kota dan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat Provinsi. - Pemenuhan SPM Urusan Kesehatan.
		S.2.1.2	Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting dengan pendekatan Pentahelix	Meningkatkan kolaborasi dalam pencegahan dan percepatan penurunan stunting untuk menciptakan masyarakat sehat dan bebas stunting	- Pelaksanaan intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif melalui pendekatan hexahelix

		S.2.1.3	Penguatan Infrastruktur di Fasilitas Layanan Kesehatan		
		a.	Infrastruktur di Fasilitas Layanan kesehatan	- Pengembangan sistem jaminan kesehatan yang memastikan setiap warga memiliki akses pelayanan kesehatan yang adil, bermutu, dan terjangkau - Meningkatkan Pusat layanan kesehatan yang aksesibel bagi penyandang disabilitas dan lansia yang memiliki hambatan mobilitas.	- Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui penyediaan sarana, prasarana, bangunan gedung, tata kelola, obat dan alat kesehatan, dan pembiayaan yang berkualitas di fasilitas kesehatan - Peningkatan kapasitas posyandu dalam pemenuhan 6 (enam) bidang SPM melalui Peningkatan peran pemerintah, masyarakat, dengan lembaga mitra - Meningkatkan Pusat layanan kesehatan yang aksesibel bagi penyandang disabilitas dan lansia yang memiliki hambatan mobilitas.
		S.2.1.4	Memastikan Seluruh Masyarakat NTT sebagai Peserta Aktif BPJS Kesehatan		
		a.	Seluruh Masyarakat NTT menjadi peserta aktif BPJS	Pengembangan sistem jaminan kesehatan yang memastikan setiap warga, terutama kelompok rentan seperti PKRT, disabilitas, lansia, anak memiliki akses pelayanan kesehatan yang adil, bermutu, dan terjangkau	- Upaya pencapaian *Univeral Health Coverage* (Jaminan Kesehatan) di seluruh NTT - Penguatan kerjasama dengan pemerintah desa dan lembaga masyarakat untuk meningkatkan cakupan kepesertaan PKRT, disabilitas lansia dalam JKN.
		S.2.1.5	Pemerataan Distribusi dan Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan		
		a.	Peningkatan Distribusi Tenaga Kesehatan	Meningkatkan pemerataan penyebaran dan peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan di daerah terpencil	- Meningkatkan kualitas dan sebaran tenaga kesehatan melalui penyediaan beasiswa dan pelatihan bagi tenaga kesehatan RSUD dan/atau fasilitas kesehatan pada Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK), serta peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan melalui insentif

					Tambahan Penghasilan (Tamsil)
MISI 3: Menghadirkan pendidikan berkualitas yang merata, partisipatif dan tepat sasaran (CERDAS)					
Pilar 5 : Pendidikan dan Pilar 7: Kolaborasi					
Cita 6: Sekolah Vokasi Unggulan berbasis potensi unggulan					
T.3.1	**Pemenuhan SDM NTT yang unggul dan berdaya saing melalui pendidikan berkualitas yang merata, partisipatif dan tepat sasaran**	S.3.1.1	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu Pendidikan yang inklusif dan holistik integratif	Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, merata dan terjangkau dengan afirmasi keadilan gender dan memperhatikan pengembangan di daerah afirmasi.	- Koordinasi, pembinaan dan pengawasan percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra-sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) yang dilakukan melalui : (i) Perluasan layanan pendidikan anak usia dini yang holistik integratif; (ii) penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran; (iii) revitalisasi sarana dan prasarana sekolah yang berkualitas; (iv) Penanganan anak tidak sekolah yang meliputi anak yang belum pernah sekolah, pencegahan tingkat *Drop Out* (DO) serta penanganan peserta didik yang lulus tidak melanjutkan. - Pembangunan dan revitalisasi sekolah pendidikan khusus yang berkualitas untuk mendorong pendidikan yang inklusif bagi siswa

					berkebutuhan khusus; - Peningkatan iklim inklusivitas untuk peserta didik berkebutuhan khusus di level pendidikan layanan khusus; - Penyiapan sarana, prasarana, dan peningkatan kualitas fasilitas dan layanan pendidikan, serta Penyediaan beasiswa afirmasi Pendidikan Menengah untuk daerah kepulauan yang masih belum terjangkau dengan afirmasi bagi perempuan ; - Mendorong tingkat partisipasi mahasiswa di Perguruan Tinggi berkualitas melalui Pemanfaatan beasiswa afirmasi Pendidikan Tinggi dengan afirmasi bagi perempuan ; - Optimalisasi pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran . - Penguatan kelembagaan dan peningkatan akses terhadap lima model penghidupan yang sensitif terhadap *Gender Equality, Disability and Social Inclusion* (GEDSI)/Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial meliputi: penghidupan berbasis masyarakat, penghidupan inklusif, penghidupan berkelanjutan, penghidupan

					berbasis hak, dan penghidupan partisipatif.
				Memastikan pengintegrasian program. Kegiatan dan sub kegiatan serta anggaran pemenuhan SPM dalam dokumen perencanaan di sekolah dan Dinas Pendidikan Provinsi	- Peningkatan kualitas pendidikan melalui Peningkatan akreditasi pendidikan menengah dan khusus berakreditasi minimal B - Pemenuhan SPM bidang Pendidikan - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Tenaga Pendidik
				Meningkatkan kemitraan dalam mendorong penyelenggaraan pendidikan vokasi berkualitas berbasis potensi unggulan daerah	- Revitalisasi sekolah vokasi sektor prioritas (pariwisata, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan (garam, rumput laut) berdasarkan potensi lokal dan pioritas pemerintah fasilitas pendidikan SMK, Politeknik dan Balai Latihan Kerja (BLK)

T.3.2	**Peningkatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan daerah secara berkelanjutan**	S.3.2.1	Mewujudkan integrasi nilai-nilai budaya lokal dalam sistem pendidikan yang inklusif dan berkarakter dan Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan dalam rangka mendukung pariwisata	Melestarikan kearifan lokal dan nilai-nilai kebudayaan	- Pengembangan dan pelestarian budaya lokal melalui perlindungan dan pelestarian warisan budaya, pengembangan komunitas budaya dan daerah melalui kolaborasi dengan Diaspora, jaminan hak kebudayaan, ekspresi budaya dan pemberdayaan masyarakat hukum adat
				Meningkatkan Penerapan Nilai-nilai Agama dan Pancasila bagi peserta didik	- Meningkatkan peran keluarga sebagai media sosialisasi primer dan kontrol sosial - Mengintegrasikan nilai-nilai agama dan pancasila dalam pembelajaran di sekolah - Internalisasi dan penguatan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat melalui kegiatan ekstrakurikuler berbasis budaya dan kearifan lokal serta pelestarian kegiatan perayaan hari besar kenegaraan
				Mendorong integrasi nilai-nilai budaya lokal dalam pengembangan pariwisata dengan melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama	- Peningkatan tata kelola pembangunan kebudayaan - Pelestarian cagar budaya, nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal
MISI 4: Mewujudkan kesejahteraan sosial, kesetaraan akses, serta kualitas hidup yang berkeadilan dan madani bagi seluruh lapisan masyarakat (SEJAHTERA)					
Pilar 2 : Pemberdayaan Komunitas dan Pilar 7: Kolaborasi					
Cita 2: Milenial dan Perempuan Motor Kreatifitas Lokal					
T.4.1	**Meningkatkan pemberdayaan komunitas yang mandiri, inklusif, dan berdaya saing**	S.4.1.1	Meningkatnya pendapatan masyarakat, ketimpangan berkurang, dan kemiskinan menurun	Mengoptimalkan model Graduasi melalui pola kemitraan dalam rangka peningkatan pendapatan perempuan dan laki- laki, yang merata dengan mempertimbangkan investasi sektor produktif,	- Mengoptimalkan integrasi program perlindungan sosial, pengembangan mata pencaharian, pemberdayaan

	melalui penguatan kapasitas, akses terhadap sumber daya, serta partisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan guna menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan			optimalisasi pemberdayaan UMKM dan ekonomi lokal, pemerataan akses infrastruktur, layanan pendidikan vokasi, dan perlindungan sosial	sosial produktif dan inklusi keuangan dengan prioritisasi masyarakat desil 1 dan 2 DTSEN dan kesenjangan antara perempuan dan laki- laki. - Peningkatan skala ekonomi lewat pengelolaan usaha berbasis kelompok atau korporasi rakyat. - Pengembangan akses pasar, teknologi melalui pola kemitraan yang baik, - Pemberdayaan masyarakat untuk terlibat dalam rantai nilai bisnis yang lebih besar. - Pemenuhan SPM Urusan Sosial.
		S.4.1.2	Terbangunnya ekosistem yang mendukung pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berbasis potensi ekonomi lokal desa	Optimalisasi potensi ekonomi desa melalui pengembangan produk dan layanan UMKM yang didukung oleh pola kemitraan strategis	- Penguatan kapasitas kelembagaan dan pendampingan berkelnajutan bagi pelaku UMKM - Fasilitasi akses permodalan , pembiayaan dan literasi keuangan - Pengembangan sentra produksi berbasis komoditas unggulan perdesaan - Pembangunan rantai nilai dan jaringan kemitraan antara UMKM, pemerintah dan sektor swasta
		S.4.1.3	Terwujudnya koperasi modern yang mandiri melalui transformasi digital, penguatan kelembagaan, dan kolaborasi usaha	Mendorong transformasi koperasi melalui penguatan kelembagaan, adopsi teknologi digital, serta pengembangan kemitraan usaha yang inklusif terutama untuk sektor-sektor produktif	- Penguatan infrastruktur digital koperasi yang merata dan terjangkau. - Peningkatan literasi digital dan kapasitas inovasi bagi pengurus dan anggota koperasi. - Pemanfaatan platform dan aplikasi digital

					untuk efisiensi layanan dan ekspansi usaha koperasi. - Pengembangan kemitraan strategis dalam ekosistem digital koperasi. - Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Koperasi Desa Merah Putih.
T.4.2	**Meningkatkan Kapasitas Perempuan dan Pemuda yang mandiri dan berdaya saing**	S.4.2.1	Meningkatnya partisipasi aktif seluruh Perempuan, kaum milenial, dan kelompok rentan dalam pengembangan ekonomi kreatif yang meningkatkan nilai tambah produk lokal	Mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif yang inklusif dan partisipatif, melalui penguatan SDM, Kemitraan usaha, serta pemanfaatan teknologi digital dengan pelibatan aktif perempuan, kaum milenial, PKRT, kelompok disabilitas, lansia pempuan dan laki- laki dan kelompok masyarakat rentan lainnya.	- Penguatan pelatihan dan pendampingan keterampilan ekonomi, kreatif berbasis kebutuhan pasar khususnya bagi anak muda milenial dan Perempuan - Pengembangan youth campaign dan inkubator bisnis, kemitraan kreatif dan akses pembiyaaan bagi perempuan dan milenial - Peningkatan dan perluasan promosi, pemasaran digital, dan branding produk lokal berbasis budaya dan inovasi
		S.4.2.2	Meningkatnya peran strategis pemuda dalam pembangunan dan partisipasi masyarakat dalam olahraga untuk meningkatkan prestasi olahraga Provinsi NTT di tingkat Nasional	Meningkatkan pemberdayaan dan pelibatan pemuda dalam pembangunan daerah, serta meningkatkan fasilitas dan pembinaan olahraga dalam rangka mendukung PON Nusra XXII tahun 2028	- Peningkatan partisipasi kepemudaan dalam ekonomi mandiri termasuk didalamnya kegiatan kewirausahaan, sosial dan budaya - Peningkatan akses dan kualitas fasilitas olahraga di daerah - Pengembangan sistem pembinaan atlet dan penyelenggaraan kompetisi olahraga berjenjang untuk

					mendukung PON Nusra XXII - Penguatan kelembagaan olahraga daerah untuk mendukung prestasi nasional
MISI 5: Mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya alam dan manusia yang bijak serta pemenuhan HAM untuk menciptakan masa depan yang inklusif (BERKELANJUTAN)					
Pilar 1: Ekonomi Berkelanjutan, Pilar 6: Reformasi Birokrasi dan Hak Azasi Manusia dan Pilar 7: Kolaborasi					
Cita 1: Dari ladang dan laut ke pasar : Efisien , modern dan aman					
T.5.1	**Mewujudkan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan, sebagai sektor unggulan yang berkelanjutan dan berbasis potensi daerah**	S.5.1.1	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian	Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi sektor pertanian melalui peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur pertanian, dan penguatan kapasitas petani untuk mendukung swasembada pangan termasuk produk unggulan daerah (garam, rumput laut, tuna cakalang, tongkol) termasuk yang berada di daerah afirmasi.	- Meningkatkan pemanfaatan lahan - Meningkatkan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) tanaman pangan, penyakit hewan dan zoonosis - Pemanfaatan bibit/ benih unggul dan penerapan praktik pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan - Pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana prasarana pendukung - Penguatan kapasitas SDM - Penguatan tata kelola dan kapasitas kelembagaan - Mendorong swasembada pangan sebagai dasar kedaulatan dan kemandirian pangan provinsi melalui penguatan produksi dalam daerah, perlindungan sumber daya pangan, serta

					pembangunan sistem pangan yang tangguh dan berkelanjutan guna menjamin ketahanan dan penyelamatan pangan jangka panjang antara lain melalui pengembangan Kawasan Strategi Produksi Pangan (KSPP).
		5.1.2	Peningkatan daya saing dan keberlanjutan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan sebagai sektor unggulan yang berbasis potensi daerah	Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian, peternakan, perikanan, dan kelautan secara berkelanjutan melalui hilirisasi dan diversifikasi produk unggulan daerah ((garam, rumput laut, tuna cakalang, tongkol)	- Pengembangan komoditas unggulan daerah yang terintegrasi dari hulu ke hilir - Pengembangan sentra produksi di kawasan perdesaan, dan pengolahan dan pemasaran di kawasan perkotaan, serta keterkaitan antar desa dan kota - Peningkatan akses pasar dan nilai tambah produk melalui penguatan sistem logistik, standardisasi kualitas, dan promosi produk unggulan daerah
T.5.2	**Terwujudnya percepatan penciptaan lapangan kerja dan wirausaha baru serta peningkatan kapasitas wirausaha**	S.5.2.1	Meningkatnya kesempatan kerja yang merata dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat	Meningkatkan akses ketenagakerjaan yang sinergi dengan kebutuhan pasar dan penciptaan ekosistem yang mendukung pertumbuhan lapangan kerja dan pemerataan bagi perempuan dan laki- laki serta kelompok disabilitas	- Mendorong iklim kebijakan yang kondusif dengan peningkatan investasi guna penciptaan lapangan kerja - Penguatan peran BLK dalam meningkatkan kompetensi angkatan kerja - Pengembangan sistem pelatihan melalui BLK dan BLK Komunitas serta penciptaan lapangan kerja baru dengan sektor swasta

					- Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja dan potensi ekonomi daerah, yang berfokus pada sektor Pertanian/Perkebunan, Peternakan, Pariwisata dan Perikanan/Kemaritiman - Penguatan koordinasi peningkatan perlindungan dan kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI). - Pendataan penduduk usia kerja untuk penerbitan administrasi kependudukan berupa NIK dan KTP. - Mendorong iklim kebijakan yang kondusif dengan peningkatan investasi guna penciptaan lapangan kerja.
		S.5.2.2	Meningkatnya wirausaha baru yang berdaya saing dan kapasitas usaha melalui penyediaan akses yang dapat dijangkau secara inklusif	Penguatan ekosistem kewirausahaan melalui pendampingan terpadu dan kemudahan akses terhadap pembiayaan, pasar, dan teknologi	- Pendampingan wirausaha baru yang intensif dan berkelanjutan - Peningkatan akses pembiayaan yang inklusif melalui kerja sama dengan lembaga keuangan dan pengembangan skema pembiayaan alternatif - Penguatan literasi digital dan adopsi teknologi untuk meningkatkan daya saing wirausaha

					dalam ekonomi digital
Cita 3: Wisata NTT Penggerak Ekonomi Lokal					
T.5.3	**Terwujudnya pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai penggerak ekonomi lokal NTT**	S.5.3.1	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata NTT (detinasi, pemasaran, kelembagaan dan industri pariwisata) untuk berkontribusi pada peningkatan pendapatan dari Sektor Pariwisata sebagai penggerak ekonomi lokal	Pengembangan pariwisata di destinasi prioritas Provinsi yang berkualitas dan berkelanjutan	- Peningkatan aksesibilitas pariwisata - Pengembangan atraksi - Pengembangan keterampilan SDM, layanan dan tata Kelola pariwisata - Penguatan dan perluasan pemasaran pariwisata - Pengembangan industri, usaha masyarakat dan investasi pariwisata (IKM, KOPERASI, UMKM dan BUMDES)
		S.5.3.2	Meningkatkan Kesejahteraan NTT melalui peningkatan usaha ekonomi kreatif	Meningkatkan inovasi, kreativitas, dan pemanfaatan teknologi dalam pengembangan produk dan layanan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal	- Penguatan akses permodalan, pelatihan, dan promosi bagi pelaku ekonomi kreatif - Mendorong kemitraan pelaku ekonomi kreatif dengan sektor swasta - Peningkatan pemanfaatan teknologi dalam penguatan pemasaran dan promosi produk ekonomi kreatif
Pilar 6: Reformasi Birokrasi dan Hak Azasi Manusia					
Cita 4: Kesejahteraan Bersama: Jaminan Kesehatan dan ketenagakerjaan untuk Masyarakat					
T.5.4	**Terwujudnya Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan Bagi Seluruh Tenaga Kerja NTT**	S.5.4.1	Jaminan dan Perlindungan bagi tenaga kerja NTT, baik formal maupun non formal, terutama tenaga kerja rentan	Perluasan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui kolaborasi dengan stake holders	- Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek - Pengembangan sistem pelatihan melalui BLK serta penciptaan lapangan kerja

					baru dengan sektor swasta - Pendataan penduduk usia kerja untuk penerbitan administrasi kependudukan berupa NIK dan KTP - Peningkatan Pengawasan tenaga kerja melalui K/L dan OPD ketenagakerjaan (BP2MI) dan Swasta - Menyiapkan skema pembiayaan inovatif.
Cita 8: Pendapatan Daerah Naik, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan ASN Terjamin					
T.5.5	**Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia**	S.5.5.1	Transformasi Pelayanan Publik menjadi lebih transparan, efisiensi, profesional, proaktif dan melayani	- Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel - Terhadap Laporan Keuangan : Setiap Laporan Keuangan SKPD maupun Pemprov harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). - Terhadap SPI (Sistem Pengendalian Intern) : Administrasi SPM/SPP harus sesuai SOP yang terdokumentasi dan terukur serta ketepatan waktu. - Terhadap Kepatuhan kepada Peraturan Perundang-undangan : Ketaatan terhadap peraturan yang berlaku dan sesuai dengan prosedur serta mekanisme yang telah ditetapkan.	- Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah - Peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui SPM serta optimalisasi peran pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Pengawasan Masyarakat ' - Peningkatan Penerapan Tata Kelola Pemerintah yang baik - Evaluasi produk-produk regulasi daerah - Peningkatan cakupan layanan pengukuran Indeks keterbukaan informasi publik - Peningkatan akses informasi dan layanan yang akurat dan up to date melalui MEJA Rakyat & Sekber - Peningkatan Profesionalime ASN melalui pola karier dan merit sistem

					- Tersusunnya Paket Regulasi untuk SKPD dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; - Pembinaan ASN dalam rangka peningkatan kapasitas agar mempu mengelola keuangan sesuai standar regulasi yang ada; - Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia; - Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana baik fisik maupun digital untuk mendukung pengelolaan keuangan dan administrasi berbasis akrual. - Pemenuhan SPM Urusan Trantibumlinmas
		S.5.5.2	Meningkatnya Kemandirian fiskal daerah	Mendorong kolaborasi terkait peningkatan kontribusi PAD dan aset terhadap pendapatan daerah	- Mengintensifkan Peningkatan pendapatan pajak, retribusi, BUMD dan sumber-sumber lainnya - Optimalisasi sumber-sumber pendapatan (aset) secara terpadu
		S.5.5.3	Meningkatnya kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai salah satu pengerak ekonomi	Meningkatkan profesionalitas, kompetensi dan kinerja ASN yang handal	- Pengembangan kapasitas SDM ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi - mendorong keberlanjutan pemberian tunjangan kinerja untuk peningkatan profesionalitas - Menentukan indikator dan target kinerja realistis dan terukur sebagai patokan pemberian tunjangan kinerja

		S.5.5.4	Meningkatnya perlindungan hak-hak masyarakat khususnya kelompok rentan dengan partisipasi aktif masyarakat dan kerja sama lintas sektor	- Mendorong kolaborasi penegakan hukum, edukasi dan pencegahan konflik, KTP/KTA dan migrasi aman - Mendorong kolaborasi peningkatan perluasan akses bagi perempuan dan disabilitas - Mendorong kolaborasi peningkatan perluasan akses dan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan PMI yang berkasus - Meningkatkan kolaborasi untuk menimbulkan rasa aman dan nyaman serta pencegahan konflik SARA	- Deregulasi terkait akses terhadap lapangan kerja - Optimalisasi Pengawasan terkait tenaga kerja perempuan dan disabilitas - Peningkatan dan perluasan pelayanan FKUB - Memperkuat kolaborasi lintas sektor antara Pemerintah, Organisasi Masyarakat sipil dan swasta dalam penegakan hukum, edukasimigrasiama nserta peningkatan dan pemerataan akses layanan yang inklusif dan berkelanjutan bagi korban KTPA/A dan PMI

4.1.4.1.3 Arah Pembangunan Kewilayahan berdasarkan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029

1) Arah Pembangunan per Wilayah Pulau

Pembangunan kewilayahan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masih menghadapi kesenjangan, baik secara ekonomi maupun sosial. Wilayah kabupaten/kota di NTT terbagi menjadi empat kelompok jika diklasifikasikan berdasarkan Tipologi Klasen. Di Tahun 2022 wilayah NTT yang termasuk dalam kelompok daerah maju adalah Kota Kupang, Rote Ndao, Belu, Ende, dan Ngada. Wilayah yang masuk dalam daerah maju tertekan adalah Kabupaten Kupang dan Sumba Timur. Selanjutnya, wilayah yang masuk dalam kelompok daerah berkembang adalah Kabupaten Sikka, Nagekeo, Sumba Barat, TTS, Malaka, Manggarai Timur, SBD, dan Manggarai Barat. Sedangkan yang termasuk dalam kelompok Daerah Relatif Tertinggal adalah Kabupaten Flores Timur, Manggarai, Sumba Tengah, Lembata, TTU, Alor, dan Sabu Raijua.

Kemampuan pembangunan masing-masing wilayah sangat dipengaruhi oleh sumber daya yang berbeda-beda, yang dalam pengelolaannya dapat menimbulkan kesenjangan antar wilayah dan berimbas pada kesenjangan pendapatan antar wilayah. Ketidakmerataan tersebut disebabkan oleh faktor-faktor yang terkait antara lain kepemilikan sumber daya, fasilitas yang dimiliki, infrastruktur, keadaan geografis wilayah dan lain sebagainya.

a. Pulau Sumba

Pulau Sumba merupakan salah satu pulau terbesar di Provinsi NTT dengan luas wilayah mencapai 11.005 Km2 atau 22.96% dari total wilayah

provinsi. Dengan luas wilayah tersebut, pulau ini dihuni oleh 775.050 penduduk atau sebesar 15.2% dari total jumlah penduduk di Provinsi NTT. Pulau ini terbagi menjadi 4 wilayah administrasi yang terdiri atas Kabupaten Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, dan Sumba Timur dengan karakteristik dan potensi wilayahnya masing masing. Meskipun demikian, Kinerja pembangunan daerah di Pulau Sumba masih relatif lebih rendah dibandingkan daerah lain di Provinsi NTT.

Pulau Sumba memiliki keberagaman potensi baik daya tarik pariwisata, sumber daya alam, maupun energi baru terbarukan. Hal tersebut menjadi modal dasar yang apabila dikelola dan direncanakan dengan baik serta terarah maka akan berperan penting dalam menunjang pencapaian tujuan nasional, yakni meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas dan memeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, serta mendorong pembangunan daerah. Selain potensi tersebut, Pulau Sumba memiliki sektor unggulan berupa sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata dan ekonomi kreatif serta Energi Baru Terbarukan (EBT).

Pulau Sumba memiliki potensi EBT yang besar terutama potensi tenaga surya tetapu belum dimanfaatkan dengan baik. Padahal, Pulau Sumba merupakan salah satu pulau di Provinsi NTT yang memiliki rasio elektrifikasi yang rendah yaitu 85,84%. Sumba sebagai pulau yang memiliki potensi ekonomi di bidang pertanian dan pariwisata yang tinggi, belum dapat memanfaatkan potensi ini secara maksimal karena mengalami kendala pada akses listrik, dan masih terdapat desa yang belum memiliki akses jaringan ke PLN. Oleh karena itu, akselerasi pengembangan EBT di Pulau Sumba diarahkan sebagai penopang energi untuk wilayah NTT dan sekitarnya.

b. Pulau Flores dan Lembata

Pembangunan pariwisata di Pulau Flores dan Lembata tidak terlepas dari dua destinasi unggulan yang ada di dalamnya, yaitu Destinasi Pariwisata Super Prioritas Labuan Bajo dan Kelimutu sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Selain kedua potensi unggulan tersebut, terdapat potensi pariwisata beragam dan unik yang tersebar di setiap kabupaten di Flores dan sekitarnya. Terletak di kawasan yang kaya akan keanekaragaman hayati laut seperti terumbu karang yang luas dan ekosistem laut yang sehat, ketersediaan sumber makanan yang cukup bagi ikan-ikan di perairan Flores dan sekitarnya serta upaya konservasi dalam menjaga kelestarian ekosistem laut, aktivitas wisata seperti *diving* dan *snorkeling* sangat potensial untuk dikembangkan seperti di wilayah perairan Labuan Bajo, Riung, Lembata dan Alor.

Aktivitas trekking, *bird watching* dan kegiatan petualangan lain yang menonjolkan keindahan alam Flores dan sekitarnya juga dapat dikembangkan. Potensi wisata budaya berupa Atraksi budaya seperti Caci, tinju adat Etu, prosesi Semana Santa di Larantuka hingga perburuan ikan paus di Lamalera sangat potensial untuk dikembangkan.

Potensi pariwisata yang terdapat di Pulau Flores dan Lembata, maka arah pembangunan kewilayahan Pulau Flores dan Lembata diarahkan pada kawasan pariwisata berbasis ekowisata yang premium. Pengembangan ekowisata di Pulau Flores juga diarahkan untuk menciptakan konektivitas yang baik antar destinasi, sehingga wisatawan dapat dengan mudah menjelajahi berbagai tempat menarik di Flores. Hal ini menjadi alternatif

kunjungan wisatawan ke Pulau Flores selain ke Manggarai Barat dan Ende sehingga diharapkan dapat meningkatkan lama kunjung wisatawan.

Selain potensi pariwisata, Pulau Flores juga terkenal sebagai penghasil tanaman pertanian seperti padi, tanaman perkebunan seperti kopi, kakao dan jambu mete dan perikanan budidaya khusunya rumput laut. Kabupaten Flores Timur diproyeksikan untuk menjadi pusat produksi, industri dan ekosistem riset dan inovasi dengan dukungan kontribusi dari kabupaten sekitarnya seperti Lembata dan Alor.

c. Pulau Timor

Kondisi geografis dan hidrologi Pulau Timor mendukung pengembangan potensi sektor pertanian, peternakan dan perikanan. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, potensi-potensi ini dapat dioptimalkan untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat setempat. Kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku industri sangat penting untuk mewujudkan pengembangan yang berkelanjutan dan inklusif di Pulau Timor.

Usaha-usaha pertanian dan peternakan dipercaya akan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Untuk itu, daerah ini diarahkan untuk pengembangan sektor pertanian dan peternakan. Dengan Food Estate yang berlokasi di Belu, ke depan Belu diarahkan menjadi penopang pangan di Pulau Timor. Proyeksi ke depan, Greater Kupang (Kota Kupang dan Kabupaten Kupang) diarahkan untuk menjadi Pusat Produksi, Industri dan ekosistem riset-inovasi Rumput Laut dengan dukungan kontribusi produksi dari kabupaten sekitarnya seperti Kabupaten Rote Ndao.

d. Pulau-pulau: Alor, Rote, Sabu

Pulau Alor

Pulau Alor terletak di kawasan yang kaya akan keanekaragaman hayati laut, sehingga sektor perikanan sangat potensial untuk dikembangkan. Pada Tahun 2021, produksi ikan tongkol Alor menjadi yang terbesar di NTT yaitu mencapai 4.284 ton sedangkan di tahun yang sama produksi ikan tuna menjadi yang terbesar ke empat di NTT dengan 562 ton. Adapun produksi rumput laut pada Tahun 2022 sebesar 2015 ton (terbesar ke enam di NTT). Namun pemanfaatan potensi yang ada ini perlu dioptimalkan agar dapat memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian daerah.

Di sektor pertanian, khususnya tanaman Perkebunan dan pertanian, potensi yang cukup menonjol dari Kabupaten Alor disumbang dari komoditas jambu mete, vanili, kemiri, kenari, jagung dan ubi kayu. Berdasarkan data BPS Tahun 2023 luas areal tanam jambu mete 12.636 ha dengan produksi 3.507 ton (terbesar ke enam di NTT). Produksi jagung pada Tahun 2022 sebesar 26.916 (terbesar ke tujuh di NTT), sedangkan produksi ubi kayu 35.751 ton (terbesar ke sembilan di NTT).

Potensi pariwisata di Kabupaten Alor terletak pada budaya dan tradisi unik masyarakat lokal seperti Kampung Adat Takpala yang masih memegang teguh warisan budaya leluhur. Selain itu, Alor terkenal dengan keindahan pantai pasir putih dan pulau-pulau kecilnya. Terdapat banyak spot untuk menikmati keindahan bawah laut di Alor baik untuk *snorkeling*

maupun *diving*. Atraksi pengamatan dugong juga cukup terkenal di Alor. Spesies yang mulai langka ini biasanya hidup pada habitat dengan kualitas yang baik. Ini juga erat kaitannya konservasi yang terus dilakukan dan berkembang baik di perairan Alor.

Selain itu, di wilayah laut Pulau Alor juga terdapat potensi engeri baru terbarukan (EBT) yakni arus laut yang dapat dikembangkan untuk penyediaan energi listrik untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Memperhatikan potensi yang ada, Kabupaten Alor diproyeksikan dapat memberikan dukungan kontribusi bagi Kabupaten Flores Timur sebagai pusat produksi, industri serta ekosistem riset dan inovasi.

Pulau Rote

Rote Ndao memiliki potensi perikanan yang sangat besar karena didukung oleh kondisi geografis dan ekosistem laut yang kaya. Perairan di sekitar Rote Ndao merupakan habitat yang baik untuk ikan pelagis besar seperti tuna dan cakalang. Selain itu, jenis ikan karang seperti kerapu, kakap, dan baronang banyak ditemukan di perairan dangkal di sekitar Rote Ndao. Potensi perikanan budidaya terutama rumput laut sangat menjanjikan. Tahun 2022 produksi rumput laut tercatat sebanyak 88.028 ton yang menjadikan Rote Ndao sebagai daerah penghasil rumput laut terbanyak ke dua di NTT.

Di sektor peternakan, Pulau Rote memiliki potensi peternakan khususnya ternak sedang. Populasi domba di Rote Ndao pada Tahun 2023 tercatat sebanyak 30.283 ekor (terbanyak ke dua di NTT). Selain itu, Pulau Rote termasuk dalam pulau-pulau terluar dengan kekayaan destinasi wisata dan keindahan alam yang sangat memukau. Beberapa destinasi wisata yang sangat terkenal di Rote Ndao misalnya Pantai Nembrala yang terkenal untuk *surfing* dan Mulut Seribu.

Pulau Sabu

Sabu Raijua juga memiliki kondisi geografis dan ekosistem laut yang mendukung perkembangan sektor perikanan. Potensi perikanan budidaya terutama rumput laut Sabu Raijua pada Tahun 2022 sebanyak 53.921 ton menjadikan Sabu Raijua sebagai daerah penghasil rumput laut terbanyak ke tiga di NTT. Selain rumput laut, Pulau Sabu juga memiliki potensi pengembangan garam dengan dukungan garis pantai kondisi panas yang sangat mendukung kualitas garam yang baik. Terdapat pula potensi peternakan khususnya ternak sedang. Populasi domba di Sabu Raijua pada Tahun 2023 tercatat sebanyak 35.633 ekor yang menjadikan Sabu Raijua sebagai daerah dengan populasi domba terbanyak di NTT.

Di sektor pariwisata, Pulau Sabu juga termasuk dalam kategori pulau terluar yang tememiliki objek wisata baik alam, wisata laut maupun budaya misalnya Kelaba Maja dan ritus-ritus budaya yang dikembangkan di masyarakat. Dengan potensi yang ada, Sabu Raijua diharapkan dapat memberikan kontribusi/penyuplai dukungan kontribusi bagi Greater Kupang sebagai pusat produksi, industri serta ekosistem riset dan inovasi.

2) Lokus Pembangunan Wilayah di Provinsi NTT

Lokus pembangunan per Pulau secara umum disandingkan dengan arah pembangunan Wilayah Bali-Nusra yang tertuang di dalam RPJMN Tahun 2025-2029 yang disandingkan dengan RPJMD 2025-2029 sebagai berikut pada Tabel 3.9 di bawah ini antara lain meliputi:

1. Kawasan Strategis: Penguatan Kawasan Pariwisata Prioritas Eksiting
2. Kawasan Sentra Produksi Pangan
3. Sentra Pemerataan Ekonomi Rintisan:
   a. Kawasan Pariwisata Rintisan
   b. Kawasan terintegrasi berbasis Perikanan
   c. Kawasan Perkotaan

Tabel 4.9 Lokus Pembangunan Wilayah di Provinsi NTT Tahun 2025-2029

LOKASI PRIORITAS PENGEMBANGAN WILAYAH				
No	**RPJMN Tahun 2025-2029**		**RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029**	
A	➢ Kawasan Pertumbuhan **Kawasan Pawisata** 1. Destinasi Parawisata Prioritas (DPP) Labuan Bajo – **Kab. Manggarai Barat,** dengan rencana perluasan menjadi DPP Labuan Bajo – Flores : • **Kab. Manggarai** • **Kab. Ngada, dan** • **Kab. Ende** **Kawasan Perkotaan** 2. Kawasan Perkotaan Kawasan Perkotaan Parawisata Labuan Bajo - **Kab. Manggarai Barat**	• Penguatan kawasan pariwisata prioritas eksisting (DPP Labuan Bajo) dan perluasannya di Pulau Flores melalui peningkatan aksesibilitas (jalan strategis dan pelabuhan kapal pesiar), pembangunan prasarana dan amenitas pariwisata (SPAL, SPAM, pengolahan sampah berbasis 3R, infrastruktur kelistrikan dan revitalisasi pasar rakyat), atraksi pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan keterampilan SDM (pembinaan, pelatihan, pembekalan kerja) • Pengembangan Kawasan perkotaan pariwisata Labuan Bajo melalui penataan dan peningkatan citra kota (penguatan branding kawasan dan penguatan promosi daya tarik kawasan), peningkatan prasarana pelayanan dasar perkotaan, serta peningkatan layanan pendidikan yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan.	**A**	• Prinsip pengembangan wilayah Provinsi NTT Tahun 2025-2029 adalah melakukan perencanaan dan pembangunan yang bertujuan untuk mendukung lokasi prioritas pengembangan wilayah yang diarahkan di dalam RPJMN Tahun 2025-2029 sesuai kewenangan Provinsi NTT dan dengan memperhatikan dan mempedomani arahan pola dan struktur ruang pada RTRW Provinsi NTT Tahun 2023-2043 dalam semngat kerja kolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan (*hexa helix*) yang berkelanjutan. Sedangkan yang bersifat lintas Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan akan tetap dilakukan pada 21 Kabupaten dan 1 Kota se Provinsi NTT.
B	➢ Kawasan Komoditas Unggulan **Sentra Industri Berbasis Komoditas Rumput Laut** 1. Kab. Kupang dan Kota Kupang 2. Kab. Sumba Timur	• Penyiapan pengembangan sentra industri komoditas rumput laut dengan dukungan kontribusi produksi dari kabupaten sekitarnya melalui penguatan produksi rumput laut, industri, ekspor, aksesibilitas dan konektivitas, peningkatan kualitas SDM (termasuk STEAM dan vokasi), peningkaatan sarana prasana pendukung (termasuk pembangunan jalan akses Pelabuhan maritaing), pendampingan UMKM/IKM, koperasi, dan BUMDes, pengembangan kampung nelayan dan desa perikanan cerdas, serta penguatan kelembagaan ekonomi nelayan.	**B**	• Prinsip pengembangan wilayah Provinsi NTT Tahun 2025-2029 adalah melakukan perencanaan dan pembangunan yang bertujuan untuk mendukung lokasi prioritas pengembangan wilayah yang diarahkan di dalam RPJMN Tahun 2025-2029 sesuai kewenangan Provinsi NTT dan dengan memperhatikan dan mempedomani arahan pola dan struktur ruang pada RTRW Provinsi NTT Tahun 2023-2043 dalam semngat kerja kolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan (*hexa helix*) yang berkelanjutan. Sedangkan yang bersifat lintas Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan akan

LOKASI PRIORITAS PENGEMBANGAN WILAYAH				
No	**RPJMN Tahun 2025-2029**		**RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029**	
	Sentra Produksi Berbasis Komoditas Rumput Laut 1. Kab. Kupang 2. Kab. Sumba Timur 3. Kab. Rote Ndao 4. Kab. Sabu Raijua 5. Kab. Alor 6. Kab. Flores Timur **Sentra Industri Berbasis Garam** 1. Kab. Sabu Raijua 2. Kab. Kupang 3. Kab. Nagekeo **Sentra Produksi Berbasis Garam** 1. Kab. Sabu Raijua 2. Kab. Kupang 3. Kab. Nagekeo 4. Kab. Sumba Timur 5. Kab. Ende	• Penguatan sentra produksi serta penyiapan pengembangan sentra industri garam terintegrasi melalui peningkatan produksi, industri, aksesbilitas dan konektivitas, sertifikasi mutu produk, perluasan ekspor, promosi produk garam industri, pengembangan BUMDes, serta kualitas SDM (termasuk STEAM dan vokasi), peningkatan sarana prasarana (pelabuhan, jalan strategis, inovasi teknologi).		tetap dilakukan pada 21 Kabupaten dan 1 Kota se Provinsi NTT.
C	➢ Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi: **1. Kab. Sumba Tengah**: KSPP **2. Kab. Belu**: KSPP, potensial air **3. Kab. Manggarai Barat**: potensial pangan. **4. Kab. Manggarai**; potensial pangan, potensial energi.	• Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Belu dan KSPP Sumba Tengah melalui pengembangan kawasan (termasuk optimasi lahan, pembangunan embung, jaringan drainase dan irigasi), peningkatan produksi termasuk penyediaan benih dan pengendalian hama, penyediaan infrastruktur dan sarana prasarana produksi; penguatan pasca panen dan tata kelola, serta pengembangan riset dan inovasi teknologi.	**C**	• Prinsip pengembangan wilayah Provinsi NTT Tahun 2025-2029 adalah melakukan perencanaan dan pembangunan yang bertujuan untuk mendukung lokasi prioritas pengembangan wilayah yang diarahkan di dalam RPJMN Tahun 2025-2029 sesuai kewenangan Provinsi NTT dan dengan memperhatikan dan mempedomani arahan pola dan struktur ruang pada RTRW Provinsi NTT Tahun 2023-2043 dalam semngat kerja kolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan (*hexa helix*) yang

LOKASI PRIORITAS PENGEMBANGAN WILAYAH				
No	**RPJMN Tahun 2025-2029**		**RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029**	
	5. **Kab. Manggarai Timur**: potensial pangan. 6. **Kab**. **Sikka**: potensial pangan 7. **Kab**. **Lembata:** potensial pangan. 8. **Kab**. **Kupang**: potensial air, potensial energi. 9. **Kab**. **Nagekeo: potensial air** 10. **Kab. Timor Tengah Selatan: potensial pangan**	• Penguatan kawasan swasembada pangan berbasis pertanian tanaman pangan pangan (padi, jagung, sorgum), pangan akuatik/bluefood berbasis perikanan tangkap laut, dan pangan hewani (sapi dan babi) melalui penguatan produksi, pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana prasarana pendukung, penguatan kapasitas SDM, penguatan tata kelola dan kapasitas kelembagaan petani dan nelayan yang mendukung pengembangan pangan lokal, serta diversifikasi pangan pada kawasan rentan • Peningkatan ketahanan air pulau dalam memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas tampungan/SDA termasuk bendungan, serta penyediaan sumber air baku alternatif di kawasan rawan air dengan embung dan/atau pengeboran sumber air • Peningkatan ketahanan energi, terutama dengan mempercepat transisi energi berbasis potensi energi baru terbarukan melalui percepatan pengembangan dan optimalisasi infrastruktur pembangkit listrik berbasis EBT terutama energi surya, perluasan cakupan layanan ketenagalistrikan di kawasan rentan energi, penyediaan sarana prasarana pendukung, dan perluasan cakupan layanan ketenagalistrikan pada Kawasan rendah elektrifikasi		berkelanjutan. Sedangkan yang bersifat lintas Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan akan tetap dilakukan pada 21 Kabupaten dan 1 Kota se Provinsi NTT.
D	➢ Kawasan Afirmasi **Daerah tertinggal** 1. Kab. Sumba Tengah 2. Kab. Sumba Barat Daya 3. Kab. Sabu Raijua	• Percepatan pembangunan afirmatif untuk daerah tertinggal menjadi daerah berkembang, melalui peningkatan akses layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial; penguatan ekonomi lokal berbasis kearifan lokal, inovasi berbasis pengembangan sentra pertanian dan perikanan	**D**	• Prinsip pengembangan wilayah Provinsi NTT Tahun 2025-2029 adalah melakukan perencanaan dan pembangunan yang bertujuan untuk mendukung lokasi prioritas pengembangan wilayah yang diarahkan di dalam RPJMN Tahun 2025-2029 sesuai kewenangan

LOKASI PRIORITAS PENGEMBANGAN WILAYAH				
No	**RPJMN Tahun 2025-2029**		**RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029**	
	*) Daerah tertinggal juga sudah termasuk daerah sangat tertinggal **Kawasan Perbatasan** • PKSN dan Wilayah Pendukung 1. Kecamatan PKSN Kefamenanu, Kec. Biboki Moenleu, Naibenu, Mutis, Musi **- Kab. Timor Tengah Utara** 2. PKSN Atambua, Kec. Lasiolat, Lamaknen Selatan, Tasifeto Barat, Nanaet Duabesi **- Kab. Belu** 3. PKSN Kalabahi, Kec. Pantar Timur **– Kab. Alor** • Perbatasan Prioritas 1. Kec. Lamboya, Lamboya Barat **– Kab. Sumba Barat**	terintegrasi, dan pariwisata; pemerataan penyediaan infrastruktur dasar dan peningkatan konektivitas intra dan antarwilayah; serta pengelolaan dan pengurangan risiko bencana yang efisien dan tepat guna. • Penguatan kawasan perbatasan di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), serta kecamatan perbatasan prioritas, melalui pemenuhan layanan dasar (penyediaan rumah layak, sarana prasarana, peningkatan SPAM, SPAL), pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis komoditas unggulan terutama di PKSN, penataan ruang kawasan dan penanggulangan bencana kawasan perbatasan, serta penguatan tata kelola pemerintahan.		Provinsi NTT dan dengan memperhatikan dan mempedomani arahan pola dan struktur ruang pada RTRW Provinsi NTT Tahun 2023-2043 dalam semngat kerja kolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan (*hexa helix*) yang berkelanjutan. Sedangkan yang bersifat lintas Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan akan tetap dilakukan pada 21 Kabupaten dan 1 Kota se Provinsi NTT.

LOKASI PRIORITAS PENGEMBANGAN WILAYAH				
No	**RPJMN Tahun 2025-2029**		**RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029**	
	2. Kec. Ngadu Ngala, Karera, Pinu Pahar, Tabundung, Katala Hamu Lingu **– Kab. Sumba Timur** 3. Kec. Amfoang Timur, Kupang Barat, Nekamese, Amarasi Barat, Amarasi Selatan, Amarasi Timur **– Kab. Kupang** 4. Kec. Nunloko, Kot Olin, Kualin **– Kab. Timor Tengah Selatan** 5. Kec. Landu Leko, Rote Timur, Pantai Baru, Rote Selatan, Lobalain, Rote Barat Daya, Ndao Nuse **– Kab. Rote Ndao** 6. Kec. Kodi Balaghar **– Kab. Sumba Barat Daya** 7. Kec. Sabu Timur, Sabu Liae, Hawu Mehara, Raijua **– Kab. Sabu Raijua** 8. Kec. Kobalima Timur **– Kab. Malaka** **Kawasan Transmigrasi** 1. KT Ponu **– Kab. Timor Tengah Utara**	• Pengembangan Kawasan Transmigrasi Ponu, Tasifeto – Mandeu, dan Kobalima Timur, melalui pembangunan infrastruktur permukiman dan aksesibilitas logistik, pengembangan ekonomi		

LOKASI PRIORITAS PENGEMBANGAN WILAYAH				
No	**RPJMN Tahun 2025-2029**		**RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029**	
	2. KT Tasifeto Mandeu **– Kab. Belu** 3. KT Kobalima Timur **– Kab. Malaka** **Kawasan Perdesaan Prioritas** 1. Kawasan Perdesaan Agrowisata Kopi Flores Bajawa **– Kab. Ngada**	kawasan transmigrasi, redistribusi aset (tanah) transmigrasi, penataan persebaran penduduk, serta penyediaan dan pengembangan kompetensi tenaga kerja terampil. • Pengembangan kawasan perdesaan agrowisata berbasis komoditas Kopi Flores Bajawa, melalui penyediaan layanan dasar skala desa dan perdesaan, peningkatan aksesibilitas desa, peningkatan produktivitas perdesaan dan diversifikasi ekonomi lokal, peningkatan kapasitas tata kelola desa.		
E	➢ Kawasan Konservasi 1. Taman Nasional Komodo – **Kab. Manggarai Barat** 2. Cagar Alam Wae Wuul – **Kab. Manggarai Barat** 3. Kawasan Konservasi Daerah Selat Pantar dan Laut Sekitarnya – **Kab. Alor** 4. Taman Wisata Alam Laut Tujuh Belas Pulau – **Kab. Ngada** 5. Cagar Alam Riung **– Kab. Ngada** 6. Taman Nasional Perairan Laut Sawu dan Sekitarnya (10 Kab. Di Prov. NTT)	• Perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan kawasan konservasi melalui pengawasan kegiatan dan penataan ruang kawasan konservasi, optimalisasi tata kelola kawasan konservasi, pengurangan status keterancaman spesies dan ekosistem, pengelolaan pemanfaatan kawasan konservasi, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi, serta peningkatan sarana prasarana pendukung.	**E**	• Prinsip pengembangan wilayah Provinsi NTT Tahun 2025-2029 adalah melakukan perencanaan dan pembangunan yang bertujuan untuk mendukung lokasi prioritas pengembangan wilayah yang diarahkan di dalam RPJMN Tahun 2025-2029 sesuai kewenangan Provinsi NTT dan dengan memperhatikan dan mempedomani arahan pola dan struktur ruang pada RTRW Provinsi NTT Tahun 2023-2043 dalam semngat kerja kolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan (*hexa helix*) yang berkelanjutan. Sedangkan yang bersifat lintas Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan akan tetap dilakukan pada 21 Kabupaten dan 1 Kota se Provinsi NTT.

Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029 dan Hasil olahan Tim Penyusun

4.1.5 ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DALAM KEBIJAKAN RKP TAHUN 2026

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 sangat berpegang pada visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang tertuang dalam Asta Cita. Ini adalah delapan program utama yang menjadi kompas dalam perencanaan pembangunan nasional untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan makmur, serta mencapai visi Indonesia Emas 2045. Berikut adalah delapan poin Asta Cita:

1. **Penguatan Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)**: Memperkuat pemahaman dan implementasi Pancasila sebagai ideologi negara, memperkokoh sistem demokrasi, serta menjunjung tinggi HAM untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan berkeadaban.
2. **Penguatan Pertahanan dan Keamanan Nasional**: Meningkatkan pertahanan dan keamanan nasional melalui modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan peningkatan kesejahteraan prajurit, serta mencapai kemandirian di bidang pangan, energi, dan air.
3. **Penciptaan Lapangan Kerja Berkualitas dan Pengembangan Kewirausahaan**: Mendorong pertumbuhan industri kreatif, melanjutkan pembangunan infrastruktur, serta meningkatkan kewirausahaan melalui pelatihan dan akses permodalan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
4. **Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kesetaraan Gender**: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap teknologi, serta mendorong kesetaraan gender dengan meningkatkan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. **Hilirisasi dan Industrialisasi untuk Nilai Tambah Ekonomi**: Berfokus pada pengolahan sumber daya alam di dalam negeri untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi, mendorong pertumbuhan berkelanjutan, dan meningkatkan daya saing produk Indonesia.
6. **Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba**: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif.
7. **Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam, dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur**: Memajukan pembangunan yang berkelanjutan, memperhatikan kelestarian alam dan keseimbangan ekosistem, serta menghargai keragaman.
8. **Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama dan Menghargai Keragaman dalam Keberagaman**: Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan menghargai keberagaman sebagai bagian dari persatuan bangsa.

Selain itu Terdapat 4 Direktif Presidan antara lain, 1)Pemberian Makanan Bergizi bagi Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu menyusui, dan Balita serta Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi untuk mendukung Percepatan Pemenuhan Gizi, 2) Peningkatan akses pendidikan untuk semua jenjang (SD, SMP, dan SMA) bagi anak miskin dan rentan dengan output pembangunan Sekolah Rakyat yang menyediakan layanan pendidikan berasrama. 3) Pemanfaatan Platform Digital Pembelajaran dalam Peningkatan

Kompetensi dengan output Platform Digital Pendidikan. 4) Peningkatan ekonomi lokal melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan output: a.Peningkatan kapasitas usaha koperasi; dan b. Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM koperasi.

Lokasi Prioritas dalam Arah dan Kebijakan Pembangunan RKP Tahun 2026

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) senantiasa menjadi fokus strategis dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional, termasuk untuk tahun 2026. Dengan karakteristik geografis kepulauan dan potensi sumber daya alam yang melimpah, namun juga dihadapkan pada tantangan pemerataan pembangunan, NTT memiliki lokasi prioritas yang akan menjadi tumpuan arah kebijakan dan sasaran pembangunan dalam RKP 2026 yang termuat dalam Tabel berikut.

Tabel 4.10

LOKASI PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI NTT TAHUN 2026

No	LOKASI PRIORITAS
1	Kawasan Pariwisata DPP Labuan Bajo dan perluasannya menjadi DPP Labuan Bajo – Flores – Kab. Manggarai Barat, Kab. Manggarai, Kab. Ngada, Kab. Ende
2	Kawasan Perkotaan Pariwisata Labuan Bajo – Kab. Manggarai Barat
3	Sentra Industri Berbasis Komoditas Rumput Laut – Kab. Kupang dan Kota Kupang, Kab. Sumba Timur
4	Sentra Produksi Berbasis Komoditas Rumput Laut – Kab. Kupang, Kab. Sumba Timur, Kab. Rote Ndao, Kab. Sabu Raijua, Kab. Alor, Kab. Flores Timur
5	Sentra Industri Berbasis Komoditas Garam – Kab. Sabu Raijua, Kab. Kupang, Kab. Nagekeo
6	Sentra Industri Berbasis Komoditas Garam – Kab. Sabu Raijua, Kab. Kupang, Kab. Nagekeo
7	Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) – Kab. Sumba Tengah, Kab. Belu
8	Kawasan Swasembada Pangan – Kab. Manggarai Barat, Kab. Manggarai, Kab. Manggarai Timur, Kab. Sikka, Kab. Lembata, Kab. Timor Tengah Selatan
9	Kawasan Swasembada Air – Kab. Belu, Kab. Kupang, Kab. Nagekeo
10	Kawasan Swasembada Energi – Kab. Manggarai, Kab. Kupang
11	Daerah Tertinggal – Kab. Sumba Tengah, Kab. Sumba Barat Daya, Kab. Sabu Raijua

No	LOKASI PRIORITAS
12	Kawasan Perbatasan (PKSN dan Wilayah Pendukung) – Kab. Timor Tengah Utara, Kab. Belu, Kab. Alor
13	Kawasan Perbatasan (Kecamatan Perbatasan Prioritas) – Kab. Sumba Barat, Kab. Sumba Timur, Kab. Kupang, Kab. Timor Tengah Selatan, Kab. Rote Ndao, Kab. Sumba Barat Daya, Kab. Sabu Raijua, Kab. Malaka
14	Kawasan Transmigrasi – Kab. Timor Tengah Utara, Kab. Belu, Kab. Malaka
15	Kawasan Perdesaan Prioritas (Kawasan Agrowisata Kopi Arabika Flores Bajawa) – Kab. Ngada
16	Kawasan Konservasi TN Komodo – Kab. Manggarai Barat
17	Kawasan Konservasi Cagar Alam Wae Wuul – Kab. Manggarai Barat
18	Kawasan Konservasi Daerah Selat Pantar dan Laut Sekitarnya – Kab. Alor
19	Kawasan Konservasi TWAL Tujuh Belas Pulau – Kab. Ngada
20	Kawasan Konservasi Cagar Alam Riung – Kab. Ngada
21	Kawasan Konservasi Nasional TNP Laut Sawu dan Sekitarnya – Kab. Timor Tengah Selatan, Kab. Kupang, Kab. Rote Ndao, Kab. Sabu Raijua, Kab. Sumba Timur, Kab. Sumba Tengah, Kab. Sumba Barat, Kab. Sumba Barat Daya, Kab. Manggarai, Kab. Manggarai Barat

Sumber: RKP Tahun 2026

4.2. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.2.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2026

Untuk mencapai Sasaran Indikator dan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029, maka setiap tahunnya dijabarkan dalam tujuan dan sasaran tahunan. Tujuan dan sasaran tahunan disinkronkan dan mendukung pencapain indikator dan target nasional. Secara makro, indikator dan target Nasional dan Nusa Tenggara Timur untuk tahun 2026 sebagaimana terlihat pada Tabel berikut:

Tabel 4.11 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2026

TUJUAN (T)/SASARAN (S)	INDIKATOR KINERJA/SASARAN	TARGET
		2026
VISI: NTT Maju Sehat Cerdas Sejahtera dan Berkelanjutan		

Misi 1: Infrastruktur berkelanjutan demi mewujudkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berdaya saing (MAJU)				
Pilar 3: Pemerataan Infrastruktur Berkelanjutan dan Pilar 7: Kolaborasi				
Cita 7: Jalan , air Listrik, rumah layak huni : Mewujudkan NTT yang Sejahtera				
T1.1	**Pemenuhan Pemerataan Infrastruktur Berkelanjutan**	**Indeks Daya Saing Daerah**		**3,43**
S1.1.1	Meningkatnya Kinerja Infrastruktur: Tersedianya infrastruktur jalan, sumber daya air, air minum bersih,kelistrikan, dan rumah layak huni dengan partisipasi bersama melalui skema penerapan infrastruktur hijau dan biru (*green and blue infrastructure*), serta pertimbangan resiliensi bencana dan perubahan iklim			
A	Meningkatnya kualitas Infrastruktur Jalan dalam menunjang aksesibilitas wilayah	a.	Waktu tempuh 2,1 jam/100 Km	1,9 Jam/ 100 Km
B	Meningkatnya fungsi pelayanan infrastruktur sumber daya air	a	Cakupan Layanan Air Minum Layak (%)	88,95
		b	Cakupan Layanan Air Minum Aman (%)	21.24
		c.	Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	37.42
		d	Kapasitas Air Baku (m3/detik)	0.44
C	Terpenuhinya kebutuhan energi daerah	a	Rasio Elektrifikasi (%)	97,81
		b	Konsumsi Listrik per Kapita (kWh/Kapita)	220,82
		c	Intensitas Energi Primer (SBN/ Rp Miliar)	78,70
		d	Porsi EBT dalam bauran energi primer (%)	25,19
D	Tersedianya Rumah Layak Huni	a	Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman (%)	4.88
		b	Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	9,25
		c.	Proporsi Rumah Tangga Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	19.25
		d	Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau Dan Berkelanjutan (%)	53,22

E	Meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan melalui penerapan ekonomi hijau (*green economy*) dan ekonomi biru (*blue economy*)	a.	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (poin)	0,473
		b.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (poin)	80,19
F.	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	a.	Indeks Risiko Bencana (IRB) (Poin)	185,48
		b.	Penurunan Emisi GRK Kumulatif (%)	20,55
		c.	Penurunan Emisi GRK Tahunan (%)	38,38
		d.	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	63,19
		e.	Indeks Ketahanan Daerah	0,47
S.1.1.2	Meningkatnya daya saing antar wilayah	a.	Indeks Kemahalan Konstruksi	92,22
		b.	Koefisien variasi harga antarwilayah tingkat provinsi	11,21
		c.	Kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto (%)	46,111
		d.	Persentase Desa Mandiri (%)	3.06
Cita 9: Membangun NTT Digital : akses Merata, Komunikasi Lancar				
T.1.2	**Peningkatan akses dan Infrastruktur Digital**	**Indeks Masyarakat Digital**		**52,1**
S.1.2.1	Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan teknologi digital untuk menunjang pelayanan publik dan aktivitas ekonomi	a.	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IPTIK)	5,4
		b.	Indeks Masyarakat Digital	52,1
Misi 2: Memperluas pelayanan kesehatan dan jaminan sosial yang lebih inklusif, terjangkau dan mudah diakses (SEHAT)				
Pilar 4: Kesehatan dan Pilar 7: Kolaborasi				
Cita 5: Posyandu Tangguh, Masyarakat Sehat dan Bebas Stunting				
T.2.1	**Pemenuhan pelayanan kesehatan yang inklusif, terjangkau dan mudah diakses**	**Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)**		**72,35**
S.2.1.1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang inklusif, terjangkau dan mudah diakses	a	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	72,35
		b.	Angka Kematian Ibu (per 100.000 KH)	99

		c.	Angka Kematian Balita (per 1000 KH)	9
		d.	Angka Kematian Bayi (per 1.000 KH)	6,00
		e.	Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate)*	2,67
		e.	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (*treatment coverage*) (%)	68
		d.	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (*treatment success rate*) (%)	90
S.2.1.2	Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting dengan pendekatan Pentahelix	a.	Prevelensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	31,9
S.2.1.3	Penguatan Infrastruktur di Fasilitas Layanan Kesehatan	a.	Persentase Kabupaten/ Kota dengan Minimal 80% Posyandu Aktif (%)	97
S.2.1.4	Memastikan Seluruh Masyarakat NTT sebagai Peserta Aktif BPJS Kesehatan	a.	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	85
		b.	Cakupan kabupaten/kota yang sudah memenuhi *Universal Health Coverage* (UHC) (%)	22 (100)
S.2.1.5	Pemerataan Distribusi dan Peningkatan Kualitas SDM	a.	Persentase tenaga kesehatan yang terlatih (%)	
Misi 3: Menghadirkan pendidikan berkualitas yang merata, partisipatif dan tepat sasaran (CERDAS)				
Pilar 5: Pendidikan dan Pilar 7: Kolaborasi				
Cita 6: Sekolah Vokasi Unggulan berbasis potensi unggulan				
T.3.1	**Pemenuhan SDM NTT yang unggul dan berdaya saing melalui pendidikan berkualitas yang merata, partisipatif dan tepat sasaran**			**8,49**
		Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)		
S.3.1.1	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan yang inklusif dan holistik integratif	a.	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	8,49
		b.	Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,54
		c.	Skor Kemampuan Literasi	
			- SMA	64,54
			- SMK	61,13
			- SDLB	55,55
			- SMPLB	62,05

			- SMALB	58,22
		d.	Skor Kemampuan Numerasi	
			- SMA	57,09
			- SMK	55,28
			- SDLB	48,89
			- SMPLB	55,53
			- SMALB	53,94
		e.	Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi (%)	10,60
T.3.2	**Peningkatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan daerah secara berkelanjutan**	**Indeks Pembangunan Kebudayaan (poin)**		**56,09**
S.3.2.1	Mewujudkan integrasi nilai-nilai budaya lokal dalam sistem pendidikan yang inklusif dan berkarakter dan Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan dalam rangka mendukung pariwisata	a.	Indeks Pembangunan Kebudayaan (Indeks)	56,09
Misi 4: Mewujudkan kesejahteraan sosial, kesetaraan akses, serta kualitas hidup yang berkeadilan dan madani bagi seluruh lapisan masyarakat (SEJAHTERA)				
Pilar 2: Pemberdayaan Komunitas dan Pilar 7: Kolaborasi				
Cita 2: Milenial dan Perempuan Motor Kreatifitas Lokal				
T.4.1.	**Meningkatkan pemberdayaan komunitas yang mandiri, inklusif, dan berdaya saing melalui penguatan kapasitas, akses terhadap sumber daya, serta partisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan guna menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan**	**Indeks Desa (nilai)**		**0,66**
S.4.1.1	Meningkatnya pendapatan masyarakat, ketimpangan berkurang, dan kemiskinan menurun	a.	PDRB Per Kapita (Rp. Juta)	24,71
		b.	Gini Ratio (0-1)	0,3247-0,3211
		c.	Tingkat Kemiskinan	18,12-18,74
S.4.1.2	Meningkatnya ekosistem yang mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berbasis potensi desa	a.	Rasio PDRB Industri Pengolahan	1,36 - 1,41
		b.	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian Level provinsi (%)	7,55
		c.	Proporsi jumlah Industri kecil dan Menengah pada Level provinsi (%)	0,36
		d.	Kontribusi UMKM Terhadap PDRB (%)	86,18

		e.	Persentase Desa Mandiri	
S.4.1.3	Terwujudnya koperasi modern yang mandiri melalui transformasi digital, penguatan kelembagaan, dan kolaborasi usaha	a.	Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB (%)	3,56
		b.	Rasio Koperasi Produktif Provinsi NTT (%)	27,00
		c.	Tingkat Digitalisasi Koperasi	53,00
		d.	Persentase Koperasi Aktif dan Berkinerja Baik (%)	75,00
T.4.2	**Meningkatkan Kapasitas Perempuan dan Pemuda yang mandiri dan berdaya saing**	**Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)**		**60,30**
S.4.2.1	Meningkatnya partisipasi aktif seluruh masyarakat terutama perempuan dan kaum milenial dalam pengembangan ekonomi kreatif yang meningkatkan nilai tambah produk lokal	a.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,385
		b.	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	60,30
S.4.2.2	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan, masyarakat berolahraga dan prestasi olahraga NTT di Tingkat Nasional	a.	Indeks Pembangunan Pemuda (Poin)	56.84
Misi 5: Mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya alam dan manusia yang bijak serta pemenuhan HAM untuk menciptakan masa depan yang inklusif (BERKELANJUTAN)				
Pilar 1: Ekonomi Berkelanjutan , Pilar 6: Reformasi Birokrasi dan Hak Azasi Manusia dan Pilar 7: Kolaborasi				
Cita 1: Dari ladang dan laut ke pasar : Efisien , modern dan aman				
T.5.1	**Mewujudkan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan, sebagai sektor unggulan yang berkelanjutan dan berbasis potensi daerah**	**Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)**		**4,43-5,01**
S.5.1.1	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian	a.	Pravelensi ketidakcukupan konsumsi pangan (%)	11,22
		b.	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	67,86
		c.	Indeks Ketahanan Pangan	71,80
		d.	Nilai Tukar Petani (NTP)	100,20
		e.	Skor Pola Pangan Harapan	69,22
S.5.1.2	Peningkatan daya saing dan keberlanjutan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan sebagai sektor unggulan yang berbasis potensi daerah.	a.	Tingkat Inflasi (%)	2,5±1
		b.	Indeks Daya Saing Daerah	3,43

T.5.2	**Terwujudnya percepatan penciptaan lapangan kerja dan wirausaha baru serta peningkatan kapasitas wirausaha**	**Tingkat Pengangguran Terbuka (%)**		**2,39 – 2,94**
S.5.2.1	Meningkatnya kesempatan kerja yang merata dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat	a.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	79,70
		b.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,39 – 2,94
		c.	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	74,45
S.5.2.2	Meningkatnya wirausaha baru yang berdaya saing dan kapasitas usaha melalui penyediaan akses yang dapat dijangkau secara inklusif	a.	Proporsi jumlah IKM (Industri Kecil Menengah) pada Level Provinsi	7,55
		b.	Inklusi Keuangan (%)	92,41
		c.	Proporsi Jumlah UKM (Usaha Kecil Menengah) pada level Provinsi	0,40
Cita 3: Wisata NTT Penggerak Ekonomi Lokal				
T.5.3	**Terwujudnya pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai penggerak ekonomi lokal NTT**	**Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan (Hari)**		**1,60**
S.5.3.1	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata NTT (destinasi, pemasaran, kelembagaan dan industri pariwisata) untuk berkontribusi pada peningkatan pendapatan dari Sektor Pariwisata sebagai penggerak ekonomi lokal	a.	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	0,80
		b.	Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan (Hari)	1,60
S.5.3.2	Meningkatkan Kesejahteraan NTT melalui peningkatan usaha ekonomi kreatif	a.	Proporsi PDRB ekonomi kreatif (%)	0,80
Pilar 6: Reformasi Birokrasi dan Hak Azasi Manusia				
Cita 4: Kesejahteraan Bersama: Jaminan Kesehatan dan ketenagakerjaan untuk Masyarakat				
T.5.4	**Terwujudnya perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi seluruh tenaga kerja NTT**		.....	
S.5.4.1	Jaminan dan perlindungan bagi tenaga kerja NTT, baik formal maupun non formal, terutama tenaga kerja rentan	a.	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan)	30,62
Cita 8: Pendapatan Daerah Naik, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan ASN Terjamin				
T.5.5	**Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia**	**Indeks Pelayanan Publik**		**3,73**
S.5.5.1	Transformasi pelayanan publik menjadi lebih transparan, efisien, profesional, proaktif, dan melayani	a.	Indeks Pelayanan Publik	3,73
		b.	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	94,47
		c.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skor/Nilai)	3,89/ 1,7

		d.	Indeks Integritas nasional	66,31
		e.	Persentase penegakan hukum peraturan daerah (%)	71,50
		f.	Indeks Kapabilitas APIP	3,12
		g.	Opini BPK	WTP
		h.	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	83,91
S.5.5.2	Meningkatnya kemandirian fiskal daerah	a.	Rasio penerimaan pajak daerah terhadap PDRB (%)	2,48
		b.	Rasio PAD terhadap total pendapatan daerah (%)	31,00
S.5.5.3	Meningkatnya Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai salah satu penggerak ekonomi	a.	Persentase pertumbuhan TPP dibandingkan realisasi Pertumbuhan PAD (%)	
S.5.5.4	Meningkatnya perlindungan hak-hak masyarakat khususnya kelompok rentan dengan partisipasi aktif masyarakat dan kerja sama lintas sektor	a.	Indeks Reformasi Hukum	72,50
		b.	Persentase capaian pelaksanaan aksi HAM (%)	61,00
		c.	Proporsi penduduk merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	64,88
		d.	Indeks Demokrasi Provinsi	78,35 - 81,60
		e.	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	16,5
		f.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	70,93
		g.	Indeks Kerukunan Umat Beragama (poin)	86,87-86,94

Sumber: RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029

4.2.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2026

Strategi pembangunan Provinsi NTT Tahun 2025-2029 merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Strategi pembangunan dilaksanakan melalui analisis lingkungan strategis internal dan analisis lingkungan strategis eksternal dengan mengidentifikasikan kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), kesempatan (*opportunity*), dan ancaman (*threat*). Strategi akan memaksimalkan kekuatan dan peluang, dan sekaligus dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman yang ada.

Untuk mewujudkan visi dan misi, beserta tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, diperlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan Provinsi NTT Tahun 2025-2029. Adapun penetapan strategi dan arah kebijakan ini mengarah pada penerapan rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi

dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025 – 2029 dengan memperhatikan arahan umum terkait pemenuhan Standar Pelayanan Minimum berdasarkan Rencana Aksi Daerah Standar Pelayanan Minimum (SPM) Provinsi NTT, GEDSI (*Gender Equality, Disability and Social Inclusion*)/Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial, Rencana Aksi Daerah Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Provinsi NTT, Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, Tata Kelola Lingkungan Hidup yang berkelanjutan, Resiliensi Bencana dan Perubahan Iklim.

TAHAPAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	
TAHAPAN PEMBANGUNAN	
Tahap I (2026)	
Tema Umum: MEWUJUDKAN NUSA TENGGARA TIMUR YANG SEJAHTERA DAN TANGGUH MELALUI PEMBERDAYAAN EKONOMI LOKAL YANG BERDAYA SAING, SDM UNGGUL, TRANSFORMASI DIGITAL YANG MERATA SERTA TATAKELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, INOVATIF DAN BERMARTABAT MENUJU PEMBANGUNAN INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN	
Prioritas: Peningkatan Produktivitas Dalam Memenuhi Kebutuhan Pangan dan Energi untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	
ARAH KEBIJAKAN	
MISI 1: Infrastruktur berkelanjutan demi mewujudkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berdaya saing (MAJU)	
Pilar 3: Pemerataan Infrastruktur Berkelanjutan dan Pilar 7 Kolaborasi	
Cita 7: Jalan , air Listrik, rumah layak huni : Mewujudkan NTT yang Sejahtera	**Cita 9: Membangun NTT Digital : akses Merata, Komunikasi Lancar**
- Pembangunan dan pengembangan ruas jalan provinsi meliputi jalan akses simpul transportasi dan jalan strategis dengan pendekatan optimalisasi pola kemitraan (Pendekatan kolaboratif) yang menghubungkan pusat -pusat pertumbuhan baru, desa-desa wisata, wilayah sentra komoditi dan desa-desa yang memiliki produk unggulan. - Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan strategis dan 3 TP (Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Perbatasan) - Melaksanakan urusan Transmigrasi sesuai dengan kebijakan nasional dan peraturan yang berlaku di daerah afirmasi kawasan transmigrasi. - Peningkatan kapasitas tampungan air melalui penguatan koordinasi dalam pembangunan, pemanfaatan, pemeliharaan dan keberlanjutan infrastruktur sumber daya air: bendungan, embung, waduk, jalan usaha tani, jalan produksi dll untuk mendukung pengembangan sektor pertanian dan penyediaan air bersih - Pembangunan sistem pengelolaan air minum yang terintegrasi dari hulu ke hilir untuk pemenuhan air minum layak melalui peningkatan kapasitas dan tata kelola pemerintah dalam penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum. - Pemenuhan akses air minum layak bagi rumah tangga - Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman sesuai karakteristik daerah - Pemenuhan ketersediaan dan keberfungsian jaringan irigasi pertanian dan infrastruktur sumber daya air melalui perencanaan irigasi partisipatif, pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sumber daya air - Pemenuhan dan optimalisasi Wilayah Sungai di Provinsi NTT dalam menjaga kuantitas dan kualitas air - Koordinasi pemenuhan elektrifikasi berbasis pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan PLN bagi rumah tangga belum berlistrik - Peningkatan pemanfaatan riset PLN dan Non-PLN - Pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan	- Peningkatan layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi - Peningkatan penyebaran informasi publik yang berkaitan dengan program prioritas pemerintah pusat dan provinsi - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi - Meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat sesuai dengan kewenangan provinsi - Penguatan komunitas lokal untuk Pemasaran produk digital UMKM dan kelembagaan - Mendorong perluasan dan pemerataan literasi digital serta integrasi layanan publik yang ramah terhadap perempuan untuk mempersempit

TAHAPAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	
- Peningkatan kualitas operasional instalasi tenaga listrik melalui kemitraan pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil *(isolated mini/ micro-grid)* untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas - Pembangunan jaringan infrastruktur pembangkit listrik dan sistem penyaluran berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk mempercepat transisi energy - Penguatan optimalisasi sumber Energi Baru Terbarukan sebagai sumber cadangan energi dalam mendukung transisi energi berbasis potensi Energi Baru Terbarukan sesuai potensi Daerah, yaitu *Timor Biomass Island, Flores Gheotermal Island, Sumba Iconic Island*, serta potensi gelombang laut, arus laut, temperatur laut dan hidrogen hijau - Penguatan peran dan kapasitas masyarakat lokal dalam pemanfaatan dan pengelolaan Energi Baru dan Terbarukan - Penguatan peran Pemerintah melalui dukungan regulasi dan kebijakan dalam mempercepat transisi energi berbasis potensi Energi Baru dan Terbarukan pada kawasan potensial swasembada energi. - Penguatan Peran Pemerintah dalam mendorong pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian kepemilikan lahan bersertifikat dan kemudahan perizinan dalam proses penyediaan rumah - Peningkatan efektivitas pengendalian untuk menjamin keandalan bangunan dan kesesuaian terhadap tata ruang - Meningkatkan kolaborasi lintas sektor dalam penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU, layanan akses sanitasi dan persampahan yang memenuhi standar kesehatan dan keselamatan sesuai dengan aturan yang berlaku - Penyediaan infrastruktur menuju sanitasi aman - Pengelolaan dan penetapan standar pengolahan limbah - Penguatan kolaborasi lintas sektor (hexahelix) dan kewenangan dalam pengelolaan sampah terpadu. - Optimalisasi regulasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang (kawasan lindung dan budidaya) untuk mendorong pembangunan yang tepat sasaran dalam mencapai keselarasan antara aspek ekonomi, sosial dan lingkungan (lingkungan tangguh) - Penciptaan iklim investasi yang kondusif melalui kemudahan perijinan investasi energi, sistem insentif dan menjaga kestabilan sosial/politik untuk mendorong pembangunan infrastruktur energi yang berkelanjutan - Mitigasi Pengurangan status keterancaman spesies dan ekosistem yang terancam punah - Peningkatan Pengawasan kegiatan dan penataan ruang kawasan konservasi melalui Pembinaan usaha dan/atau kegiatan terbangun di kawasan konservasi, pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan konservasi, kebijakan pengelolaan KKPRL (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut), dan pengawasan terhadap tindak pidana pelanggaran di kawasan konservasi - Pemanfaatan riset dan penguatan kapasitas SDM dalam pembangunan yang berketahanan iklim dan resilien terhadap bencana - Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana, serta adaptasi perubahan iklim melalui: (v) Peningkatan kapasitas dan keterlibatan masyarakat dalam mitigasi bencana dan perubahan iklim (vi) Pengembangan sistem dan sarana prasarana pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim (vii) Pelestarian hutan dan keanekaragaman hayati. (viii) Peningkatan Kapasitas institusi dan Kebijakan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan dengan mempertimbangkan resiko bencana	kesenjangan dan mendorong kemandirian ekonomi. - Meningkatkan kemitraan dalam penguatan infrastruktur digital koperasi yang merata dan terjangkau - Meningkatkan literasi digital dan adopsi teknologi untuk pengembangan Koperasi - Mengoptimalkan platform dan aplikasi digital untuk pengembangan Koperasi - Koordinasi, Pembinaan dan pengawasan Koperasi Desa Merah Putih - Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Layanan Publik Terpadu melalui: - Aplikasi yang mengintegrasikan layanan publik seperti kesehatan (BPJS, jadwal dokter), pendidikan (data siswa, e-learning), dan bantuan sosial dan pariwisata - Layanan Aspirasi dan Aduan Online dengan pengembangan aplikasi mobile phone yang akan ditindaklanjuti dengan penangan prioritas untuk masalah mendesak melalui platform MEJA RAKYAT - Koordinasi, pembinaan dan pengawasan dalam Pengembangan *Smart Village* dan *Smart City* melalui: (iii) Penetapan Pilot Project Desa Digital (iv) Pengembangan Big Data dan Artificial Inteligence untuk Kebijakan Publik

TAHAPAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	
- Pemanfaatan ruang budi daya berbasis risiko bencana melalui pemenuhan dokumen dasar perencanaan penanggulangan bencana yang tepat dan akurat serta pengendalian tata ruang berbasis risiko bencana , terutama pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil - Perluasan tutupan lahan kritis secara bertahap - Penguatan riset dan kapasitas SDM dalam pengembangan dan penerapan transportasi - Optimalisasi inventarisasi dan implementasi aksi mitigasi per sektor yang menyumbang penurunan Emisi GRK - Penguatan sistem ketahanan mata pencaharian penduduk terhadap bencana dan perubahan iklim. - Penguatan investasi pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan untuk membangun ketahanan ekonomi yang adaptif dan responsif. - Peningkatan pengawasan pembangunan infrastruktur publik yang adaptif terhadap resiko bencana sesuai rencana tata ruang. - Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Pemenuhan SPM Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana. - Pengembangan prasarana transportasi Darat, Laut, Udara dan ASDP yang berkeselamatan dan menghubungkan wilayah strategis - Keterpaduan Pengembangan pelabuhan simpul utama untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi termasuk pariwisata diantaranya pelabuhan Tenau dan Labuan Bajo secara terpadu - Pengembangan transportasi publik termasuk sistem angkutan umum massal perkotaan di Kota Kupang yang andal dan modern dalam melayani mobilitas penumpang melalui audit dan rencana peremajaan armada, serta pembenahan sistem layanan moda transportasi dan sistem informasi yang terintegrasi secara real time - Pengembangan Kawasan Sentra Produksi melalui peningkatan Jalan Usaha Tani dan Penguatan kerja sama intra daerah dengan kabupaten/kota dalam menjamin penyediaan rantai pasok - Penyiapan pengembangan sentra industri berbasis komoditas rumput laut dengan dukungan kontribusi produksi dari kabupaten sekitarnya melalui Peningkatan sarana prasarana pendukung dengan pengembangan pelabuhan pendukung industri rumput laut, pembangunan jalan dan infrastruktur TIK	
MISI 2: Memperluas pelayanan kesehatan dan jaminan sosial yang lebih inklusif, terjangkau dan mudah diakses (SEHAT)	
Pilar 4: Kesehatan dan Pilar 7 Kolaborasi	
Cita 5: Posyandu Tangguh, Masyarakat Sehat dan Bebas Stunting	
- Peningkatan peran dan dukungan Pemerintah Desa dalam Promosi, pencegahan dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan AIDS, TBC, Malaria (ATM) dan penyakit menular lainnya serta tidak menular dengan pendekatan *one health*, termasuk masalah kesehatan akibat perubahan iklim melalui fasilitisasi dukungan kebijakan di tingkat kabupaten/kota dan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat Provinsi - Pemenuhan sarana dan prasarana untuk mendukung pola hidup sehat termasuk ruang terbuka hijau dan sarana untuk aktivitas fisik - Peningkatan fasilitas dan layanan kesehatan ibu dan anak melalui penguatan puskesmas, gedung pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta peningkatan kapasitas tenaga kesehatan	

TAHAPAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
- Inovasi dan pemanfaatan pengembangan kesehatan digital dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan melalui : penguatan tata kelola pelayanan kesehatan (implementasi Satu Sehat NTT Terintegrasi) - Penyediaan Promotif, Peningkatan dukungan Pemerintah Desa dalam promosi, pencegahan dan penyediaan layanan dasar kesehatan bagi lansia melalui fasilitisasi dukungan kebijakan di tingkat kabupaten/kota dan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat Provinsi. - Pemenuhan SPM Urusan Kesehatan. - Pelaksanaan intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif melalui pendekatan hexahelix . - Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui penyediaan sarana, prasarana, bangunan gedung, tata kelola, obat dan alat kesehatan, dan pembiayaan yang berkualitas di fasilitas kesehatan - Peningkatan kapasitas posyandu dalam pemenuhan 6 (enam) bidang SPM melalui Peningkatan peran pemerintah, masyarakat, dengan lembaga mitra - Meningkatkan Pusat layanan kesehatan yang aksesibel bagi penyandang disabilitas dan lansia yang memiliki hambatan mobilitas. - Upaya pencapaian Univeral Health Coverage (Jaminan Kesehatan) di seluruh NTT - Penguatan kerjasama dengan pemerintah desa dan lembaga masyarakat untuk meningkatkan cakupan kepesertaan PKRT, disabilitas lansia dalam JKN. - Meningkatkan kualitas dan sebaran tenaga kesehatan melalui penyediaan beasiswa dan pelatihan bagi tenaga kesehatan RSUD dan/atau fasilitas kesehatan pada Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK), serta peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan melalui insentif Tambahan Penghasilan (Tamsil)
MISI 3: Menghadirkan pendidikan berkualitas yang merata, partisipatif dan tepat sasaran (CERDAS)
Pilar 5 : Pendidikan dan Pilar 7 Kolaborasi
Cita 6: Sekolah Vokasi Unggulan berbasis potensi unggulan
- Koordinasi, pembinaan dan pengawasan percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra-sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) yang dilakukan melalui : (v) Perluasan layanan pendidikan anak usia dini yang holistik integratif; (vi) penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran; (vii) revitalisasi sarana dan prasarana sekolah yang berkualitas; (viii) Penanganan anak tidak sekolah yang meliputi anak yang belum pernah sekolah, pencegahan tingkat Drop Out (DO) serta penanganan peserta didik yang lulus tidak melanjutkan. - Pembangunan dan revitalisasi sekolah pendidikan khusus yang berkualitas untuk mendorong pendidikan yang inklusif bagi siswa berkebutuhan khusus; - Peningkatan iklim inklusivitas untuk peserta didik berkebutuhan khusus di level pendidikan layanan khusus; - Penyiapan sarana, prasarana, dan peningkatan kualitas fasilitas dan layanan pendidikan, serta Penyediaan beasiswa afirmasi Pendidikan Menengah untuk daerah kepulauan yang masih belum terjangkau dengan afirmasi bagi perempuan ; - Mendorong tingkat partisipasi mahasiswa di Perguruan Tinggi berkualitas melalui Pemanfaatan beasiswa afirmasi Pendidikan Tinggi dengan afirmasi bagi perempuan ; - Optimalisasi pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran. - Penguatan kelembagaan dan peningkatan akses terhadap lima model penghidupan yang sensitif terhadap GEDSI (penghidupan berbasis masyarakat, penghidupan inklusif penghidupan berkelanjutan, penghidupan berbasis hak, dan penghidupan partisipatif.

TAHAPAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
- Peningkatan kualitas pendidikan melalui Peningkatan akreditasi pendidikan menengah dan khusus berakreditasi minimal B - Pemenuhan SPM bidang Pendidikan. - Peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga pendidik - Revitalisasi sekolah vokasi sektor prioritas (pariwisata, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan (garam, rumput laut) berdasarkan potensi lokal dan pioritas pemerintah fasilitas pendidikan SMK, Politeknik dan Balai Latihan Kerja (BLK) - Pengembangan dan pelestarian budaya lokal melalui perlindungan dan pelestarian warisan budaya, pengembangan komunitas budaya dan daerah melalui kolaborasi dengan Diaspora, jaminan hak kebudayaan, ekspresi budaya dan pemberdayaan masyarakat hukum adat - Meningkatkan peran keluarga sebagai media sosialisasi primer dan kontrol sosial - Mengintegrasikan nilai-nilai agama dan pancasila dalam pembelajaran di sekolah - Internalisasi dan penguatan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat melalui kegiatan ekstrakurikuler berbasis budaya dan kearifan lokal serta pelestarian kegiatan perayaan hari besar kenegaraan - Peningkatan tata kelola pembangunan kebudayaan - Pelestarian cagar budaya, nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal
MISI 4: Mewujudkan kesejahteraan sosial, kesetaraan akses, serta kualitas hidup yang berkeadilan dan madani bagi seluruh lapisan masyarakat (SEJAHTERA)
Pilar 2 : Pemberdayaan Komunitas dan Pilar 7 Kolaborasi
Cita 2: Milenial dan Perempuan Motor Kreatifitas Lokal
- Mengoptimalkan integrasi program perlindungan sosial, pengembangan mata pencaharian, pemberdayaan sosial produktif dan inklusi keuangan dengan prioritisasi masyarakat desil 1 dan 2 DTSEN dan kesenjangan antara perempuan dan laki- laki. - Peningkatan skala ekonomi lewat pengelolaan usaha berbasis kelompok atau korporasi rakyat. - Pengembangan akses pasar, teknologi melalui pola kemitraan yang baik. - Pemberdayaan masyarakat untuk terlibat dalam rantai nilai bisnis yang lebih besar. - Pemenuhan SPM Urusan Sosial. - Penguatan kapasitas kelembagaan dan pendampingan berkelanjutan bagi pelaku UMKM - Fasilitasi akses permodalan , pembiayaan dan literasi keuangan - Pengembangan sentra produksi berbasis komoditas unggulan perdesaan - Pembangunan rantai nilai dan jaringan kemitraan antara UMKM, pemerintah dan sektor swasta - Penguatan infrastruktur digital koperasi yang merata dan terjangkau - Peningkatan literasi digital dan kapasitas inovasi bagi pengurus dan anggota koperasi - Pemanfaatan platform dan aplikasi digital untuk efisiensi layanan dan ekspansi usaha koperasi - Pengembangan kemitraan strategis dalam ekosistem digital koperasi - Koordinasi, Pembinaan dan pengawasan Koperasi Desa Merah Putih

TAHAPAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN			
- Penguatan pelatihan dan pendampingan keterampilan ekonomi, kreatif berbasis kebutuhan pasar khususnya bagi anak muda milenial dan Perempuan - Pengembangan youth campaign dan inkubator bisnis, kemitraan kreatif dan akses pembiyaaan bagi perempuan dan milenial - Peningkatan dan perluasan promosi, pemasaran digital, dan branding produk lokal berbasis budaya dan inovasi - Peningkatan partisipasi kepemudaan dalam ekonomi mandiri termasuk didalamnya kegiatan kewirausahaan, sosial dan budaya - Peningkatan akses dan kualitas fasilitas olahraga di daerah - Pengembangan sistem pembinaan atlet dan penyelenggaraan kompetisi olahraga berjenjang untuk mendukung PON Nusra XXII - Penguatan kelembagaan olahraga daerah untuk mendukung prestasi nasional			
MISI 5: Mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya alam dan manusia yang bijak serta pemenuhan HAM untuk menciptakan masa depan yang inklusif (BERKELANJUTAN)			
Pilar 1: Ekonomi Berkelanjutan, Pilar 6: Reformasi Birokrasi Dan Hak Azasi Manusia dan Pilar 7 Kolaborasi			
Cita 1: Dari ladang dan laut ke pasar : Efisien , modern dan aman	**Cita 3: Wisata NTT Penggerak Ekonomi Lokal**	**Cita 4: Kesejahteraan Bersama: Jaminan Kesehatan dan ketenagakerjaan untuk Masyarakat**	**Cita 8: Pendapatan Daerah Naik, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan ASN Terjamin**
- Meningkatkan pemanfaatan lahan - Meningkatkan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) tanaman pangan, penyakit hewan dan zoonosis - Pemanfaatan bibit/ benih unggul dan penerapan praktik pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan - Pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana prasarana pendukung - Penguatan kapasitas SDM - Penguatan tata kelola dan kapasitas kelembagaan - Mendorong swasembada pangan sebagai dasar kedaulatan dan kemandirian pangan provinsi melalui penguatan produksi dalam daerah, perlindungan sumber daya pangan, serta pembangunan sistem pangan yang tangguh dan berkelanjutan guna menjamin ketahanan dan penyelamatan pangan jangka panjang. - Pengembangan komoditas unggulan daerah yang terintegrasi dari hulu ke hilir	- Peningkatan aksesibilitas pariwisata - Pengembangan atraksi - Pengembangan keterampilan SDM, layanan dan tata Kelola pariwisata - Penguatan dan perluasan pemasaran pariwisata - Pengembangan industri, usaha masyarakat dan investasi pariwisata - Penguatan akses permodalan, pelatihan, dan	- Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek - Pengembangan sistem pelatihan melalui BLK serta penciptaan lapangan kerja baru dengan sektor swasta - Pendataan penduduk usia kerja untuk penerbitan administrasi	- Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah - Peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui SPM serta optimalisasi peran pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Pengawasan Masyarakat - Peningkatan Penerapan Tata Kelola Pemerintah yang baik - Evaluasi produk-produk regulasi daerah - Peningkatan cakupan layanan pengukuran Indeks keterbukaan informasi publik - Peningkatan akses informasi dan layanan yang akurat dan up to date melalui MEJA Rakyat & Sekber - Peningkatan Profesionalime ASN melalui pola karier dan merit sistem - Tersusunnya Paket Regulasi untuk SKPD dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; - Pembinaan ASN dalam rangka peningkatan kapasitas agar mempu mengelola keuangan sesuai standar regulasi yang ada; - Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.

TAHAPAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN			
- Pengembangan sentra produksi di kawasan perdesaan, dan pengolahan dan pemasaran di kawasan perkotaan, serta keterkaitan antar desa dan kota - Peningkatan akses pasar dan nilai tambah produk melalui penguatan sistem logistik, standardisasi kualitas, dan promosi produk unggulan daerah. - Mendorong iklim kebijakan yang kondusif dengan peningkatan investasi guna penciptaan lapangan kerja - Penguatan peran BLK dalam meningkatkan kompetensi angkatan kerja - Pengembangan sistem pelatihan melalui BLK dan BLK Komunitas serta penciptaan lapangan kerja baru dengan sektor swasta - Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja dan potensi ekonomi daerah, yang berfokus pada sektor Pertanian/Perkebunan, Peternakan, Pariwisata dan Perikanan/Kemaritiman - Penguatan koordinasi peningkatan perlindungan dan kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI). - Pendataan penduduk usia kerja untuk penerbitan administrasi kependudukan berupa NIK dan KTP. - Mendorong iklim kebijakan yang kondusif dengan peningkatan investasi guna penciptaan lapangan kerja. - Pendampingan wirausaha baru yang intensif dan berkelanjutan - Peningkatan akses pembiayaan yang inklusif melalui kerja sama dengan lembaga keuangan dan pengembangan skema pembiayaan alternatif - Penguatan literasi digital dan adopsi teknologi untuk meningkatkan daya saing wirausaha dalam ekonomi digital.	promosi bagi pelaku ekonomi kreatif - Mendorong kemitraan pelaku ekonomi kreatif dengan sektor swasta - Peningkatan pemanfaatan teknologi dalam penguatan pemasaran dan promosi produk ekonomi kreatif	kependudukan berupa NIK dan KTP - Peningkatan Pengawasan tenaga kerja melalui K/L dan OPD ketenagakerjaan (BP2MI) dan Swasta - Menyiapkan skema pembiayaan inovatif	- Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana baik fisik maupun digital untuk mendukung pengelolaan keuangan dan administrasi berbasis akrual. - Pemenuhan SPM Urusan Trantibumlinmas. - Mengintensifkan Peningkatan pendapatan pajak, retribusi, BUMD dan sumber-sumber lainnya - Optimalisasi sumber-sumber pendapatan (aset) secara terpadu - Pengembangan kapasitas SDM ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi - mendorong keberlanjutan pemberian tunjangan kinerja untuk peningkatan profesionalitas - Menentukan indikator dan target kinerja realistis dan terukur sebagai patokan pemberian tunjangan kinerja - Deregulasi terkait akses terhadap lapangan kerja - Optimalisasi Pengawasan terkait tenaga kerja perempuan dan disabilitas - Peningkatan dan perluasan pelayanan FKUB - Memperkuat kolaborasi lintas sektor antara Pemerintah, Organisasi Masyarakat sipil dan swasta dalam penegakan hukum, edukasi migrasi aman serta peningkatan dan pemerataan akses layanan yang inklusif dan berkelanjutan bagia korban KTPA/A dan PMI.

Sumber: RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029

4.3 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.3.1. ISU STRETAGIS, PRIORITAS NASIONAL, PRIORITAS DAERAH, TEMA, PRIORITAS LOKASI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2026

4.3.1.1 ISU STRATEGIS

Adapun Isu Strategis di Nusa Tenggara Timur secara umum sebagai berikut:

1. Isu Strategis Nasional

Isu strategis nasional dalam perencanaan pembangunan daerah merupakan berbagai masalah, tantangan, dan peluang yang memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan dan kemajuan Indonesia serta dampaknya terhadap pembangunan daerah. Isu-isu ini mendapatkan perhatian dan penanganan serius oleh Pemerintah Pusat sehingga memerlukan dukungan Pemerintah Provinsi NTT untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

a) Isu Strategis Transformasi Sosial Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial

Pembangunan kesehatan dihadapkan pada masalah dan tantangan untuk meingkatkan cakupan dan kualitas pelayanan dan gizi masyarakat, pengendalian penyakit, peningkatan kapasitas, dan pemerataan kapasistas dan responsiveness system kesehatan di seluruh wilayah, yang ditandai dengan; AKI masih tinggi (189/100.000); Stunting masih tinggi (21,6%); Perevelensi obesitas 21,8%; Kasus baru TB meningkat ke-2 dunia; Kasus kusta peringkat ke-3 dunia; 51,14% puskesmas tidak tersedia 9 jenis nakes sesuai standar; 24,7% RSUD kelas C belum memiliki 7 dokter spesialis dasar dan penunjang, dan; 36,5% Rumah Sakit terakreditasi Paripurna, 56,4% FKTP terakreditasi.

Pembangunan pendidikan dihadapkan pada kondisi untuk mengoptimalkan bonus demografi dan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas agar dapat mendukung percepatan pembangunan di daerah pada berbagai bidang. Beberapa kendala yang asih dihadapi, antara lain; Layanan pendidikan belum merata; Kualitas pendidikan masih rendah; Kuantitas, kualitas, dan distribusi guru masih terbatas; Kualitas pendidikan angkatan kerja masih rendah; Kualitas lulusan masih rendah, sehingga produktivitas dan daya saingnya masih rendah, dan; Daya saing perguruan tinggi di tingkat global masih rendah.

Perlindungan social yang adaptif ditujukan untuk percepatan penuntasan kemiskinan dan memperluas perlindungan yang menyeluruh bagi seluruh penduduk sesuai kerentanan yang dijalankan dengan prinsip keadilan dan inklusif. Beberapa kendala yang masih dihadapi, antara lain; Akurasi program bantuan social masih rendah; Ancaman bencana dan dampak perubahan iklim; Kesempatanyang belum merata bagi penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan; Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan masih rendah; Belum optimalnya integrasi layanan dan system administrasi kependudukan sebagai basis perencanaan pembangunan, dan; Program Jaminan Sosial belum optimal.

b) Isu Strategis Transformasi Ekonomi Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja

Pembangunan ekonomi pada periode pertama dari 20 tahun pembangunan jangka panjang diarahkan untuk penyelesaian isu:

- Peningkatan produktivitas, sektor-sektor ekonomi melalui industralisasi, modernisasi dan digitalisasi pertanian dengan pemanfaatan IPTEK,

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pengembangan UMKM dan Koperasi, Produktivitas BUMN, dan penguatan ekonomi dan keuangan Syariah.

- Pengembangan IPTEK dan Inovasi
- Penerapan Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru
- Transformasi digital
- Integrasi ekonomi domestik dan global
- Perkotaan dan pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi

c) Isu Strategis Transformasi Tata Kelola Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan public, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil

Transformasi tata kelola akan menjamin terlaksananya transformasi social dan tranformasi ekonomisesuai dengan prinsip kepemerintahan yang baik (good governance). Transformasi tata kelola akan menciptakan pelayanan public yang berkualitas dan masyarakat sipil yang partisipatif. Transformasi tatakelola bertujuan untuk menciptakan lingkungan kelembagaan yang memungkinkan tercapainya regulasi yang adaptif dan taat asas serta tata kelola yang berintegritas, tangkas, dan kolaboratif.

d) Isu Strategis Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia: Memperkuat supermasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi.

Supermasi hukum, stabilitas, dan ketangguhan dipomasi diarhan untuk; terwujudnya supermasi hukum nasional yang berkeadilan, kepastian hukum, bermanfaat dan berlandaskan HAM; terwujudnya keselamatan Bangsa, kedaultan, dan keutuhan wilayah negara Nusantara Indonesia yang aman, damai dan mandiri serta aktif menjaga perdamian dunia dan berpengaruh di dunia Inernasional; terjaminnya kebebaan sipil dan hak-hak politik; kesetaraan social, ekonomi, dan politik, serta terbukanya partisipasi untuk semua pihak; terwujudnya kesinambungan fiscal dan stabilitas harga melalui transformasi tata kelola dan kelembagaan keuangan negara disertai optimalisasi bauran kebijakan; penguatan sinergi dan fokus diplomasi, dan; pemantapan kelembagaan dan infrastruktur pendukung diplomasi.

e) Isu Strategis Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan

Ketahanan social budaya dan ekologi yang kuat merupakan landasan sangat penting untuk mewujudkan transformasi social, ekonomi, dan tata kelola. Ketahanan social budaya dan ekologi adalah ketangguhan manusia, masyarakat, beserta alam dan lingkungan sekitarnya untuk bertahan dan menjaga kesinambungan alam menghadapi berbagai perubahan dan guncangan, agar daya dukung dan daya tamping lingkungan terus terjaga secara berkelanjutan dan setiap individu dapat hidup berkualitas dan berkontribusi dalam pembanugnan. Ketahanan social, budaya dan ekologi bertumpu pada; penguatan agama sebagai landasan spiritual, etika, moral sebagai modal dasar pembangunan; pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter, memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakat, serta menetapkan peran dan posisi Indonesia dalam mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia; peningkatan ketangguhan individu keluarga, dan masyarakat untuk memastikan terbentuknya sumber daya manusia berkualitas sebagai motor penggerak pembangunan; pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk peningkatan kualitas hidup, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; memastikan kemandirian pangan didukung dengan

ketahanan energi dan air dilakukan pendekatan terpadu FEW Nexus (*Food, Energy, Water*), dan; pembangunan rendah karbon dilakukan untuk mencapai penurunan emisi GRK, pembangunan berketahanan iklim, dan penaggulangan bencana didasarkan pada kareakteristik dan kondisi berbasi pulau.

f) Isu Strategis Transformasi Sistem Pangan

Sektor pangan adalah pilar penting dalam perekonomian Indonesia dimana sektor ini memberikan kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan ketahanan pangan. Tetapi sektor ini dalam beberapa tahun terakhir ini dihadapkan pada beberapa tantangan seperti adanya konflik geopolitik dan dampak dari perubahan iklim global. Tantangan-tantangan ini sangat mempengaruhi stabilitas pasokan pangan, kualitas, keamanan, hingga akses masyarakat terhadap pangan.

Industri pangan di Indonesia menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Ke depan, terdapat tantangan besar yang perlu dihadapi oleh setiap insan pangan dalam pengelolaan dan pengembangan sistem pangan di Indonesia. Tantangan besar tersebut adalah bagaimana Indonesia dapat melaksanakan transformasi sistem pangan.

Transformasi sistem pangan bertujuan untuk memperkuat dan meningkatkan resiliensinya; yaitu kemampuannya untuk bertahan dan beradaptasi dalam menghadapi, mengatasi, mencegah, meminimalkan atau menghilangkan tekanan pada sistem. Dengan demikian, diharapkan untuk terus mampu berfungsi memberikan ketahanan pangan dan gizi bagi semua. Menjamin kemampuan produksi pangan dalam berbagai skenario situasi, sehingga dapat memastikan ketahanan pangan dan gizi, dengan tetap memberikan dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi yang optimal. Transformasi ini memerlukan investasi dan inovasi untuk memastikan bahwa sistem pangan secara keseluruhan menjadi lebih berkelanjutan dan adil, serta menjamin akses bagi setiap individu untuk hidup sehat, aktif, dan produktif.

g) Isu Strategis Transformasi Energi Baru Terbarukan

Dalam mitigasi perubahan iklim, Indonesia telah meratifikasi Paris Agreement dan berkomitmen menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 31,89% hingga 43,2% dengan bantuan internasional pada 2030. Salah satu upaya mengurangi emisi GRK yakni melalui transisi energi dimana sistem energi yang ada sekarang ditransformasi untuk mengakomodasi penetrasi Energi Baru Terbarukan (EBT) yang tinggi, sehingga secara berangsur-angsur akan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil.

Pada 2023, Indonesia berhasil untuk mencapai porsi energi terbarukan sebesar 14%. Namun demikian, potensi pemanfaatan energi baru terbarukan untuk pembangkit tenaga listrik masih sangat besar. Dari potensi tenaga listrik sebesar 3.686 GW, pemanfaatan EBT baru mencapai 12.557 MW dimana bioenergi berkontribusi sebesar 3.086 MW.

Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmen yang kuat dalam pengembangan energi terbarukan. Hingga Semeter I (Januari - Juni) tahun 2024, penambahan kapasitas terpasang Pembangkit Listrik Tenaga (PLT) Energi Baru dan Terbarukan (EBT) telah mencapai 217,73 Mega Watt (MW) atau sekitar 66,6% dari target tahunan sebesar 326,91 MW. Peningkatan kapasitas ini didominasi oleh PLT hidro dan PLT surya. PLT hidro berhasil mencapai 66,4% dari target, sementara PLT surya bahkan melampaui target dengan capaian 147,02%. Kendati PLT panas bumi belum mencapai target, namun sektor energi terbarukan lainnya seperti bioenergi juga menunjukkan perkembangan yang positif, yaitu 43,2% dari target.

Dalam upaya pengembangan energi bersih, Indonesia menghadapi tantangan berupa realisasi bauran EBT yang belum mencapai target. Hingga semester I-2024, data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

menunjukkan realisasi bauran EBT baru mencapai 13,93%, masih jauh dari target 23% yang ditetapkan dalam Kebijakan Energi Nasional pada 2025.

2. Isu Strategis Daerah

Berdasarkan permasalahan serta isu global dan nasional, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis daerah yang dipetakan pada beberapa transformasi sebagai berikut:

a) Isu Strategis Transformasi Sosial: Peningkatan kualitas hidup manusia pada seluruh siklus hidup manusia untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan kohesif **(Belum Optimalnya Mutu dan Akses Pendidikan dan Belum Optimalnya Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Sosial;**

Tercapainya transformasi sosial bertumpu pada upaya pemenuhan pelayanan dasar serta pengembangan modal manusia dan modal sosial budaya yang berkaitan dengan kesehatan untuk semua, pendidikan yang berkualitas dan merata, dan perlindungan social yang adaptif. Karena itu, transformasi sosial di NTT adalah upaya untuk; mengatasi kemiskinan dan ketimpangan di daerah, dan menciptakan keadilan sosial agar setiap orang memiliki kesempatan yang sama terhadap pemenuhan pelayanan kesehatan, gizi, pendidikan, perlindungan sosial, serta masyarakat yang sejahtera, unggul, dan berdaya saing.

Kesehatan untuk semua dihadapkan pada upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan akses dan kualitas layanan kesehatan melalui; optimalisasi penanganan stunting dan penyakit endemic (malaria), dan; pemerataan dan peningkatan akses serta kualitas fasilitas kesehatan; optimalisasi peningkatan umur harapan hidup; optimalisasi penurunan angka kematian ibu, bayi, dan balita, dan; optimalisasi penurunan angka wasting yaitu gizi buruk, gizi kurang, dan underweight.

Pendidikan yang berkualitas dan merata dihadapkan pada upaya untuk mengoptimalkan bonus demografi dan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia NTT yang berkualitas agar dapat mendukung percepatan pembangunan di daerah pada berbagai bidang melalui; peningkatan mutu pendidikan, peningkatan angka partisipasi sekolah untuk penduduk usia sekolah termasuk disabilitas, peningkatan angka melanjutkan sekolah pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, peningkatan angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan sekolah, mengoptimalkan kualitas penyelenggaraan vokasional, peningkatan cakupan SMA dan SMK yang terakreditasi, peningkatan digitalisasi sektor pendidikan, dan peningaktan SPM sektor pendidikan.

Perlindungan social yang adaptif dihadapkan pada upaya untuk memperluas perlindungan yang menyeluruh bagi seluruh penduduk sesuai kerentanan yang dijalankan dengan prinsip keadilan dan inklusif adaptif. Uapaya tersebut dilaksanakan melalui; penurunan angka kemiskinan; optimalisasi pembangunan *Gender, Equalitu*, Disabilitas, dan *Social Inkluasi* (GEDSI), peningkatan perlindungan social bagi PMKS; optimalisasi cakupan jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan; optimalisasi akurasi data untuk ketepatan intervensi; optimalisasi pemberdayaan kelompok masyarakat miskin; fasilitas umum yang ramah GEDSI, dan; Mengurangi jumlah masyarakat yang masuk kategori rumah tidak layak huni.

b) Isu Strategis Transformasi Ekonomi: Peningkatan produksi dan produktifitas sektor primer untuk mendukung hilirisasi **(1) Belum Maksimalnya Transformasi Ekonomi Daerah, (2) Belum Terbangunnya Ketahanan Pangan yang Tangguh dan Berkelanjutan; (3) Belum optimalnya pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar)**

Terciptanya transformasi ekonomi bertumpu pada upaya penciptaan kemampuan dan daya saing ekonomi daerah melalui peningkatan kontribusi sektor primer, sektor indutri, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, serta BUMD. Upaya tersebut ditunjang dengan penerapan ekonomi biru dan ekonomi hijau untuk memastikan keberlanjutan pembangunan pada berbagai sektor.

Peningkatan produksi dan produktifitas pada sektor primer dihadapkan pada upaya untuk; perbaikan pola pertanian, peternakan, dan perikanan yang bersifat subsisten kepada pola pertanian yang berorientasi komersil; optimlsiasi adopsi teknologi pada sektor pertanian, peternakan, dan perikanan; optimalisasi penguatan sentra produksi dikawasan pedesaan, serta sentra-sentra pengolahan dan pemasaran di kawasan perkotaan; perbaikan insentif pada system pasar sektor primer; optimalisasi ketersediaan dan pemerataan sarana dan prasana termasuk ketersediaan pupuk, benih, jalan usaha tani, ketersediaan air dan irigasi; optimalisasi penanganan hama penyakit pada sektor pertanian dan peternakan, dan optimalisasi ketahanan sektor primer terhadap dampak perubahan iklim.

Peningkatan produksi dan produksi pada sektor primer memberikan dukungan terhadap pengembangan industri pengolahan (hilirisasi). Selain itu, ketersediaan dan kontinuitas produksi dan produktifitas sektor primer juga diperlukan agar dapat menjamin keberlanjutan supply bahan baku bagi pengembangan industry di NTT. Apa lagi NTT memiliki komoditas berbasis *Core Competence* Komoditas Unggulan Wilayah, antara lain; padi, mete, kopi, kakao, jagung, babi, sapi, rumput laut, perikanan tangkap, dan garam. Komoditas-komoditas ini perlu diperkuat guna mendukung indutri pariwisata dan ekonomi kreatif.

c) Isu Strategis Transformasi Tata Kelola: Peningkatan efektifitas, akutantabilitas dan profesionalisme pengelolaan birokrasi melalui penguatan terhadap kemampuan fiskal daerah, kualitas ASN, regulasi yang efektif, pelayanan public, manajemen talenta, dan keberlanjutan pembangunan **(Belum Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan)**

Transformasi tata kelola diperlukan dalam rangka memungkinkan pemerintah daerah bekerja dengan kerangka kerja yang lebih efektif da akuntabel sehingga bisa menyediakan pelayanan public yang berkualitas. Hal ini ditempuh melalui; peningkatan kemampuan fiskal daerah, kualitas ASN, regulasi yang efektif, pelayanan public, manajemen talenta, dan keberlanjutan pembangunan.

Penguatan terhadap drajat kemandrian fiskal dihadapkan pada upaya; optimalisasi pengelolaan potensi PAD; mengembangkan investasi pengelolaan keuangan daerah, dan; penguatan pengelolaan asset daerah. Penguatan terhadap pelayanan publik ditempuh melalui upaya; peningkatan akses pelayanan publik berbasis digital yang merata bagi masyarakat; peningkatan pelayanan yang berbasis kepuasan pelanggan, dan; optimalisasi inovasi pelayanan publik. Peningkatan manajemen talenta ditempuh melalui; optimalisasi pengembangan SDM birokrasi berbasis manajamen talenta. Keberlanjutan pembangunan ditempuh melalui; pengintagrasian proses bisnis perencanaan, pengaggaran, akuntabilitas kinerja, pemantauan dan evaluasi, dan; peningkatan perencanaan dan penganggaran dalam memastikan keberlanjutan pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku.

4.3.1.2 PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

Arah Kebijakan Pembangunan Nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran Pembangunan daerah serta rencana

Program, Kegiatan,sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif , bottom up dan top down. Keberhasilan Pembangunan Nasional adalah keberhasilan dan pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, sub kegiatan Pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku Kepentingan.

Sesuai dengan Tema RKP tahun 2026 **"Kedaulatann Pangan, Energi yang Produktif dan Inklusif**, Pembangunan Nasional diarahkan pada arah Kebijakan yang meliputi :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital,ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan onfrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industry kreatif serta mengembangkan agromaritim industry di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat Pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran Perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai Masyarakat yang adil dan makmur.

Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD tahun 2026 perlu mengacu pada Tema RKP Tahun 2026. Sesuai dengan tema RKP Tahun 2026 "Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi, yang Produktif dan Inklusif". Untuk mewujudkan tema RKP tersebut ditetapkan sasaran makro pembangunan nasional pada tahun 2026, yaitu: 1). Laju Pertumbuhan Ekonomi; 2). PDRB per kapita (juta); 3). Kontribusi PDRB Provinsi; 4). Tingkat Kemiskinan; 5). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT); 6). Indeks Rasio Gini; 7). Indeks Modal Manusia; 8). Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK dan 9). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah. Masing-masing sasaran makro pembangunan nasional tersebut dijabarkan ke dalam masing-masing provinsi yang menjadi acuan Pemerintah Daerah provinsi dalam menetapkan target sasaran makro pembangunan nasional dalam penyusunan RKPD Tahun 2026. Berikut 9 (sembilan) sasaran makro pembangunan Provinsi NTT dalam RKP 2026:

Tabel 4.12
Sasaran Indikator Makro Provinsi NTT dalam RKP 2026

NO	Sasaran Pembangunan Nasional	Target Nasional 2026 (RKP)*	Target Provinsi NTT (RKP)*	Target Nasional 2026 (RKP)**	Target RPJMD***	Target NTT RKPD 2026
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,8-6,3	5,0-5,1	4,4-5,0	4,43 – 5,01	4,43 – 5,01
2	Tingkat Pengangguran	4,44 – 4,96	2,38-2,92	2,90-3,00	4,45 – 4,66	4,45-4,66

NO	Sasaran Pembangunan Nasional	Target Nasional 2026 (RKP)*	Target Provinsi NTT (RKP)*	Target Nasional 2026 (RKP)**	Target RPJMD***	Target NTT RKPD 2026
	terbuka					
3	Tingkat Kemiskinan (%)	6,5-7,5	14,06-15,06	17,00-18,00	18,12-18,74	18,12-18,74
4	Rasio Gini (Nilai)	0,377-0,380	0,303-0,310	0,303-0,310	0,319– 0,324	0,319– 0,324
5	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	37,14	58,75-63,19	58,75-63,19	61,82	61,82
6	PDRB per Kapita (Juta)	NA	NA	27,0-27,7	24,71-25,25	24,71
7	Kontribusi PDRB Provinsi	NA	NA	0,6	0,6285	0,6285
8.	Indeks Modal Manusia	NA	NA	0,48	0,463	0,463
9.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	NA	NA	80,19	80,19	80,19

*** Sumber Tarikan Krisna Selaras Tahun 2025**
**** Sumber PermenPPN/Kepala BAPPENES Nomor 3/2025**
***** Sumber Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029**

Dari Delapan prioritas Pembangunan diatas, memuat 17 program prioritas presiden yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor langkah langkah berupa program hasil terbaik cepat/quick wins. Keseluruhan upaya tersebut diformulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional, kegiatan prioritas utama serta Proyek Strategis Nasional seperti pada table berikut.

Tabel 4.13
17 Program Prioritas dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat

Program Prioritas		Program Hasil Terbaik Cepat	
1	Mencapai swasembada pangan, energi, dan air	1	Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil
2	Penyempurnaan sistem penerimaan negara	2	Menyelenggarakan pemeriksanaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten
3	Reformasi politik, hukum, dan birokrasi.	3	Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional.
4	Pencegahan dan pemberantasan korupsi.	4	Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi disetiap kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi
5	Pemberantasan kemiskinan.	5	Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut

6	Pencegahan dan pemberantasan narkoba.	6	Kenaikan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara.
7	Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat.	7	Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
8	Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi	8	Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%
9	Penguatan pertahanan dan keamanaan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif		
10	Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas.		
11	Menjamin pelestarian lingkungan hidup.		
12	Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani		
13	Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau, bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan.		
14	Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif, karateristik-mandiri lainnya.		
15	Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan Sumber Daya Alam (SDA), termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam		
16	Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah.		

17	Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif dan peningkatan prestasi olahraga.		

Sebagai langkah konkret dalam mewujudkan 17 prioritas presiden dan 8 program hasil terbaik diidentifikasi beberapa Kegiatan Prioritas Utama. Kegiatan prioritas merupakan kebijakan terintegrasi yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap pencapaian sasaran pembangunan Nasional. Kegiatan Prioritas Utama ini menjadi fokus penekanan pelaksanaan RKP Tahun 2026. Kegiatan Prioritas Utama juga disusun dengan memperhatikan kontribusi dari berbagai pihak baik Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, Swasta dan stakeholders lainnya sebagai berikut.

Tabel 4.14 Kegiatan Prioritas Utama

PRIORITAS NASIONAL	NO	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA
Prioritas Nasional 1	1	Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertangung jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S)
Prioritas Nasional 2	2	Transformasi tata kelola industri pertahanan dan penerapan skema spend to invest
	3	Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/lumbung pangan Kalimantan Tengah
	4	Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/lumbung pangan Sumatra Selatan
	5	Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/lumbung pangan Papua Selatan
	6	Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/lumbung pangan lainnya
	7	Pembangunan pangan akuatik (blue food)
	8	Pembangunan pangan hewani
	9	Pembangunan pangan lokal dan nabati
	10	Fortifikasi dan biofortifikasi pangan
	11	Peningkatan penyediaan energi
	12	Perluasan akses dan jangkuan pelayanan energ
	12	Penguatan implementasi transisi energi berkeadilan
	13	Konservasi sumberdaya air
	14	Pengembangan SPAM terintegrasi hulu ke hilir
	15	Penyediaan dan pengawasan sanitasi aman, berkelanjutan, dan berketahanan iklim berbasis CWIS
	16	Pengembangan terpadu pesisir utara jawa
	17	Penguatan faktor pendukung ekonomi digital
	18	Penguatan ekonomi dan industri digital serta sektor strategis lainnya
	19	Pengelolaan susut dan sisa pangan
	20	Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik

	21	Peningkatan pengelolaan kualitas air sungai dan danau
	22	Peningkatan kualitas ekosistem gambut
	23	Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan
	24	Peningkatan pengumpulan dan pengelolaan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR
	25	Pengembangan industri garam dan produk olahan hasil laut
Prioritas Nasional 3	26	Pembangunan infrastruktur jaringan ketenagalistrikan dan digitalisasinya
	27	Pengembangan dan peningkatan ekosistem digital
	28	Percepatan pembangunan destinasi pariwisata prioritas BorobudurYogyakarta-Prambanan
	29	Percepatan pembangunan destinasi prioritas Lombok-Gili Tramena
	30	Percepatan pembagunan destinasi pariwisata prioritas Danau Toba
	31	Percepatan pembangunan destinasi prioritas Labuan Bajo
	32	Penguatan ekosistem aplikasi dan Gim
	33	Pengembangan koperasi sektor produksi
Prioritas Nasional 4	34	Perluasan layanan pendidikan anak usia dini
	35	Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah madrasah yang berkualitas
	36	Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah
	37	Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul
	38	Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru meliputi formasi rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, mobilitas, pembinaan karier profesional (e.g. pelatihan, inservice training), perlindungan hukum, dan kesejahteraan berbasis kinerja
	39	Peningkatan relevansi dan perluasan akses pendidikan tinggi
	40	Peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatan IPTEK dan inovasi
	41	Penurunan kematian ibu dan anak
	42	Pencegahan dan penurunan stunting
	43	Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis
	44	Penuntasan TBC
	45	Pemberian makan bergizi untuk siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita
	46	Penguatan ekosistem pendukung pemberian makan bergizi
	47	Eliminasi penyakit kusta dan Schistosomiasis
	48	Investasi pelayanan kesehatan primer
	49	Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan

		pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses
	50	Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan
	51	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) seni budaya
	52	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) riset dan inovasi
	53	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) olahraga
Prioritas Nasional 5	54	Pengembangan hilirisasi Nikel
	55	Pengembangan hilirisasi Tembaga
	56	Pengembangan hilirisasi Bauksit
	57	Pengembangan hilirisasi Timah
	58	Pengembangan hilirisasi Kelapa Sawit
	59	Pengembangan hilirisasi Kelapa
	60	Pengembangan hilirisasi Rumput Laut
	61	Pengembangan hilirisasi Kimia
	62	Pengembangan industri semikonduktor
	63	Pengembangan industri tekstil dan produk tekstil
	64	Penguatan industri logam dasar, besi dan baja
	65	Pengembangan industri dirgantara
	66	Pengembangan KEK Sei Mangkei
	67	Pengembangan KIT Batang
	68	Pengembangan KI Weda bay
Prioritas Nasional 6	69	Penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran melalui kartu kesejahteraan
	70	Peningkatan daya saing melalui kartu usaha produktif
	71	Peningkatan kemandirian melalui kartu usaha afirmatif
	72	Perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara
	73	Fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU
	74	Pemenuhan layanan dasar dan infrastruktur desa
Prioritas Nasional 7	75	Pencegahan tindak pidana korupsi
	76	Peningkatan kesejahteraan ASN melalui penerapan konsep total reward berbasis kinerja ASN
	77	Transformasi digital layanan publik prioritas
	78	Ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan perpajakan
	79	Intensifikasi penerimaan negara bukan pajak
Prioritas Nasional 8	80	Penguatan karakter dan jati diri bangsa
	81	Pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan
	82	Peningkatan ketahanan iklim pesisir dan laut

PROGRAM STRATEGIS NASIONAL (ProSN)

Program Strategis Nasional merupakan program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang merupakan program/proyek yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan RKP yang mencakup Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Proyek Prioritas, dan Proyek Strategis Nasional yang memiliki sifat strategis dan menjadi tanggung jawab pemerintahan daerah dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia serta menjaga keamanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, ProSN menjadi acuan penting bagi Pemerintah Daerah dalam menyelaraskan kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan agar mendukung agenda strategis nasional secara terpadu dan berkelanjutan. Pelaksanaan ProSN diarahkan untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi nasional serta mengurangi kesenjangan pembangunan antardaerah. Dalam hal ini, keterpaduan antara program pusat dan daerah menjadi kunci dalam menciptakan pemerataan infrastruktur, peningkatan daya saing wilayah, serta pemerataan akses terhadap layanan dasar dan peluang ekonomi di seluruh Indonesia. Selain aspek ekonomi, ProSN juga memuat dimensi strategis dalam menjaga stabilitas nasional, khususnya melalui programprogram yang mendukung ketahanan energi, pangan, dan pertahanan negara. Pemerintah Daerah diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung program-program tersebut melalui penguatan kapasitas wilayah dan sinergi lintas sektor, demi menciptakan lingkungan yang aman, tangguh, dan resilien. Pada akhirnya, seluruh inisiatif dalam Program Strategis Nasional bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pelaksanaan ProSN yang terarah dan terkoordinasi dengan baik, diharapkan tercipta pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, yang tidak hanya menciptakan pertumbuhan, tetapi juga memastikan bahwa manfaatnya dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Berikut Program Strategis Nasional (ProSN):

Tabel. 4.15 Program Strategis Nasional (ProSN)

No	ProSN	PROYEK/KEGIATAN	
1.	Pengentasan Kemiskinan	1	Penanggulangan Kemiskinan
		2	Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
		3	Sekolah Rakyat
		4	Pembangunan 3 Juta Rumah
2.	Ketahanan Pangan	1	Swasembada Pangan (Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan)
		2	Pendayagunaan Penyuluh Pertanian
		3	Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah
		4	Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian (Sawah/Lumbung Pangan/Food Estate
3.	Kesehatan untuk semua	1	Stunting
		2	Pemeriksaan Kesehatan Gratis

No	ProSN	PROYEK/KEGIATAN	
		3	Jaminan Kesehatan Nasional
		4	Penuntasan TBC
		5	Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota
4.	Perluasan Akses Pendidikan	1	Pembangunan dan Revitalisasi PAUD
		2	Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah
		3	Pembangunan dan Revitalisasi SMA Unggul Garuda dan Digitalisasi Pembelajaran
		4	Makan Bergizi Gratis
5.	Pertumbuhan Ekonomi	1	Pengendalian Inflasi
		2	Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
		3	Optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
		4	Industrialisasi dan Hilirisasi (Investasi, Lapangan Pekerjaan,)
		5	Pelestarian Lingkungan dan Pengelolaan Sampah

4.3.1.3 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH RKPD 2026

Prioritas pembangunan daerah dalam RKPD 2026 merupakan penjabaran arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi yang disesuaikan dengan kebutuhan, potensi, dan permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing daerah. Penetapan prioritas ini bertujuan untuk **mewujudkan pembangunan yang efektif, efisien, dan tepat sasaran**, sesuai dengan visi-misi kepala daerah dan hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya.

Sesuai dengan Tema RKPD tahun 2026 **"Peningkatan Produktivitas untuk Swasembada Pangan dan Energi serta percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif**, Pembangunan Daerah diarahkan pada 7 (Tujuh) Pilar Pembangunan Daerah yang meliputi:

1. Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan;
2. Pemberdayaan Komunitas;
3. Pemerataan Infrastruktur Berkelanjutan;
4. Pemerataan Akses dan Layanan Kesehatan;
5. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan;
6. Reformasi Birokrasi dan HAM; dan
7. Kolaborasi Ayo Bangun NTT.

Adapun Pilar Pembangunan Daerah dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pilar 1: Ekonomi Berkelanjutan

a. Memajukan sektor pertanian, Perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan sebagai sektor unggulan yang berkelanjutan berbasis potensi daerah;
b. Mengakselerasi program penciptaan lapangan kerja dan wira usaha baru serta meningkatkan kapasitas wirausaha;
c. Memperkaya ekowisata, geowisata, geopark, dan wisata budaya berbasis komunitas, menampilkan jati diri dan pesona NTT ke dunia;
d. Memastikan seluruh Masyarakat NTT yang bekerja terlindungi BPJS Ketenagakerjaan.
e. Tour De Entete sebagai Motor penggerak Perekonomian daerah

f. Mengembangkan NTT Mart sebagai Pusat Pemasaran Produk NTT Lokal untuk mendukung ekonomi masyarakat dan memperluas lapangan kerja;
g. Mendorong Pengembangan Restoran Flobamorata sebagai wadah promosi kuliner dalam budaya daerah dalam mendukug Parawisata

2. **Pilar 2: Pemberdayaan Komunitas**

a. Mengembangkan ekonomi kreatif untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal khususnya oleh anak muda milenial dan perempuan;
b. Menciptakan ekosistem yang mendukung usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) berbasis Potensi Desa;
c. Digitalisasi, kolaborasi dan revitalisasi koperasi menuju kemandirian ekonomi;
d. Optimalisasi dan penguatan kapasitas BUMDES untuk mendukung pengembangan ekonomi masyarakat.

3. Pilar 3: Pemerataan Infrastruktur Berkelanjutan

a. Membangun jalan, sumber daya air, air minum bersih,kelistrikan, dan rumah layak huni dengan partisipasi bersama melalui skema penerapan infrastruktur hijau dan biru (*green and blue infrastructure*), serta pertimbangan resiliensi bencana dan perubahan iklim;
b. Pembangunan infrastruktur digital untuk memperluas akses internet dan komunikasi;
c. Meningkatkan kualitas layanan transportasi publik guna meningkatkan konektivitas antar wilayah.

4. Pilar 4: Kesehatan

a. Pencegahan dan percepatan penurunan stunting dengan pendekatan hexahelix;
b. Penguatan infrastruktur di fasilitas layanan kesehatan;
c. Memastikan seluruh Masyarakat NTT sebagai peserta aktif BPJS;
d. Pemerataan distribusi dan peningkatan kualitas SDM Kesehatan;
e. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat melalui pelayanan kesehatan dan jaminan sosial yang lebih inklusif, terjangkau dan mudah diakses.

5. Pilar 5: Pendidikan

a. Peningkatan dan pemerataan infrastruktur Pendidikan berkualitas;
b. Insentif Pendidikan bagi siswa/mahasiswa berprestasi kurang mampu serta tenaga pendidik di daerah perifer;
c. Membangun sekolah vokasi unggulan berbasis potensi daerah;
d. Mengoptimalkan penggunaan teknologi untuk pembelajaran formal dan non formal;
e. Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan Menengah dan Khusus.

6. Pilar 6: Reformasi Birokrasi Dan Hak Azasi Manusia

a. Mentransformasi pelayanan publik menjadi lebih transparan, efisien, professional proaktif dan melayani;
b. Memperkuat sumber pendapat daerah;
c. Meningkatkan kesejahteraan ASN sebagai salah satu penggerak ekonomi;
d. Meningkatkan keamanan daerah dan melindungi hak-hak Masyarakat khususnya kelompok rentan dengan partisipasi aktif Masyarakat dan kerja sama lintas sektor.

7. Pilar 7: Kolaborasi

a. Melibatkan dan mengoptimalkan kontribusi diaspora dan potensi Keluarga Besar NTT untuk membangun daerah

b. Mengkoordinasikan dan menyelaraskan seluruh program pemerintah kabupaten/kota serta CSO/NGO untuk Pembangunan di Provinsi NTT

c. Mengoptimalkan pengunaan IPTEK, Riset dan Inovasi Daerah untuk mendukung pencapaian Pembangunan di Provinsi NTT.

Selain Prioritas yang merupakan pilar dari Gubernur dan Wakil Gubernur juga terdapat dasa cita yang merupakan Program Pembangunan Daerah antara lain:

1. Cita 1 : Dari ladang dan Laut ke Pasar:Efisien, Modern, dan Aman;
2. Cita 2 : Milenial dan Perempuan Motor Kreativitas Lokal;
3. Cita 3 :Wisata NTT Pengerak Ekonomi Lokal;
4. Cita 4: Kesejahteraan Bersama; Jaminan Kesehatan dan ketenagakerjaan untuk masyarakat;
5. Cita 5 : Posyandu Tanguh, Masyarakat Sehat dan bebas Stunting
6. Cita 6 : Sekolah Vokasi Unggulan Berbasis Potensi Unggulan;
7. Cita 7 : Jalan, Air, Listrik, Rumah Layak Huni : Mewujudkan NTT yang Sejahtera
8. Cita 8 : Pendapatan Daerah Naik, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan ASN Terjamin
9. Cita 9 : Membangun NTT Digital : Akses Merata, Komunikasi Lancar
10. Cita 10 : Ayo Bangun NTT, Kolaborasi Bersama

Ke tujuh prioritas daerah tersebut dijadikan sebagai acuan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan strategis yang belum terselesaikan seperti yang telah disampaikan pada Sub Bab 4.3.1.1 Isu Strategis.

4.3.1.4 PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2026

Kerangka Perumusan Program Prioritas RKPD secara umum diturunkan dari penelaahan terhadap Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sehingga dapat diperoleh outcome, indikator yang bermuara pada pemilihan program-program prioritas daerah yang akan menjandi pedoman bagi perangkat daerah untuk menyusun dokumen turunan selanjutnya. Secara umum, kerangka perumusan Program Prioritas Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Menunjuk amanat pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penyusunan RKPD Tahun 2026 dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan berpedoman ada Visi, Misi, dan program Kepala Daerah terpilih yang dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, kinerja program yang termuat dalam RPJMD 2025-2029. Mengingat perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, diperlukan penyelarasan RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025- 2029. Aspek penyelarasan dimaksud bermakna bahwa disamping RPJMD Tahun 2025-2029 menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah, dan wakil kepala daerah terpilih, sekaligus juga merupakan bagian dari upaya mendukung secara seiring sejalan dengan pelaksanaan dan pencapaian 8 (Delapan) Asta Cita, 17 (Tujuh Belas) Program Prioritas, dan 8 (Delapan) Proyek Hasil Terbaik Cepat (Quick Wins) yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2025-2029.

Dengan demikian, pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 ditujukan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur dan wakil Gubernur, yang menjabarkan makna Dasa Cita Ayo Bangun NTT dengan 5 Misi, 7 Pilar/Prioritas Pembangunan dan 10 Dasa Cita yang kemudian mengerucut pada pemilihan program – program prioritas pembangunan daerah. Pemetaan Misi, Prioritas Daerah/Pilar dan Dasa Cita Ayo Bangun NTT pada Tabel 4.10 sebagai berikut:

Tabel 4.16 Pemetaan Misi, Pilar Pembangunan dan Dasa Cita

MISI	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
PILAR PEMBANGUNAN	**3,7**	**4,7**	**5,7**	**2,7**	**1,6,7**
DASA CITA	**7, 9,10**	**4,5,10**	**6,10**	**2,10**	**1,3,4,8,10**

MISI	PILAR PEMBANGUNAN	DASA CITA
Misi I Infrastruktur berkelanjutan demi mewujudkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berdaya saing (MAJU)	**Pilar 3**: PEMERATAAN INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN **Pilar 7:** KOLABORASI	**Cita 7**: Jalan, Air, Listrik, rumah Layak Huni : Mewujudkan NTT yang Sejahtera **Cita 9**: Membangun NTT Digital : Akses Merata, Komunikasi Lancar **Cita 10**: Ayo Bangun NTT, Kolaborasi bersama
Misi II Memperluas pelayanan kesehatan dan jaminan sosial yang lebih inklusif, terjangkau dan mudah diakses (SEHAT)	**Pilar 4**: KESEHATAN **Pilar 7:** KOLABORASI	**Cita 4**: Kesejahteraan Bersama; Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan untuk masyarakat. **Cita 5**: Posyandu Tangguh, Masyarakat Sehat dan Bebas Stunting **Cita 10**: Ayo Bangun NTT, Kolaborasi bersama
Misi III Menghadirkan pendidikan berkualitas yang merata, partisipatif dan tepat sasaran (CERDAS)	**Pilar 5:** PENDIDIKAN **Pilar 7:** KOLABORASI	**Cita 6**: Sekolah vokasi unggulan Berbasis Potensi unggulan **Cita 10**: Ayo Bangun NTT, Kolaborasi bersama
Misi IV Mewujudkan kesejahteraan sosial, kesetaraan akses, serta kualitas hidup yang berkeadilan dan madani bagi seluruh lapisan masyarakat (SEJAHTERA)	**Pilar 2:** PEMBERDAYAAN KOMUNITAS **Pilar 7:** KOLABORASI	**Cita 2:** Milenial dan Perempuan Motor Kreativitas Lokal **Cita 10**: Ayo Bangun NTT, Kolaborasi bersama
Misi V Mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan	**Pilar 1:** EKONOMI BERKELANJUTAN	**Cita 1**: Dari Ladang dan Laut ke Pasar : Efisien, Modern dan Aman

MISI	PILAR PEMBANGUNAN	DASA CITA
sumber daya alam dan manusia yang bijak serta pemenuhan HAM untuk menciptakan masa depan yang inklusif (BERKELANJUTAN)	**Pilar 6:** REFORMASI BIROKRASI DAN HAK AZASI MANUSIA **Pilar 7:** KOLABORASI	**Cita 3:** Wisata NTT Penggerak Ekonomi Lokal **Cita 4**: Kesejahteraan Bersama; Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan untuk masyarakat **Cita 8:** Pendapatan Daerah Naik, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan ASN Terjamin **Cita 10:** Ayo Bangun NTT, Kolaborasi bersama

Sesuai arahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan turunannya, maka pemilihan program, kegiatan dan sub kegiatan menggunakan acuan ketentuan yang berlaku yang tertuang di dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Tabel 4.17 Program Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi NTT Tahun 2026

VISI: NTT MAJU, SEHAT, CERDAS, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN

OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	DASA CITA	PD PENANGGUNG JAWAB
MISI 1: Infrastruktur berkelanjutan demi mewujudkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berdaya saing (MAJU)				
Pilar 3: Pemerataan Infrastruktur Berkelanjutan dan Pilar 7 : Kolaborasi				
Tujuan 1.1 : Pemenuhan Pemerataan Infrastruktur Berkelanjutan				
Sasaran 1.1.1 : Meningkatnya Kinerja Infrastruktur: Tersedianya infrastruktur jalan, sumber daya air, air minum bersih,kelistrikan, dan rumah layak huni dengan partisipasi bersama melalui skema penerapan infrastruktur hijau dan biru (*green and blue infrastructure*), serta pertimbangan resiliensi bencana dan perubahan iklim				
a. Meningkatnya kualitas Infrastruktur Jalan dalam menunjang aksesibilitas wilayah				
Meningkatnya aksesibiltas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Cita 7: Jalan, Air, Listrik, rumah Layak Huni : Mewujudkan NTT yang Sejahtera	PUPR
b. Meningkatnya fungsi pelayanan infrastruktur sumber daya air				
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cita 7: Jalan, Air, Listrik, rumah Layak Huni : Mewujudkan NTT yang Sejahtera	PUPR

OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	DASA CITA	PD PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	1. Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir 2. Persentase peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob 3. Persentase Luas Layanan Irigasi Multi komoditas	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		PUPR
Meningkatnya tata kelola kegeologian	Jumlah Volume Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas kabupaten/ Kota	3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Dasa Cita 7: Jalan, Air, Listrik, rumah Layak Huni : Mewujudkan NTT yang Sejahtera	DINAS ESDM
c. Terpenuhinya kebutuhan energi daerah				
Meningkatnya cakupan Pelayanan kelistrikan	Rasio Elektrifikasi	3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Cita 7: Jalan, Air, Listrik, rumah Layak Huni : Mewujudkan NTT yang Sejahtera	ESDM
Meningkatnya tata kelola baru terbarukan	Porsi EBT dalam bauran energi	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAN ENERGI BARU TERBARUKAN		
d. Tersedianya Rumah Layak Huni				
Meningkatnya Layanan persampahan regional	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional	1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Cita 7: Jalan, Air, Listrik, rumah Layak Huni : Mewujudkan NTT yang Sejahtera	PUPR
Meningkatnya akses masyarakat terhadap system pengelolaan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		PUPR
Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Cita 7: Jalan, Air, Listrik, rumah Layak Huni : Mewujudkan NTT yang Sejahtera	PUPR
Meningkatnya Kualitas infrastruktur permukiman	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik	1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN		

OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	DASA CITA	PD PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya Kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		PUPR
Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		PUPR
Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		PUPR
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	1. Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni 2. Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		PUPR
Meningkatnya Kualitas kawasan permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani	1.03.07 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		PUPR
Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cita 7: Jalan, Air, Listrik, rumah Layak Huni : Mewujudkan NTT yang Sejahtera	PUPR
Meningkatnya pelaksanaan transmizrasi	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan	3.32.02 PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI		DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
Meningkatnya kualitas pembangunan Kawasan transmizrasi	Persentase Luas Kawasan Transrnigrasi yang Berkembang	3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI		DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
Meningkatnya Pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan	3.32.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI		DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	DASA CITA	PD PENANGGUNG JAWAB
kawasan transmigrasi				
e. Meningkatnya Pengelolaan Sumberdaya alam yang berkelanjutan melalui penerapan ekonomi hijau (*green economy*) dan ekonomi biru (*blue economy*)				
Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Provinsi	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Cita 7: Jalan, Air, Listrik, rumah Layak Huni : Mewujudkan NTT yang Sejahtera	PUPR
Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		DLHK
Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	1. Indeks Kualitas Air 2. Indeks Kualitas Udara	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		DLHK
Meningkatnya Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		DLHK
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup	Persentase Pembinaan Izin lingkungan	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Cita 7: Jalan, Air, Listrik, rumah Layak Huni : Mewujudkan NTT yang Sejahtera	DLHK
Meningkatnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya	Indeks Keanekaragaman Hayati	3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA		DLHK
Meningkatnya tata kelola energi baru terbarukan	Porsi EBT dalam Bauran Energi	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN		ESDM
f. Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan yang resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim				
1. Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1. Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cita 7: Jalan, Air, Listrik, rumah Layak Huni : Mewujudkan NTT yang Sejahtera	BPBD

OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	DASA CITA	PD PENANGGUNG JAWAB
2. Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	2. Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana			BPBD
3. Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	3. Persentase Penanganan Pasca Bencana			BPBD
1. Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	1. Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cita 7: Jalan, Air, Listrik, rumah Layak Huni : Mewujudkan NTT yang Sejahtera	SATPOL PP
2. Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	2. Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran			
Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati	Luasan Kawasan Konservasi	3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Sasaran 1.1.2 : Meningkatnya daya saing antar wilayah				
Meningkatnya kualitas layanan Transportasi darat	1. Konektivitas Darat 2. Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Cita 7: Jalan, Air, Listrik, rumah Layak Huni : Mewujudkan NTT yang Sejahtera	DINAS PERHUBUNGAN
Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut	Konektivitas Laut	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		DINAS PERHUBUNGAN
Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	Cita 7: Jalan, Air, Listrik, rumah Layak Huni : Mewujudkan NTT yang Sejahtera	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA		
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	1. Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya 2. Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		
Tujuan 1.2 : Peningkatan akses dan Infrastruktur Digital				

OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	DASA CITA	PD PENANGGUNG JAWAB
Sasaran 1.2.1 : Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan teknologi digital untuk menunjang pelayanan publik dan aktivitas ekonomi				
Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Cita 9: Membangun NTT Digital : Akses Merata, Komunikasi Lancar	DINAS KOMINFO
Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		DINAS KOMINFO
Meningkatnya pemanfaatan dan informasi Penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		DPMPTSP
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Cita 9: Membangun NTT Digital : Akses Merata, Komunikasi Lancar	DPMPTSP
Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
MISI 2: Memperluas pelayanan kesehatan dan jaminan sosial yang lebih inklusif, terjangkau dan mudah diakses (SEHAT)				
Pilar 4: Kesehatan dan Pilar 7: Kolaborasi				
Tujuan 2.1 : Pemenuhan pelayanan kesehatan yang inklusif, terjangkau dan mudah diakses				
Sasaran 2.1.1 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang inklusif, terjangkau dan mudah diakses				
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	1. Angka Kematian Ibu (AKI)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cita 5: Posyandu Tangguh, Masyarakat Sehat dan Bebas Stunting	DINAS KESEHATAN
Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	1. Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate/* TFR) 2. Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (*Age Specific Fertility Rate*/ASFR 15-19)	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		DP3AP2KB
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1. Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/*Modern Contraceptive* (mCPR) 2. Persentase Kebutuhan Ber KB yang tidak	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		DP3AP2KB

OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	DASA CITA	PD PENANGGUNG JAWAB
	Terpenuhi (*Unmet Need*)			
Meningkatnya cakupan perlindungan dan jaminan sosial	1. Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar 2. Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		DINAS SOSIAL
Sasaran 2.1.2 : Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting dengan pendekatan Pentahelix				
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cita 5: Posyandu Tangguh, Masyarakat Sehat dan Bebas Stunting	DINAS KESEHATAN
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		BAPPERIDA
Sasaran 2.1.3 : Penguatan Infrastruktur di Fasilitas Layanan Kesehatan				
Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Cita 5: Posyandu Tangguh, Masyarakat Sehat dan Bebas Stunting	DINAS KESEHATAN
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		DINAS KESEHATAN
Sasaran 2.1.4 : Memastikan Seluruh Masyarakat NTT sebagai Peserta Aktif BPJS Kesehatan				
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	1. Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital 2. Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cita 5: Posyandu Tangguh, Masyarakat Sehat dan Bebas Stunting	DINAS DUKCAPIL
Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	1. Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan 2. Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cita 5: Posyandu Tangguh, Masyarakat	DINAS DUKCAPIL

OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	DASA CITA	PD PENANGGUNG JAWAB
	3. Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan 4. Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan		Sehat dan Bebas Stunting	
Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		DINAS DUKCAPIL
Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		DINAS DUKCAPIL
Sasaran 2.1.5 : Pemerataan Distribusi dan Peningkatan Kualitas SDM				
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Cita 5: Posyandu Tangguh, Masyarakat Sehat dan Bebas Stunting	DINAS KESEHATAN
MISI 3: Menghadirkan pendidikan berkualitas yang merata, partisipatif dan tepat sasaran (CERDAS)				
Pilar 5: Pendidikan dan Pilar 7: Kolaborasi				
Tujuan 3.1 : Pemenuhan SDM NTT yang unggul dan berdaya saing melalui pendidikan berkualitas yang merata, partisipatif dan tepat sasaran				
Sasaran 3.1.1 : Meningkatnya aksesibilitas dan mutu Pendidikan yang inklusif dan holistik integratif				
Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	1. Presentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS) 2. Presentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Cita 6: Sekolah vokasi unggulan Berbasis Potensi unggulan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Cita 6: Sekolah vokasi unggulan Berbasis Potensi unggulan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	1. Indeks Pemerataan Guru 2. Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Meningkatnya kualitas dan distribusi	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan	1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Cita 6: Sekolah vokasi unggulan	DINAS PENDIDIKAN DAN

OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	DASA CITA	PD PENANGGUNG JAWAB
institusi pendidikan	yang Diterbitkan/ Diperbarui		Berbasis Potensi unggulan	KEBUDAYAAN
Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra	1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Meningkatnya kualitas perpustakaan dan pustakawan	Persentase Pustakawan yang Memperoleh Sertifkasi Profesi dibidang Perpustakaan	2.23.04 PROGRAM AKREDITASI PERPUSTAKAAN DAN SERTIFIKASI PUSTAKAWAN		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat Ketersediaan Arsip	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	2.24.04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Meningkatnya kapasitas SDM bidang kearsipan	Persentase SDM Bidang Kearsipan yang Ditingkatkan kompetensinya	2.24.05 PROGRAM AKREDITASI DAN SERTIFIKASI		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Tujuan 3.2 : Peningkatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan daerah secara berkelanjutan				
Sasaran 3.2.1 : Mewujudkan integrasi nilai-nilai budaya lokal dalam sistem pendidikan yang inklusif dan berkarakter dan Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan dalam rangka mendukung pariwisata				
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Cita 3: Wisata NTT Penggerak Ekonomi Lokal	DINAS PENDIDIKAN DAN

OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	DASA CITA	PD PENANGGUNG JAWAB
pengembangan kebudayaan	Pengembangan Kebudayaan		Cita 3: Wisata NTT Penggerak Ekonomi Lokal	KEBUDAYAAN
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	1. Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan 2. Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Meningkatnya tata kelola museum	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum	2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	1. Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) 2. Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		BADAN KESBANGPOL
Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		BADAN KESBANGPOL
Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		BADAN KESBANGPOL
Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial,	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN		BADAN KESBANGPOL

OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	DASA CITA	PD PENANGGUNG JAWAB
dan budaya masyarakat	Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		
Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		BADAN KESBANGPOL
MISI 4: Mewujudkan kesejahteraan sosial, kesetaraan akses, serta kualitas hidup yang berkeadilan dan madani bagi seluruh lapisan masyarakat (SEJAHTERA)				
Pilar 2 : Pemberdayaan Komunitas dan Pilar 7 : Kolaborasi				
Tujuan 4.1. Meningkatkan pemberdayaan komunitas yang mandiri, inklusif, dan berdaya saing melalui penguatan kapasitas, akses terhadap sumber daya, serta partisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan guna menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan				
Sasaran 4.1.1. Meningkatnya pendapatan masyarakat, ketimpangan berkurang, dan kemiskinan menurun				
Meningkatnya pemberdayaan potensi kesejahteraan sosial	1. Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial 2. Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan 3. Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Cita 2: Milenial dan Perempuan Motor Kreatifitas Lokal	DINAS SOSIAL
	4. Persentase Pekerja Sosial /Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar			

OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	DASA CITA	PD PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya cakupan perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Cita 2: Milenial dan Perempuan Motor Kreatifitas Lokal	DINAS SOSIAL
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cita 2: Milenial dan Perempuan Motor Kreatifitas Lokal	DP3AP2KB
Sasaran 4.1.2. Meningkatnya ekosistem yang mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berbasis potensi desa				
Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Cita 2: Milenial dan Perempuan Motor Kreatifitas Lokal	DINAS KOPERASI DAN UMKM
Meningkatnya Promosi pelayanan modal	Persentase promosi penanaman modal	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		DPMPTSP
Meningkatnya Kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang vang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Meningkatnya kelancarandistribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Sasaran 4.1.3 Terwujudnya koperasi modern yang mandiri melalui transformasi digital, penguatan kelembagaan, dan kolaborasi usaha				
Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Cita 2: Milenial dan Perempuan Motor Kreativitas Lokal	DINAS KOPERASI DAN UMKM
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		DINAS KOPERASI DAN UMKM
Meningkatnya Kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif dan berkinerja baik	2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		DINAS KOPERASI DAN UMKM
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		DINAS KOPERASI

OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	DASA CITA	PD PENANGGUNG JAWAB
	Dukungan Fasilitasi Pelatihan			DAN UMKM
Meningkatnya Produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		DINAS KOPERASI DAN UMKM
Meningkatnya legalitas koperasi	Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam	2.17.09 PROGRAM PENGUATAN BADAN HUKUM KOPERASI		DINAS KOPERASI DAN UMKM
Tujuan 4.2. Meningkatkan Kapasitas Perempuan dan Pemuda yang mandiri dan berdaya saing				
Sasaran 4.2.1 Meningkatnya partisipasi aktif seluruh masyarakat terutama perempuan dan kaum milenial dalam pengembangan ekonomi kreatif yang meningkatkan nilai tambah produk lokal				
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	1. Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) 2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Cita 2: Milenial dan Perempuan Motor Kreativitas Lokal	DP3AP2KB
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		DP3AP2KB
Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		DP3AP2KB
Sasaran 4.2.2.Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan, masyarakat berolahraga dan prestasi olahraga NTT di Tingkat Nasional				
Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Cita 2: Milenial dan Perempuan Motor Kreativitas Lokal	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Misi 5: Mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya alam dan manusia yang bijak serta pemenuhan HAM untuk menciptakan masa depan yang inklusif (BERKELANJUTAN)				
Pilar 1: Ekonomi Berkelanjutan, Pilar 6: Reformasi Birokrasi dan Hak Azasi Manusia dan Pilar 7: Kolaborasi				

OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	DASA CITA	PD PENANGGUNG JAWAB
Tujuan 5.1. Mewujudkan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan, sebagai sektor unggulan yang berkelanjutan dan berbasis potensi daerah				
Sasaran 5.1.1. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian				
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masvarakat	Skor Pola Pangan Harapan	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Cita 1: Dari Ladang dan Laut ke Pasar : Efisien, Modern dan Aman	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		
Meningkatnya pengawasan mutu dan Keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	1. Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		DINAS PETERNAKAN
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan 2. Peningkatan Produksi Hortikultura	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Meningkatnya produksi Perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Cita 1: Dari Ladang dan Laut ke Pasar : Efisien, Modern dan Aman	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Meningkatnya Produksi perikanan budidava	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi lkan	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Sasaran 5.1.2. Peningkatan daya saing dan keberlanjutan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan sebagai sektor unggulan yang berbasis potensi daerah				
Laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil sebagai sumber nilai tambah ekonomi kelautan dan perikanan	Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Cita 1: Dari Ladang dan Laut ke Pasar : Efisien, Modern dan Aman	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Meningkatnya Produktivitas hasil hutan	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		DLHK

OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	DASA CITA	PD PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Cita 1: Dari Ladang dan Laut ke Pasar : Efisien, Modern dan Aman	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	1. Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan 2. Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan	1. Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) 2. Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		DLHK
Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH		BAPPERIDA
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Laban Pertanian yang Ditetapkan Meniadi LP2B	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Meningkatnya Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	1. Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) 2. Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		DINAS PETERNAKAN
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	1. Persentase Penanganan Bencana Pertanian 2. Persentase Penanganan Dampak Perubahan lklim Terhadap Pertanian	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Cita 1: Dari Ladang dan Laut ke Pasar : Efisien, Modern dan Aman	DINAS PERTANIAN
Tujuan 5.2. Terwujudnya percepatan penciptaan lapangan kerja dan wirausaha baru serta peningkatan kapasitas wirausaha				

OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	DASA CITA	PD PENANGGUNG JAWAB
Sasaran 5.2.1. Meningkatnya kesempatan kerja yang merata dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat				
Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase Kabupaten/ Kota yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja	2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Cita 1: Dari Ladang dan Laut ke Pasar : Efisien, Modern dan Aman	DINAS KETENAGA KERJAAN DAN TRANSMIGRASI
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktivitasnya	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		DINAS KETENAGA KERJAAN DAN TRANSMIGRASI
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		
Sasaran 5.2.2. Meningkatnya wirausaha baru yang berdaya saing dan kapasitas usaha melalui penyediaan akses yang dapat dijangkau secara inklusif				
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	1. Persentase usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal 2. Pertumbuhan Wirausaha	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Cita 1: Dari Ladang dan Laut ke Pasar : Efisien, Modern dan Aman	DINAS KOPERASI DAN UMKM
Meningkatnya Perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	2.18.03 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		DPMTSP
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Meningkatnya Kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Tujuan 5.3. Terwujudnya pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai penggerak ekonomi lokal NTT				
Sasaran 5.3.1. Meningkatnya Daya Saing Pariwisata NTT (detinasi, pemasaran, kelembagaan dan industri pariwisata) untuk berkontribusi pada peningkatan pendapatan dari Sektor Pariwisata sebagai penggerak ekonomi lokal				
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Cita 3: Wisata NTT Penggerak Ekonomi Lokal	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Meningkatnya Jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		
Meningkatnya Kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN		DINAS PARIWISATA DAN

OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	DASA CITA	PD PENANGGUNG JAWAB
		DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL		EKONOMI KREATIF
Sasaran 5.3.2. Meningkatkan Kesejahteraan NTT melalui peningkatan usaha ekonomi kreatif				
Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Cita 3: Wisata NTT Penggerak Ekonomi Lokal	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Meningkatnya Pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan lnformasi Penanaman Modal	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		DPMPTSP
Terkendalinya Pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		DPMPTSP
Meningkatnya efektivitas kerja sama penanaman modal	Persentase Kerja Sama Penanaman Modal yang Ditindaklanjuti	2.18.07 PROGRAM KERJA SAMA PENANAMAN MODAL		DPMPTSP

Tujuan 5.4. Terwujudnya Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan Bagi Seluruh Tenaga Kerja NTT				
Sasaran 5.4.1. Jaminan dan Perlindungan bagi tenaga kerja NTT, baik formal maupun non formal, terutama tenaga kerja rentan				
Meningkatanya Pekerja Indonesia yang terlindungi	Jumlah Pekerja Pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Cita 4: Kesejahteraan Bersama; Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan untuk masyarakat	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Meningkatnya Realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Terlindunginya hak-hak pekerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Terlindungi Hak-Hak Dasarnya	2.07.06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN		
Meningkatnya kualitas layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani	1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN		DINAS SOSIAL
Tujuan 5.5. Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia				
Sasaran 5.5.1. Transformasi Pelayanan Publik menjadi lebih transparan, efisiensi, profesional, proaktif dan melayani				
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cita 8: Pendapatan Daerah Naik, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan ASN Terjamin	DINAS KOMINFO
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks SPBE	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		DINAS KOMINFO
Sasaran 5.5.2. Meningkatnya Kemandirian fiskal daerah				
Meningkatnya Kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Cita 8: Pendapatan Daerah Naik, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan ASN Terjamin	DPMPTSP
Meningkatnya tata kelola anggaran	1. Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD 2. Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		BADAN KEUANGAN DAERAH
Sasaran 5.5.3. Meningkatnya kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai salah satu pengerak ekonomi				
1. Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	1. Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Cita 8: Pendapatan Daerah Naik, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan ASN Terjamin	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
2. Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	2. Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya			

3. Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	3. Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya			
4. Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	4. Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik			
Sasaran 5.5.4. Meningkatnya perlindungan hak-hak masyarakat khususnya kelompok rentan dengan partisipasi aktif masyarakat dan kerja sama lintas sektor				
Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	4.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cita 8: Pendapatan Daerah Naik, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan ASN Terjamin	BIRO KESRA
Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		SATPOL PP
Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat			
Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya			
Meningkatnya cakupan rehabilitasi sosial	1. Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Cita 8: Pendapatan Daerah Naik, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan ASN Terjamin	DINAS SOSIAL
	2. Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti			
	3. Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti			
	4. Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti 5. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan			

	Dasarnya di Dalam Panti			
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		DP3AP2KB
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		DP3AP2KB
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	1. Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		DP3AP2KB
	2. Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)			

Sumber :Tarikan Rancangan Akhir RKPD Provinsi NTT Tahun 2026 dan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029 (diolah)

4.4 INOVASI DAERAH

Dalam konsep pembangunan berkelanjutan, Indeks Inovasi Daerah/Innovation Government Award (IID/IGA) merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk mengetahui lebih spesifik kondisi dan laku inovatif di lingkungan pemerintah di suatu daerah. Model pengukuran IID/IGA ini dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk mengukur potensi dan kinerja pemerintah daerah dalam menciptakan iklim berinovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Skor IID/IGA menggambarakan bagaimana produktivitas, kemajuan, persaingan, dan kemandirian pemerintah daerah dalam ekosistem inovasi secara keseluruhan. Gambaran utuh IID/IGA menunjukkan *positioning* inovasi di lingkungan pemerintah dari suatu daerah dari daerah-daerah lainnya. Hasil IID/IGA ini, pada akhirnya dapat dijadikan referensi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih inovatif, tepat sasar, serta mendorong usaha-usaha dan penciptaan ekosistem inovasi yang sesungguhnya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Skor IID/IGA Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tahun 2024 menggambarkan kondisi pembangunan pemerintah daerah NTT dalam kerangka ekosistem inovasi selama dua tahun terakhir (2022/2023 dan 2023/2024). Dengan menjelaskan 26 indikator inovasi, maka potret potensi dan pembangunan ekosistem inovasi di lingkup pemerintah provinsi NTT terus dimonitor dari tahun ke tahun.

Penjelasan terkait Inovasi sebagai pilar, Indeks Inovasi Daerah dan Perlibatan Aktor Riset terhadap Inovasi Daerah Sebagai Berikut:

a. Inovasi sebagai Pilar Transformasi Pembangunan: ekosistem inovasi daerah

Pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif tidak lagi dapat bergantung pada pendekatan konvensional yang bersifat linier dan sektoral. Dalam menghadapi kompleksitas tantangan global dan lokal—seperti kemiskinan struktural, stunting, keterisolasian wilayah, hingga kerentanan terhadap perubahan iklim—pemerintah daerah dituntut untuk lebih responsif, adaptif, dan kreatif. Di sinilah peran inovasi menjadi sangat vital. Inovasi bukan hanya sekadar pengembangan teknologi atau digitalisasi layanan, melainkan mencakup seluruh pendekatan baru dalam tata kelola, pelayanan publik, dan partisipasi masyarakat.

Dalam konteks Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), inovasi daerah merupakan fondasi penting untuk mengakselerasi pencapaian visi pembangunan daerah. Pemerintah Provinsi NTT, melalui berbagai kebijakan strategis, telah menunjukkan komitmen untuk mendorong transformasi berbasis inovasi. Untuk memastikan arah kebijakan ini terukur dan terarah, dua instrumen utama digunakan sebagai tolok ukur: **Indeks Inovasi Daerah – *Innovative Government Award* (IID-IGA)** dan **Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)**.

b. Indeks Inovasi Daerah: Instrumen Diagnostik Kemajuan Tata Kelola Inovatif

- **Konsep dan Dimensi IID-IGA**

Indeks Inovasi Daerah adalah instrumen penilaian yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengukur kinerja inovasi pemerintah daerah dalam aspek pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya. IID menjadi alat diagnostik yang penting karena mampu memberikan gambaran menyeluruh atas kapasitas institusional daerah dalam mengembangkan dan mereplikasi inovasi secara sistematis.

IID mengukur tiga aspek utama:

1. **Input Inovasi**, meliputi dukungan regulasi, anggaran, dan kapasitas SDM.
2. **Proses Inovasi**, yakni inisiatif yang dilakukan, pengelolaan inovasi, serta keterlibatan aktor multipihak.
3. **Output Inovasi**, yakni jumlah dan jenis inovasi, serta replikasi dan keberlanjutannya.

- **Capaian dan Tantangan IID-IGA di NTT**

Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah Provinsi NTT menunjukkan peningkatan signifikan dalam capaian IID. Pada tahun 2023, NTT masuk dalam kategori "**Inovatif**" berdasarkan penilaian Kemendagri, dengan berbagai inisiatif seperti digitalisasi layanan administrasi kependudukan, model integratif pengentasan stunting berbasis desa, serta pendekatan *cross-sectoral* dalam program *Kupang Hijau*.

Meski demikian, sejumlah tantangan masih harus diatasi, di antaranya:

- **Keterbatasan SDM inovatif** di tingkat perangkat daerah, khususnya dalam perencanaan dan pengelolaan program lintas sektor.
- **Minimnya alokasi anggaran riset dan pengembangan (R&D)** sebagai pondasi lahirnya inovasi berbasis bukti.
- **Kurangnya sistem insentif dan replikasi inovasi** dari kabupaten/kota di tingkat provinsi.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi NTT perlu memperkuat ekosistem inovasi melalui penguatan regulasi daerah (Pergub No. 109 tahun 2023 tentang Inovasi Daerah)), pelatihan SDM, pengembangan *innovation hub*, serta integrasi inovasi ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran.

c. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)

- **Definisi dan Dimensi IDSD**

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen yang disusun oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Kementerian Koordinator Perekonomian, yang mengukur kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya dan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. IDSD berperan sebagai cermin kapasitas struktural suatu daerah dalam menghadapi tekanan global dan mengoptimalkan potensi lokal.

Dimensi utama IDSD meliputi:

- **Ekonomi**, seperti struktur PDRB, produktivitas tenaga kerja, investasi, dan diversifikasi sektor unggulan.
- **Sumber Daya Manusia**, termasuk pendidikan, kesehatan, dan pengembangan keterampilan.
- **Infrastruktur**, baik konektivitas fisik maupun digital.
- **Institusi dan Tata Kelola**, termasuk transparansi, efektivitas birokrasi, dan kualitas perencanaan.
- **Sosial dan Budaya**, mencakup kohesi sosial, partisipasi publik, dan toleransi.

- **Posisi dan Tantangan IDSD di NTT**

Dalam laporan IDSD 2024, Provinsi NTT masih tergolong dalam klaster daya saing **menengah ke bawah**. Beberapa catatan penting dari hasil penilaian tersebut antara lain:

- **Tingkat produktivitas ekonomi daerah yang masih rendah**, ditandai dengan dominasi sektor informal dan ketergantungan pada sektor primer.

- **Ketimpangan pembangunan antarwilayah**, di mana kawasan-kawasan seperti Pulau Timor dan Sumba lebih berkembang dibanding wilayah kepulauan kecil lainnya.
- **Rendahnya literasi digital**, yang berdampak pada terbatasnya pemanfaatan teknologi dalam peningkatan nilai tambah ekonomi.

Namun demikian, NTT memiliki potensi besar untuk meningkatkan daya saing melalui sektor pariwisata alam dan budaya, pertanian berkelanjutan, dan energi terbarukan. Inovasi kebijakan yang berbasis potensi lokal—misalnya pemanfaatan Faloak dalam industri herbal kesehatan atau tenun ikat sebagai ekonomi kreatif berbasis budaya—merupakan contoh konkret integrasi antara inovasi dan daya saing.

d. Integrasi IID dan IDSD dalam Perencanaan Pembangunan NTT

Mengintegrasikan Indeks Inovasi Daerah dan Indeks Daya Saing Daerah ke dalam dokumen RKPD bukan hanya sebatas memasukkan indikator atau skor, tetapi menjadikannya sebagai alat strategis untuk:

1. **Menyusun prioritas pembangunan yang berbasis bukti dan kapasitas nyata daerah.**
2. **Mendorong kolaborasi antar-OPD dan antar-pelaku pembangunan (masyarakat, akademisi, dunia usaha).**
3. **Membangun sistem monitoring yang berbasis indikator kinerja inovasi dan daya saing.**

   Penting pula untuk menjadikan IID dan IDSD sebagai dasar dalam *review* tahunan RPJMD dan RAD (Rencana Aksi Daerah) lintas sektor. Dengan demikian, indikator kinerja tidak hanya menilai output fisik, tetapi juga kualitas pendekatan dan keberlanjutan dampaknya.

e. Penutup

IID-IGA dan IDSD bukanlah dua entitas yang terpisah. Justru, inovasi merupakan katalis bagi daya saing, sementara daya saing adalah refleksi dari keberhasilan inovasi yang terstruktur dan terlembaga. Dalam konteks NTT, kedua indeks ini harus menjadi rujukan utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah. Bapperida sebagai institusi perencana strategis, memiliki peran sentral dalam mentransformasikan data dan instrumen ini menjadi kebijakan yang

Tabel. 4.18 Profil Pencapaian Inovasi Daerah Provinsi NTT
Tahun 2020-2024

CAPAIAN INDEKS INOVASI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH NTT TAHUN 2020-2024

NO	KABUPATEN	2020		2021		2022		2023		2024	
		SKO	KATEGORI	SKO	KATEGORI	SKO		SKOR	KATEGORI	SKO	
1	Lembata	35	kurang inovatif	24.17	kurang inovatif	0	tidak dapat dinilai	37.70	inovatif	38.26	inovatif
2	Alor	56	kurang	3.20	kurang inovatif	9.10	kurang	10.90	kurang inovatif	15.00	kurang
3	Flotim	3	kurang	47.88	inovatif	1.80	kurang	41.98	inovatif	42.33	inovatif
4	Sikka	46	kurang	23.29	kurang inovatif	43.36	inovatif	41.99	inovatif	34.73	kurang
5	Ende	38	kurang	10.40	kurang inovatif	0.40	kurang	19.98	kurang inovatif	15.80	kurang
6	Nagekeo	12	kurang	2.80	kurang inovatif	52.80	inovatif	24.44	kurang inovatif	21.44	kurang
7	Ngada	0	tidak dapat dinilai	11.20	kurang inovatif	41.96	inovatif	41.70	inovatif	33.26	kurang inovatif
8	Manggarai Timur	0	tidak dapat dinilai	48.02	inovatif	5.40	kurang inovatif	7.50	kurang inovatif	11.80	kurang inovatif
9	Manggarai	0	tidak dapat dinilai	49.63	inovatif	47.56	inovatif	36.56	inovatif	51.84	inovatif
10	Manggarai Barat	0	tidak dapat dinilai	55.96	inovatif	54.65	inovatif	44.60	inovatif	53.22	inovatif
11	Sumba Barat	6	kurang	0.80	kurang inovatif	35.22	inovatif	43.05	inovatif	42.49	inovatif
12	Sumba Barat Daya	57	kurang inovatif	52.81	inovatif	39.60	inovatif	47.82	inovatif	31.02	kurang inovatif
13	Sumba Tengah	3	kurang inovatif	29.88	kurang inovatif	41.96	inovatif	21.54	kurang inovatif	27.83	kurang inovatif
14	Sumba Timur	32	kurang	58.36	inovatif	46.88	inovatif	53.97	sangat inovatif	65.84	sangat
15	Sabu	0	tidak dapat dinilai	15.04	kurang inovatif	33.98	kurang inovatif	35.38	inovatif	32.27	kurang inovatif
16	Rote	1.018	sangat	34.86	inovatif	36.11	inovatif	39.48	inovatif	40.18	inovatif
17	Kupang	21	kurang	27.08	kurang inovatif	38.76	inovatif	35.08	inovatif	37.80	inovatif
18	Kota Kupang	688	inovatif	47.34	inovatif	43.24	inovatif	19.44	kurang inovatif	13.30	kurang
19	TTS	24	kurang	3.56	kurang inovatif	12.50	kurang	37.47	inovatif	36.69	inovatif
20	TTU	0	tidak dapat dinilai	37.56	inovatif	43.20	inovatif	25.13	kurang inovatif	40.61	inovatif
21	Belu	174	kurang	54.04	inovatif	46.08	inovatif	49.28	inovatif	9.40	kurang
22	Malaka	0	tidak dapat dinilai	5.60	kurang inovatif	45.40	inovatif	16.84	kurang inovatif	9.00	kurang inovatif
23	Provinsi NTT	3.831	sangat	53.38	inovatif	59.76	inovatif	62.53	sangat inovatif	50.10	inovatif

Pemetaan IID/IGA Provinsi NTT setiap tahun disusun sesuai dengan acuan atau petunjuk dari Kemendagri untuk mendapatkan posisi inovasi NTT secara nasional. Hasil pemetaan IID/IGA secara nasional akan memberikan informasi tentang posisi Provinsi NTT yang memotivasi setiap *stakeholder* untuk meningkatkan produktivitas, kemajuan, persaingan, dan kemandirian NTT.

Menciptakan iklim inovasi dan situasi kerja inovatif menjadi hal yang mutlak untuk dikejar dalam setiap pelayanan dan pelaksanaan pemerintahan. Dengan cara kerja inovatif dan didukung dengan model pembangunan *Penta Helix* dalam sistem inovasi daerah, maka semua potensi pemerintah dapat diarahkan secara lebih fokus untuk kesehjateraan masyarakat NTT. Oleh karena itu, diharapkan agar informasi capaian IID/IGA Provinsi NTT ini dapat menjadi yang sekaligus menjadi acuan komplementer untuk bertindak bagi semua pihak yang melaksanakan aktivitas pembangunan di Provinsi NTT.

Sejalan dengan hal tersebut, penyelenggaraan pemerintahan pada era desentralisasi (otonomi daerah) telah memberikan harapan besar terhadap upaya peningkatan kemandirian daerah yang berimplikasi pada peningkatan kualitas pelayanan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat ke arah yang lebih baik. Agar Pemerintah Daerah dapat mandiri dalam mensejahterakan masyarakatnya, untuk itu Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih profesional dalam mengelola seluruh sumber daya yang dimilikinya, karena itu pemerintah daerah dituntut membuat kebijakan yang kreatif dan inovatif disesuaikan dengan karakteristik, kemampuan serta kearifan lokal di daerahnya masing-masing.

Terkait dengan itu, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diatur secara tegas tentang inovasi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk berinovasi tanpa harus ada kekawatiran timbulnya masalah hukum apabila inovasi yang dilakukan pemerintah daerah tidak selesai/gagal. Untuk mempercepat implementasi inovasi daerah, selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan juga Permendagri Nomor 104 Tahun 2018.

Inovasi daerah adalah pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sedangkan indeks inovasi daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri. Dari pengertian tersebut mengandung makna bahwa Pemerintah Daerah harus melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, cara-cara penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kebiasaan yang selama ini terjadi harus sudah ditinggalkan karena akan tergilas oleh kemajuan jaman. Disamping itu juga memberikan dorongan agar masing-masing daerah berlomba-lomba membuat kebijakan yang inovatip untuk mensejahterakan masyarakatnya.

Karena itulah maka, implementasi inovasi daerah yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Pemerintah Daerah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri, untuk dinilai diberikan skor dan akan disusun peringkat daerah inovatif. Untuk menumbuh kembangkan semangat berinovasi, hasil penilaian inovasi daerah akan dipilih daerah pemenang inovasi dan diberikan penghargaan oleh Menteri Dalam Negeri, selanjutnya akan diberikan dana insentif daerah bidang inovasi sesuai peraturan perundangan. Untuk menjamin efektifitas, transparansi dan keakuratan penilain, maka pengisian data inovasi dilakukan secara elektronik.

Dengan cara begitu, diharapkan akan diperoleh Nilai-nilai strategis implementasi inovasi daerah antara lain adalah:

1. Memperkuat Kemandirian Daerah. Setiap Pemerintah Daerah diharapkan mampu dan mandiri dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Di tengah keterbatasan sumber daya, Pemda harus kreatif dan inovatif dalam menyediakan pelayanan publik dan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah yang mandiri, pasti akan lebih survive. Tanpa inovasi, daerah akan ketinggalan
2. Membangun Citra Positif Pemerintah Daerah. Kesungguhan dan kerja keras Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat melalui kreativitas dan inovasi, akan meningkatkan kepercayaan dan dukungan masyarakat serta terbentuk citra positif pemerintah daerah di hati rakyat.
3. Mendorong Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah untuk melakukan kreativitas dan inovasi serta berkinerja lebih baik demi kesejahteraan masyarakatnya.

Selama periode 2021-2024, terdapat Inovasi unggulan Daerah Provinsi NTT yang sudah dilaksanakan antara lain TJPS (Tanam Jagung

Panen Sapi), Pemberdayaan Kelompok Perempuan Bambu dan Revitalisasi Teknologi Tepat Guna Noelbaki.

Selanjutnya untuk fokus inovasi pada tahun 2025, ditekankan pada 10 apek membudayakan inovasi dengan penjelasan sebagai berikut:

1. POLA PEMECAHAN MASALAH
   Merubah pola pemecahan masalah pemerintahan dengan cara-cara baru yang lebih solutif, inovatif, efektif dan efisien.
2. KEBIJAKAN KEPALA DAERAH
   Kebijakan Kepala Daerah yang dapat mewajibkan berinovasi bagi setiap perangkat daerah (misal: satu opd 3 inovasi / one innovation one program yang di tindaklanjuti secara terukur melalui komitmen kinerja inovasi. Pemerintah Provinsi NTT telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah.
3. EVALUASI
   Evaluasi terhadap komitmen kinerja inovatif secara berkala dan komprehensif pada tiap perangkat daerah.
4. KOORDINASI
   Komukasi dan koordinasi baik horizontal dan utamanya secara vertikal dengan pemerintah pusat terkait inovasi daerah.
5. *MARKETING*
   Marketing dan Branding Inovasi Daerah dalam meningkatkan manfaat dan dampak.
6. KOMPETISI DAN KOLABORASI
   Kompetisi dalam penciptaan inovasi daerah dan kolaborasi dalam penerapan inovasi daerah (win win solution). Kompetisi dilakukan bukan saja melalui IGA namun juga dilakukan di tingkat Pemerintah Daerah Provinsi NTT dengan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemprov NTT dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota melalui Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KOIN YANLIK).
7. MANAJEMEN INOVASI
   Perbaikan menejemen inovasi daerah melalui peningkatan kapasitas organisasi kelitbangan dan sumber daya manusia serta menejemen pengelolaan inovasi yang merujuk pd kematangan inovasi dengan tolok ukur 36 indikator Indeks Inovasi Daerah.
8. *SUSTAINABLE INOVASI*
   Inovasi yang berkelanjutan melalui update dan upgrade inovasi untuk menjaga ritme keberlanjutan inovasi dan memperluas dampak inovasi. Inovasi bukan hanya intervensi namun mengembangakan inovasi yang sudah ada agar bermanfaat lebih adalah inovasi.
9. *INNOVATION HUB*
   Membentuk innovation hub sebagai wadah interaksi antar aktor inovasi dalam mengembangkan inovasi pemerintah daerah.
10. INDIKATOR KINERJA UTAMA
    Menjadikan nilai indeks inovasi sebagai indikator kinerja utama (iku) Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dengan menetapkan nilai satuan inovasi sebagai capaian dalam pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah.

Dari kesepuluh aspek tersebut, aspek yang paling menjadi perhatian dan capaiannya masih rendah yaitu pada bagian sustainable innovation dan *Innovation Hub* sehingga dapat menjadi prioritas untuk didorong capaiannya pada tahun mendatang.

Salah satu inovasi unggulan yang telah/sedang dilaksanakan adalah Padu Padan Data Mikro Kemiskinan (P3KE, REGSOSEK, DTKS) dengan data sektoral

perangkat daerah dan instasi lainnya (PAPADANKE) dengan uraian sebagai berikut:

A. Input

1. Regulasi
   - Inpres 4 tahun 2022 tentang percepatan penurunan kemiskinan ekstrem
   - Permendagri 53 tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota
   - Keputusan Kepala BAPPELITBANGDA Provinsi NTT nomor BP4D.050.13/SK/PPM.039.01/2024 tentang Tim Fasilitator Inovasi Padu Padan Data P3KE dan Data Sektoral Perangkat Daerah
2. Anggaran
   - DPA BAPPELITBANGDA NTT TA 2025 dengan dukungan Skala dan Usaid Erat
3. SDM
   - ASN Pada BAPPELITBANGDA Provinsi NTT sebanyak 10 orang sesuai SK Kepala BAPPELITBANGDA nomor BP4D.050.13/SK/PPM.039.01/2024 tentang Tim Fasilitator Inovasi Padu Padan Data P3KE dan Data Sektoral Perangkat Daerah
4. Sarana Prasarana
   Teknis Padu Padan Data menggunakan aplikasi STATA yang telah didownload oleh masing-masing fasilitator

B. Proses

Padu padan data dilakukan dengan beberapa tahapan:

1. Mensosialisasikan tujuan padu padan data kepada OPD pengampu kemiskinan;
2. Menginformasikan kepada 11 Perangkat Daerah Pengampuh Kemiskinan (Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Peternakan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Dinas KOPNAKETRANS, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) untuk melaporkan kepada sekretariat TKPK (BAPPELITBANGDA) penerima manfaat program/kegiatan penanggulangan kemiskinan/kemiskinan ekstrem By Name By Address (BNBA) berserta NIK;
3. Memadu madankan data penerima manfaat tersebut dengan data P3KE;
4. Mendapatkan output hasil padu padan;
5. Integrasi output padu padan dengan dashboard satu data NTT.

C. Masalah

Hasil simulasi yang dilakukan oleh Sekkretariat TNP2K menunjukkan bahwa target penurunan kemiskinan ekstrem dapat tercapai pada tahun 2024 melalui konvergensi program dan perbaikan sasaran. Konvergensi program dapat terjadi jiika koordinasi antar Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah serta pemerintah desa berjalan baik dan menggunakan sumber data yang sama. Berdasarkan pembelajaran intervensi penanggulangan kemiskinan ekstrem tahun 2023, Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem membutuhkan data yang akurat dan memiliki ranking kesejahteraan untuk secara tepat mensasar rumah tangga ekstrem. Namun demikian, untuk intervensi program kegiatan di tingkat provinsi NTT, terdapat salah satu persoalan mendasar yaitu data penerima

manfaat yang berasal dari data sektoral perangkat daerah. Oleh karena itu padu padan data menjadi salah satu alternatif sebagai bahan evaluasi targeting TKPK NTT untuk mengetahui berapa banyak masyarakat miskin/miskin ekstrem yang tercover dalam intervensi pemerintah.

D. Output

Output dari inovasi ini adalah untuk mengetahui berapa banyak masyarakat miskin/miskin ekstrem yang tercover dalam intervensi pemerintah khususnya intervensi oleh 11 OPD Pengampu kemiskinan di lingkup pemerintah provinsi NTT.

E. Outcome

Outcome yang diharapkan dari padu padan data ini adalah semakin banyak masyarakat miskin khususnya desil 1 dan 2 yang tercover dalam program penanggulangan kemiskinan *(exclusion error)* dan berkurangnya masyarakat yang terindikasi tidak miskin tetapi masih mendapat program penanggulangan kemiskinan *(inclusion error)* dan pada akhirnya dapat mengurangi tingkat kemiskinan di NTT.

Selain IGA, pemprov NTT juga melaksanakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KOIN-YANLIK) melalui Biro Organisasi Setda Provinsi NTT dengan dukungan USAID ERAT NTT. Terdapat beberapa catatan pelaksanaan KOIN-YANLIK 2023 antara lain:

1. Meningkatnya peran Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah Provinsi dalam keikutsertaan KOIN-YANLIK
2. Meningkatnya komitmen dari Kabupaten/Kota dengan hadirnya Bupati,Pj.Bupati/Pj.Walikota Kupang,Sekda dan Asisten Sekda pada tahap presentase dan wawancara KOIN-YANLIK
3. Penetapan TOP 20 Inovasi dan TOP 10 Inovasi KOIN-YANLIK Tahun 2023
4. Pendaftaran Inovasi berbasis WEB.

Maksud dan Tujuan Penyelennggaraan KOIN-YANLIK Sebagai Berikut:

a. Maksud
   Maksud dari penyelenggaraan KOIN-YANLIK adalah untuk mendorong persaingan yang positif antar penyelenggara pelayanann publik di linngkungan Pemerinntah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerinntah Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam meningkatkan Pelayanan dan Pembangunnan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
b. Tujuan
   Penyelenggaraan KOIN-YANLIK bertujuan untuk:
   1. Menjaring, mendokumentasikan, mendiseminasikan, dan mempromosikann Inovasi sebagai upaya percepatann penningkatan kualitas pelayanan publik;
   2. Menjadi sarana pertukaran pengalaman dan pembelajaran dalam rangka pengembangan Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Nusa Tenggara Timur;
   3. Memotivasi penyelenggaraan pelayanan public untuk meningkatkan inovasi dan perfesionalisme dalam pemberian pelayanan publik;
   4. Meningkatkan citra penyelenggara pelayanan publik;
   5. Memberikan apresiasi dan penghargaan agi penyelenggara pelayanan public yang inovasi pelayanan publiknya ditetapkan sebbagai Top Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
   6. Menjadi sarana pertukaran pengalaman dan pembelajaran.

Adapun yang menjadi Top 10 Inovasi Pelayanan Publik KOIN-YANLIK termuat dalam tabel 4.19 berikut:

Tabel 4.19 Top 10 Inovasi KOIN-YANLIK Provinsi NTT Tahun 2024

No	Judul Inovasi	Pengusul
1	Alat Tenun Lepas Pasang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT UPTD SMKN Kupang
2	Gerakan Masyarakat Sehat Jiwaku (Gema Sejiwaku)	UPT Puskesmas Tana Rawa Kabupaten Sikka
3	Jalan Lain Desa Tubu Menuju Sejahtera (Jalin Satu Mesra)	Bumdes Pala Opat Desa Tubu, Kecamatan Bikomi Nilulat Kabupaten Timor Tengah Utara
4	Lapor Pak Lurah	Kelurahan Balela Kabupaten Flores Timur
5	Mangrover SMANTIG BERSINAR	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT UPTD SMA 3 Waingapu
6	Pelopor Karakter Nilai Canossa (PKNC)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang (SD Katolik Canossa)
7	SIMPONIVET	UPYD Veteriner Dinas Peternakan Provinsi NTT
8	Spenia Peduli Bumi, Sampahku Tanggung Jawabku.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang UPTD SMP Negeri 8 Kupang
9	Tane Hoe	SMPK St. Isidorus Lewotala Kubupaten Flores Timur
10	Tapenpah Just Klik (TAJUK)	Pemerintah Desa Taperiah Kecamatan Insana Kabupaten Timor Tengah Utara

10 inovasi tersebut selanjutnya diprioritaskan untuk mengkuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) di tingkat Nasional. Selanjutnya, di tahun 2025 akan dilaksanakan beberapa kegiatan serupa yaitu KOIN-YANLIK dengan pendaftaran berbasis WEB dengan tetap mengedepankan aspek keberlanjutan dan revitalisasi WEB Lopo Inovasi Flobamorata.

BAB V
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

Bab ini berisi rencana kerja pembangunan daerah yang secara lebih mendetail mencakup arahan kebijakan umum Pembangunan kabupaten/Kota yang perlu dilaksanakan pada Tahun rencana 2026. Bab III dan Bab V dalam RKPD Provinsi NTT Tahun 2026 memiliki hubungan yang erat dan saling melengkapi. Keduanya berfokus pada aspek perencanaan pembangunan daerah, namun dari sudut pandang yang berbeda. Apabila pada Bab III bertugas menganalisis kondisi ekonomi dan keuangan daerah saat ini, dan memproyeksikan kondisi ekonomi dan keuangan daerah ke depan, Bab V bertugas memberikan arahan kepada Kabupaten Kota terkait target-target makro Pembangunan yang akan memberikan kontribusi terhadap capaian target Pembangunan NTT secara agregat, dan arahan kebijakan Pembangunan yang perlu dilaksanakan Kabupaten/Kota dalam rangka memenuhi target-target tersebut.

5.1. TARGET INDIKATOR MAKRO KABUPATEN/KOTA SE-NTT

Arah Kebijakan Pembangunan Kota Kupang

Kota kupang adalah wilayah perkotaan dengan dominasi aktivitas sektor jasa, karena “keuntungan”nya sebagai ibukota Provinsi NTT. Kota Kupang juga menunjukkan performa yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten lain yang ada di NTT. Indikator-indikator makro ekonomi utama daerah pada Kota Kupang umumnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten lain di NTT. Pada Tahun rencana 2026, Kota Kupang diharapkan meneruskan performanya, sambil dapat memberikan dampak positif kepada wilayah-wilayah lain yang berada di sekitarnya. Kota Kupang juga harus bisa menjadi pusat *demand*, mampu menyerap komoditas dan produk yang telah dihasilkan oleh kabupaten/kota di NTT. Dengan denikian, Kota Kupang harus menjadi pusat pengolahan sekaligus pemasaran bagi produk unggulan yang dihasilkan di NTT. Hal ini memungkinkan dengan karakteristik Kota Kupang yang sudah bergerak ke arah jasa dan perdagangan, serta sarana prasarana infrastruktur yang tersedia, seperti transportasi darat, udara dan laut, listrik, air, dan telekomunikasi (IT). Adapun target indikator Pembangunan makro yang ditetapkan untuk kota Kupang pada Tahun rencana 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel. 5.1 Target Indikator Pembangunan Makro Kota Kupang

Tahun 2026

Indikator makro	Target 2026
Pertumbuhan ekonomi (%)	7
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	8,02
Tingkat Kemiskinan (%)	7,31
Indeks Pembangunan Manusia (Point)	85,19

Sumber data olahan Bapperida Prov NTT dari RPD Prov NTT 2024-2026

Pada Tahun rencana 2026, Ekonomi Kota Kupang diproyeksikan tumbuh sebesar 7%, tingkat pengangguran terbuka diproyeksikan akan berada pada kisaran 8,02%, dan persentase penduduk miskin yang pada Tahun 2023 tercatat sebesar 8,61% diproyeksikan dapat ditekan menjadi 7,31 % dari total populasi. Pada Tahun rencana 2026, IPM Kota Kupang diproyeksikan akan

mencapai 85,19 capaian yang memang sangat jauh jika dibandingkan dengan Kabupaten lain yang ada di NTT.

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kupang

Kabupaten Kupang merupakan salah satu kabupaten di NTT dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang besar. Pada Tahun 2023, jumlah penduduk di Kabupaten Kupang mencapai ±376 ribu jiwa atau merupakan Kabupaten ke dua di NTT dengan jumlah penduduk terbesar, setelah kabupaten Timor Tengah Selatan. Posisi geografisnya yang berdekatan dengan Kota Kupang sebagai pusat pemerintahan dan pusat bisnis di NTT dapat memberikan keuntungan tersendiri bagi Kabupaten Kupang untuk dapat meningkatkan produktivitas ekonominya dan mendorong meningkatnya kesejahteraan Masyarakat. Luas wilayah Kabupaten Kupang yang besar juga merupakan salah satu keuntungan tersendiri. Kabupaten Kupang diarahkan untuk pengembangan peternakan, khususnya sapi dan babi, juga unggas, khususnya ayam. Usaha-usaha pertanian juga memiliki potensi besar untuk dikembangkan pada Kabupaten ini seperti pengembangan hortikultura dan tanaman pangan (jagung dan padi) dan pengembangan pertanian lahan kering mengingat situasi hidrologi dan klimatologi di wilayah ini yang kering. Pengembangan perikanan baik perikanan laut dan perikanan darat juga potensial di kembangkan di Kabupaten Kupang. Kabupaten Kupang merupakan salah satu penghasil rumput laut dengan kualitas tinggi di NTT. Pembangunan Observatorium Timau di Amfoang bisa menjadi salah satu keunggulan untuk pengembangan wisata Langit Gelap, selain potensi wisata lainnya. Upaya-upaya untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat –tetap harus dilakukan mengingat masih banyak penduduk miskin di daerah ini. Pada Tahun 2023, di Kabupaten Kupang tercatat persentase penduduk miskin mencapai 28,08%.

Target makro Pembangunan daerah untuk Kabupaten Kupang pada Tahun rencana 2026 adalah sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel. 5.2 Target Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Kupang Tahun 2026

Indikator Makro	Target 2026
Pertumbuhan ekonomi (%)	5,41
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	2,47
Tingkat Kemiskinan (%)	18,21
Indeks Pembangunan Manusia	63,60 – 63,89

Sumber data olahan Bapperida Prov NTT dari RPD Prov NTT 2024-2026

Pada Tahun 2026, ekonomi Kabupaten Kupang diproyeksikan akan tumbuh sebesar 5,41%. Tingkat pengangguran terbuka diproyeksikan akan turun menjadi 2,47% dan tingkat kemiskinan dapat ditekan menjadi 18,21% % turun dari 21,78% pada Tahun 2023. Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kupang diproyeksikan akan berada pada kisaran 63,60 – 63,89.

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Timor Tengah Selatan

Kabupaten Timor Tengah Selatan merupakan wilayah yang sangat luas, dengan jumlah Angkatan kerja yang besar ditambah dengan potensi pengembangan pertanian dan peternakan yang juga besar mengingat situasi geografis dan iklim yang relatif mendukung. Kabupaten TTS diarahkan untuk pengembangan pertanian khususnya tanaman pangan (padi, jagung), perkebunan dan pengembangan peternakan khususnya sapi. Untuk Tahun 2026, pengentasan dan pencegahan wabah rabies juga menjadi prioritas.

Pendayagunaan potensi Kabupaten TTS dengan baik dipercaya akan memberi daya dorong yang besar terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pengentasan kemiskinan yang masih tinggi di Kabupaten ini (pada Tahun 2023 tercatat persentase penduduk miskin di TTS mencapai 25,18%. Kabupaten TTS ditargetkan untuk dapat mencapai target makro Pembangunan pada Tahun rencana 2026 sebagai berikut :

Tabel. 5.3 Target Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2026

Indikator makro	Target 2026
Pertumbuhan ekonomi (%)	4,50 – 5,00
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	1,03 – 0,71
Tingkat Kemiskinan (%)	24,64 – 24,37
Indeks Pembangunan Manusia	63,60,63,89

Sumber data olahan Bapperida Prov NTT dari RPD Prov NTT 2024-2026

Ekonomi Kabupaten TTS pada Tahun rencana 2026 diproyeksikan tumbuh sebesar 4,50 – 5,00 % dari Tahun 2024. Tingkat pengangguran terbuka juga diharapkan dapat ditekan menjadi 1,03% – 0,71%. Persentase penduduk miskin yang besar di daerah ini, yaitu sebesar 25,18% pada Tahun 2023 diproyeksikan akan dapat ditekan menjadi 24,64% - 63,89% pada Tahun rencana 2026.

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Timor Tengah Utara

Seperti wilayah lain di daratan Timor, situasi *hidrologi* dan klimatologi Timor Tengah Utara mendukung bagi pertumbuhan vegetasi yang mendukung usaha-usaha pertanian, perkebunan dan peternakan besar seperti Sapi,kerbau dan Kuda. Usaha-usaha pertanian dan peternakan dipercaya akan dapat memerikan kontribusi terhadap upaya meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Pada Tahun 2026 kabupaten Timor Tengah Utara ditargetkan untuk dapat mencapai target-target makro berikut ini.

Tabel. 5.4 Target Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2026

Indikator makro	Target 2026
Pertumbuhan ekonomi (%)	3,25
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	1,8
Tingkat Kemiskinan (%)	20,49
Indeks Pembangunan Manusia	66,1

Sumber data olahan Bapperida Prov NTT dari RPD Prov NTT 2024-2026

Ekonomi TTU pada Tahun rencana 2026 diproyeksikan akan mencapai 3,25% dengan tingkat pengangguran terbuka ditekan menjadi 1,8% . persentase penduduk miskin di daerah ini yang cukup tinggi yaitu sebesar 21,85% pada Tahun 2023 dapat ditekan menjadi 20,49% pada Tahun rencana 2026. Indeks pembangunan manusia di TTU diproyeksikan berada pada kisaran 66,1

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Belu

Kabupaten Belu termasuk salah satu kabupaten di NTT yang memiliki catatan perkembangan indikator Pembangunan yang relatif baik dari Tahun ke Tahun sehingga potensial untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan baru. Situasi yang mendukung perkembangan positif dari Belu antara lain lokasinya yang merupakan salah satu Kabupaten terdepan yang berbatasan langsung dengan Negara Tetangga Timor Leste. Posisi geopolitik yang strategis

yang membuat Kabupaten ini cenderung lebih cepat berkembang dibandingkan dengan Kabupaten tetangga. Selain potensi geo-politik dan geo-ekonomi nya yang strategis, kabupaten Belu memiliki potensi pengembangan pertanian, peternakan dan kelautan perikanan. Belu juga potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu destinasi wisata penting di NTT mengingat daya tarik alam dan wisata minat khusus (wisata religi) yang dimilikinya. Oleh karena performa yang ditunjukkan oleh Kabupaten Belu, maka pada Tahun 2026, target indikator makro Pembangunan kabupaten Belu adalah sebagaimana terlihat dalam tabel berikut

Tabel. 5.5 Target Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Belu Tahun 2026

Indikator makro	Target 2026
Pertumbuhan ekonomi (%)	5,1
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	2
Tingkat Kemiskinan (%)	14,7
Indeks Pembangunan Manusia	64,51

Sumber data olahan Bapperida Prov NTT dari RPD Prov NTT 2024-2026

Ekonomi Kab. Belu diproyeksikan akan tumbuh sebesar 5,1 % pada Tahun rencana 2026. Tingkat pengangguran terbuka diproyeksikan turun menjadi 2% dan tingkat kemiskinan dapat ditekan menjadi 14,7%. IPM belu diproyeksikan tumbuh menjadi 64,51.

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Malaka

Malaka merupakan kabupaten “bungsu” di Provinsi NTT, mekar dari kabupaten Induk Belu pada Tahun 2013 seperti juga belu dan TTU, malaka merupakan salah satu kabupaten di NTT yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Timor Leste. Oleh karena merupakan daerah otonom baru, infrastruktur pembangunan belum se “siap” kabupaten-kabupaten tetangganya, sehingga berpengaruh terhadap capaian daerah ini yang sedikit lebih rendah dibandingkan dengan daerah tetangga. Namun dengan memanfaatkan potensi yang dimilikinya, diantara-nya adalah potensi pertanian dan peternakan yang relatif besar, Kabupaten Malaka akan segera dapat mengejar ketertinggalannya. Pada Tahun 2026, kabupaten Malaka dipercaya akan dapat merealisasikan target-target makro pembangunan sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel. 5.6 Target Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Malaka Tahun 2026

Indikator makro	Target 2026
Pertumbuhan ekonomi (%)	3,73 - 3,94
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	3,32 - 3,50
Tingkat Kemiskinan (%)	15,29 – 10,00
Indeks Pembangunan Manusia	63,21 - 65,00

Sumber data olahan Bapperida Prov NTT dari RPD Prov NTT 2024-2026

Pada Tahun rencana 2026, ekonomi Malaka diproyeksikan tumbuh cepat sebesar 3,73% - 3,94% dan tingkat pengangguran terbuka diproyeksikan turun manjadi 3,32% – 3,50%. Tingkat kemiskinan di Malaka diproyeksikan turun menjadi 15,29% - 10,00% dan Indeks Pembangunan Manusia meningkat menjadi 63,21 – 65,00.

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Manggarai Barat

Manggarai Barat merupakan Kabupaten yang berbatasan langsung dengan provinsi tetangga, Nusa Tenggara Barat. Kabupaten paling barat di Nusa Tenggara Timur ini lebih dikenal karena potensi pariwisata yang dimilikinya. Tidak juga mengherankan jika kabupaten Manggarai barat meskipun merupakan kabupaten yang relatif "baru" (mekar dari Kabupaten Induk Kabupaten Manggarai pada Tahun 2003), namun maju sangat pesat, mengingat karena selain ditetapkan sebagai kawasan pariwisata super premium, proyek-proyek strategis nasional banyak yang berlokasi di Manggarai Barat.

Selain pariwisata, potensi pertanian, khususnya pertanian tanaman pangan di Kabupaten Manggarai Barat juga harus dikembangkan. Manggarai Barat juga bisa bekerja sama dengan kabupaten tetangga untuk bisa memenuhi kebutuhan pangan untuk pariwisata. Kabupaten manggarai Barat harus bersama Kota Kupang dan Kabupaten Belu harus bisa menjadi pusat *demand* yang menyerap produk yang dihasilkan di Provinsi NTT.

Untuk bisa seperti ini, maka perlu menjaga dan menetapkan kawasan peruntukan untuk pertanian, sekaligus juga memperbaiki kapasitas sumber daya manusia di Kabupaten Manggarai Barat, dengan memperbaiki tingkat pendidikan tenaga kerja di Kabupaten Manggarai Barat, baik melalui sekolah formal, maupun dengan pendidikan vokasi dan keahlian tenaga kerja sesuai yang dibutuhkan pasar kerja. Dengan demikian kebutuhan tenaga kerja terampil di Kabupaten Manggarai Barat bisa dipenuhi dari Kabupaten Manggarai Barat dan sekitarnya.

Menimbang kinerja pembangunan selama ini, target makro pembangunan Kabupaten Manggarai Barat pada Tahun 2026 adalah sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel. 5.7 Target Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2026

Indikator makro	Target 2026
Pertumbuhan ekonomi (%)	5,87
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	3
Tingkat Kemiskinan (%)	16,13
Indeks Pembangunan Manusia	69

Sumber data olahan Bapperida Prov NTT dari RPD Prov NTT 2024-2026

Ekonomi Manggarai Barat diperkirakan akan tumbuh sebesar 5,87%, tingkat pengangguran terbuka diproyeksikan dapat ditekan menjadi 3 %. Persentase penduduk miskin yang masih cukup tinggi di wilayah ini diproyeksikan dapat ditekan menjadi 16,13%, dan indeks Pembangunan Manusia ditargetkan untuk berada pada kisaran 69.

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Manggarai

Kabupaten Manggarai merupakan salah satu Kabupaten paling "tua" di NTT, yang lahir bersamaan dengan lahirnya Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi otonom, mekar dari Provinsi Sunda Kecil. Dari Kabupaten Manggarai telah mekar dua Kabupaten Otonom baru: Kabupaten Manggarai Barat dan Kabupaten Manggarai Timur. Kabupaten Manggarai yang lebih dikenal sebagai Kabupaten dengan iklim yang sejuk ini memiliki kinerja pembangunan yang relatif baik. Manggarai sendiri memiliki potensi pengembangan yang besar terutama tanaman pangan dan perkebunan. Secara tradisional Manggarai sering dianggap sebagai lumbung padi NTT. Dengan potensi pertanian dan perkebunan yang ada, Kabupaten Manggarai dapat menjalin kerja sama dengan

Kabupaten Manggarai Barat untuk memenuhi kebutuhan pariwisata akan pangan segar di Kabupaten Manggarai Barat.

Potensi Manggarai sendiri tidak terbatas pada sektor pertanian dan perkebunan. Manggarai juga memiliki potensi pengembangan wisata minat khusus karena memiliki beberapa destinasi wisata yang masih dapat dikembangkan. Karena itu, Kabupaten Manggarai dapat bekerja sama dengan Kabupaten Manggarai Barat melalui pelaksanaan event-event pariwisata dan paket pariwisata yang terintegrasi antara Kabupaten Manggarai dan Manggarai Barat, sehingga wisatawan yang datang ke Kabupaten Manggarai Barat dapat juga melanjutkan ke Kabupaten Manggarai. Selain itu, Manggarai juga memiliki Potensi energi terbarukan khsusunya panas bumi yang telah mulai di kelola.

Oleh karena potensi pengembangannya yang cukup besar, target-target makro pembangunan yang ditetapkan untuk Kabupaten Manggarai Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut, dipercaya akan dapat dicapai.

Tabel. 5.8 Target Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Manggarai Tahun 2026

Indikator makro	Target 2026
Pertumbuhan ekonomi (%)	5,23
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	2,08
Tingkat Kemiskinan (%)	17,12
Indeks Pembangunan Manusia	69,3

Sumber data olahan Bapperida Prov NTT dari RPD Prov NTT 2024-2026

Pada Tahun rencana 2026, Ekonomi Kabupaten Manggarai diproyeksikan tumbuh sebesar 5,23% dan tingkat pengangguran terbuka dapat ditekan menjadi 2,08%. Tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi di daerah ini ditargetkan turun menjadi 17,12%. Dan indeks pembangunan manusia Manggarai ditargetkan berada pada kisaran 69,3

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Manggarai Timur

Sebagai Kabupaten yang mekar paling akhir dari kabupaten Induk Manggarai, kabupaten Manggarai Timur termasuk dalam kelompok Kabupaten yang berusia relatif muda. “Konsekuensi” dari relatif mudanya usia Kabupaten Manggarai Timur ini diantara-nya adalah masih relatif minimnya infrastruktur pembangunan yang terbangun dan berfungsi dengan baik untuk dapat mendorong potensi yang besar di kabupaten agar dapat berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan kesejahteraan, dan pengentasan kemiskinan. Kabupaten Manggarai Timur sendiri memiliki potensi yang besar dalam bidang pertanian dan perkebunan. Situasi tanah dan iklim yang baik menyebabkan tanah di kabupaten Manggarai Timur subur dan cocok untuk ditanami dengan tanaman-tanaman pertanian dan perkebunan yang berharga tinggi di pasar hasil bumi.

Kabupaten Manggarai Timur juga memiliki potensi pariwisata. Dengan adanya tumbuhan teratai terbesar kedua di dunia, setelah di India, selain potensi pariwisata lainnya. Dengan potensi pengembangan yang demikian besar, Kabupaten Manggarai Timur diyakini akan dapat mencapai target pembangunan daerah Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini:

Tabel. 5.9 Target Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2026

Indikator makro	Target 2026
Pertumbuhan ekonomi (%)	5,23
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	3
Tingkat Kemiskinan (%)	16,13
Indeks Pembangunan Manusia	69

Sumber data olahan Bapperida Prov NTT dari RPD Prov NTT 2024-2026

Ekonomi Manggarai Timur diproyeksikan akan tumbuh sebesar 45,23% pada Tahun rencana 2026. Tingkat pengangguran terbuka di targetkan dapat ditekan manjadi 3% dan tingkat kemiskinan yang masih tinggi di daerah ini ditargetkan turun menjadi 16,13%. IPM Manggarai timur ditargetkan meningkat menjadi 69.

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Ngada

Seperti Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada merupakan wilayah yang memiliki potensi besar pengembangan tanaman perkebunan. Lokasi dari Kabupaten yang berada di bawah kaki Gunung Inerie memberikan keuntungan dalam bentuk tanah yang subur dan iklim yang baik yang sangat membantu dalam mengupayakan tanaman-tanaman perkebunan berharga tinggi. Selain potensi di sektor perkebunan, Ngada sendiri memiliki potensi untuk pengembangan tanaman hortikultura dan peternakan khususnya ternak babi. Selain itu, Kabupaten Ngada juga dapatdikembangkan sebagai salah satu destinasi wisata yang penting di NTT. Daya tarik alam dan adat istiadat di Ngada telah menarik ribuan turis untuk berkunjung setiap Tahunnya. Situs-situs budaya yang masih terjaga baik di Ngada masih dapat dikembangkan untuk dapat secara lebih besar memberikan dorongan bagi perkembangan industri pariwisata di daerah ini. Selain itu Penetapan Kawasan Wolobobo sebagai Kebun Raya melalui SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.438/Men.lhk/Setjen/PLA.0/6/2016 tentang Penetapan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus sebagai Kebun Raya Wolobobo untuk Hutan Penelitian, Pengembangan dan Pendidikan Lingkungan pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Ngada Provinsi NTT seluas ± 100 Ha, memberikan "keuntungan" tersendiri bagi Kabupaten Ngada, karena kawasan Kebun Raya Wolobobo juga menjadi salah satu destinasi paariwisata minat khusus, yang tidak ada di kabupaten/kota lain di Provinsi NTT. Lokasi Wolobobo yang berada di gunung tertinggi di Pulau Flores memungkinkan untuk itu.

Membesarnya pariwisata di Ngada diharapkan dapat memberikan insentif bagi berkembangnya industri kreatif di daerah ini yang akan banyak menciptakan lapangan kerja baru. Kabupaten Ngada juga termasuk dalam wilayah yang memiliki kinerja pembangunan yang cukup baik relatif sehingga diyakini akan dapat merealisasikan target makro pembangunan pada Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel. 5.10 Target Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Ngada Tahun 2026

Indikator makro	Target 2026
Pertumbuhan ekonomi (%)	5,17
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	2,58
Tingkat Kemiskinan (%)	9,54
Indeks Pembangunan Manusia	71,1

Sumber data olahan Bapperida Prov NTT dari RPD Prov NTT 2024-2026

Ekonomi Ngada ditargetkan tumbuh sebesar 5,17% pada Tahun rencana 2026 dan tingkat pengangguran terbuka ditargetkan berkisar antara 2,58%. Tingkat kemskinan di daerah ini termasuk kecil relatif dibandingkan dengan wilayah lain di NTT, dan ditargetkan turun menjadi 9,54%, sementara IPM ditargetkan berkisar antara 71,1.

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Nagekeo

Kabupaten Nagekeo merupakan Kabupaten pemekaran dari kabupaten Induk Ngada. Sebagaimana beberapa kabupaten baru yang ada di NTT, infrastruktur pembangunan yang terbangun masih belum selengkap sebagaimana yang ada di Kabupaten-Kabupaten yang sudah lama berdiri. Ini berakibat pada performa/kinerja pembangunannya yang relatif masih sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain di NTT. Meskipun demikian, Nagekeo memiliki potensi pengembangan yang tidak kalah besar. Luasan wilayah yang masih memungkinkan untuk mendorong perkebunan skala besar mengingat situasi tanahnya yang subur. Potensi pariwisata dan perikanan kelautan juga merupakan potensi yang dapat didorong untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada Tahun 2026, Negeko dipercaya akan dapat memenuhi target makro pembangunan sebagaimana tampak dalam tabel.. berikut :

Tabel. 5.11 Target Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Nagekeo Tahun 2026

Indikator makro	Target 2026
Pertumbuhan ekonomi (%)	3,52
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	3,3
Tingkat Kemiskinan (%)	12
Indeks Pembangunan Manusia	66,70

Sumber data olahan Bapperida Prov NTT dari RPD Prov NTT 2024-2026

Ekonomi Nagekeo ditargetkan tumbuh sebesar 3,52% pada Tahun rencana 2026. Tingkat pengangguran terbuka diproyeksikan turun menjadi 3,3% dan tingkat kemiskinan ditargetkan turun menjadi 12%. Indeks Pembangunan Manusia Nagekeo ditargetkan berkisar antara 66,70

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Ende

Kabupaten Ende terletak di tengah pulau Flores. Namun bukan lokasinya saja yang terletak pada sentral Flores, peran Ende dalam perdagangan di Flores juga cukup sentral. Ini tidak lepas dari lokasi dan ketersediaan infrastruktur perhubungan di Ende yang selama ini menjadi pintu masuk utama ke daratan Flores. Peran sentral Ende dalam perdagangan regional Flores menjadi salah satu modal utama dalam mengakselerasi pembangunan daerahnya selain potensi pertanian yang memang didukung oleh situasi tanah dan iklim. Kabupaten Ende juga memiliki potensi pengembangan perikanan yang besar yang dapat dimaksimalkan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mengingat angka kemiskinan yang relatif tinggi di kabupaten ini (22,86% pada Tahun 2023), dibutuhkan upaya bersama untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kemiskinan di Kabupaten ini.

Dengan performa pembangunan sepanjang beberapa Tahun terakhir, Ende dipercaya akan dapat merealisasikan target pembangunan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini.

Tabel. 5.12 Target Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Ende Tahun 2026

Indikator makro	Target 2026
Pertumbuhan ekonomi (%)	4,19
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	1,234
Tingkat Kemiskinan (%)	2,196
Indeks Pembangunan Manusia	69,01

Sumber data olahan Bapperida Prov NTT dari RPD Prov NTT 2024-2026

Kabupaten Ende ditargetkan dapat mendorong ekonominya tumbuh sebesar 4,19% pada Tahun rencana 2026. Tingkat pengangguran terbuka ditargetkan untuk dapat diturunkan menjadi 1,234% dan tingkat kemiskinan diturunkan menjadi 2,196%. Indeks Pembangunan Manusia ditargetkan dapat ditingkatkan pada kisaran 69,01 pada Tahun rencana 2026.

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Sikka

Kabupaten Sikka, berlokasi di bagian barat-tengah pulau Flores kaya akan potensi yang dapat didayagunakan untuk mendorong kemajuan dan perbaikan kesejahteraan masyarakat di daerah ini. Beberapa potensi yang dimiliki antaranya potensi pertanian yang cukup besar, terutama dalam produksi jagung, kopi, kelapa, dan kemiri. Selain itu, komoditas pertanian lainnya seperti coklat, vanili, dan padi juga dapat dikembangkan. Di sektor perikanan, Wilayah ini juga kaya akan sumber daya perikanan, baik laut maupun darat. Berbagai jenis ikan dan hasil laut lainnya menjadi potensi yang dapat dikembangkan lebih lanjut untuk meningkatkan ekonomi masyarakat setempat. Di sektor pariwisata, Kabupaten Sikka memiliki potensi pariwisata yang menarik, terutama dengan keindahan alamnya seperti pantai-pantai yang eksotis, pulau-pulau cantik, serta keberagaman budaya dan adat istiadat. Pariwisata budaya dan religi juga merupakan daya tarik tersendiri. Kabupaten Sikka adalah salah satu dari sedikit wilayah di NTT yang mulai mengembangkan industri pertaniannya, Potensi industri di Kabupaten Sikka terutama berfokus pada pengolahan hasil pertanian dan perikanan, seperti pengolahan kopi, kelapa, dan ikan. Selain itu, industri kreatif seperti kerajinan tangan juga memiliki peluang untuk dikembangkan.

Dengan potensi yang dimilikinya, Sikka dipercaya akan dapat mencapai target pembangunan pada Tahun rencana 2026 seperti yang tercantum dalam tabel berikut ini.

Tabel. 5-13 Target Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Sikka Tahun 2026

Indikator makro	Target 2026
Pertumbuhan ekonomi (%)	4,3
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	4,42
Tingkat Kemiskinan (%)	11,59
Indeks Pembangunan Manusia	67,5

Sumber data olahan Bapperida Prov NTT dari RPD Prov NTT 2024-2026

Ekonomi Sikka ditargetkan untuk tumbuh sebesar 4,3% pada Tahun 2026, dan tingkat pengangguran terbuka dapat ditekan menjadi 4,42%. Persentase penduduk miskin di daerah ini ditargetkan untuk dapat diturunkan ke level 11,59% dan Indeks Pembangunan Manusia diproyeksikan akan mencapai kisaran 67,5.

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Flores Timur

Kabupaten Flores Timur, merupakan kabupaten yang berada di daratan (*mainland*) Flores yang paling timur, memiliki potensi yang dapat dikembangkan dalam berbagai sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Flores Timur memiliki potensi pariwisata yang besar, terutama karena keindahan alamnya yang memukau, dan sejarahnya yang unik yang membuatnya menjadi destinasi wisata religi yang mungkin paling terkenal di NTT. Pengembangan infrastruktur pariwisata, akomodasi, dan fasilitas pendukung lainnya dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dan memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat setempat. Potensi pertanian di Kabupaten Flores Timur meliputi tanaman pangan seperti padi, jagung, dan ubi kayu, serta komoditas hortikultura seperti sayuran dan buah-buahan. Selain itu, potensi besar Flores Timur adalah perikanan dan kelautan. Wilayah pesisir Kabupaten Flores Timur juga kaya akan sumber daya perikanan. Pengembangan sektor perikanan melalui pembangunan pelabuhan, fasilitas pengolahan, serta peningkatan kapasitas nelayan lokal dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi daerah. Akhir-akhir ini seiring dengan membesarnya potensi pariwisata di daerah, industri kreatif di Flores Timur juga makin berkembang. Potensi industri kreatif seperti kerajinan tangan tradisional, tekstil, dan tenun ikat dikembangkan di Kabupaten Flores Timur. Dukungan dalam pengembangan keterampilan, pemasaran, dan akses pasar dapat membantu meningkatkan pendapatan bagi para pengrajin lokal.

Dengan potensi pengembangan yang besar, target capaian indikator pembangunan kabupaten Flores timur pada Tahun rencana 2026 adalah sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini

Tabel. 5-14 Target Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Flores Timur Tahun 2026

Indikator makro	Target 2026
Pertumbuhan ekonomi (%)	4,71
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	2,82
Tingkat Kemiskinan (%)	9,5
Indeks Pembangunan Manusia	66,2

Sumber data olahan Bapperida Prov NTT dari RPD Prov NTT 2024-2026

Pada Tahun rencana 2026, ekonomi Flores Timur ditargetkan untuk tumbuh sebesar 4,71% dengan tingkat pengangguran terbuka ditekan menjadi 2,82%. Tingkat kemiskinan ditargetkan menurun menjadi 9,5% dan Indeks Pembangunan Manusia meningkat di kisaran 66,2.

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Lembata

Kabupaten Lembata, terletak di sebelah timur kabupaten Flores Timur, merupakan kabupaten yang relatif muda, mekar dari induknya Kabupaten Flores Timur pada Tahun 2006. meskipun relatif muda, kabupaten Lembata memiliki potensi yang dapat dikembangkan dalam beberapa sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya.

Kabupaten Lembata memiliki potensi pertanian yang cukup menjanjikan, terutama dalam produksi tanaman pangan seperti padi, jagung, dan ubi kayu. Selain itu, komoditas pertanian lainnya seperti kelapa, kakao, dan kopi juga dapat dikembangkan lebih lanjut. Wilayah pesisir Kabupaten Lembata kaya akan sumber daya perikanan. Pengembangan sektor perikanan melalui pembangunan infrastruktur penangkapan, pengolahan, dan pemasaran ikan

dapat memberikan kontribusi besar terhadap ekonomi lokal. Selain bergantung kepada hasil bumi dan laut, terdapat potensi pengembangan Pariwisatadi daerah ini yang didukung oleh keindahan alamnya yang menakjubkan, termasuk pantai-pantai yang eksotis, pemandangan gunung, serta keberagaman budaya dan tradisi lokal. Dengan segala potensi yang dimilikinya, maka kabupaten Lembata dipercaya akan dapat mencapai target makro pembangunan Tahun rencana 2026 sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini.

Tabel. 5-15 Target Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Lembata Tahun 2026

Indikator makro	Target 2026
Pertumbuhan ekonomi (%)	5,5 – 6,75
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	1,5 – 2,00
Tingkat Kemiskinan (%)	19 – 20,0
Indeks Pembangunan Manusia	70,5

Sumber data olahan Bapperida Prov NTT dari RPD Prov NTT 2024-2026

Ekonomi Lembata ditargetkan tumbuh sebesar 5,5 – 6,75% pada Tahun rencana 2026, dengan tingkat pengangguran terbukja yang ditekan menjadi 1,5% - 2,00%. Tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi ditargetkan dapat diturunkan menjadi 19 – 20,0% sementara Indeks pembangunan Manusia diproyeksikan akan dapat mencapai kisaran 70,5.

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Alor

Kabupaten Alor adalah Kabupaten paling Timur di NTT. Kabupaten ini memiliki beragam potensi yang dapat dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya. Sebagai kabupaten kepulauan, Alor kaya akan sumber daya perikanan. Pengembangan sektor perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya, dapat memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian daerah. Dukungan untuk pengembangan infrastruktur penangkapan, pengolahan, dan pemasaran ikan akan meningkatkan potensi sektor ini. Selain itu, potensi pariwisata di daerah ini juga potensial untuk dikembangkan. Potensi pariwisata di Kabupaten Alor terletak pada keindahan alamnya yang menakjubkan, termasuk pantai-pantai yang eksotis, terumbu karang yang indah, serta budaya dan tradisi unik masyarakat lokal. Destinasi wisata seperti Pulau Alor dan Pantai Takpala, menawarkan potensi untuk dikembangkan lebih lanjut. Selain itu, Kabupaten Alor juga memiliki potensi dalam industri kreatif, seperti kerajinan tangan tradisional, anyaman, dan tenun ikat. Dukungan dalam pengembangan keterampilan, promosi, dan pemasaran produk-produk kreatif lokal dapat meningkatkan pendapatan bagi pengrajin dan pelaku usaha kecil. Potensi energi terbarukan seperti energi surya, angin, dan hidro juga dapat dikembangkan di Kabupaten Alor. Pemanfaatan sumber daya alam ini tidak hanya dapat meningkatkan ketersediaan energi, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Pada Tahun rencana 2026, Kabupaten Alor diproyeksikan dapat mencapai target makro pembangunan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini.

Tabel. 5-16 Target Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Alor Tahun 2026

Indikator makro	Target 2026
Pertumbuhan ekonomi (%)	5,24
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	2,08
Tingkat Kemiskinan (%)	19,11
Indeks Pembangunan Manusia	69,99

Sumber data olahan Bapperida Prov NTT dari RPD Prov NTT 2024-2026

Pada Tahun rencana 2026, ekonomi alor ditargetkan tumbuh pada kisaran 5,24 % dengan tingkat pengangguran terbuka yang dapat ditekan menjadi 2,08 %. Tingkat kemiskinan diproyeksikan akan dapat dikurangi menjadi 19,11% dan Indeks Pembangunan Manusia diproyeksikan akan mencapai kisaran 69,99%

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Rote Ndao

Kabupaten Rote Ndao merupakan Kabupaten paling selatan di NTT, berbatasan langsung dengan perairan batas negara Indonesia dan Australia. Sebagai daerah terdepan, Rote Ndao memiliki nilai strategis bagi Indonesia dan perlu mendapatkan perhatian untuk pengembangannya. Rote Ndao memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut pada beberapa sektor : Pariwisata: Rote Ndao memiliki pantai-pantai yang indah dan potensi untuk pengembangan ekowisata. Pariwisata pantai, selam, dan surfing bisa menjadi daya tarik utama. Promosi pariwisata yang lebih aktif, pengembangan infrastruktur yang mendukung, dan pelatihan bagi masyarakat lokal untuk menjadi pemandu wisata dapat menjadi langkah-langkah dalam pengembangan sektor pariwisata. Di sektor pertanian, terutama dalam produksi padi dan jagung merupakan komoditi pertanian utama di Rote Ndao. Pengembangan teknologi pertanian yang lebih modern, pelatihan bagi petani, dan pengembangan rantai pasok yang efisien dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan pendapatan petani. Dengan lokasinya yang berada di dekat laut, perikanan merupakan sektor yang berpotensi untuk dikembangkan di Rote Ndao. Peningkatan teknologi perikanan, pembangunan infrastruktur pendukung seperti pelabuhan, serta pengembangan pasar lokal dan ekspor dapat meningkatkan potensi sektor perikanan. Rote Ndao memiliki budaya yang kaya, termasuk musik tradisional dan kerajinan lokal seperti tenun ikat. Pengembangan industri kreatif seperti pengolahan kerajinan tangan tradisional dan promosi seni dan budaya lokal dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat dan meningkatkan pariwisata budaya.

Pada Tahun rencana 2026, Rote Ndao diproyeksikan akan mencapai target-target makro pembangunan sebagaimana tertera dalam tabel berikut :

Tabel. 5-17 Target Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Rote Ndao Tahun 2026

Indikator makro	Target 2026
Pertumbuhan ekonomi (%)	4,5
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	3
Tingkat Kemiskinan (%)	25
Indeks Pembangunan Manusia	67,21

Sumber data olahan Bapperida Prov NTT dari RPD Prov NTT 2024-2026

Ekonomi Rote Ndao ditargetkan tumbuh berkisar 4,5% pada Tahun rencana 2026 dengan tingkat pengangguran terbuka dapat ditekan menjadi 3%. Tingkat kemiskinan yang masih tinggi di Kabupaten ini diproyeksikan akan dapat menurun menjadi 25% dan Indeks pembangunan manusia ditargetkan akan mencapai rentang 67,21.

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Sabu Raijua

Kabupaten Sabu raijua merupakan salah satu Kabupaten termuda di NTT. Sebagai sebuah kabupaten yang masih muda, masih banyak hal yang perlu mendapatkan perhatian untuk pembenahannya. Tentu saja ini tidak mudah, tetapi juga bukan sesuatu yang mustahil mengingat banyaknya potensi pengembangan yang dimiliki oleh daerah ini. Dengan keindahan alamnya, seperti pantai-pantai yang eksotis dan terumbu karang yang menakjubkan, Sabu Raijua memiliki potensi besar untuk pengembangan pariwisata. Promosi pariwisata yang lebih aktif, pengembangan infrastruktur pariwisata, dan pelatihan bagi pelaku pariwisata lokal dapat meningkatkan daya tarik pariwisata di daerah ini. Sebagai Kabupaten kepulauan, perikanan juga memiliki potensi besar di Sabu Raijua. Pengembangan infrastruktur perikanan seperti pelabuhan dan fasilitas pengolahan ikan, serta peningkatan kapasitas nelayan melalui pelatihan, dapat meningkatkan produksi dan nilai tambah sektor perikanan. Budaya dan kerajinan tradisional, seperti tenun ikat dan kerajinan tangan lainnya, merupakan kekayaan budaya Sabu Raijua yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Pengembangan industri kreatif melalui pelatihan keterampilan, promosi produk lokal, dan pembukaan pasar baru dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat mengurangi populasi penduduk miskin di sabu raijua yang sangat tinggi. Pada Tahun 2023, tercatat di wilayah ini terdapat sebesar 28,37% penduduk miskin diantara total penduduknya.

Dengan melihat performa Sabu Raijua di Tahun-Tahun sebelumnya, kabupaten sabu raijua dipercaya akan dapat mencapai target makro pembangunan Tahun rencana 2026 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut

Tabel. 5-18 Target Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2026

Indikator makro	Target 2026
Pertumbuhan ekonomi (%)	5,25
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	2,09 – 1,90
Tingkat Kemiskinan (%)	25
Indeks Pembangunan Manusia	67,21

Sumber data olahan Bapperida Prov NTT dari RPD Prov NTT 2024-2026

Pada Tahun rencana 2026, ekonomi Sabu Raijua ditargetkan tumbuh sebesar 5,25% dengan tingkat pengangguran terbuka dapat diturunkan menjadi 2,09 – 1,90%. Tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi di daerah ini ditargetkan untuk dapat diturunkan ke level 25% dan Indeks Pembangunan Manusia ditargetkan dapat ditingkatkan menjadi 67,21.

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Sumba Timur

Kabupaten Sumba Timur terletak pada bagian timur pulau sumba. Wilayah ini memiliki berbagai potensi pengembangan diantaranya Pariwisata, didukung oleh keindahan alam yang memikat, pantai-pantai yang eksotis, serta

kekayaan budaya yang khas, seperti tradisi adat dan tenun ikat Sumba. Pengembangan infrastruktur pariwisata yang memadai, promosi destinasi wisata, dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas layanan pariwisata bisa menjadi langkah-langkah yang ditempuh untuk menambah daya dorongnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Kabupaten Sumba Timur memiliki potensi pertanian yang masih dapat dikembangkan lagi karena didukung oleh ketersediaan lahan yang besar dan angkatan kerja yang cukup. Pengembangan pertanian organik atau pertanian berkelanjutan dapat meningkatkan nilai tambah produk pertanian daerah apabila didukung dengan penyediaan sumberdaya air yang memadai. Pemanfaatan potensi sumber daya laut seperti perikanan dan budidaya rumput laut dapat menjadi sektor yang menjanjikan di Sumba Timur. Pengembangan infrastruktur penangkapan dan pengolahan ikan, serta pelatihan untuk meningkatkan keterampilan nelayan, bisa membantu mengoptimalkan potensi ini. Selain itu wilayah yang luas dan vegetasi yang mendukung memungkinkan sumba Timur untuk menjadi salah satu daerah produsen ternak-ternak besar seperti sapi, kerbau dan kuda. Di sektor ekonomi kreatif, Tenun ikat Sumba merupakan warisan budaya yang sangat berharga dan memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai produk kreatif yang memiliki nilai jual tinggi. Pelatihan dan pendampingan bagi para pengrajin lokal dapat membantu meningkatkan kualitas produk dan akses pasar. Upaya-upaya pembangunan sumba timur memang harus terus dilaksanakan mengingat persentase penduduk miskin yang tinggi di daerah ini, yang pada Tahun 2023 tercatat sebesar 28,08% dari total penduduk Sumba Timur.

Dengan potensi pengembangannya yang besar, Sumba Timur diproyeksikan dapat mencapai target pembangunan makro daerah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

Tabel. 5-19 Target Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Sumba Timur Tahun 2026

Indikator makro	Target 2026
Pertumbuhan ekonomi (%)	3,72
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	2,18
Tingkat Kemiskinan (%)	26,51
Indeks Pembangunan Manusia	68,69

Sumber data olahan Bapperida Prov NTT dari RPD Prov NTT 2024-2026

Pada Tahun rencana 2026, ekonomi Sumba Timur ditargetkan tumbuh sebesar 3,72%. Tingkat pengangguran terbuka ditargetkan menurun menjadi 2,18% sementara tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi dapat diturunkan menjadi 26,51%. Indeks Pembangunan Manusia Sumba Timur ditargetkan mencapai 68,69 pada Tahun rencana 2026.

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Sumba Tengah

Kabupaten Sumba Tengah merupakan salah satu Kabupaten termuda di Provinsi Nusa Tenggara Timur, mekar dari Kabupaten Induk Sumba Barat pada Tahun 2007. Kabupaten Sumba Tengah juga memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Beberapa potensi pengembangan yang dapat dipertimbangkan diantaranya adalah Pariwisata: Sumba Tengah memiliki keindahan alam yang luar biasa, termasuk pantai-pantai yang memukau, dan keanekaragaman budaya. Potensi wisata alam dan budaya dapat dikembangkan melalui promosi destinasi wisata, pembangunan fasilitas pariwisata, dan

pengembangan paket wisata yang menarik. Selain itu, daerah ini memiliki lahan pertanian yang subur dan potensial untuk pengembangan berbagai jenis tanaman seperti dan buah-buahan tropis lainnya. Pengembangan teknologi pertanian modern dan pelatihan bagi petani dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian.Sumba Tengah juga memiliki potensi perikanan yang dapat dikembangkan, baik melalui peningkatan kapasitas penangkapan ikan maupun pengembangan budidaya ikan air tawar dan air laut seperti keramba ikan atau rumput laut. Seperti Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah juga memiliki tradisi tenun ikat yang khas dan berharga. Pengembangan industri kreatif melalui promosi dan pengembangan produk-produk tenun ikat serta kerajinan tangan lainnya dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi masyarakat setempat. Sumba tengah adalah salah satu kabupaten dengan catatan kemiskinan yang tinggi. Pada Tahun 2023 tercatat persentase penduduk miskin di Kabupaten ini mencapai 31,78% dari total populasinya sehingga upaya-upaya mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat harus terus didorong.

Pada Tahun rencana 2026, proyeksi beberapa indikator makro pembangunan Sumba Tengah adalah sebagaimana tercantum dalam table berikut :

Tabel. 5-20 Target Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2026

Indikator makro	Target 2026
Pertumbuhan ekonomi (%)	5,5
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	1,18
Tingkat Kemiskinan (%)	26
Indeks Pembangunan Manusia	66,07

Sumber data olahan Bapperida Prov NTT dari RPD Prov NTT 2024-2026

Pada Tahun rencana 2026, ekonomi sumba tengah ditargetkan dapat mencapai 5,5% dengan tingkat pengangguran terbuka yang dapat ditekan menjadi 1,18 %. Dengan tingkat kemiskinan yang sangat tinggi, diharapkan pada Tahun rencana 2026 sumba tengah dapat menurunkannya menjadi 26% dan Indeks Pembangunan Manusia berkisar pada 66,07

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Sumba Barat

Kabupaten Sumba Barat, adalah salah satu Tertua di NTT, dan telah mengalami pemekaran menjadi tiga Kabupaten: Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Barat Daya. Seperti kabupaten lain di Sumba, juga memiliki potensi yang menjanjikan untuk dikembangkan seperti Pariwisata, Pertanian dan kelautan perikanan. Kabupaten ini memiliki lahan pertanian yang cukup besar dan potensial untuk berbagai jenis tanaman. Potensi pengembangan pertanian organik atau pertanian berkelanjutan dapat meningkatkan kualitas dan nilai tambah produk pertanian daerah. Diversifikasi produk pertanian juga dapat menjadi strategi untuk meningkatkan pendapatan petani. Sumba Barat memiliki potensi perikanan yang dapat dikembangkan baik di sektor penangkapan ikan maupun budidaya. Investasi dalam infrastruktur perikanan seperti dermaga dan fasilitas pengolahan ikan, serta pelatihan untuk meningkatkan keterampilan nelayan lokal, dapat meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor perikanan. Sumba Barat juga memiliki potensi besar untuk pengembangan peternakan karena vegetasi dan hamparan alamnya yang mendukung usaha-usaha peternakan. Seperti daerah lain di Sumba, tenun ikat merupakan warisan budaya yang penting di Sumba Barat. Pengembangan industri kreatif melalui promosi produk tenun ikat dan kerajinan lokal dapat

memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat setempat. Upaya-upaya mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat terus dilakukan untuk dapat menurunkan tingkat kemiskinan di daerah ini yang pada Tahun 2023 mencapai 27,17%

Pada Tahun rencana 2026, target capaian indikator makro pembagnunan di Sumba Barat adalah sebagaimana terlihat dalam tabel berikut :

Tabel. 5-21 Target Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Sumba Barat Tahun 2026

Indikator makro	Target 2026
Pertumbuhan ekonomi (%)	5,37
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	1,1
Tingkat Kemiskinan (%)	28,27 – 27,82
Indeks Pembangunan Manusia	66

Sumber data olahan Bapperida Prov NTT dari RPD Prov NTT 2024-2026

Target pertumbuhan ekonomi sumba barat pada Tahun rencana 2026 adalah sebesar 5,37% dengan tingkat pengangguran terbuka ditekan menjadi 1,1%. Tingkat kemiskinan yang masih tinggi di daerah ini ditargetkan untuk dapat diturunkan menjadi 28,27 – 27,82% dan Indeks Pembangunan Manusia ditargetkan untuk meningkat menjadi 66

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Sumba barat Daya

Kabupaten Sumba Barat Daya secara geografis merupakan bagian paling barat dari pulau Sumba. Kabupaten ini mekar dari Kabupaten Sumba Barat pada Tahun 2007. Sebagai kabupaten dengan usia yang relatif “muda” potensi pengembangan Sumba Barat daya masih sangat luas. Potensi pengembangan kabupaten ini diantaranya: Pariwisata Berkelanjutan. Kabupaten Sumba Barat Daya memiliki pantai-pantai yang eksotis, pemandangan alam yang menakjubkan, dan kekayaan budaya yang unik. Pengembangan pariwisata berkelanjutan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan, budaya lokal, serta kesejahteraan masyarakat setempat dapat menjadi salah satu arah utama. Investasi dalam infrastruktur pariwisata, promosi destinasi wisata, dan pelatihan tenaga kerja di sektor pariwisata dapat meningkatkan daya tarik dan pengelolaan destinasi wisata. Pertanian merupakan sektor utama di Sumba Barat Daya. Dengan memperkenalkan teknologi pertanian yang modern, penerapan praktik pertanian berkelanjutan, serta diversifikasi tanaman, seperti tanaman pangan, tanaman hortikultura, dan tanaman perkebunan, pertanian dapat ditingkatkan secara signifikan. Selain itu, pelatihan dan pendampingan untuk petani dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian juga penting. Potensi perikanan dan kelautan di wilayah pantai Sumba Barat Daya sangat besar. Pengembangan budidaya ikan, peningkatan kapasitas penangkapan ikan secara berkelanjutan, serta pengembangan industri pengolahan hasil perikanan dapat menjadi fokus pengembangan dalam sektor ini. Warisan budaya seperti tenun ikat dan kerajinan tangan tradisional merupakan aset yang berharga di Sumba Barat Daya. Pengembangan industri kreatif melalui promosi dan pengembangan produk-produk lokal dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Pelatihan dalam pengembangan keterampilan dan manajemen bisnis juga dapat meningkatkan daya saing produk-produk lokal di pasar.

Pada Tahun rencana 2026, Sumba Barat daya dipercaya akan dapat mencapai target indikator makro pembangunan sebagaimana tertera pada tabel dibawa ini.

Tabel. 5-22 Target Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2026

Indikator makro	Target 2026
Pertumbuhan ekonomi (%)	4,5
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	1,13
Tingkat Kemiskinan (%)	25,11
Indeks Pembangunan Manusia	63,71

Sumber data olahan Bapperida Prov NTT dari RPD Prov NTT 2024-2026

Ekonomi Sumba Barat Daya ditargetkan untuk tumbuh 4,5% pada Tahun rencana 2026 dengan tingkat pengangguran terbuka ditekan menjadi 1,13%. Tingkat kemiskinan yang tinggi ditargetkan untuk dapat diturunkan menjadi 25,11% sementara Indeks Pembangunan Manusia ditargetkan meningkat pada kisaran 63,71.

5.2. PENGEMBANGAN RANTAI NILAI EKONOMI

Pengembangan rantai nilai ekonomi mengacu pada upaya untuk meningkatkan nilai tambah dalam setiap tahapan produksi atau penyediaan barang dan jasa, dari bahan mentah hingga produk jadi atau layanan yang siap digunakan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan daya saing produk atau layanan tersebut di pasar. Bagi Nusa Tenggara Timur pengembangan rantai nilai ekonomi mutlak diperlukan dalam rangka meningkatkan nilai tambah komoditi-komoditi yang dihasilkan di NTT agar memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan masyarakat di NTT yang sebagian besarnya bekerja pada lapangan usaha primer (pertanian, peternakan, kelautan perikanan). Proses ini menuju kepada apa dalam istilah yang lebih umum sering disebut sebagai “hilirisasi”.

Untuk kepentingan hilirisasi ini kabupaten/Kota di NTT dibagi kedalam tiga kluster pembangunan yaitu cluster-Flores-Lembata-Alor ; Cluster Timor-Rote Ndao; dan Cluster Sumba-Sabu Raijua, dengan masing-masing peran yang diharapkan dapat dijalankan oleh masing-masing Kabupaten/Kota dalam rangka mendorong peningkatan nilai tambah. Pengembangan wilayah yang berada dalam tiga cluster ekonomi ini dilaksanakan melalui pengembangan ekonomi hijau, yaitu model ekonomi yang bertujuan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan mengurangi ketimpangan, tanpa membahayakan kelestarian lingkungan hidup untuk generasi mendatang; dan ekonomi biru yaitu konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan melestarikan kesehatan laut.

5.2.1. PENGEMBANGAN CLUSTER FLORES-LEMBATA-ALOR

Cluster Flores – Lembata – Alor terdiri dari kabupaten-Kabupaten yang yang berada di daratan Flores yaitu Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, Sikka, Flores, Lembata dan Alor. Cluster ini selain memiliki lokasi yang berdekatan, juga memiliki kemiripan dalam hal potensi pertanian, perkebunan, potensi kelautan-Perikanan. Cluster Flores-Lembata - Alor juga diarahkan untuk mendukung superhub pariwisata Bali-Nusra dan

memanfaatkan potensi pengembangan EBT seperti Geo Thermal di Kabupaten Manggarai dan potensi arus laut disekitar perairan Flores Timur-Lembata.

Strategi Pemerataan Pembangunan Kewilayahan

Cluster Flores-Lembata-Alor diarahkan untuk mendukung penciptaan, dan mendapatkan keuntungan dari perkembangan industri pariwisata NTT. Lokus pariwisata diarahkan pada empat Kabupaten : Manggarai barat, Ende, Flores Timur dan Alor. Kabupaten tetangga berfungsi sebagai pendukung lewat peran sebagai sentra pengembangan pangan, peternakan, dan perikanan serta pengolahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan untuk kemudian menjadi pemain utama dalam pasokan kebutuhan pangan pada empat titik pusat pariwisata daerah.

Kabupaten Manggarai Barat di proyeksikan akan menjadi sentral industri pariwisata Flores bagian barat. Investasi yang terus masuk akan meningkatkan permintaan terhadap tenaga kerja dan komoditas-komoditas pangan. Peluang-peluang usaha yang muncul seiring dengan berkembangnya industri pariwisata di Manggarai Barat akan membuka peluang penciptaan lapangan kerja dan berkembangnya industri kreatif.

Kabupaten Manggarai adalah merupakan Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Manggarai Barat dapat memainkan peran untuk menyuplai kebutuhan pangan, menjadi pusat pendidikan dan pelatihan tenaga kerja pariwisata dan membangun hub pariwisata Flores. Ini sangat dimungkinkan karena secara tradisional Manggarai sering dianggap sebagai lumbung padi NTT, memiliki tanah dan iklim yang memadai untuk usaha-usaha pertanian dan perkebunan, sehingga dapat menjadi pemain kunci untuk menyediakan pangan yang permintaannya akan semakin membesar seiring membesarnya industri pariwisata di Manggaai barat. Kabupaten Manggarai juga memiliki institusi pendidikan tinggi yang dapat menjadi pusat pendidikan dan pelatihan tenaga kerja yang dibutuhkan di pusat industri pariwisata di Manggarai Barat. Selain itu, Manggarai sendiri memiliki beberapa destinasi wisata yang menarik, seperti niang todo, danau ranamese. Pengembangan pariwisata di Manggarai sendiri akan memberikan kontribusi terhadap terbangunnya saluran pariwisata yang menghubungkan seluruh daratan Flores sampai ke Kabupaten Alor. Kabupaten Manggarai juga memiliki potensi pengembangan EBT yaitu potensi *Geo Thermal* di PLTG Ulumbu yang saat ini sudah beroperasi dan melayani kebutuhan listrik di Manggarai dan beberapa Kabupaten sekitarnya.

Apabila Kabupaten Manggarai menjadi salah satu penyedia kunci bahan pangan untuk titik pusat pariwisata Manggarai Barat, Manggarai Timur diproyeksikan akan menjadi pusat penghasil dan pengolahan hasil-hasil perkebunan seperti vanili dan cengkeh. Produk-produk perkebunan yang dihasilkan di Manggarai Timur, yang selama ini dijual mentah ke pasar hasil bumi di luar NTT, perlu untuk diolah terlebih dahulu untuk meningkatkan nilai tambahnya. Hasil produksi tanaman perkebunan jadi / setengah jadi dapat menyuplai kebutuhan bukan saja terhadap permintaan pada pusat pariwisata Manggarai barat, tetapi juga seluruh permintaan dari zona tiga Manggarai: Manggarai Barat, Manggarai dan Manggarai Timur, yang memiliki pasar yang cukup besar.

Seperti kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada memiliki potensi pengembangan perkebunan yang sangat besar. Tanaman-tanaman seperti kopi, vanili, cengkeh dan jahe memiliki potensi pengembangan yang besar. Ngada diproyeksikan akan menjadi pusat penghasil dan pengolahan hasil-hasil perkebunan untuk menyuplai kebutuhan pasar pariwisata yang berpusat di Ende, dan kebutuhan akan hasil perkebunan olahan di wilayah Ngada, Nagekeo

dan Ende. Selain itu, potensi pariwisata yang dimiliki Ngada perlu untuk terus dikembangkan untuk dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan “hub” pariwisata Flores-alor.

Kabupaten Nagekeo memiliki potensi perikanan dan kelautan yang besar. Potensi yang perlu terus dikembangkan untuk dapat menjadi salah satu pemain kunci dalam penyediaan pangan laut pada sentra pariwisata di Manggarai Barat dan Ende. Peluang Permintaan akan pangan laut yang terus membesar seiring dengan membesarnya industri pariwisata di Manggarai barat dan Ende perlu untuk ditangkap oleh Nagekeo dengan mengembangkan potensi kelautan dan perikanannya. selain itu, Nagekeo berpotensi dikembangkan sebagai sentra pengolahan komoditas kelautan agar komoditas-komoditas kelautannya memiliki nilai tambah yang lebih besar. Selain perikanan dan kelautan, potensi pertanian dan perkebunan yang dimiliki Nagekeo dapat dikembangkan untuk memasok kebutuhan komoditas-komoditas perkebunan mentah pada pusat-pusat pengolahan perkebunan di Ngada dan Manggarai Timur.

Ende diproyeksikan sebagai sentra pariwisata Flores bagian tengah. Pengembangan Ende sebagai sentra pariwisata pada bagian tengah Flores akan dapat membuka peluang-peluang kerja sama ekonomi pada dua kabupaten tetangganya yaitu Ngada dan Nagekeo. Dua kabupaten tetangga tersebut dapat menjadi penopang permintaan terhadap pangan dan tenaga kerja. Selain itu potensi pertanian, perkebunan dan kelautan perikanan di Ende yang cukup tinggi dapat menjadi pemasok bagi sentra pengolahan perkebunan di Ngada maupun perikanan di Nagekeo selain tentu saja menopang kebutuhan akan komoditas perkebunan dan perikanan di tiga kabupaten tersebut.

Kabupaten Sikka diproyeksikan menjadi penopang sentra pariwisata Flores timur dengan menjadi pemain kunci dalam penyediaan kebutuhan pangan dan perkebunan yang dibutuhkan. Industri pengolahan hasil perkebunan seperti coklat yang selama ini sudah ada perlu untuk di replikasi pada komoditas-komoditas perkebunan lainnya agar memiliki nilai tambah yang lebih tinggi. Posisi Sikka yang berbatasan langsung dengan Ende dan Flotim, dua kabupaten yang diproyeksikan sebagai sentra pariwisata Flores bagian tengah dan timur, membuat pasar terhadap hasil-hasil komoditi perkebunan olahan dari Sikka semakin besar, ini akan mendorong tumbuhnya usaha-usaha kecil dan menengah yang akan membuka lapangan kerja dan membantu usaha penyerapan tenaga kerja dan penurunan pengangguran.

Flores Timur diproyeksikan menjadi salah satu pusat pariwisata Flores bagian timur. Daya tarik alam dan adat istiadat Flores timur potensial untuk terus dikembangkan. Salah satu daya tarik terbesar dari Flores timur adalah wisata religi yang berbeda dengan Manggarai Barat dan Ende. Jika Ende dan Manggarai barat menawarkan wisata alam dan minat khusus, maka Flores timur menyediakan wisata religi. Diversifikasi dalam produk pariwisata daerah ini yang membuat Flores dapat membangun hub pariwisata karena dapat memberikan pengalaman yang lebih lengkap kepada wisatawan yang berkunjung pada kabupaten yang satu dengan kabupaten yang lain yang ada di Flores. Selain pariwisata, Flores timur memiliki potensi perikanan yang sangat besar. Produk-produk perikanan di Flotim akan akan mendapatkan pasar pada pusat-pusat pariwisata di daerah tersebut dan menyuplai kebutuhan pangan laut untuk Flotim dan Sikka. Selain itu, komoditas perikanan Flotim dapat memasok kebutuhan bahan baku pengolahan ikan pada sentra pengolahan perikanan yang di proyeksikan akan ada di kabupaten Lembata.

Lembata lebih terkenal dengan tradisi penangkapan pausnya. Hal ini saja merupakan salah satu daya tarik wisata, yang dapat dijual sebagai salah satu paket wisata yang ada di Flores. Namun potensi terbesar Lembata terletak di potensi kelautannya. Meskipun besar, komoditas-komoditas perikanan yang dihasilkan di Lembata hanya dijual mentah untuk memenuhi permintaan pasar hasil laut baik itu pada region Lembata-Flotim-Sikka, maupun untuk di jual

keluar NTT. Oleh karena itu, Lembata dipandang potensial untuk dapat dikembangkan sebagai sentra pengolahan hasil pangan laut agar memiliki nilai tambah yang lebih tinggi, yang akan dapat mendorong peningkatan masyarakat di daerah tersebut. Pasar hasil olahan pangan laut akan dapat menyuplai permintaan pada sentra pariwisata di Flores timur maupun alor, dan juga pada wilayah lain di Flores.

Alor diproyeksikan sebagai salah satu pusat pariwisata di cluster Flores-Lembata-Alor. Daya tarik pantai eksotik yang ada di alor, keindahan alam bawah lautnya, dan keunikan adat istiadat alor potensial menjadi magnet bagi wisatawan untuk berkunjung ke alor. Dalam kacamata hub pariwisata Flores, Alor menjadi destinasi awal/ pintu masuk dan/atau akhir/pintu keluar bagi wisatawan yang berkunjung ke cluster Flores-Lembata-Alor. Pengembangan alor sebagai pusat pariwisata di cluster tersebut akan membuka peluang-peluang kerjasama dengan kabupaten-kabupaten tetangga seperti Lembata dan Flores Timur seiring membesarnya permintaan akan pasokan komoditas pangan, perkebunan dan perikanan. Kabupaten alor, yang juga adalah salah satu produsen perikanan, juga dapat memasok kebutuhan perikanannya sebagai komoditas input pada pusat pengolahan hasil perikanan yang ada di Lembata.

5.2.2. PENGEMBANGAN CLUSTER TIMOR-ROTE

Cluster Timor-Rote terdiri dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Malaka, dan Rote Ndao. *Cluster* ini terdiri dari Kabupaten-Kabupaten yang bertetangga dalam daratan Timor kecuali Rote Ndao yang secara lokasi berdekatan namun dipisahkan oleh batas lautan. Selain memiliki kedekatan secara geografis cluster ini juga memiliki kemiripan dalam hal iklim dan vegetasi yang sangat berpotensi untuk pengembangan tanaman-tanaman pangan seperti jagung, dan peternakan ternak besar seperti sapi dan kuda. Potensi pengembangan EBT juga hadir di cluster ini, misalnya potensi pengembangan biomass pada kabupaten Kupang. *Cluster* dengan potensi pengembangan sektor perikanan dan pertanian-perkebunan-peternakan ini diharapkan dapat menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan ekonomi hijau dan ekonomi biru dalam perkembangannya, sehingga dapat bersinergi dengan perkembangan sektor jasa yang dipercaya akan memberikan daya dorong terhadap perkembangan wilayah-wilayah yang ada dalam *cluster* ini pada Tahun rencana.

Strategi Pemerataan Pembangunan Kewilayahan

Kota Kupang adalah wilayah dengan aktivitas ekonomi yang didominnasi oleh sektor jasa. Oleh karena Kota Kupang merupakan pusat aktivitas pemerintahan dan jasa, kemajuan kota kupang menjadi sangat tinggi dan timpang jika dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain di daratan Timor dan NTT secara umum. Oleh karena itu, Kota Kupang perlu untuk menjadi pusat pertumbuhan bagi wilayah-wilayah tetangga dalam hubungan yang saling menguntungkan. Sebagai wilayah dengan jumlah penduduk yang besar dalam luas yang relatif kecil, pasar Kota Kupang terhadap produk-produk pangan sangat tinggi. Ini dapat menjadi peluang bagi wilayah-wilayah tetangga. Selain itu, kota kupang juga memiliki demand yang tinggi terhadap tenaga kerja yang dapat menjadi peluang bagi Kabupaten tetangga dalam menyiapkan dan menyediakan tenaga kerja berkualitas yang dapat memenuhi permintaan pasar kerja di kota Kupang yang semakin besar.

Kabupaten Kupang merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan Kota Kupang. Ini memberikan keuntungan tersendiri bagi Kabupaten Kupang untuk bisa mendapatkan dampak positif dari perkembangan kota

Kupang . Kabupaten Kupang menjadi wilayah yang paling dekat untuk menyuplai kebutuhan pangan pokok seperti beras dan jagung, juga kebutuhan ternak untuk konsumsi dan kebutuhan pangan laut. Karena merupakan wilayah dengan potensi pengembangan pertanian dan kelautan dan perikanan, kabupaten Kupang sangat potensial dikembangkan sebagai pusat pengolahan hasil pertanian mentah menjadi barang jadi/ setengah jadi untuk memenuhi permintaan pasar di Kota Kupang dan Kabupaten tetangga seperti TTS dan TTU. Potensi perikanan Kabupaten Kupang juga perlu untuk di kembangkan. Ketiadaan industri pengolahan hasil perikanan tangkap akan mendapatkan peningkatan nilai tambah apabila terdapat industri pengolahan hasil perikanan tangkap di Kabupaten Kupang. Sekali lagi pasar di Kota Kupang dan Kabupaten tetangga masih sangat besar dan potensial untuk di pasok dengan produk-produk dari industri pengolahan hasil laut. Selain itu potensi pengembangan biomass di Kabupaten Kupang dapat mensuplai kebutuhan bahan bakar di PLTD Kota Kupang sekaligus mengurangi konsumsi batu bara yang tidak ramah lingkungan.

Kabupaten Timor Tengah Selatan terkenal karena potensi peternakan dan komoditas perkebunan seperti buah-buahan. Sayangnya komoditas perkebunan tersebut masih dijual mentah bahkan beberapa komoditi telah mulai perlahan hilang karena kesulitan dalam mencari pasar, padahal lokasi TTS masih berada dalam satu daratan dengan Kota Kupang yang memiliki permintaan tinggi akan komoditas perkebunan tersebut. Oleh karena itu, kabupaten TTS perlu mulai mengembangkan sentra pengolahan hasil-hasil perkebunannya agar bisa memberikan nilai tambah lebih besar kepada masyarakat yang mengusahakannya dan menjadi pemain kunci dalam menyuplai permintaan dari Kota Kupang dan wilayah sekitar. Potensi peternakan yang dimiliki juga perlu dikembangkan dengan orientasi yang lebih kepada keuntungan/ profit sehingga dapat menjadi salah satu pemasok ternak baik untuk kebutuhan konsumsi pada kabupaten TTS sendiri, wilayah-wilayah sekitar khususnya Kota Kupang, maupun menjadi pemasok ternak untuk sentra pengolahan komoditi peternakan di cluster Timor-Rote ini.

Seperti TTS, Kabupaten Timor Tengah Utara juga memiliki situasi geografi dan iklim yang cenderung cocok untuk mengusahakan tanaman pangan tertentu seperti jagung, dan usaha peternakan ternak besar seperti Sapi. Dengan potensi tersebut, TTU berpotensi menjadi salah satu wilayah di cluster Timor-Rote yang mengembangkan industri pengolahan pangan untuk menyuplai kebutuhan wilayah sekitar, terutama Kupang yang masih bergantung pada pasokan dari luar NTT. Usaha peternakan di TTU dapat diarahkan untuk menyuplai kebutuhan wilayah sekitar dan pusat pertumbuhan baru di Belu yang pastinya akan semakin tinggi seiring dengan membesarnya peran Belu dalam perdagangan kawasan dan posisinya sebagai pintu masuk ke Indonesia dari Timor Leste.

Belu diproyeksikan akan menjadi pusat pertumbuhan/ pusat pemasaran baru di cluster Timor-Rote karena beberapa hal. Pertama: keuntungan geo-politiknya yang merupakan gerbang masuk ke Indonesia dari negara tetangga Timor Leste. Belu adalah pintu masuk Eksport-Import ke Indonesia dari Timor Leste sehingga peran perting Belu dalam perdagangan kawasan menjadi semakin besar. Oleh karena Belu berbatasan langsung dengan Timor Leste, membuatnya menjadi basis bagi kantor-kantor perwakilan bisnis, maupun NGO yang beroperasi di Timor Leste. Belu juga mendapatkan keuntungan lain sebagai wilayah perbatasan karena mobilitas masyarakat Timor leste ke Indonesia dan sebaliknya via darat melewati Belu sehingga memunculkan berbagai bentuk usaha jasa, baik itu kuliner, akomodasi dll. kedua : belu sendiri

memiliki potensi pengembangan karena potensi SDA nya yang besar. Belu memiliki luas wilayah yang besar dan jumlah angkatan kerja yang besar, yang seperti umumnya wilayah di NTT, bekerja di sektor agraris-pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan. Optimalisasi potensi-potensi yang dimiliki Belu ini akan membuat Belu menjadi pusat pertumbuhan baru di Cluster Timor-Rote ini, khususnya pada sektor jasa yang pada beberapa Tahun terakhir ini menampakkan perkembangannya. Belu diproyeksikan akan dapat menjadi kabupaten dengan perkembangan sektor jasa yang tinggi dan Atambua, ibukota Belu berpotensi akan menjadi seperti Kupang, sebagai pusat perdagangan dan jasa.

Kabupaten Malaka seperti juga Kabupaten tetangganya memiliki iklim yang cenderung kering namun mendukung untuk pengembangan tanaman pangan alternatif seperti jagung, juga tanaman perkebunan dan buah-buahan tropis. Malaka juga memiliki prospek pengembangan peternakan karena memiliki hamparan dan vegetasi yang mendukung. Dengan situasi demikian, Malaka diarahkan untuk dapat menjadi salah satu penopang untuk pusat pertumbuhan baru di Belu. Malaka diharapkan dapat menjadi menyuplai kebutuhan pangan di Malaka sendiri, pada pusat pertumbuhan baru Belu dan kawasan tetangga, maupun menyediakan input bagi pemrosesan komoditi-komoditi pangan yang belokasi di Kabupaten TTU. Oleh karena potensi peternakan yang besar, malaka diproyeksikan akan dapat menjadi salah satu kabupaten di cluster Timor-Rote yang mengembangkan industri pengolahan ternak. Ini akan memberikan nilai tambah yang besar dan menjamin suplai produk peternakan olahan ke seluruh wilayah Timor – Rote, bahkan seluruh wilayah NTT, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap produk olahan peternakan dari luar NTT.

Rote Ndao merupakan wilayah yang meskipun berada dalam satu cluster dengan cluster Timor-Rote, namun memiliki batas laut. Hal ini membuat Rote memiliki peran yang unik dalam cluster ini. Dengan wilayah yang dikelilingi oleh laut, potensi perikanan Rote Ndao patut menjadi salah satu prioritas pengembangan untuk dapat menjadi pemain kunci dalam menyediakan kebutuhan pangan laut khususnya bagi Kota Kupang. Rote memiliki potensi untuk pengembangan industri pengolahan pangan laut yang akan memberikan nilai tambah yang tinggi bagi usaha kelautan dan perikanan. Pengembangan industri pengolahan kelautan dan perikanan juga akan menjamin suplai bagi pasar produk perikanan olahan yang selama ini masih bergantung pada produk dari luar NTT. Selain itu, Rote Ndao juga memiliki daya tarik wisata yang tidak kalah. Berbagai potensi wisata yang ada di Rote Ndao perlu untuk dikembangkan dalam rangka menjadikan Rote sebagai salah satu destinasi wisata yang penting di NTT, dan khususnya pada cluster Timor-Rote.

5.2.3. PENGEMBANGAN CLUSTER SUMBA-SABU RAIJUA

Cluster ini terdiri dari Kabupaten-kabupaten di daratan pulau sumba : Sumba Barat Daya, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Timur; dan Kabupaten Sabu Raijua yang dipisahkan dengan laut namun berada sangat dekat dengan pulau sumba. Selain memiliki posisi yang berdekatan secara geografis, terdapat kemiripan sosial budaya pada cluster ini. iklim dan vegetasi di cluster ini juga memiliki kemiripan. Situasi yang potensial untuk pengembangan peternakan, pariwisata, perikanan dan kelautan. Pengembangan daratan Sumba sebagai lumbung baru pangan NTT juga potensial untuk dikembangkan mengingat Sumba diproyeksikan sebagai lokasi pelaksanaan *food estate*.

Sumba juga sangat berpotensi untuk menjadi penyedia energi baru dan terbarukan. Sumba *Iconic Island* yang diluncurkan Pada Tahun 2010 dimaksudkan untuk membantu memenuhi kebutuhan listrik masyarakat Sumba melalui sumber-sumber energi yang ramah lingkungan. Program ini berfokus pada pemanfaatan berbagai sumber energi terbarukan. Selain membantu kelestarian lingkungan, inisiatif ini juga turut meningkatkan kualitas hidup masyarakat Pulau Sumba.

Sejalan dengan hal tersebut, penerapan prinsip ekonomi hijau dan ekonomi biru perlu untuk menjadi alternatif pemanfaatan potensi pertanian-perkebunan-peternakan dan potensi kelautan-perikanan yang dipunyai oleh sumba untuk dapat mendorong peningkatan kesejahteraan, menekan tingkat kemiskinan yang masih tinggi pada wilayah yang berada dalam *cluster* ini.

Strategi Pemerataan Pembangunan Kewilayahan

Kabupaten Sabu Raijua merupakan Kabupaten dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang relatif kecil dibandingkan dengan kabupaten lain yang berada dalam cluster Sumba Sabu. Namun situasi kesejahteraan di Sabu Raijua mirip dengan apa yang ada di daratan sumba. Sabu Raijua dalam cluster Sumba-Sabu memiliki peran untuk menopang perkembangan pusat-pusat perkembangan baru di Sumba lewat komoditas yang menjadi andalan Sabu khususnya dari sektor kelautan dan perikanan. Potensi perikanan yang dimiliki sabu akan mendapatkan pasarnya pada wilayah-wilayah yang berada di pulau Sumba. Pengembangan sektor perikanan dan kelautan menjadi salah satu harapan agar Sabu Raijua dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan masyarakat miskin di kabupaten ini. Pembangunan infrastruktur perikanan, seperti pelabuhan, dermaga, pusat distribusi, dan fasilitas pemrosesan ikan sangat direkomedasikan untuk dilaksanakan di Sabu Raijua untuk meningkatkan efisiensi dalam rantai pasok perikanan pada cluster Sumba- Sabu. Hal ini juga akah meningkatkan nilai tambah produk dan memberi manfaat ekonomi kepada masyarakat

Sumba Timur merupakan wilayah dengan luasan area terbesar dalam cluster ini potensial untuk pengembangan pertanian. Dengan jumlah angkatan kerja yang memadai, peningkatan sektor pertanian di Sumba Timur akan dapat dilakukan dengan mendorong diversifikasi tanaman untuk meningkatkan ketahanan pangan dan pendapatan petani. Selain tanaman pangan seperti padi dan jagung, juga dapat ditanam tanaman hortikultura; buah-buahan seperti jambu biji, mangga, nangka jambu mete; rempah-rempah seperti kunyit, dan tanaman keras lainnya yang sesuai dengan kondisi agroekologi setempat. Sumba Timur juga memiliki potensi pengembangan peternakan ternak besar seperti kerbau, Sapi, dan Kuda. Investasi dalam infrastruktur yang mendukung peternakan, seperti akses jalan yang baik, fasilitas penyimpanan dan pengolahan yang modern, dan sistem distribusi yang efisien mutlak diperlukan agar membantu memperlancar rantai pasok peternakan dan meningkatkan nilai tambah produk. Selain itu sumba Timur juga memiliki potensi kelautan dan perikanan seperti perikanan tangkap (ikan tongkol) termasuk rumput laut. Khusus terkait rumput laut, perlu mendorong pengembangan pasar domestik dan internasional untuk produk rumput laut. Ini dapat dilakukan melalui promosi produk, partisipasi dalam pameran dagang, dan pembangunan jaringan distribusi yang efisien. Sumba Timur juga akan menjadi lokasi prioritas pengembangan budidaya udang shrimp farm Pengelolaan potensi kelautan yang dimiliki Sumba Timur akan dapat berkontribusi menjadikan cluster Sabu-Sumba sebagai cluster kesejahteraan baru di NTT. Satu potensi besar yang belum begitu dieksplorasi di Sumba Timur adalah sektor

pariwisata alam dan budaya. Festival budaya seperti festival pasola, dan parade kuda sandel merupakan contoh festival budaya pada pulau sumba yang dapat dipromosikan untuk menarik minat wisatawan berkunjung ke Pulau Sumba. Selain festival budaya, Sumba terkenal akan pantainya yang eksotik dan pemandangan alamnya yang memukau. Namun kerja-kerja pengembangan pariwisata daerah bukanlah sesuatu yang mudah dan murah. Diperlukan investasi dalam pembangunan infrastruktur yang mendukung pariwisata, seperti jalan raya, bandara, pelabuhan, akomodasi, fasilitas kesehatan, dan fasilitas publik lainnya. Pengembangan pariwisata di Sumba Timur perlu mendorong keterlibatan masyarakat lokal dalam pengembangan dan manajemen pariwisata untuk memastikan partisipasi dan manfaat yang adil. Ini dapat dilakukan melalui pembentukan koperasi pariwisata, pelatihan keterampilan, dan program pengembangan ekonomi lokal.

Kabupaten Sumba Tengah diproyeksikan memainkan peran untuk menjamin distribusi dan permintaan pangan lewat usaha pertanian yang dimilikinya. Potensi pertanian sumba tengah termasuk tanaman pangan (padi, dan jagung) dan tanaman buah-buahan tropis (jeruk besar), dan tanaman keras lainnya (cendana). Untuk meningkatkan potensi pertanian ini diperlukan upaya untuk meningkatkan dukungan infrastruktur irigasi dan drainase untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air dan mengatasi masalah kekeringan yang sering terjadi. Hal ini akan membantu meningkatkan produktivitas tanaman dan mengurangi risiko gagal panen. Memperkenalkan teknologi pertanian modern seperti sistem irigasi tetes, penggunaan varietas unggul yang tahan terhadap penyakit dan cuaca ekstrem. Seperti kabupaten lain di Sumba, Sumba Tengah juga memiliki potensi pengembangan peternakan. Komoditas peternakan antara lain sapi, kerbau, kuda dan kambing. Potensi perikanan sumba tengah juga cukup besar dengan komoditi ikan cakalang, tongkol dan Tuna. Selain perikanan tangkap, Sumba Tengah memiliki potensi pengembangan rumput laut *Cluster* Sumba-Sabu akan menjadi pasar yang memadai bagi produk-produk pertanian dari sumba tengah asalkan terdapat jaringan distribusi yang efisien untuk meningkatkan akses petani ke pasar dan nilai tambah produk pertanian/ Kelautan/ Perikanan. Investasi juga perlu dilakukan pada infrastruktur transportasi seperti membuka/ meningkatkan kualitas akses jalan, mendirikan pusat-pusat pengumpulan dan distribusi, dan memfasilitasi akses ke teknologi pemasaran digital. Kabupaten Sumba Tengah diproyeksikan akan dijadikan lokasi *food estate*, yang bertujuan meningkatkan produktivitas pertanian, mengurangi ketergantungan pada impor pangan, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Kabupaten Sumba Tengah juga potensial untuk dikembangkannya *Agro Eco Tourism*, yaitu bentuk pariwisata yang berfokus pada pengalaman di lingkungan pertanian dan ekosistem alami, dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang keberlanjutan, pertanian organik, pelestarian lingkungan, dan kehidupan pedesaan. Karena lokasinya yang berada di tengah-tengah pulau sumba, potensi pembangunan infrastruktur perhubungan yang dapat memicu inisiatif usaha baru juga perlu untuk dilaksanakan di Sumba Tengah, misalnya dengan pembangunan rest area yang dapat dijadikan tempat usaha kecil membuka lapak dagangannya. Ini akan memberikan kesempatan kerja kepada penduduk sekitar.

Kabupaten Sumba Barat memiliki potensi pariwisata yang besar. Festival budaya seperti festival pasola, dan parade kuda sandel juga ada di Sumba Barat seperi juga pada empat Kabupaten yang ada di pulau Sumba. Daya tarik wisata alam dan budaya dipercaya akan membuat Sumba Barat dapat memberikan keuntungan bukan saja bagi masyarakat lokal, namun kepada wilayah-wilayah lain yang berada pada *cluster* Sumba-Sabu. Investasi perlu dilakukan untuk membuka akses menuju situs-situs pariwisata yang menarik. Infrastruktur

pendukung pariwisata, termasuk jalan, transportasi umum, akomodasi, tempat makan, fasilitas kesehatan, dan sarana umum lainnya, dipastikan terbangun untuk dapat mengoptimalkan potensi pariwisata yang dimiliki. Masyarakat lokal dan pengunjung perlu mendapatkan edukasi tentang pentingnya konservasi lingkungan dan warisan budaya, serta perilaku bertanggung jawab saat berkunjung agar warisan budaya yang ada di Sumba Barat tetap terjaga. Pelibatan komunitas lokal dalam pengembangan dan manajemen pariwisata mutlak untuk dilakukan. Juga dukungan terhadap inisiatif lokal untuk menciptakan lapangan kerja, mempromosikan budaya lokal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain pariwisata, Sumba Barat juga memiliki potensi pertanian yang menjanjikan. Sumba barat memiliki komoditi pertanian tanaman pangan seperti padi dan jagung; komoditi hortikultura seperti bayam, buncis, kangkung petai; dan tanaman perkebunan seperti kopi dan jambu mete. Potensi peternakan juga memiliki prospek baik untuk dikembangkan dengan komoditas utama berupa ternak besar seperti kerbau, sapi, dan kuda. Selain pertanian dan peternakan, potensi kelautan perikanan yang prospektif untuk dikembangkan dengan komoditas unggulan antara lain ikan cakalang dan tongkol. Sumba barat juga memiliki potensi pengembangan rumput laut. Untuk menjamin potensi ini memberikan manfaat kepada masyarakat diperlukan investasi pada pengembangan keterampilan dan kesejahteraan petani, peternak dan nelayan untuk memastikan tenaga kerja yang terampil dan berkomitmen dalam jangka panjang. Seperti juga tiga kabupaten tetangganya, sumba barat memiliki potensi pengembangan pariwisata alam dan budaya yang besar. Pengembangan sektor pariwisata di daerah diharapkan akan mampu menyediakan lapangan kerja yang lebih luas dan mendorong inisiatif-inisiatif ekonomi yang baru yang akan sangat berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sumba Barat daya merupakan Kabupaten paling timur dalam cluster Sumba-Sabu, memiliki potensi pengembangan pertanian, perkebunan peternakan dan juga pengembangan ekonomi kreatif. Komoditas pertanian unggul di sumba barat daya antara lain komoditi tanaman pangan (jagung dan kedelai); tanaman hortikulura (buncis, cabai rawit, tomat), tanaman buah-buahan tropis (jeruk besar, nangka, mete) dan tanaman keras lainnya (cendana). Potensi peternakan antara lain pengembangan ternak besar (kerbau, sapi dan kuda), sementara potensi kelautan yang potensial dikembangkan di SBD adalah budidaya rumput laut. Terhadap pengembangan *cluster* Sumba-Sabu sendiri, Sumba barat daya dapat berperan sebagai penopang membesarnya industri pariwisata di Sumba Timur, Sumba Barat dan Sumba Tengah dan sumba barat daya sendiri dengan menyuplai permintaan terhadap produk-produk pertanian-perkebunan, dan peternakan . Sumba Barat daya juga potensial dalam pengembangan ekonomi kreatif di daerah. Bentuk dukungan terhadap berkembangnya ekonomi kreatif di SBD dapat dilakukan dengan misalnya membuat kebijakan publik yang mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif, termasuk perlindungan hak kekayaan intelektual, insentif pajak, dan regulasi yang memfasilitasi operasi bisnis kreatif juga dengan mendorong kolaborasi antara pelaku industri kreatif, pemerintah, lembaga pendidikan, dan sektor lainnya untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif. Ini dapat dilakukan melalui pembentukan kemitraan, jaringan profesional, dan pertukaran pengetahuan dan sumber daya.

BAB VI
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 untuk tahun kedua pelaksanaanya diterjemahkan dalam rencana dan pelaksanaan Program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan ini sejalan dan mendukung pencapaian sasaran dan prioritas nasional sekaligus mendukung pencapaian prioritas daerah.

Perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang diprioritaskan dalam RKPD Tahun 2026 mengacu pada RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029 khususnya Arahan Tahun 2025 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 untuk Tahun rencana 2026 serta disesuaikan dengan kondisi dan potensi serta serta tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah pada tahun 2025.

Kemudian, dalam proses perencanaan baik di tingkat nasional yang bersifat jangka panjang yaitu dengan adanya penyusunan RPJPN, maupun di tingkat daerah seperti adanya perubahan nomeklatur Perangkat Daerah dalam Struktur Organisasi yang baru, maka terdapat beberapa perubahan kebijakan dan regulasi baik di tingkat nasional maupun daerah yang akan mempengaruhi proses perencanaan dan penganggaran di tingkat Provinsi NTT Tahun 2025. Perubahan yang dimaksud adalah:

1. Adanya penyesuaian kembali Indikator Makro di level Nasional yang dibahas pada RAKORTEKRENBANGNAS Regional I sehingga menjadi 31 (tiga puluh satu) Indikator Makro yang mempengaruhi penambahan Indikator Makro dan Target perencanaan Tahun 2025 di tingkat Provinsi untuk mendukung pencapaian target nasional. Dimana, perubahan Indikator Makro ini sudah menyesuaikan dengan arah pembangunan berdasarkan RPJMN 2025-2029 sehingga secara imperatif diikuti oleh Provinsi sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah;
2. Adanya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3405 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi dan Infentarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang memuat tambahan sub kegiatan dan indikator di dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang menjadi acuan pengusulan program, kegiatan dan sub kegiatan serta indikator sehingga pemerintah Provinsi NTT perlu mengakomodir di dalam Dokumen Perencanaan Tahun 2025;

Dengan demikian, untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan tersebut, dibutuhkan kerja sama dan sinergi baik dalam hal perencanaan, kebijakan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi antara pemerintah pusat dan daerah, swasta maupun Lembaga donor/mitra.

Jika dikaitkan dengan Agenda pembangunan pada RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029 untuk tahun Pertama, maka Arah Kebijakan Pembangunan yang tertuang untuk Tahun rencana 2026 bertemakan "**EKONOMI YANG KOKOH, INFRASTRUKTUR YANG HANDAL DAN SDM YANG BERKUALITAS".**

Dengan 6 (enam) arah kebijakan pembangunan Tahun 2025 meliputi:

1. Pengembangan rantai nilai ekonomi lokal;
2. Penguatan sistem ekonomi masyarakat;
3. Sinergitas tujuan pembangunan dan pemangku kepentingan lainnya;
4. Peningkatan kualitas hidup masyarakat;
5. Ketersediaan dan pemantapan infrastruktur; dan
6. Pencapaian dan pemenuhan SPM.

Sedangkan Prioritas Pembangunan Daerah yang akan dijalankan yaitu:

1. Pemangunan Ekonomi Berkelanjutan;
2. Pemberdayaan Komunitas;
3. Pemerataan Infrastruktur Berkelanjutan;
4. Pemerataan Akses dan Layanan Kesehatan;
5. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan;
6. Reformasi Birokrasi dan HAM; dan
7. Kolaborasi Ayo Bangun NTT.

Adapun Isu Strategis di Nusa Tenggara Timur secara umum sebagai berikut:

1. Isu Strategis Daerah

Berdasarkan permasalahan serta isu global dan nasional, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis daerah yang dipetakan pada beberapa transformasi sebagai berikut:

a) Isu Strategis Transformasi Sosial: Peningkatan kualitas hidup manusia pada seluruh siklus hidup manusia untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan kohesif **(Belum Optimalnya Mutu dan Akses Pendidikan dan Belum Optimalnya Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Sosial;**

Tercapainya transformasi sosial bertumpu pada upaya pemenuhan pelayanan dasar serta pengembangan modal manusia dan modal sosial budaya yang berkaitan dengan kesehatan untuk semua, pendidikan yang berkualitas dan merata, dan perlindungan social yang adaptif. Karena itu, transformasi sosial di NTT adalah upaya untuk; mengatasi kemiskinan dan ketimpangan di daerah, dan menciptakan keadilan sosial agar setiap orang memiliki kesempatan yang sama terhadap pemenuhan pelayanan kesehatan, gizi, pendidikan, perlindungan sosial, serta masyarakat yang sejahtera, unggul, dan berdaya saing.

Kesehatan untuk semua dihadapkan pada upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan akses dan kualitas layanan kesehatan melalui; optimalisasi penanganan stunting dan penyakit endemic (malaria), dan; pemerataan dan peningkatan akses serta kualitas fasilitas kesehatan; optimalisasi peningkatan umur harapan hidup; optimalisasi penurunan angka kematian ibu, bayi, dan balita, dan; optimalisasi penurunan angka wasting yaitu gizi buruk, gizi kurang, dan underweight.

Pendidikan yang berkualitas dan merata dihadapkan pada upaya untuk mengoptimalkan bonus demografi dan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia NTT yang berkualitas agar dapat mendukung percepatan pembangunan di daerah pada berbagai bidang melalui; peningkatan mutu pendidikan, peningkatan angka partisipasi sekolah untuk penduduk usia sekolah termasuk disabilitas, peningkatan angka melanjutkan sekolah pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, peningkatan angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan sekolah, mengoptimalkan kualitas penyelenggaraan vokasional, peningkatan cakupan SMA dan SMK yang terakreditasi, peningkatan digitalisasi sektor pendidikan, dan peningaktan SPM sektor pendidikan.

Perlindungan social yang adaptif dihadapkan pada upaya untuk memperluas perlindungan yang menyeluruh bagi seluruh penduduk sesuai

kerentanan yang dijalankan dengan prinsip keadilan dan inklusif adaptif. Uapaya tersebut dilaksanakan melalui; penurunan angka kemiskinan; optimalisasi pembangunan *Gender, Equalitu*, Disabilitas, dan *Social Inkluasi* (GEDSI), peningkatan perlindungan social bagi PMKS; optimalisasi cakupan jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan; optimalisasi akurasi data untuk ketepatan intervensi; optimalisasi pemberdayaan kelompok masyarakat miskin; fasilitas umum yang ramah GEDSI, dan; Mengurangi jumlah masyarakat yang masuk kategori rumah tidak layak huni.

b) Isu Strategis Transformasi Ekonomi: Peningkatan produksi dan produktifitas sektor primer untuk mendukung hilirisasi **(1) Belum Maksimalnya Transformasi Ekonomi Daerah, (2) Belum Terbangunnya Ketahanan Pangan yang Tangguh dan Berkelanjutan; (3) Belum optimalnya pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar);**

Terciptanya transformasi ekonomi bertumpu pada upaya penciptaan kemampuan dan daya saing ekonomi daerah melalui peningkatan kontribusi sektor primer, sektor indutri, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, serta BUMD. Upaya tersebut ditunjang dengan penerapan ekonomi biru dan ekonomi hijau untuk memastikan keberlanjutan pembangunan pada berbagai sektor.

Peningkatan produksi dan produktifitas pada sektor primer dihadapkan pada upaya untuk; perbaikan pola pertanian, peternakan, dan perikanan yang bersifat subsisten kepada pola pertanian yang berorientasi komersil; optimlsiasi adopsi teknologi pada sektor pertanian, peternakan, dan perikanan; optimalisasi penguatan sentra produksi dikawasan pedesaan, serta sentra-sentra pengolahan dan pemasaran di kawasan perkotaan; perbaikan insentif pada system pasar sektor primer; optimalisasi ketersediaan dan pemerataan sarana dan prasana termasuk ketersediaan pupuk, benih, jalan usaha tani, ketersediaan air dan irigasi; optimalisasi penanganan hama penyakit pada sektor pertanian dan peternakan, dan optimalisasi ketahanan sektor primer terhadap dampak perubahan iklim.

Peningkatan produksi dan produksi pada sektor primer memberikan dukungan terhadap pengembangan industri pengolahan (hilirisasi). Selain itu, ketersediaan dan kontinuitas produksi dan produktifitas sektor primer juga diperlukan agar dapat menjamin keberlanjutan supply bahan baku bagi pengembangan industry di NTT. Apa lagi NTT memiliki komoditas berbasis *Core Competence* Komoditas Unggulan Wilayah, antara lain; padi, mete, kopi, kakao, jagung, babi, sapi, rumput laut, perikanan tangkap, dan garam. Komoditas-komoditas ini perlu diperkuat guna mendukung indutri pariwisata dan ekonomi kreatif.

c) Isu Strategis Transformasi Tata Kelola: Peningkatan efektifitas, akutantabilitas dan profesionalisme pengelolaan birokrasi melalui penguatan terhadap kemampuan fiskal daerah, kualitas ASN, regulasi yang efektif, pelayanan public, manajemen talenta, dan keberlanjutan pembangunan **(Belum Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan);**

Transformasi tata kelola diperlukan dalam rangka memungkinkan pemerintah daerah bekerja dengan kerangka kerja yang lebih efektif da akuntabel sehingga bisa menyediakan pelayanan public yang berkualitas. Hal ini ditempuh melalui; peningkatan kemampuan fiskal daerah, kualitas ASN, regulasi yang efektif, pelayanan public, manajemen talenta, dan keberlanjutan pembangunan.

Penguatan terhadap drajat kemandrian fiskal dihadapkan pada upaya; optimalisasi pengelolaan potensi PAD; mengembangkan investasi pengelolaan keuangan daerah, dan; penguatan pengelolaan asset daerah. Penguatan terhadap pelayanan publik ditempuh melalui upaya; peningkatan akses pelayanan publik berbasis digital yang merata bagi masyarakat; peningkatan

pelayanan yang berbasis kepuasan pelanggan, dan; optimalisasi inovasi pelayanan publik. Peningkatan manajemen talenta ditempuh melalui; optimalisasi pengembangan SDM birokrasi berbasis manajamen talenta. Keberlanjutan pembangunan ditempuh melalui; pengintagrasian proses bisnis perencanaan, pengaggaran, akuntabilitas kinerja, pemantauan dan evaluasi, dan; peningkatan perencanaan dan penganggaran dalam memastikan keberlanjutan pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, rencana kerja yang hendak dilakukan pada Tahun 2025 adalah mengakomodir 7 (Tujuh) prioritas pembangunan daerah termasuk di dalamnya penyesuaian nomeklatur program dan indikator serta melakukan penyesuaian terhadap 31 (tiga puluh satu) Indikator Utama hasil Rakortekrenbangnas. Dengan catatan untuk pencapaian target Indikator Makro akan *dibreakdown* kepada 22 (dua puluh dua) Kabupaten/Kota sehingga menjadi akumulasi pencapaian target Provinsi NTT pada Tahun 2025.

Adapun pagu Anggaran per Prioritas Daerah Tahun rencana 2026 sebagaimana terlihat pada Tabel 6.1 berikut merupakan pagu akumulasi antara belanja Prioritas dan Non Urusan. Kemudian pagu per prioritas diakumulasi hanya pada prioritas awal, jika terdapat pengulangan pada prioritas setelahnya, maka akan diberikan inisial Perangkat Daerah yang mendukung tanpa memasukkan jumlah pagu. Sehingga jika dijumlahkan akan mendapatkan total pagu sesungguhnya.

Tabel 6.1
Pagu Anggaran per Prioritas per Perangkat Daerah Tahun 2026

KODE SKPD	NAMA SKPD	RINCIAN
1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.387.119.606.310
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	509.542.847.870
1.03.1.04.2.10.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	180.537.025.513
1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	15186742500
1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9585354846
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	41996503960
2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi	21821465690
2.08.2.14.0.00.02.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	22453285257
2.11.3.28.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	101.172.779.080
2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	10366297920
2.13.2.14.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	23078093800
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	65277524596
2.16.2.21.2.20.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	17716695880
2.17.2.07.3.32.01.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	8774782648
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10510210479
2.19.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	53944347915
2.24.2.23.0.00.01.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	13995661240
3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kelautan dan Perikanan	55958303600
3.26.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	19035095696
3.27.0.00.0.00.02.0000	Dinas Peternakan	42695762700
3.27.2.09.0.00.01.0000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	75625470220

KODE SKPD	NAMA SKPD	RINCIAN
3.29.1.03.0.00.01.0000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	20407496120
3.31.3.30.0.00.01.0000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	15518450270
4.01.5.07.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	121.940.728.596
4.02.0.00.0.00.02.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	177.181.785.347
5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	26524952840
5.02.0.00.0.00.03.0000	Badan Keuangan Daerah	785.289.869.669
5.02.2.10.0.00.02.0000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	134.627.431.370
5.03.0.00.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian Daerah	13809922000
5.04.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	30093008436
5.06.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	7560766240
5.07.0.00.0.00.01.0000	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.	11391989200
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat Daerah Provinsi NTT	32353238653
8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	17485625160
Grand Total		**5.080.579.121.621**

Sumber: Tarikan sipd-ri.kemendagri.go.id, Tahun 2025

Kemudian, pada kaidah perumusan kebijakan RKPD juga memuat penelaahan pokok-pokok Pikiran DPRD sesuai amanat Pasal 178 Permendagri 86 Tahun 2017 bahwa penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses, selanjutnya hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD dirumuskan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD dan dimasukkan ke dalam *e-planning* bagi Daerah yang telah memiliki SIPD.

Adapun Rincian Pokok-pokok pikiran DPRD Tahun 2026 seperti pada Lampiran. Adapun proses pengajuan Pokok – pokok pikiran DPRD Provinsi NTT Tahun 2026 secara umum antara lain:

a. Pokir yang diusulkan diajukan ke Setwan DPRD kemudian dibvalidasi dan akan disampaikan ke masing – masing bidang Koordinasi pada Bapperida untuk di verifikasi lanjut.
b. Kemudian setelah itu diteruskan ke perangkat daerah yang sesuai dengan urusan untuk diverifikasi lanjut oleh PD tujuan usulan;
c. Selanjutnya diteruskan ke TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) untuk verifikasi akhir;
d. Kemudian usulan yang diterima diteruskan kembali ke PD untuk dimasukkan ke tahapan pembahasan KUA PPAS.

Dalam rangkaian proses ini, terdapat usulan yang ditolak, dikembalikan dan/atau diterima dengan alasan masing – masing terdokumentasi dalam SIPD. Secara ringkas, total jumlah usulan sebanyak 3911 Usulan.

Sedangkan, terkait dengan sumber pembiayaan pelaksanaan Program, Kegiatan dan sub kegiatan serta pelaksanaan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal diarahkan bukan saja dari APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun rencana 2025, namun terbuka juga untuk pembiayaan dari berbagi pihak antara lain:

a. Dana Pusat berupa APBN (DAK/Dana Alokasi Khusus, Dekon/Dana Dekonsentrasi, TP/Tugas Pembantuan);
b. Dana Lembaga Mitra/NGO;
c. Dana Pihak ke 3 yang bersifat tidak mengikat seperti CSR Bank.

Pengaturan terkait penggunaan sumber pembiayaan mengikuti ketentuan dan regulasi – regulasi yang berlaku.

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026 disusun berdasarkan capaian kinerja Tahun 2025 serta mempertimbangkan dinamika lingkungan strategis yang sedang berlangsung. Penilaian kinerja mencakup indikator kinerja utama daerah yang mencerminkan capaian kepala daerah, indikator kinerja penyelenggara pemerintah daerah yang mencerminkan kinerja seluruh perangkat daerah, serta indikator kinerja per urusan pemerintahan.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan memberikan gambaran yang jelas mengenai ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Indikator tersebut ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang mencerminkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Indikator dan target kinerja dinyatakan secara tegas sejak tahap perencanaan hingga akhir pelaksanaan guna menjamin akuntabilitas pencapaian kinerja. Ketentuan ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa kinerja harus diukur berdasarkan indikator yang tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. IKU berfungsi sebagai ukuran keberhasilan utama yang menggambarkan kinerja inti instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi, dan mandat (core business) yang diemban. Penetapan IKU bersumber dari indikator sasaran yang bersifat strategis dan berdampak signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan..

Indikator Kinerja Utama yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025–2029 disajikan pada Tabel 7.1. Tabel ini secara umum memuat target Pemerintah Provinsi NTT untuk tahun 2026 sebagaimana tertuang dalam RPJMD, yang disandingkan dengan berbagai target nasional untuk NTT pada tahun yang sama. Penyandingan dilakukan berdasarkan beberapa referensi, antara lain rancangan awal RKP Tahun 2026, hasil Rakortekrenbang Tahun 2025, sasaran pokok daerah Provinsi NTT dalam RPJPN (baseline 2026), serta Surat Bappenas tertanggal 17 Mei 2024 mengenai pemutakhiran target prevalensi stunting nasional dan provinsi untuk tahun 2025 dan 2045. Pencantuman target nasional dari berbagai sumber tersebut dimaksudkan sebagai bagian dari proses penyelarasan dengan RPJPN, yang bersifat imperatif terhadap RPJPD Provinsi NTT, namun belum seluruhnya terakomodasi dalam dokumen RPJMD Tahun 2025–2029.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2026

NO	Indikator	Satuan	Target RKPD
			2026
1	PDRB per kapita	(Rp Juta)	24,71-25,25
2	Kontribusi PDRB Provinsi	%	0.6285
3	Indeks Modal Manusia	poin	0,463
4	Tingkat Kemiskinan	%	18,12-18,74
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,43-5,01
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3.1/ 4.45
7	Rasio Gini	%	0,309-0,313
8	Penurunan intensitas emisi GRK (kumulatif)	%	63,19
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	poin	80,18
10	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	poin	69,05
11	Indeks Ekonomi Hijau	poin	67,86

Sumber: diolah dari berbagai sumber
**Sasaran pokok daerah Prov. NTT dalam RPJPN (Baseline 2025)
***Surat Bappenas Pemutakhiran target prevalensi stunting nasional dan provinsi Tahun 2025 dan 2045 (17 Mei 2024)

Penetapan indikator kinerja diperlukan sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah merupakan indikator yang menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Indikator ini berada pada level intermediate outcome, yang menjembatani kinerja program dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, serta berfungsi sebagai Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK menggambarkan kondisi yang ingin dicapai atau dipertahankan oleh penerima manfaat dalam kurun waktu tertentu, dan mencerminkan hasil keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Sementara itu, indikator kinerja daerah untuk mengukur capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan pada tingkat hasil (outcome) merupakan indikator kinerja program yang terdiri atas program perangkat daerah, program prioritas, atau program pembangunan daerah. IKK menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan. Indikator kinerja kunci penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing Daerah seperti pada Tabel 7.2.

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Tahun 2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026
I	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**		
1	Indeks Ketahanan Pangan	Poin	71,80
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	%	11,22
3	Skor Pola Pangan Harapan	Poin	69,22
4	Cakupan layanan air minum aman	%	
5	Cakupan layanan Air Minum Layak	%	88,95
6	Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan	%	37,42
7	Rasio Elektrifikasi	%	97,81
8	Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman	%	4,88
9	Persentase timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	%	9,25
10	Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah	% RT	19,25
11	Penurunan Emisi GRK	ton co2eq	38,38
12	Indeks Resiko Bencana (IRBI)	poin	185,48
13	Intensitas energi primer	SBM/Rp. Miliar	78,70
14	Indeks pengelolaan keanekaragaman hayati	poin	0,473
15	Indeks kualitas lingkungan hidup daerah	poin	80,18
16	Indeks Kesulitan Geografis	poin	80,18
17	Indeks Ketahanan Daerah	poin	10,41
18	Konsumsi Listrik per kapita	kwh	220,82
19	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,43
20	Kepadatan Penduduk	jiwa/km2	126,00
21	Persetase penegakan hukum peraturan daerah	%	100
22	Ideks Trantibum	Angka	100
II	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**		
1	PDRB Per Kapita	Rp. Juta	24,71
2	Kontribusi UMKM Terhadap PDRB	%	75,50
3	Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB	%	3,56
4	Tingkat Kemiskinan	**%**	18,12-18,74
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,43-5,01
6	Indeks Gini		0,,3152
7	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,39 – 2,94
8	Indeks Modal Manusia/IPM	Poin	0,463
9	Proporsi jumlah IKM pada Level Provinsi	%	7,55
10	Inklusi Keuangan (%)	%	92,41
11	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	72,35

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026
12	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,385
13	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	Indeks	60,30
14	Indeks Pembangunan Pemuda (Poin)	Poin	56,84
15	Indeks Perlindungan anak	Indeks	48,67
16	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian Level provinsi (%)	%	7,55
17	Proporsi jumlah Industri kecil dan Menengah pada Level provinsi (%)	%	0,42
18	Rasio Koperasi Produktif Provinsi NTT (%)	%	27,00
19	Tingkat Digitalisasi Koperasi	%	53,00
20	Persentase Koperasi Aktif dan Berkinerja Baik (%)	%	75,00
21	Pertumbuhan Ekonomi Sektor pertanian	%	101,58
22	Nilai Tukar Petani (NTP)	%	31,9
23	Prevelensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	31,9
24	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	Tahun	8,49
25	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Tahun	13,54
26	Skor Kemampuan Literasi	%	
	- SMA		64,54
	- SMK		61,13
	- SDLB		55,55
	- SMPLB		62,05
	- SMALB		58,22
27	Skor Kemampuan Numerasi	%	
	- SMA		57,09
	- SMK		55,28
	- SDLB		48,89
	- SMPLB		55,53
	- SMALB		53,94
28	Indeks SPM Pendidikan	%	100
29	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan)	%	30,62
30	Indeks Kerukunan Umat Beragama	poin	86,87-86,94
31	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Poin	51,65-51,69
32	Angka Kematian Ibu (per 100.000 KH)	(per 100.000 KH)	99,00
33	Angka Kematian Bayi (per 1.000 KH)	(per 100.000 KH)	6,00
34	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate)	Rata-Rata Anak	2,67
35	Persentase pemajuan kebudayaan di NTT (%)		68
36	Kapasitas air baku (m3/detik)	m3/detik	0,44

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026
37	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi(%)	%	10,60
III	**ASPEK DAYA SAING**		
1	Rasio PDRB Industry Pengolahan	%	1,36 - 1,41
2	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%	0,90
3	Proporsi PDRB sektor pariwisata	%	7,80
4	Rasio Kewirausahaan daerah (%)	%	1,48
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	79,70
6	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	%	74,45
7	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	54,00
8	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	Indeks	67,86
9	Indeks Ekonomi Biru Daerah	Indeks	69,05
10	Porsi EBT dalam bauran energi primer	%	27,79
11	Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau Dan Berkelanjutan	%	53,22
12	Rasio penerimaan pajak daerah terhadap PDRB	%	2,48
13	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IPTIK)	poin	5,4
14	Indeks Masyarakat Digital	poin	52,10
15	Koevisien variasi harga antarwilayah tingkat provinsi	%	11,21
16	Kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	46,111
17	Persentase desa mandiri	%	3,06
18	Return on Aset (ROA) BUMD (%)	%	1,22
19	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	%	28,4
20	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	%	2,47
21	Proporsi kontribusi PDRB wilayah terhadap nasional (%)	%	28,4
22	Rasio PAD terhadap penndapatan daerah	%	31,00
23	Tingkat Inflasi	%	2,5±1
24	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	%	31,72
25	Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	%	1,04
26	Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Provinsi (Rupiah)	%	782933,43
27	Total Kredit/PDRB (%)	%	38,3
IV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**		
1	Indeks Reformasi Hukum	Poin	97,50
2	Persentase penegakan hukum peraturan daerah	Poin	71,50
3	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Poin	4,43

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026
4	Indeks Pelayanan Publik	Poin	3,73
5	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Level	94,47
6	Indeks integritas nasional	Poin	66,31
7	Persentase capaian pelaksanaan aksi HAM	%	82,20
8	Indeks Demokrasi Indonesia	Level	sedang
9	Proporsi penduduk merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	%	64,88
10	Indeks Daya Saing Daerah	POIN	3,43
11	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	96,44
12	Opini BPK	Level	WTP
13	INdeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Poin	83,41
14	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	%	**16,5**
15	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	%	70,93
16	Rasio Konektivitas	%	0,68
17	Indeks Pembangunan Olahraga	Poin	0,38
INDIKATOR KINERJA KUNCI			
A	**Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar**		
I	**URUSAN PENDIDIKAN**		
1	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Tahun	13,54
2	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	Tahun	8,49
3	Skor Kemampuan Literasi	%	
	- SMA		64,54
	- SMK		61,13
	- SDLB		55,55
	- SMPLB		62,05
	- SMALB		58,22
4	Skor Kemampuan Numerasi	%	
	- SMA		57,09
	- SMK		55,28
	- SDLB		48,89
	- SMPLB		55,53
	- SMALB		53,94
30	Indeks SPM Pendidikan	Indeks	100%
II	**URUSAN KESEHATAN**		
1	Usia Harapan Hidup (UHH)		72,35
III	**URUSAN PEKERJAAN UMUM**		
1	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur		72,35
IV	**URUSAN PERUMAHAN RAKYAT**		

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026
1	Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau Dan Berkelanjutan	%	53,22
V	**URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**		
1	Persentase pencapaian SPM ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	%	100
VI	**URUSAN SOSIAL**		
1	Indeks Kesejahteraan Sosial		
2	Persentase pemerlu pelayanan Sosial (PPKS) yang terakses perlindungan dan jaminan social	%	100
3	Persentase Potensi sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berpartisipasi dalam penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan social (PPKS)	%	90
B	**Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar**		
I	**URUSAN TENAGA KERJA**		
1	Persentase Tenaga Kerja Terlatih yang di tempatkan secara prosedural	%	88,00
2	Pembinaan Hubungan Industrial dan pengawasan Norma Kerja	%	54,49
II	**URUSAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**		
1	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Poin	0,385
2	Indeks Pembangunan Gender (IPG	Poin	94,29
3	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Poin	48,67
III	**URUSAN PANGAN**		
1	Indeks Ketahanan Pangan	Poin	71,80
IV	**URUSAN PERTANAHAN**		
1	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan		36,9
V	**URUSAN LINGKUNGAN HIDUP**		
15	Indeks kualitas lingkungan hidup daerah	Poin	80,18
VI	**URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**		
1	Jumlah cakupan kepemilikan dokumen identitas Kependudukan	Persen	98,35
2	Jumlah cakupan kepemilikan dokumen akta pencatatan sipil	Persen	83
3	Jumlah perjanjian kerjasama pengunaan data kependudukan	Jumlah	4
VII	**URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	Nilai	
1	Indeks Desa Membangun		0,66
VIII	**URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**		
1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)		62,60

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026
IX	**URUSAN PERHUBUNGAN**		
1	Rasio Konektivitas	%	0,24
X	**URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**		
1	Persentase Informasi Publik yang disediakan dan di Publikasi	%	75,00
2	Persentase Badan Publik (PD Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang Informatif	%	62,00
3	Cakupan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	65,00
4	Cakupan pengembangan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat	%	62,00
5	Indeks SPBE / Indeks Pemerintahan Digital	Skor/Nilai	3,89/1,7
6	Presentase OPD yang dilayani Akses Internet Terintegrasi oleh Dinas Kominfo	%	100,00
7	Jumlah aplikasi layanan publik yang terintegrasi (SPLP)	Jumlah Aplikasi	3,00
8	Jumlah PD yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah (JIP)	Jumlah PD	12,00
9	Jumlah Aplikasi yang memanfaatkan pusat data Pemerintah Provinsi NTT	Jumlah Aplikasi	5,00
10	Jumlah Area Blankspot yang telah diintervensi	Jumlah Desa	5,00
11	Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas Bidang Kominfo Yang bertalenta Digital	Jumlah Orang	200,00
12	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi	Indikator Layanan	6,00
XI	**URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**		
1	Kontribusi UMKM Terhadap PDRB	%	75,50
XII	**URUSAN PENANAMAN MODAL**		
1	Persentase peningkatan Investasi	%	85,00
XIII	**URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**		
1	Indeks Pembangunan Pemuda (Poin)	%	56,84
2	Indeks Partisipasi Olahraga	%	28,10
XIV	**URUSAN STATISTIK**		
1	Indeks EPSS	Nilai	2,25
2	Tingkat Pemanfaatan Data Statistik Sektoral	%	74,00
3	Tingkat Pemenuhan data sektoral	%	74,00
XV	**URUSAN PERSANDIAN**		
1	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (IKAMI)	%	40,00
2	Nilai Ciber Sekuriti Maturity (CSM)	Level	340,00
3	Presentase PD Yang memiliki keamanan Informasi	%	15,00

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026
XVI	**URUSAN KEBUDAYAAN**		
1	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Poin	56,09
XVII	**URUSAN PERPUSTAKAAN**		
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Nilai	63,50
XVIII	**URUSAN KEARSIPAN**		
1	Indeks Hasil Pengawasan Hasil Kearsipan pada Lingkup Pemerintah Daerah	poin	66,00
C	**Urusan Pilihan**		
I	**URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**		
1	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	%	102,00
2	Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan NTPi)	%	118,00
II	**URUSAN PARIWISATA**		
1	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	0,80
III	**URUSAN PERTANIAN**		
1	Nilai Tukar Petani (NTP)	Indeks	100,20
IV	**URUSAN KEHUTANAN**		
1	Persentase Tutupan Lahan		1,51
V	**URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**		
1	Porsi EBT dalam bauran energi primer		27,79
7	Rasio Elektrifikasi	%	97,4
VI	**URUSAN PERDAGANGAN**		
1	Kontribusi Sektor Perdangan Terhadap PDRB	%	13,00
VII	**URUSAN PERINDUSTRIAN**		
1	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	%	1,60
VIII	**URUSAN TRANSMIGRASI**	%	
1	Pendapatan per Kapita di wilayah transmigrasi		
D	**Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan**		
I	**Unsur Sekretariat Daerah**		
1	Persentase Penataan Perangkat Daerah Provinsi NTT	%	100,00
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor	90,00
3	Persentase penyusunan Rencana Aksi RB General dan RB Tematik oleh Perangkat Daerah Pengampu	%	100,00
4	Persentase Perangkat Daerah dengan hasil evaluasi Akuntablitas kinerja "MEMUASKAN" (A)	%	26,00
5	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Skor	78,00
6	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri	%	95,00
7	Indeks Pencegahan Korupsi Daerah Area Pengadaan Barang/Jasa	Skor	78,00

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026
8	Persentase Capaian Peraturan Perundang-Undangan	%	100,00
9	Persentase Capaian Penegakan Hukum dan Pengelolaan HAM	%	100,00
II	**Unsur Sekretariat DPRD**		
1	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	%	100,00
III	**Unsur Perencanaan**		
1	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks	83,91
IV	**Unsur Keuangan**		
1	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Opini	WTP
2	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	NA	68,279
3	Kontribusi PAD terhadap pendaptan daerah	30,21	31
V	**Unsur Kepegawaian**		
1	Indeks Profesionalitas ASN	%	83,00
VI	**Unsur Pendidikan dan Pelatihan**		
1	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi Dasar	%	91,83
2	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi pengembangan kompetensi manajerial	%	91,50
3	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi pengembangan kompetensi pemerintahan	%	83,66
4	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi pengembangan kompetensi sosial kultural	%	88,50
5	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi pengembangan kompetensi teknis	%	88,50
6	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi pengembangan kompetensi fungsional	%	69,17
VII	**Unsur Penelitian dan Pengembangan**		
1	Proporsi hasil riset dan inovasi sebagai input dalam perumusan kebijakan	%	83,01
VIII	**Unsur Pengawasan**		
1	Indeks Kapabbilitas APIP	Level	3,17
IX	**Unsur Pemerintahan Umum**		
1	Indeks Demokrasi Indonesia	Poin	78,35-81,60

BAB VIII
PENUTUP

Upaya mengefektifkan pencapaian sasaran pembangunan daerah tahun 2026 dilakukan dengan mendayagunakan sumber pendanaan yang terbatas secara optimal. Seluruh Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur wajib menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Keberhasilan implementasi perencanaan pembangunan ditentukan oleh kuatnya koordinasi dan sinkronisasi antar pihak, guna memastikan keterpaduan program dan kegiatan pembangunan yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta dukungan pendanaan dari mitra pembangunan, termasuk sektor swasta, NGO, maupun lembaga kerja sama bilateral dan multilateral.

Koordinasi telah ditempuh melalui pelaksanaan Musrenbang secara berjenjang, mulai dari tingkat desa sebagai level pemerintahan terendah hingga Musrenbang Nasional. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan juga mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026. RKPD Tahun 2026 menjadi dasar dalam perumusan kebijakan publik, baik dalam bentuk kerangka regulasi, kerangka investasi, maupun pelayanan umum oleh pemerintah, serta menjadi acuan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.

Penjaminan keterpaduan, sinkronisasi, dan harmonisasi pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan melalui penyempurnaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 oleh masing-masing perangkat daerah. Penyempurnaan tersebut wajib disesuaikan dengan arah dan kebijakan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2026, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Usulan pembangunan tahun 2026 harus di dukung perencanaan berkualitas, oleh karena itu setiap usulan program/kegiatan pembangunan harus dilengkapi kelengkapan dokumen yaitu; (a) target dan sasaran yang terukur; (b) lokasi yang jelas; (c) dokumen teknis berupa TOR sesuai jenis program/kegiatan;
2. Kepastian terpenuhinya dokumen pendukung untuk usulan program dan kegiatan pembangunan tahun 2026 dijamin melalui koordinasi intensif antara Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Bappeda/BP4D/Bappelitbang/Bapperida Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur. Masing-masing perangkat daerah tingkat provinsi maupun perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pengusul wajib memenuhi kewajiban penyediaan dokumen secara tepat dan lengkap.
3. Strategis yang berskala lintas Kabupaten/Kota dan berdampak signifikan terhadap pembangunan Nusa Tenggara Timur dapat disiapkan langsung oleh perangkat daerah Provinsi sebagai pelaksana program dan kegiatan.Untuk usulan strategis program/kegiatan dalam satu wilayah Kabupaten/Kota maka usulannya disiapkan perangkat daerah Kabupaten/Kota;
4. Kegiatan fisik yang membutuhkan desain, maka pembiayaan studi desain dapat dilakukan melalui pendanaan APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota;

Demikian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 disusun untuk menjadi pedoman bagi semua Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai dokumen acuan dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan tahun 2026 selanjutnya.

Semua Perencanaan Program dan Kegiatan selanjutnya, tidak dapat keluar dari kerangka yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah ini, kecuali timbul hal-hal yang mendesak dan prioritas yang membutuhkan penanganan segera.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

ttd.

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001